RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan *Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun* 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20202 Nomor 245, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 794);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 terdiri dari:
   a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan; dan
   b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2023 periode tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA APBD Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2023.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
   a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
   b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan
   c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan
c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 6 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 22

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah II-1
2.1.1.2. Kondisi Topografi II-3
2.1.1.3. Kondisi Geolologi II-4
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi II-6
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi II-10
2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah II-11
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana II-20
2.1.1.8. Kondisi Demografi II-29
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-31
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-62
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD II-122
2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung II-122
2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 ..... II-122
2.2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah II-124
2.2.1.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung II-141
2.2.1.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung II-142
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD II-143
2.3. Permasalahan Pembangunann Daerah II-175
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-175
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-176
2.3.3. Isu Strategis II-183

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-3
3.1.3. Kinerja Makro Ekonomi Daerah III-3
3.1.3.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) III-3
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-21
3.1.5. Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Daerah. III-22
3.1.6. Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi III-28
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-32
3.3.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-34

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-36
3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-39
3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-43

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-2
4.1.1. TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 DAN RKP 2023 ..... IV-2
4.1.2. TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019 – 2024 ..... IV-12
4.2 TEMA, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 ..... IV-28
4.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI LAMPUNG IV-43
4.4 RENCANA KAWASAN STRATEGIS IV-48
4.5 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (EMISI GAS RUMAH KACA) IV-53

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Program Prioritas Nasional bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... V-1
5.2 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-3

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH VI-1
6.1 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan VI-2
6.2 Sinkronisasi Program Prioritas menurut Prioritas Pembangunan Daerah VI-16
6.3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah dan Nasional VI-180
6.4 Program Prioritas berdasarkan SPM VI-204
6.5 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... VI-224

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar I - 1 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah I-9

BAB II

Gambar II - 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung II-1
Gambar II - 2 Peta Geologi Provinsi Lampung II-6
Gambar II - 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung II-7
Gambar II - 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung II-9
Gambar II - 5 Peta Hidrologi Provinsi Lampung II-9
Gambar II - 6 Peta Klimatologi Provinsi Lampung II-11
Gambar II - 7 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan II-13
Gambar II - 8 Peta Kawasan Perkebunan II-14
Gambar II - 9 Peta Kawasan Pertambangan II-16
Gambar II - 10 Peta Kawasan Industri II-17
Gambar II - 11 Peta Kawasan Pariwisata II-20
Gambar II - 12 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung II-29

BAB III

Gambar IV - 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-30
Gambar IV - 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung IV-53

BAB V

Gambar V - 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan V-5

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel II - 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung II-2
Tabel II - 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung II-7
Tabel II - 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung II-8
Tabel II - 4 Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm/tahun) II-10
Tabel II - 5 Sebaran Komoditas Pekebunan II-14
Tabel II - 6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung II-19
Tabel II - 7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung II-21
Tabel II - 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung II-22
Tabel II - 9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung II-22
Tabel II - 10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung II-23
Tabel II - 11 Tabel Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung II-24
Tabel II - 12 Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung II-25
Tabel II -13 Tabel Potensi Luas Bahaya Epidiemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung II-25
Tabel II - 14 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung II-26
Tabel II - 15 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung II-26
Tabel II - 16 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung II-27
Tabel II - 17 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung II-28
Tabel II - 18 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung II-28
Tabel II - 19 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2021 ..... II-31
Tabel II - 20 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung II-35
Tabel II - 21 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung II-37
Tabel II - 22 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2017 – 2021 (Persen) II-39
Tabel II - 23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2021 (Ribu Jiwa) II-42
Tabel II - 24 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2016 - 2021 (Persen) II-43
Tabel II - 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit 2017-2021 ..... II-48
Tabel II - 26 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016 – 2021 ..... II-49
Tabel II - 27 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021 ..... II-51
Tabel II - 28 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... II-52
Tabel II - 29 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2021 ..... II-54
Tabel II - 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung II-57
Tabel II - 31 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2021 ..... II-58
Tabel II - 32 Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2014-2021 ..... II-60
Tabel II - 33 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2016-2021 ..... II-62

Tabel II - 34 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2017-2021 ..... II-64
Tabel II - 35 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkatan Umur se-Sumatera Tahun 2021 ..... II-66
Tabel II - 36 Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera Tahun 2021 ..... II-68
Tabel II - 37 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera II-70
Tabel II - 38 Tabel Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2021 ..... II-71
Tabel II - 39 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2017-2021 ..... II-73
Tabel II - 40 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-75
Tabel II - 41 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2017 – 2021 ..... II-80
Tabel II - 42 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-88
Tabel II - 43 Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... II-90
Tabel II - 44 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... II-92
Tabel II - 45 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dinas KPTPH, 2021 ..... II-97
Tabel II - 46 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2021 ..... II-98
Tabel II - 47 Persentase Capaian Produksi Tanaman Hortikultura, 2021 ..... II-100
Tabel II - 48 Tabel Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020 ..... II-105
Tabel II - 49 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2021 ..... II-106
Tabel II - 50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata II-108
Tabel II - 51 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2017 – 2021 ..... II-108
Tabel II - 52 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2021 ..... II-110
Tabel II - 53 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditas Unggulan Tahun 2020-2021 (US$ Juta) II-111
Tabel II - 54 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2020-2021 ..... II-111
Tabel II - 55 Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d 2020 ..... II-112
Tabel II - 56 PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Harga Konstan Tahun 2017-2021 ..... II-113
Tabel II - 57 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2021 ..... II-115
Tabel II - 58 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2021 ..... II-116
Tabel II - 59 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2020 ..... II-118
Tabel II - 60 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021 ..... II-122
Tabel II - 61 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2021 ..... II-124
Tabel II - 62 Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2021 ..... II-142
Tabel II - 63 Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Pilar Tahun 2021 ..... II-143
Tabel II - 64 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung II-144

BAB III

Tabel III - 1 Nilai PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... III-4
Tabel III - 2 Kontribusi PDRB (ADHB) Prov. Lampung terhadap PDRB Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-4
Tabel III - 3 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... III-6
Tabel III - 4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... III-7
Tabel III - 5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2021 ..... III-8
Tabel III - 6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017– 2021 ..... III-10
Tabel III - 7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2017 –2021 ..... III-11
Tabel III - 8 PDRB Perkapita Provinsi Lampung (ADHB) Tahun 2017 – 2021 ..... III-12
Tabel III - 9 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK) Tahun 2017 – 2021 ..... III-12
Tabel III - 10 Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... III-32
Tabel III - 11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024 ..... III-35
Tabel III - 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024 ..... III-42
Tabel III - 13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024 ..... III-44

BAB IV

Tabel IV - 1 Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2023, Sesuai Hasil Rakortekrenbang Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... IV-7
Tabel IV - 2 Indikator Sasaran Makro RKP 2023 ..... IV-12
Tabel IV - 3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... IV-29
Tabel IV - 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap RKP 2023 ..... IV-31
Tabel IV - 5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 ..... IV-34
Tabel IV - 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan IV-36
Tabel IV - 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan IV-37
Tabel IV - 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-38
Tabel IV - 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV-40
Tabel IV - 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial IV-41
Tabel IV - 11 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas IV-43

BAB V

Tabel V - 1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ..... V-5
Tabel V - 2 KESELARASAN SASARAN MAKRO RKPD PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA TAHUN 2023 ..... V-15

BAB VI

Tabel VI-1 Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan VI-2
Tabel VI-2 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah VI-16
Tabel VI-3 Program Prioritas berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional VI-179
Tabel VI-4 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM VI-204
Tabel VI-5 Program dan Kegiatan berdasarkan OPD Tahun 2023 ..... VI-224

BAB VII

Tabel VII - 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VII-1
Tabel VII - 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VII-2

DAFTAR GRAFIK

BAB II

Grafik II - 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen) II-30
Grafik II - 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia II-32
Grafik II - 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Sumatera tahun 2021 ..... II-34
Grafik II - 4 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional II-36
Grafik II - 5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional II-37
Grafik II - 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021 ..... II-39
Grafik II - 7 Indeks Williamson Provinsi Lampung II-40
Grafik II - 8 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung II-42
Grafik II - 9 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 – 2021 (persen) II-44
Grafik II - 10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung II-45
Grafik II - 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia II-46
Grafik II - 12 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2021 ..... II-48
Grafik II - 13 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia (2016 – 2021) II-50
Grafik II - 14 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021 ..... II-52
Grafik II - 15 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Februari 2021 ..... II-55
Grafik II - 16 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal (2017-2021) II-56
Grafik II - 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021 (Persen) II-57
Grafik II - 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota II-58
Grafik II - 19 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-63
Grafik II - 20 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia Lampung dan Nasional II-65
Grafik II - 21 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan II-67
Grafik II - 22 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Nasional II-69
Grafik II - 23 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional II-71
Grafik II - 24 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-72
Grafik II - 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung II-74
Grafik II - 26 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia, ... II-75
Grafik II - 27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung II-76
Grafik II - 28 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 ..... II-77
Grafik II - 29 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 ..... II-78

Grafik II - 30 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 ..... II-79
Grafik II - 31 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021 ..... II-79
Grafik II - 32 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2021 ..... II-81
Grafik II - 33 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2021 ..... II-82
Grafik II - 34 Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... II-83
Grafik II - 35 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung II-84
Grafik II - 36 Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2017 –2021 ..... II-85
Grafik II - 37 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 ..... II-85
Grafik II - 38 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 ..... II-86
Grafik II - 39 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung II-87
Grafik II - 40 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia II-87
Grafik II - 41 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung II-88
Grafik II - 42 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung II-90
Grafik II - 43 Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung II-92
Grafik II - 44 Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015 - 2021 ..... II-93
Grafik II - 45 Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015-2021 ..... II-94
Grafik II - 46 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Tanggal 3 Januari 2022 Berdasarkan Asal KTP II-96
Grafik II - 47 Perbandingan Luas Panen Padi Lampung-Indonesia Tahun 2019-2021 (ha) II-98
Grafik II - 48 Produksi Padi Lampung – Indonesia Tahun 2019 – 2021 (ton) II-98
Grafik II - 49 Produksi Jagung Lampung Tahun 2019 – 2021 (ton) II-99
Grafik II - 50 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2016-2021 ..... II-109
Grafik II - 51 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2016 – 2021 (juta US$) II-111
Grafik II - 52 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015–2021 ..... II-116
Grafik II - 53 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2015-2021 ..... II-117
Grafik II - 54 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2021 ..... II-118
Grafik II - 55 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2021 ..... II-119
Grafik II - 56 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2021 ..... II-119
Grafik II - 57 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021 ..... II-120
Grafik II - 58 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2021) II-120

BAB III

Grafik III - 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017– 2021 ..... III-9
Grafik III - 2 Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017– 2021 ..... III-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan. Penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Diharapkan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif,* substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi

prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance.*

- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up)*, dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas- bawah* (*top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi saat ini dan prospek perekonomian pasca Covid 19 mengakibatkan perlunya kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang fokus bagi pemulihan dan penguatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 adalah "Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah" yang telah diselaraskan dengan tema RKP 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan fokus prioritas untuk Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya serta Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023. Dengan demikian RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan capaian pembangunan tahun 2023. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut mengambil peran dalam upaya pemulihan dan penguatan perekonomian, kesehatan dan sosial pasca pandemic Covid 19.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I - 1 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

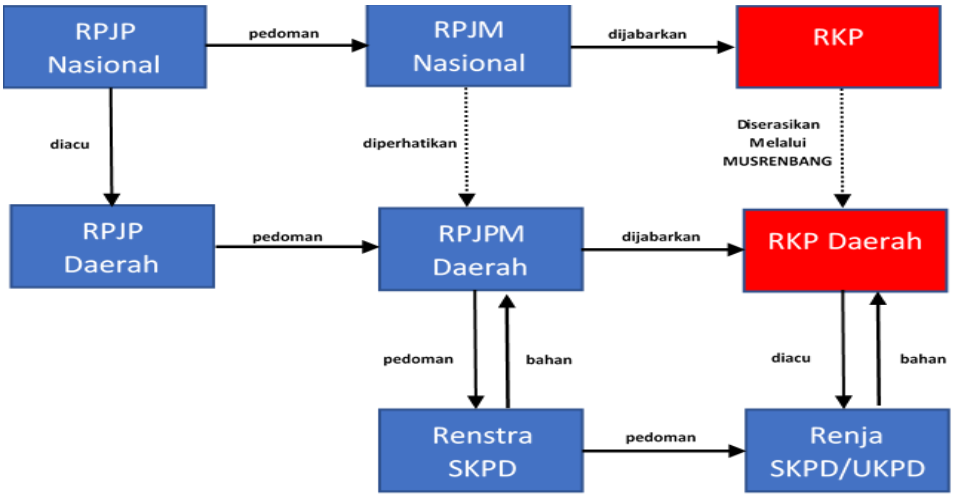

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RKP Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)* untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi

dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.

6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.3. Hubungan Antardokumen

Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.5. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2019-2024.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2021 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2021, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2023 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2023 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023.

5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2023, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2023.

BAB VIII PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $3^0$45'sampai $6^0$45' Lintang Selatan dan $103^0$40'sampai $105^0$50' Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.575,41 km^2 termasuk 172 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km^2 dan panjang garis pantai lebih kurang 1.663,26 km (Sumber: Garis Pantai RBI 2021). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudera Indonesia di sebelah barat

Gambar II - 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

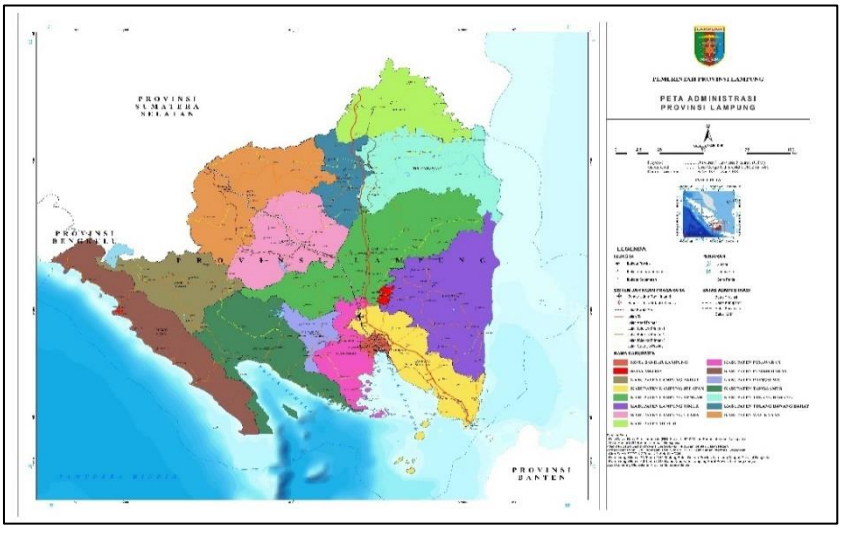

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel II - 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (Km2)
1	Lampung Selatan	17	300	2.218,84
2	Lampung Tengah	28	311	4.548,93
3	Lampung Utara	23	247	2.656,39
4	Lampung Barat	15	136	2.116,01
5	Tulang Bawang	15	151	3.107,47
6	Tanggamus	20	302	2.901,98
7	Lampung Timur	24	264	3.867,43
8	Way Kanan	15	227	3.531,10
9	Pesawaran	11	144	1.279,60
10	Pringsewu	9	131	614,97
11	Mesuji	7	105	2.200,51
12	Tulang Bawang Barat	9	96	1.281,45

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (Km2)
13	Pesisir Barat	11	118	2.993,80
14	Kota Bandar Lampung	20	126	183,72
15	Kota Metro	5	22	73,21
Provinsi Lampung		**229**	**2.640**	**33.575,41**

Sumber: Kepmendagri 050-145 Tahun 2022

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

a. Daerah topografis berbukit sampai bergunung.

   Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa.

b. Daerah topografis berombak sampai bergelombang.

   Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran.

c. Daerah dataran alluvial

   Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.

d. Daerah dataran rawa pasang surut

Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.

e. Daerah River Basin

River basin atau daerah aliran sungai adalah hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima dan mengumpulkan air hujan serta unsur hara. Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin yang utama, yaitu River Basin Jepara, River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan, berdasarkan SK Menhut no 256/KPTS-II/2000 seluas 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (26,17%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.

2.1.1.3. Kondisi Geolologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra–Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km).

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah–Oligosen Awal.

Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction)di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. FormasiSabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit– Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarFrendah sa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *FormasiBaturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipanserpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan. *Tektonik* yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi–Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi

batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasiran, betu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai*, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini.

Gambar II - 2 Peta Geologi Provinsi Lampung

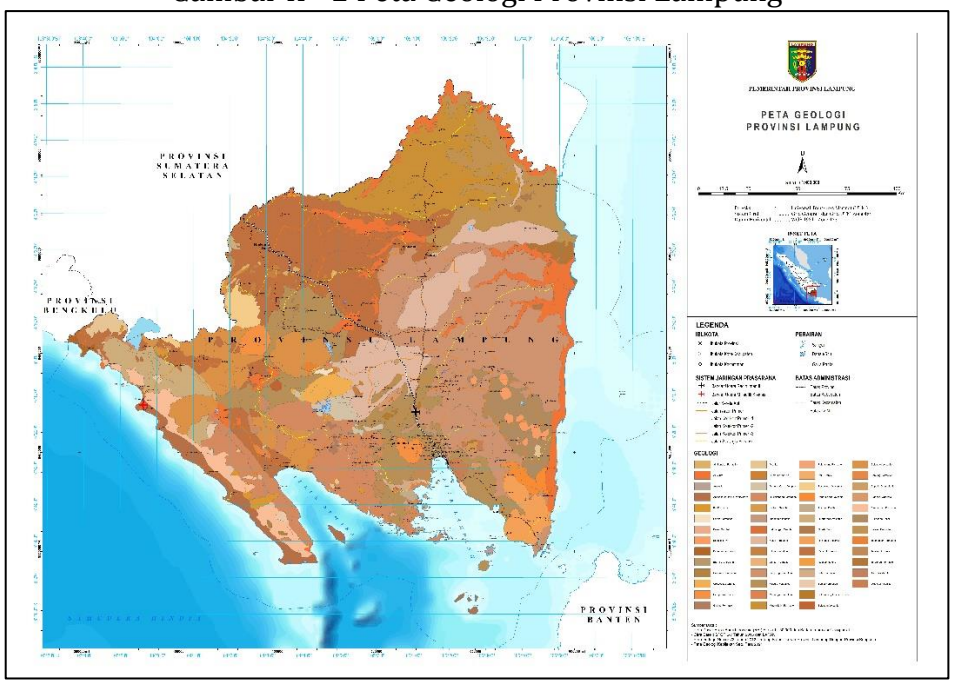

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.4.Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai diantaranya WS Semangka, WS Seputih-Sekampung, WS Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way

Kanan. Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berikut ini daftar 10 (sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Lampung :

Tabel II - 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

No.	Nama DAS	Luas (hektar)
1	Tulang Bawang	979.818,78
2	Seputih	751.526,73
3	Mesuji	723.714,52
4	Sekampung	482.316,03
5	Semangka	161.448,33
6	Way Jepara	76.187,28
7	Way Kambas	48.750,40
8	Way Ratai	32.477,47
9	Way Tenubang	28.943,08
10	Manula	25.396,62

Sumber: BNPB, dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Gambar II - 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

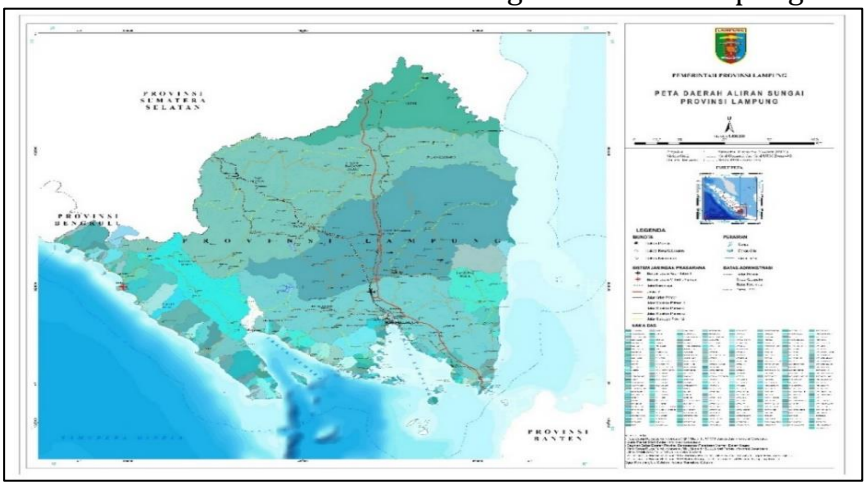

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat *7* (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

Tabel II - 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO.	NAMA CAT	Luas CAT (Ha)	Lokasi CAT
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, Tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Baturaja	43.019,06	Way Kanan
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Ranau	78.893,68	Lampung Barat, Pesisir Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

Gambar II - 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

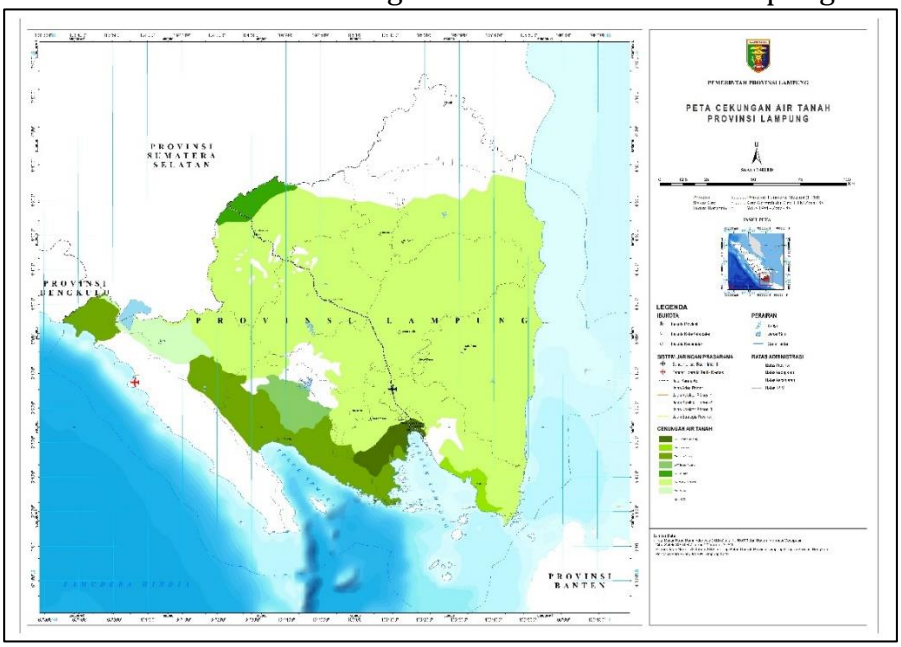

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:

a. Zona Aman Potensi Tinggi *(ZONA I)*
b. Zona Aman Potensi Sedang *(ZONA II)*
c. Zona Aman Potensi Kecil *(ZONA III)*
d. Zona Imbuh / Resapan *(ZONA IV)*
e. Zona Bukan CAT

Gambar II - 5 Peta Hidrologi Provinsi Lampung

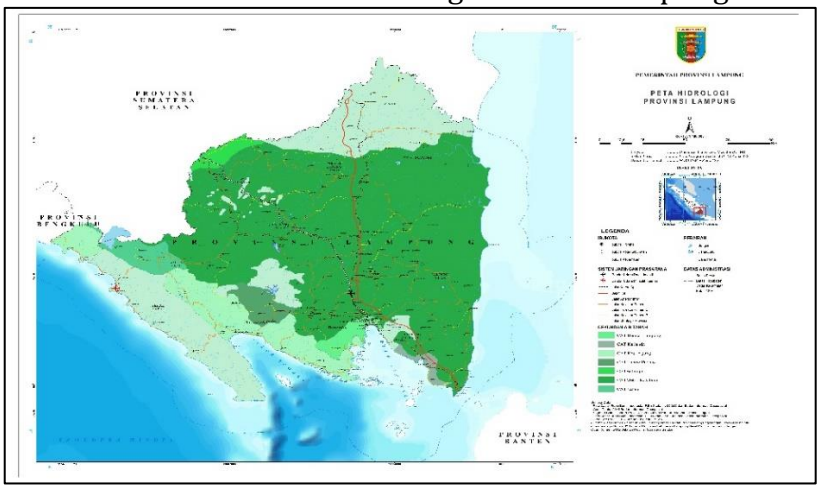

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.5.Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat hingga Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur hingga Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 29°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm, sebagaimana diperlihatkan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel II - 4 Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm/tahun)

No.	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata–Rata Normal Tahunan (mm)				
		<1.800	1.800-2.500	2.500-2.800	2.800-3.000	>3.000
1	Bandar Lampung	-	1.950	-	-	-
2	LampungBarat	-	2.301	-	-	-
3	Lampung Selatan	-	1.994	-	-	-
4	Lampung Tengah	-	2.220	-	-	-
5	Lampung Timur	-	2.147	-	-	-
6	Lampung Utara	-	2.373	-	-	-
7	Mesuji	1.726	-	-	-	-
8	Metro	-	2.164	-	-	-
9	Pesawaran	-	1.905	-	-	-
10	Pesisir Barat	-	-	-	2.828	-
11	Tanggamus	-	2.067	-	-	-
12	Pringsewu	1.696	-	-	-	-
13	Tulang Bawang Barat	-	2.233	-	-	-
14	Tulang Bawang	-	2.155	-	-	-
15	Way Kanan	-	2.442	-	-	-

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar II - 6 Peta Klimatologi Provinsi Lampung

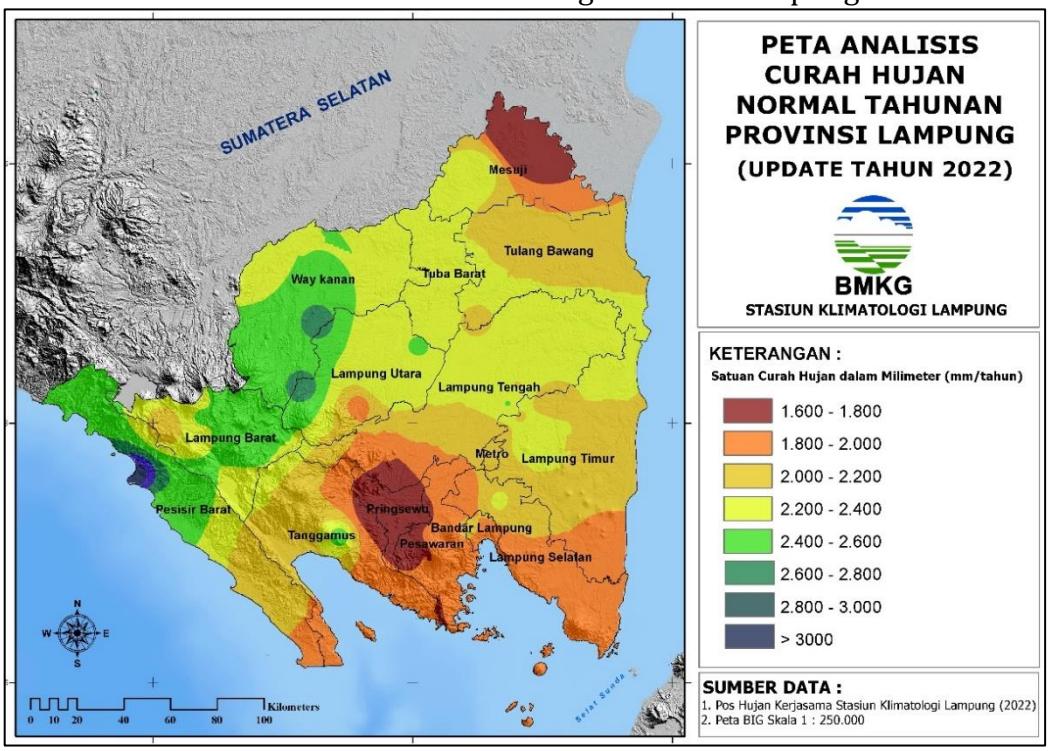

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung 2022, data diolah 1991-2020

2.1.1.6.Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan pengembangan potensi meliputi:

1. Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada.

2. Kawasan Pertanian dan Perikanan

Kawasan peruntukan pertanian Provinsi Lampung terdiri dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 369,831 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 327,835 Ha dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 361,699 Ha. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung kecuali Bandar Lampung, sedangkan luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar pada beberapa kabupaten Provinsi Lampung kecuali Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Lahan pertanian tanaman pangan basah dan kering yang ada dapat diupayakan dan dipertahankan keberadaannya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai sebelumnya dan untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Beberapa komoditas yang memiliki produktivitas yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Lampung adalah tanaman padi, ubi kayu, dan jagung.

Potensi perikanan di Lampung sangat besar yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu sepanjang pesisir pantai timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan sepanjang pesisir pantai barat. Untuk jenis perikanan tangkap seperti tuna mata esar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru dan albakora, sebaran meliputi daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangka di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya, perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur, Pesisir Barat dan Pesawaran yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove, agar dapat

menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Sedangkan budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Luas kawasan perikanan ini adalah 66.090 Ha. Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang (Kuala Teladas), Kabupaten Lampung Barat (Kuala Krui dan Bengkunat), Kota Bandar Lampung (Lempasing), Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Gambar II - 7 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan

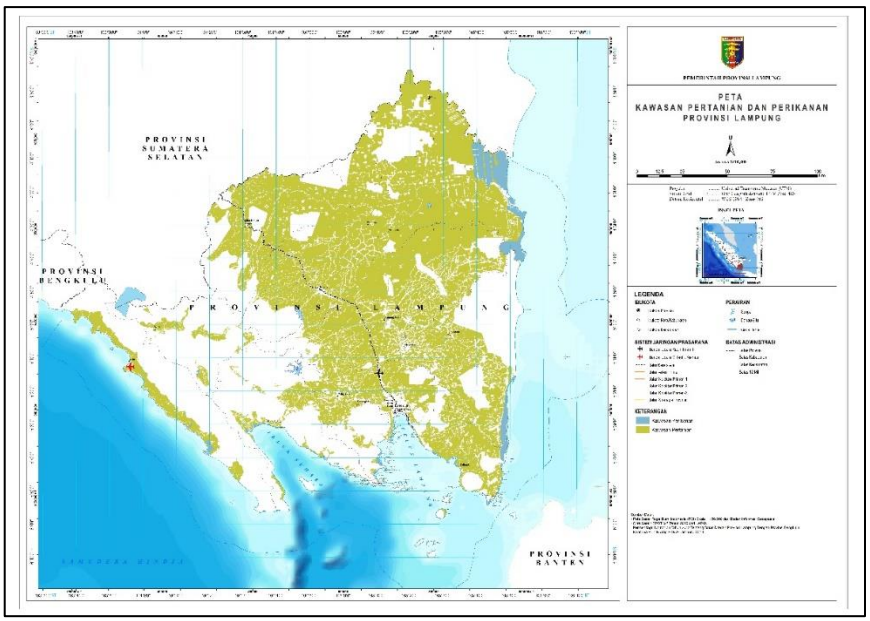

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

3. Kawasan Perkebunan

Sektor perkebunan terus dikembangkan dengan kombinasi perkebunan rakyat dan perkebunan skala besar. Luas kawasan peruntukan perkebunan adalah 878.611 Ha. Pengembangan komoditas ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri ekonomi kerakyatan. Tanaman perkebunan tersebut diarahkan pada lahan-lahan di beberapa kabupaten, sebagaimana dipetakan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel II - 5 Sebaran Komoditas Pekebunan

Komoditi	Kabupaten
Kopi, Lada, Tebu,	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung

Komoditi	Kabupaten
Kakao dan Kelapa	Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran dan Tanggamus
Tebu	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat
Sawit	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang.

Gambar II - 8 Peta Kawasan Perkebunan

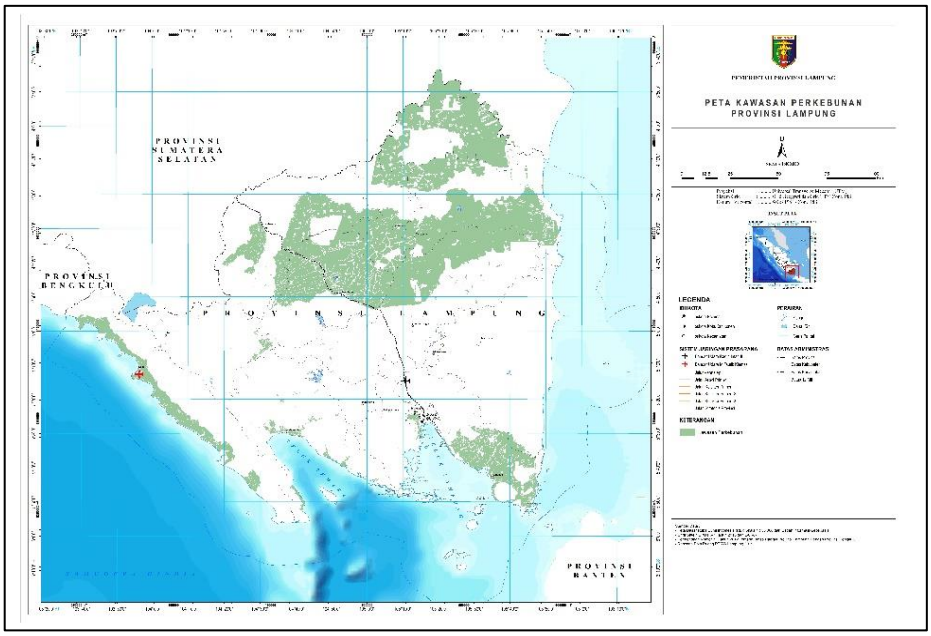

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

4. Kawasan Pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi:

a. Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi ziolit (437.670.000 m3), emas (415.677 ton),batu bara (867.000 ton), geothermal (400 Kw), bentonit (88.700.000 m3) dan granit(62.500.000 m3, dan andesit di Kecamatan Kelumbayaan;

b. Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m3), emas (16.783Ha), geothermasl (430 Kw), trass (2.750.000 m3) diatomea (170.000 m3) dan perlit(10.500.000 m3);

c. Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m3);Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batubara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m3), kaolin (2.929.000 m3) dan batu mulia (40.000 m3);

d. Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batubara (360.000 km2);

e. Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m3) danmigas (dalam penelitian);

f. Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m3), emas(102.875 ton), batubara 2.358.855 ton), biji besi (68.457 ton), fedspar (389.350.000 m3)dan granit (980.600.000 m3).

g. Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m3), pasir kuarsa(32.575.000 m3) dan minyak bumi (dalam penelitian).

h. Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m3), zeolit (8.000m3), batu bara (5.000 ton), biji besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m3), emas (10.732,5ton), mangan (243.000 ton), granit (287.000.000 m3).

i. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batubara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

Kawasan pertambangan di Provinsi Lampung dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar dibawah ini:

Gambar II - 9 Peta Kawasan Pertambangan

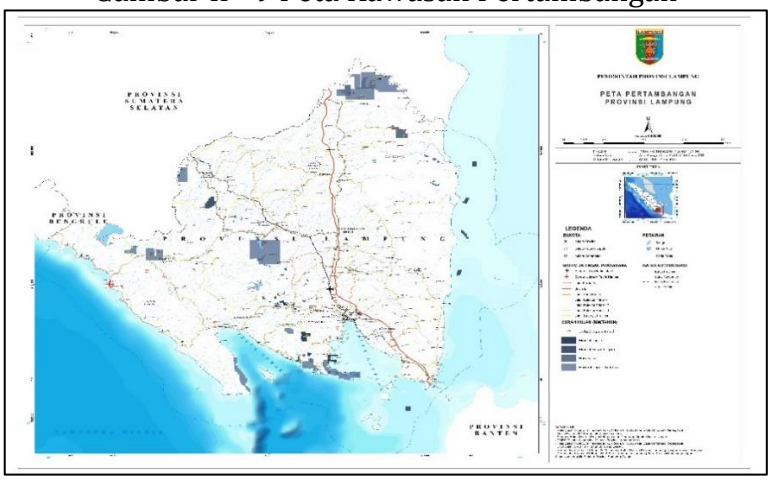

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

5. Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, terutama pada lokasi yang dekat dengan penghasil sumberdaya. Hingga saat ini, kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai kawasan industri seluas 35.807 Ha. Kawasan Industri di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 Ha. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. Adapun sebaran kawasan peruntukan industri prioritas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan;
b. Kawasan Peruntukan Industri Tanggamus di Kabupaten Tanggamus;
c. Kawasan Peruntukan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
d. Kawasan Peruntukan Industri Mesuji di Kabupaten Mesuji;
e. Kawasan Peruntukan Industri Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
f. Kawasan Peruntukan Industri Way Kanan di Kabupaten Way Kanan;
g. Kawasan Peruntukan Industri Tulang Bawang Barat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
h. Kawasan Peruntukan Industri Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
i. Kawasan Peruntukan Industri Ketibung di Kabupaten Lampung Selatan;
j. Kawasan Peruntukan Industri Tegineneng di Kabupaten Pesawaran

k. Kawasan Peruntukan Industri Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung

Gambar II - 10 Peta Kawasan Industri

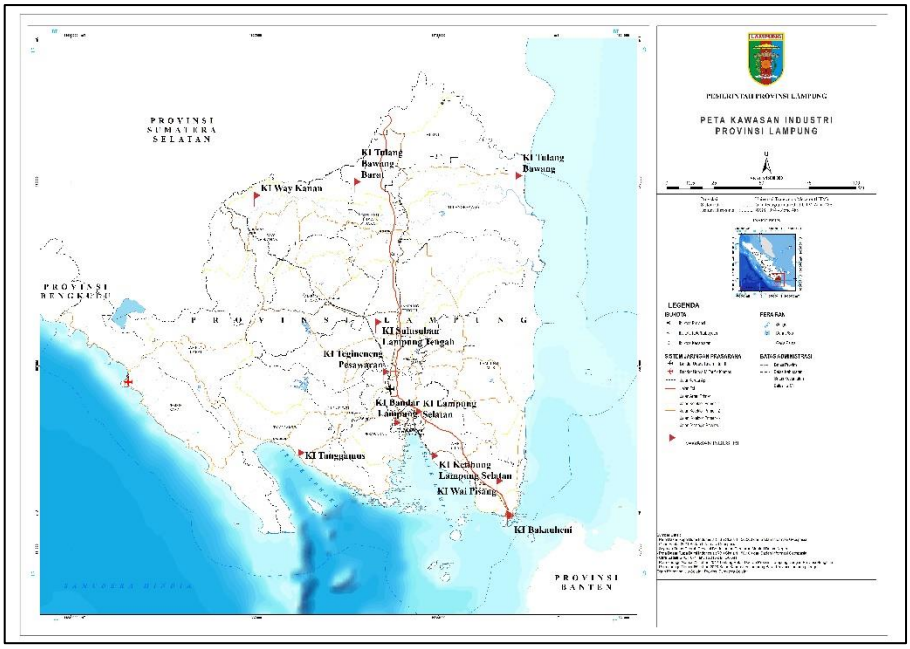

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

6. Kawasan Pariwisata

Strategi pengembangan pariwisata Provinsi Lampung diarahkan untuk pengembangan potensi wisata alam dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif, di mana wisatawan terlibat secara fisik dan emosional dalam suatu kegiatan tertentu, bukan sekedar perjalanan wisata pasif. Sehingga pengembangan pariwisata Provinsi Lampung tidak semata-mata pada kegiatan berwisata yang mengandung aktivitas secara fisik namun juga pengkayaan wawasan pengetahuan (*gaining insight*).

Pengembangan pariwisata Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

a. Mendorong motivasi wisatawan mencari sesuatu yang baru, otentik dan mempunyai pengalaman perjalanan wisata yang berkualitas;
b. Mendorong motivasi dan keputusan untuk melakukan perjalanan ditentukan oleh minat tertentu/khusus dari wisatawan dan bukan dari pihak-pihak lain;

c. Mendorong wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya mencari pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan lokal, olahraga, adat istiadat, kegiatan di lapangan dan petualangan alam.

Pengembangan pariwisata dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

Rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung; meliputi Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat
2. Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas *Park and Conservation Center*.
3. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung; meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Tanggamus.

Tabel II - 6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung

NO.	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
1.	Wisata Alam	Pantai	Kabupaten Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan	rekreasi alam
		Pegunungan	Lampung Barat, Pesawaran, Lampung Selatan	
		Danau	Way Jepara (Lampung Utara), Ranau (Kabupaten Lampung Barat)	
		Air Terjun	Way Kanan dan Lampung Barat	
		Minat Khusus	Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro	mobil dan motor *off-road*
		Minat Khusus	Kabupaten Pesawaran	*paragliding* dan *gantole*

NO.	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
		Minat Khusus	Way Semangka (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus), serta Way Semong (Kabupaten Tanggamus), Way Besai (Kabupaten Lampung Barat), Bandar Lampung	arung jeram
		Minat Khusus	Way Kambas/Way Kanan (Kabupaten Lampung Timur)	*Trekking*
		Minat Khusus	Lampung Timur, Tanggamus	pengamatan satwa liar
2.	Wisata Bahari	Minat Khusus	Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pubu Tegal	selam, mancing, *snorkling*
		Minat Khusus	Pulau Condong (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pubu Tegal	selam, mancing, *snorkling*
		Minat Khusus	Krui (Pesisir Barat)	*Surfing*
3.	Wisata Budaya	Wisata Sejarah	Sumber Jaya (Lampung Barat)	Situs Masa Pra Sejarah
		Wisata Sejarah	Sukau (Lampung Barat)	Situs masa Hindu dan Budha
		Wisata Sejarah	Pesisir Tengah (Pesisir Barat)	Situs Masa Islam
		Wisata Sejarah	Pasemah (Lampung Selatan)	Prasasti Batu Tulis Kerajaan Sriwijaya
		Wisata Sejarah	Pugung Raharjo (Lampung Timur)	Situs masa Pra Sejarah
		Wisata Sejarah	Tulang Bawang	Situs Kerajaan Tulang Bawang
		Wisata Ziarah	Lampung Selatan	Makam Radin Intan II
		Wisata Ziarah	Pesisir Tengah (Lampung Barat)	Makam Islam
		Wisata Ziarah	Way Kanan	Makam Raja-raja Way Kanan
		Wisata Ziarah	Goa Maria (Pringsewu), Makan KH. Gholib (Pringsewu)	Ziarah umat Katholik
4.	Wisata Buatan	Wisata Museum	Kota Bandar Lampung	Museum Lampung
		Wisata Museum	Gedong Tataan	Museum Transmigrasi
		Wisata Museum	Kota Bandar Lampung	Gedung Juang 45
		Wisata Monumen	Bakauheni (Lampung Selatan)	Menara Siger
		Wisata Monumen	Kota Bandar Lampung	Monumen Krakatau
		Wisata	Kota Bandar Lampung	Taman Bumi

NO.	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
		Taman Rekreasi		Kedaton, Taman Budaya Lampung dan Lembah Hijau
		Wisata Resort	Kalianda (Lampung Selatan)	Resort Grand Elty

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

Gambar II - 11 Peta Kawasan Pariwisata

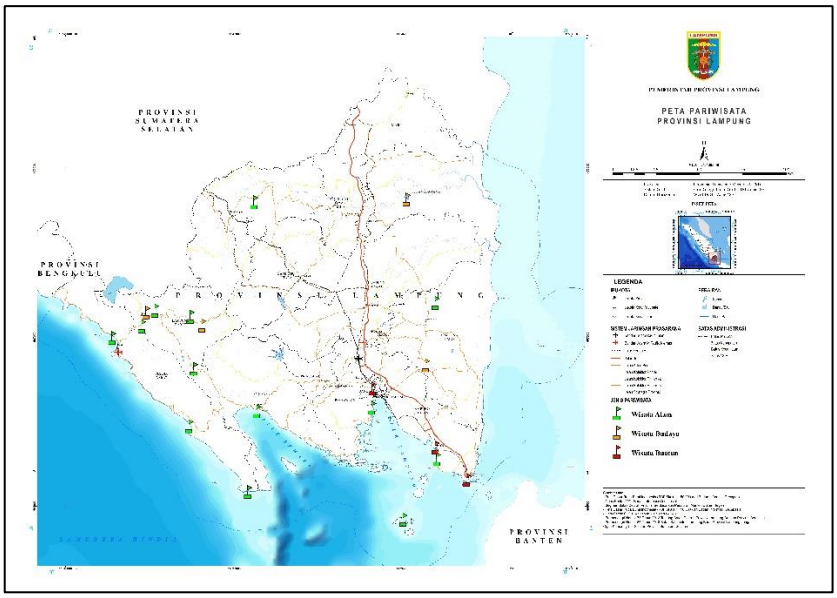

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan.

Kawasan rawan bencana alam tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Berdasarkan DIBI, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Pengelompokkan potensi bencana di Provinsi Lampung disesuaikan

dengan kondisi daerah serta sejarah kejadian yang pernah terjadi. Berdasarkan hal tersebut, potensi bencana di Provinsi Lampung meliputi:

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan.

Tabel II - 7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	26.326	Tinggi
2	Tanggamus	42.033	Sedang
3	Lampung Selatan	70.032	Tinggi
4	Lampung Timur	255.051	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Tinggi
6	Lampung Utara	188.770	Sedang
7	Way Kanan	264.609	Sedang
8	Tulang Bawang	307.150	Tinggi
9	Pesawaran	49.171	Sedang
10	Pringsewu	34.822	Sedang
11	Mesuji	202.391	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	126.726	Tinggi
13	Pesisir Barat	55.070	Sedang
14	Bandar Lampung	10.092	Sedang
15	Metro	6.179	Sedang
PROVINSI LAMPUNG		**2.018.690**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

b. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pada umumnya gelombang ekstrim dan abrasi terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai.

Tabel II - 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanggamus	4.775	Sedang
2	Lampung Selatan	5.302	Sedang
3	Lampung Timur	2.564	Sedang
4	Tulang Bawang	1.796	Sedang
5	Pesawaran	3.940	Sedang
6	Pesisir Barat	4.786	Tinggi
7	Bandar Lampung	515	Sedang
PROVINSI LAMPUNG		**23.678**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

c. Gempa Bumi

Gempa Bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempa Bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Tabel II - 9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	214.278	Tinggi
2	Tanggamus	279.859	Tinggi
3	Lampung Selatan	70.032	Sedang
4	Lampung Timur	394.580	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Sedang
6	Lampung Utara	257.047	Tinggi
7	Way Kanan	367.375	Tinggi
8	Tulang Bawang	311.079	Tinggi
9	Pesawaran	136.949	Sedang
10	Pringsewu	60.899	Sedang
11	Mesuji	218.400	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Tinggi
13	Pesisir Barat	270.265	Tinggi
14	Bandar Lampung	17.660	Sedang
15	Metro	8.854	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		**3.107.645**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Tabel II - 10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	58.780	Tinggi
2	Tanggamus	40.923	Tinggi
3	Lampung Selatan	20.859	Tinggi
4	Lampung Timur	134.246	Tinggi
5	Lampung Tengah	69.619	Tinggi
6	Lampung Utara	27.712	Tinggi
7	Way Kanan	135.733	Sedang
8	Tulangbawang	131.045	Tinggi
9	Pesawaran	17.088	Tinggi
10	Pringsewu	6.092	Tinggi
11	Mesuji	109.123	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	34.655	Sedang
13	Pesisir Barat	203.990	Tinggi
14	Bandar Lampung	136	Tinggi
15	Metro	36	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		**990.037**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

e. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penghitungan indeks bahaya kegagalan

teknologi mengacu kepada beberapa parameter. Parameter tersebut adalah kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.

Tabel II - 11 Tabel Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Selatan	2.633	Tinggi
2	Lampung Tengah	11.620	Tinggi
3	Lampung Utara	334	Sedang
4	Bandar Lampung	1.915	Tinggi
5	Metro	519	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		17.021	Tinggi

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

f. Kekeringan

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata.

Tabel II - 12 Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	214.278	Tinggi
2	Tanggamus	279.861	Sedang
3	Lampung Selatan	70.032	Sedang
4	Lampung Timur	394.580	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Tinggi
6	Lampung Utara	257.047	Tinggi
7	Way Kanan	367.375	Tinggi
8	Tulangbawang	311.082	Tinggi
9	Pesawaran	136.959	Sedang
10	Pringsewu	60.899	Sedang
11	Mesuji	218.400	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Tinggi
13	Pesisir Barat	270.264	Sedang
14	Bandar Lampung	17.660	Sedang
15	Metro	8.854	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		**3.107.659**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

g. Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa.

Tabel II - 13 Tabel Potensi Luas Bahaya Epidiemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanggamus	2.036	Sedang
2	Lampung Selatan	11.936	Tinggi
3	Lampung Timur	17	Tinggi
4	Lampung Tengah	16.988	Tinggi
5	Way Kanan	205	Tinggi
6	Pesawaran	3.879	Tinggi
7	Pringsewu	10.520	Tinggi
8	Mesuji	2	Tinggi
9	Bandar Lampung	3.782	Tinggi
10	Metro	12	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		49.377	SEDANG

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

h. Letusan Gunung Api

Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung terjadi pada tahun 1883. Setelah meletusnya gunung krakatau tersebut, saat ini Gunung Api Anak Krakatau yang terletak di Kabupaten Lampung masih aktif dan bahkan seringkali mengalami erupsi.

Tabel II - 14 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Selatan	2.651	Rendah
PROVINSI LAMPUNG		**2.651**	**RENDAH**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

i. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Perhitungan potensi bahaya letusan cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Tabel II - 15 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	184.611	Sedang
2	Tanggamus	172.770	Sedang
3	Lampung Selatan	69.906	Sedang
4	Lampung Timur	265.094	Sedang
5	Lampung Tengah	380.268	Sedang
6	Lampung Utara	247.253	Sedang
7	Way Kanan	362.516	Sedang
8	Tulangbawang	303.472	Sedang
9	Pesawaran	99.087	Sedang
10	Pringsewu	60.555	Sedang
11	Mesuji	179.934	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Sedang
13	Pesisir Barat	130.353	Sedang
14	Bandar Lampung	17.601	Sedang
15	Metro	9.568	Sedang
PROVINSI LAMPUNG		2.603.088	SEDANG

j. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran.

Tabel II - 16 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	116.197	Tinggi
2	Tanggamus	131.727	Tinggi
3	Lampung Selatan	17.721	Tinggi
4	Lampung Timur	343	Tinggi
5	Lampung Tengah	19.269	Tinggi
6	Lampung Utara	26.405	Tinggi
7	Way Kanan	23.942	Tinggi
8	Pesawaran	52.103	Tinggi
9	Pringsewu	10.676	Tinggi
10	Pesisir Barat	88.781	Tinggi
11	Bandar Lampung	3.223	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		**490.387**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019.

k. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Tabel II - 17 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	2.515	Tinggi
2	Tanggamus	2.060	Tinggi
3	Lampung Tengah	6.808	Tinggi
4	Lampung Utara	30	Tinggi
5	Way Kanan	13.888	Tinggi
6	Pesisir Barat	4.015	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		**29.316**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019.

l. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempabumi

di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitude lebih dari 7 SR.

Tabel II - 18 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanggamus	2.791	Tinggi
2	Lampung Selatan	4.596	Tinggi
3	Lampung Timur	1	Tinggi
4	Pesawaran	926	Tinggi
5	Pesisir Barat	2.639	Tinggi
6	Bandar Lampung	198	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		**11.151**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019.

Gambar II - 12 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung

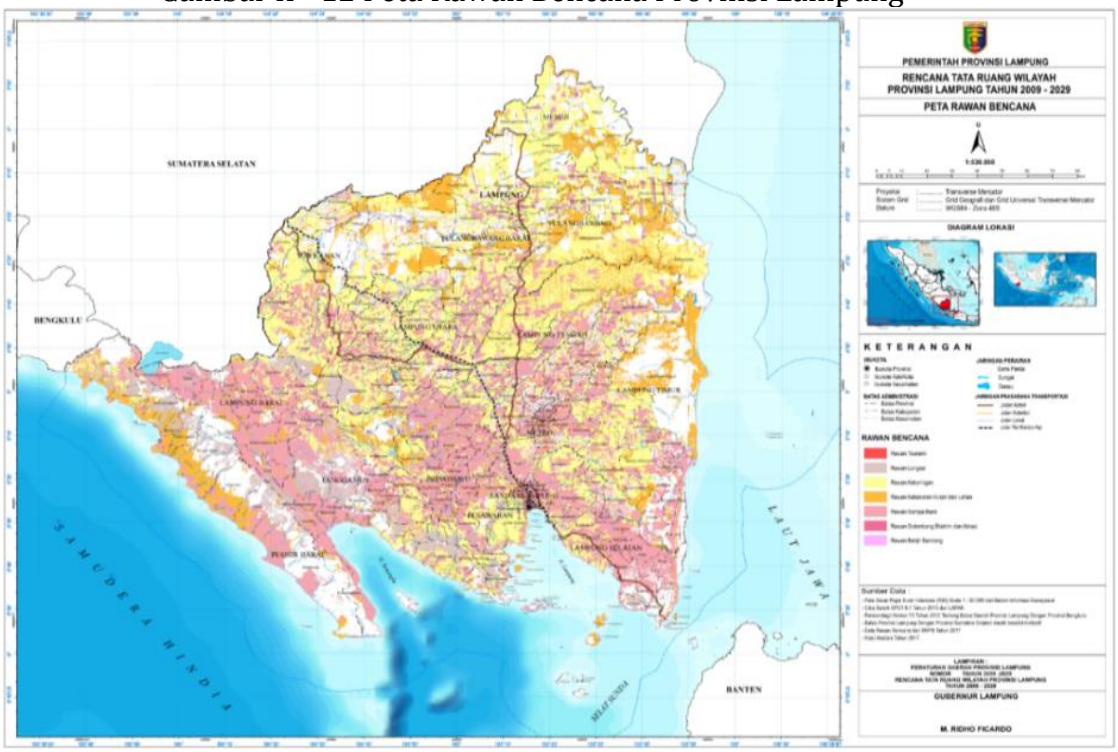

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.8.Kondisi Demografi

Kondisi Demografi sebuah wilayah dapat memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Komposisi Umur Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan antara periode tahun 1971 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui Komposisi Umur Penduduk selama tahun 1971 – 2020 (dalam persen). Proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 48,04 persen pada tahun 1971 menjadi 23,74 persen pada tahun 2020. Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat dari 50,57 persen menjadi 70,31 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 1,39 persen menjadi 5,95 persen.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Provinsi Lampung selama 10 tahun terkahir dari tahun 2011 – 2021 cukup stabil dan terkendali, menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 1,33 tahun 2011 menjadi 0,87 tahun 2020 tapi sedikit meningkat pada 2021. Hal ini menjadi indikasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk.

Grafik II - 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen)

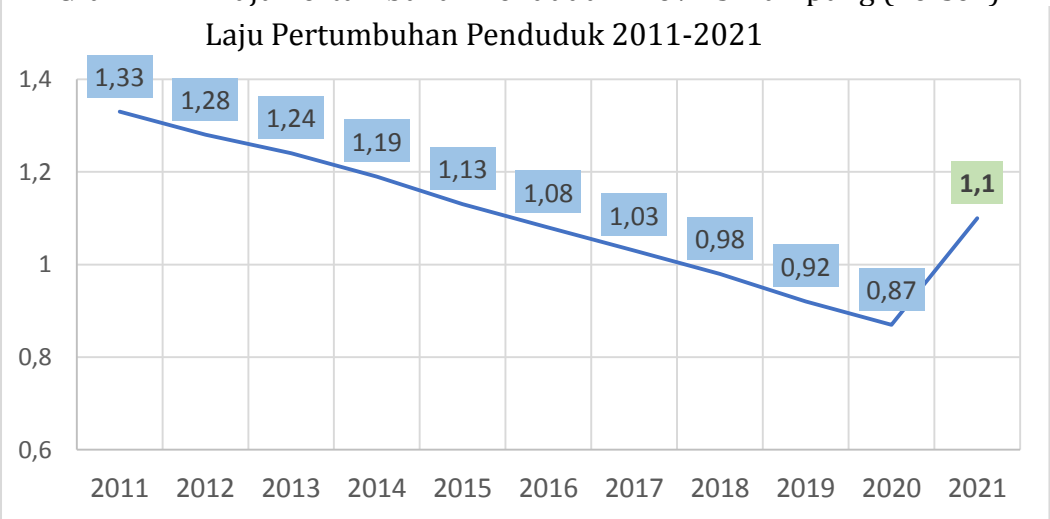

Sumber : BPS, 2022

Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebanyak 9.081.792 jiwa yang tersebar pada 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk yang terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.477.395 jiwa disusul oleh Kota Bandar Lampung sebanyak 1.184.949 jiwa dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.118.115 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 163.641 jiwa atau 1,80 persen penduduk Povinsi Lampung. Untuk tingkat kepadatan penduduk Lampung, adalah sebesar 270,49 Jiwa per Km^2. Wilayah terpadat di Provinsi Lampung adalah oleh Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan sebesar 6.450 Jiwa per Km^2 kemudian disusul Kota Metro sebesar 2.319 Jiwa per Km^2 dan Kabupaten Pringsewu sebesar 662 Jiwa per Km^2. Sebaran penduduk Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II - 19 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%	Kepadatan Penduduk Per Km^{2*})
1	Lampung Barat	295.689	298.286	300.703	302.828	302.140	302.749	3,33	143,08
2	Tanggamus	580.383	586.624	592.603	598.299	640.280	645.807	7,11	222,54
3	Lampung Selatan	982.885	992.763	1.002.285	1.011.286	1.064.300	1.071.727	11,80	483,01
4	Lampung Timur	1.018.424	1.027.476	1.036.193	1.044.320	1.110.340	1.118.115	12,31	289,11
5	Lampung Tengah	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.050	1.477.395	16,27	324,78
6	Lampung Utara	609.304	612.100	614.701	616.897	633.100	634.117	6,98	238,71
7	Way Kanan	437.530	441.922	446.113	450.109	473.580	476.871	5,25	135,05
8	Tulang Bawang	435.125	440.511	445.797	450.902	430.020	430.630	4,74	138,58
9	Pesawaran	431.198	435.827	440.192	444.380	477.470	481.708	5,30	376,45
10	Pringsewu	390.486	393.901	397.219	400.187	405.470	406.823	4,48	661,53
11	Mesuji	196.913	198.092	199.168	200.198	227.520	229.772	2,53	104,42
12	Tulang Bawang Barat	266.973	269.162	271.206	273.215	286.160	287.707	3,17	224,52
13	Pesisir Barat	151.288	152.529	153.743	154.895	162.700	163.641	1,80	54,66
14	Bandar Lampung	997.728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	1.166.070	1.184.949	13,05	**6.449,76**
15	Metro	160.729	162.976	165.193	167.411	168.680	169.781	1,87	**2.319,10**
	Provinsi Lampung	8.205.141	8.289.577	8.370.485	8.447.737	9.007.850	9.081.792	100,00	270,49

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2022, data diolah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan *trend* yang terus meningkat dari 5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen dan mulai membaik tumbuh positif di tahun 2021 sebesar 2,79 persen.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (3,69) dan Sumatera (3,18). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2021 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 371.903,17 Miliar dan Rp. 247.001,67 Miliar.

Grafik II - 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia

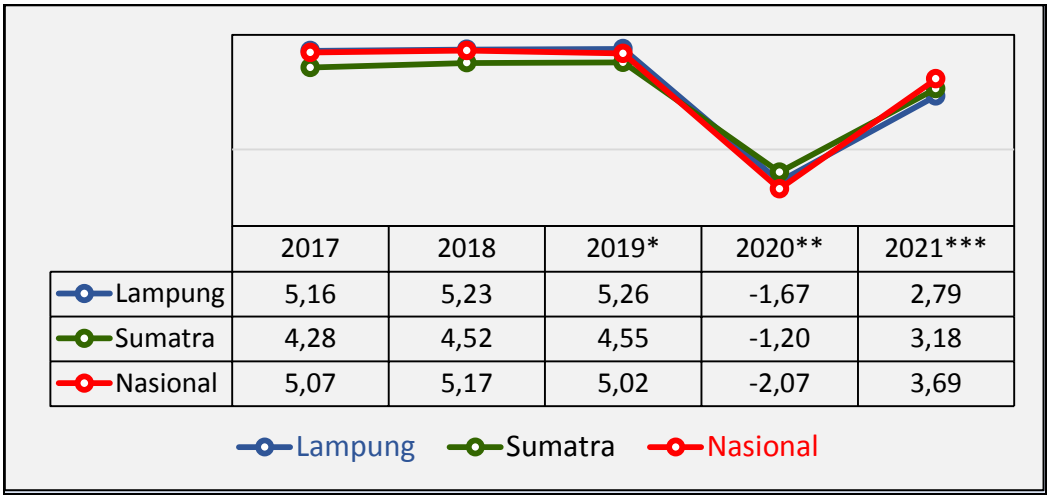

	2017	2018	2019*	2020**	2021***
Lampung	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79
Sumatra	4,28	4,52	4,55	-1,20	3,18
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi produksi, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Selanjutnya Konstruksi tumbuh sebesar 6,95 persen dan Pengadaan Air tumbuh sebesar 6,94 persen. Selain itu lapangan usaha yang juga tumbuh cukup besar adalah Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,17 persen dan 4,57 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, terutama terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi masing-masing sebesar -6,80 persen dan -5,28 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2021 (ADHB), masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 28,39 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,65 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,70 persen; serta Konstruksi sebesar 9,89 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,63 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan (*source of growth*), Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,97 persen, diikuti

Industri Pengolahan sebesar 0,84 persen, dan Konstruksi sebesar 0,68 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,29 persen.

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,79 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,94 persen; Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,63 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,67 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,26 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran (ADHB), masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 61,84 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 47,00 persen; Komponen PMTB sebesar 33,78 persen; Komponen PK-P sebesar 7,91 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,71 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,22 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 52,47 persen

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 berada pada posisi terendah kedua bersama Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,79. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-1.

Grafik II - 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Sumatera tahun 2021

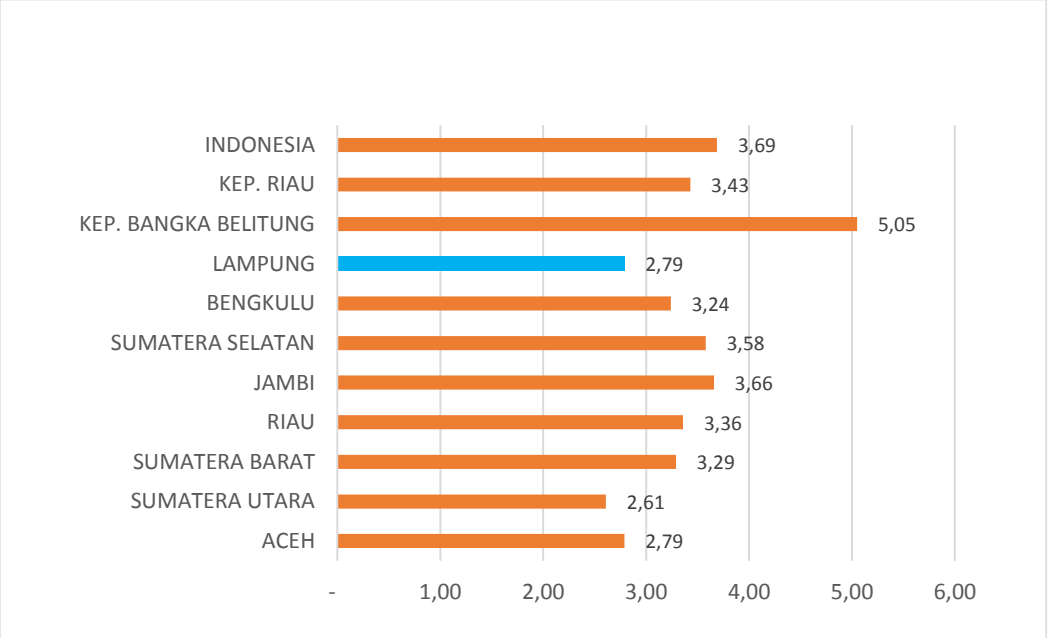

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 5 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung (3,05), Kabupaten Pringsewu (2,91), Kota Metro (2,90), Kabupaten Tulang Bawang Barat (2,89) serta Kabupaten Lampung Timur (2,89). Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Timur mampu tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provisi Lampung.

Tabel II - 20 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bandar Lampung	6.28	6.2	6.21	-1.85	3.07
Metro	5,66	5,68	5.58	-1.79	2.9
Tulang Bawang	5,45	5,42	5,41	-1,36	2.88
Lampung Tengah	5,27	5,33	5,35	-1,02	2.88
Pesisir Barat	5,33	5,33	5,37	-1,17	2.07
Tulang Bawang Barat	5,55	5,27	5.36	-1.32	2.89
Lampung Utara	5,21	5,31	5,33	-1,45	2.82
Mesuji	5,20	5,30	5,26	-1,35	2.84
Lampung Barat	5,03	5,09	5,19	-1,14	2.58
Way Kanan	5,11	5,18	5,17	-1,16	2.9
Lampung Selatan	5,46	5,23	5,13	-1,73	2.68
Pringsewu	5,11	5,01	5,04	-1,21	2.91
Tanggamus	5,19	5,01	5,02	-1,77	2.3
Pesawaran	5,01	5,05	5,00	-1,26	2.08
Lampung Timur	4,58	3,71	3,81	-2,29	2.89
Provinsi Lampung	5,16	5,23	5.26	-1.67	2.79
Nasional	5,07	5,17	5.02	-2.07	3.69

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2. Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017–2021 inflasi umum tahunan Lampung berada kisaran 2,00–3,44. Sementara nasional pada kisaran 1,68–3,61. ini artinya inflasi nasional dan Lampung masih tergolong rendah. Inflasi tertinggi Lampung terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 3,44% dan terendah pada tahun 2020 yang mencapai 2,00%. Selama 3 tahun terakhir, inflasi tahunan Lampung berada di atas angka inflasi nasional.

Grafik II - 4 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional

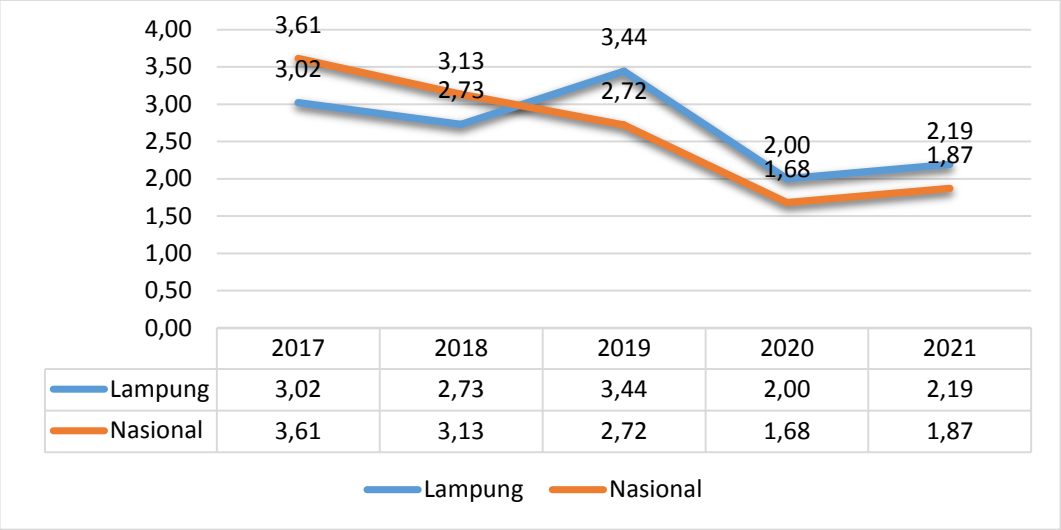

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.3. PDRB per Kapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun secara signifikan cenderang mengalami peningkatan dari 37 juta tahun 2017 menjadi 40,95 juta pada tahun 2021. Penurunan PDRB Perkapita pada tahun 2020 dan 2021 dibanding tahun 2019 menunjukkan bahwa pada kemampuan masyarakat Lampung mengalami sedikit penurunan dalam hal untuk mengonsumsi suatu produk. Apabila dibanding secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 62,96 Juta Rupiah pada tahun 2021.

Secara umum, dalam kurun waktu 2020-2021, PDRB per kapita Provinsi Lampung menunjukkan penurunan yang disebabkan karena memang menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran akibat dampak Covid 19.

Grafik II - 5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional

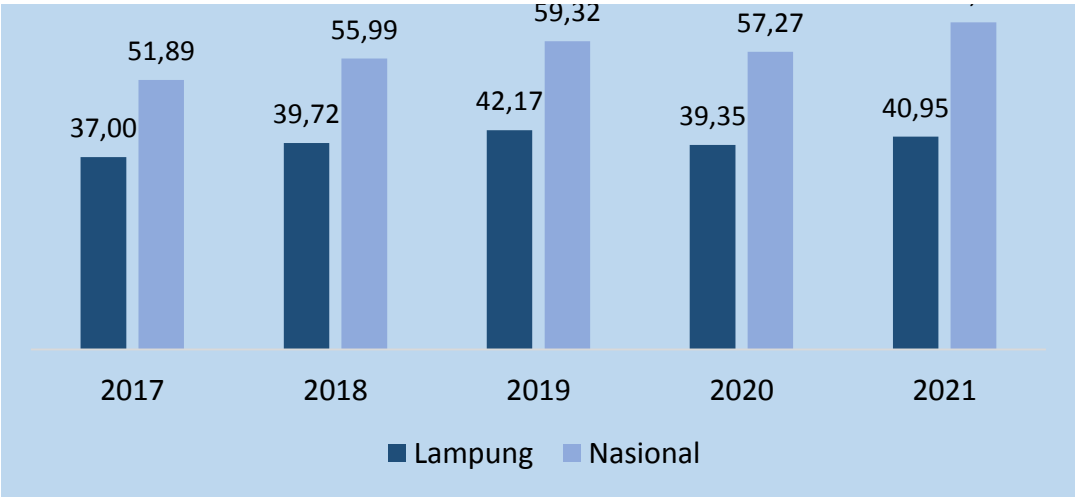

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional, 2022

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,8 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji masing-masing sebesar 4,10 persen dan 3,31 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung, masing-masing 0,8 persen dan 1 persen. Pada Tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 56,12 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 40,95 juta).

Tabel II - 21 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tulang Bawang	45,09	48,37	51,07	53,69	56,12
Bandar Lampung	49,30	53,00	56,22	50,75	51,90
Lampung Tengah	48,32	52,17	55,37	48,86	50,32
Mesuji	45,09	49,01	51,93	45,81	47,41
Lampung Selatan	38,60	41,63	44,13	41,70	43,31
Tulang Bawang Barat	36,61	39,56	41,86	39,97	41,57
Lampung Utara	33,55	36,07	38,51	37,55	39,21
Metro	33,63	35,67	37,68	37,36	38,74
Lampung Timur	35,18	38,48	39,80	36,71	38,32
Pesawaran	32,11	34,43	36,43	34,05	34,97
Way Kanan	27,40	29,38	31,02	29,59	30,75

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Pesisir Barat	25,88	27,86	30,25	28,89	30,06
Pringsewu	24,59	26,20	27,85	27,56	28,67
Tanggamus	22,87	24,54	26,03	24,22	25,30
Lampung Barat	20,50	22,02	23,40	23,61	24,71
Provinsi Lampung	37,00	39,86	42,17	39,35	40,95

Sumber : BPS 2022

2.1.2.4. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2016 hingga 2021, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,358 tahun 2016 menjadi 0,314 pada Tahun 2021, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,381). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antarkelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik II - 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021

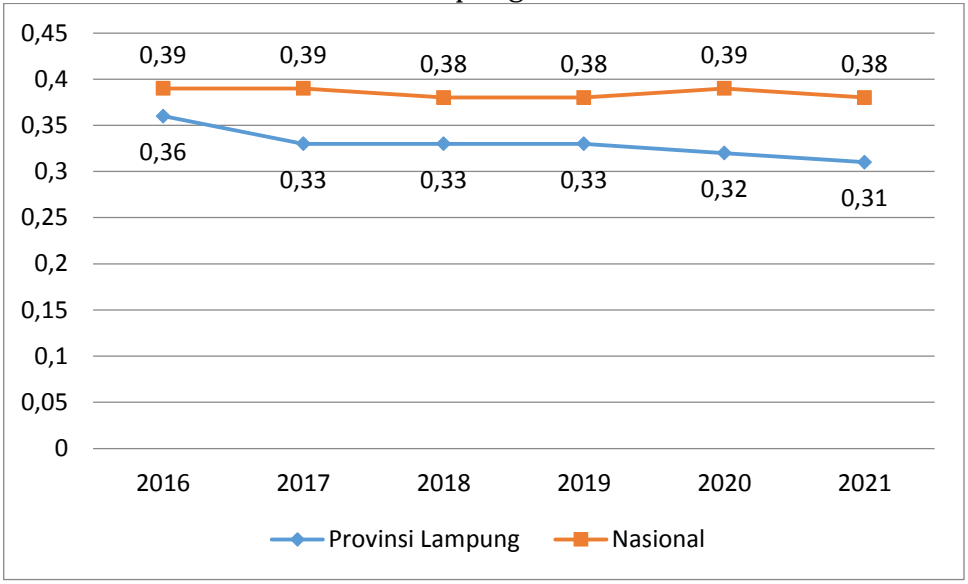

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi dapat dilihat dalam konteks kewilayahan, yakni dengan mengamati kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021, kontribusi terbesar disumbang Kabupaten Lampung Tengah sebesar 19,80 persen, disusul Kota Bandar Lampung dengan kontribusi sebesar 16,38 persen serta Kabupaten Lampung Selatan dengan kontribusi sebesar 12,36. Sedangkan Kabupaten dengan kontribusi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,31 persen disusul Kota Metro 1,75 persen serta Kabupaten Lampung Barat 1,99 persen.

Tabel II - 22 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2017 – 2021 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	1,98	1,96	1,97	1,99	1,99
2	Tanggamus	4,34	4,33	4,33	4,31	4,35
3	Lampung Selatan	12,38	12,40	12,40	12,35	12,36
4	Lampung Timur	11,68	11,73	11,55	11,35	11,41
5	Lampung Tengah	19,70	19,70	19,71	19,82	19,80
6	Lampung Utara	6,64	6,60	6,60	6,63	6,62
7	Way Kanan	3,91	3,89	3,88	3,90	3,90

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
8	Tulang Bawang	6,42	6,40	6,40	6,44	6,44
9	Pesawaran	4,52	4,50	4,50	4,52	4,49
10	Pringsewu	3,13	3,10	3,10	3,11	3,11
11	Mesuji	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90
12	Tulang Bawang Barat	3,18	3,18	3,18	3,19	3,19
13	Pesisir Barat	1,28	1,28	1,30	1,31	1,31
14	Bandar Lampung	16,19	16,28	16,43	16,42	16,38
15	Metro	1,77	1,76	1,75	1,75	1,75
	Jumlah	100	100	100	100	100

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.1.2.5. Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Grafik II - 7 Indeks Williamson Provinsi Lampung

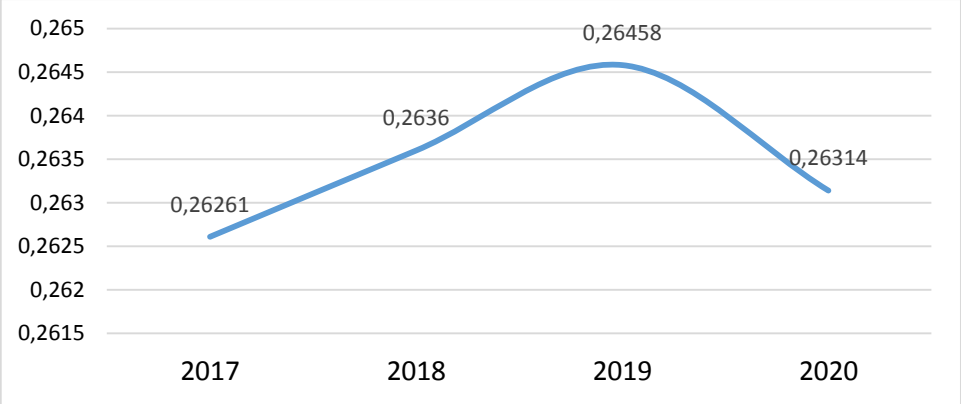

Sumber : BPS 2022, data diolah

Indeks *Williamson* Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2017-2018 cenderung sedikit naik. Nilai indeks pada tahun 2017 sebesar 0,26261 meningkat menjadi 0,26458 di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 sebesar 0,26314. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

2.1.2.6. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,67 persen di 2021, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada tahun 2021 berada pada angka 9,71 persen. Selama periode Maret-September, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin 76,91 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 84,12 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 11,67 persen menurun 0,95 poin terhadap Maret 2021 dan 1,09 poin terhadap September 2020.

Grafik II - 8 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung

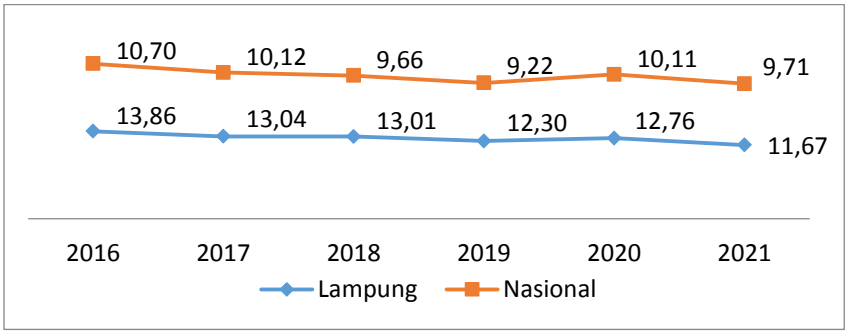

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II-20 menunjukkan pada September 2021 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 770,54 ribu jiwa. angka tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 831,86 ribu jiwa dan di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan yaitu dari sebesar 259,28 ribu jiwa tahun 2020 menjadi 236,48 ribu jiwa tahun 2021.

Tabel II - 23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2021 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2017	2018	2019	2020	2021
Kota	211,97	230,20	224.69	259,28	236,48
Desa	871,77	861,40	816.79	831,86	770,54
Kota + Desa	1.083,74	1.091,60	1041.48	1.091,14	1007,02

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Selanjutnya berdasarkan tabel II-21, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara sebanyak 19,63 persen,

Kabupaten Pesawaran sebesar 15,11 persen dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 15,08 yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan jumlah persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung, ketiga kabupaten masih menduduki posisi yang sama dari tahun 2020 tidak ada perubahan hanya nilainya saja semakin meningkat di tahun 2021

Tabel II - 24 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2016 - 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	14,32	13,54	12,92	12,52	12,82
Tanggamus	13,25	12,48	12,05	11,68	11,81
Lampung Selatan	15,16	14,86	14,31	14,08	14,19
Lampung Timur	16,35	15,76	15,24	14,62	15,08
Lampung Tengah	12,9	12,62	12,03	11,82	11,99
Lampung Utara	21,55	20,85	19,9	19,3	19,63
Way Kanan	14,06	13,52	13,07	12,9	13,09
Tulang Bawang	10,09	9,7	9,35	9,33	9,67
Pesawaran	16,48	15,97	15,19	14,76	15,11
Pringsewu	11,3	10,5	10,15	9,97	10,11
Mesuji	7,66	7,55	7,47	7,33	7,54
Tulang Bawang Barat	8,11	8,1	7,75	7,39	8,32
Pesisir Barat	15,61	14,98	14,48	14,29	14,81
Bandar Lampung	9,94	9,04	8,71	8,81	9,11
Metro	9,89	9,14	8,68	8,47	8,93
Provinsi Lampung	**13,69**	**13,14**	**12,62**	**12,34**	**12,62**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,11 di tahun 2017 menjadi 1,88 pada September 2021. Pada periode Maret – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 1,881 menjadi 1,849. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada tahun 2021 berada pada angka 1,67.

Grafik II - 9 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 – 2021 (persen)

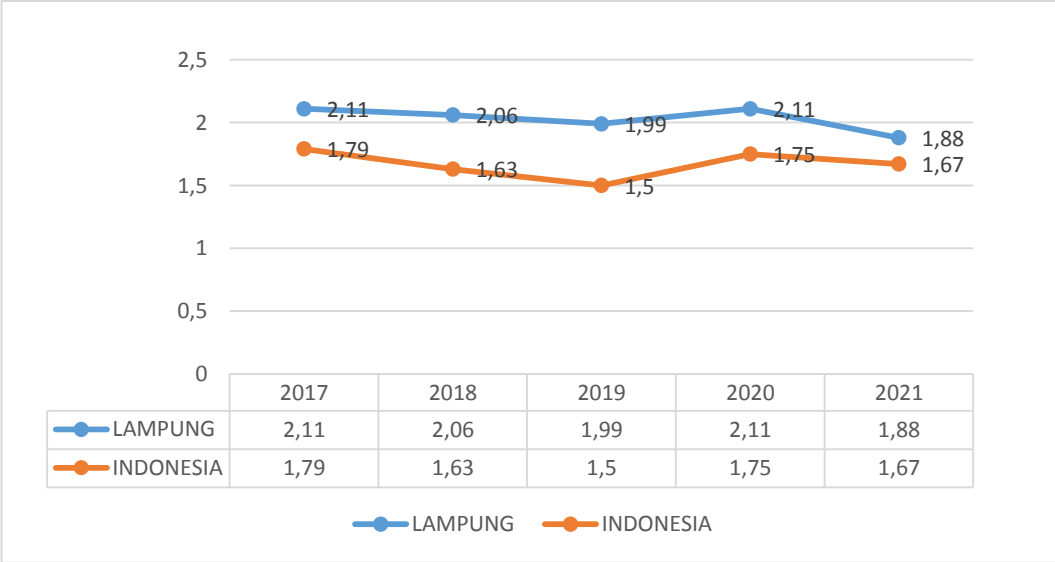

Sumber: BPS Susenas, 2022 diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,70 di 2016 menjadi 0,384 di 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret – September 2021 juga mengalami penurunan dari 0,416 menjadi 0,384. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin

kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Bila dibandingkan secara nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung masih berada di bawah P2 Nasional yang sebesar 0,42.

Grafik II - 10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung

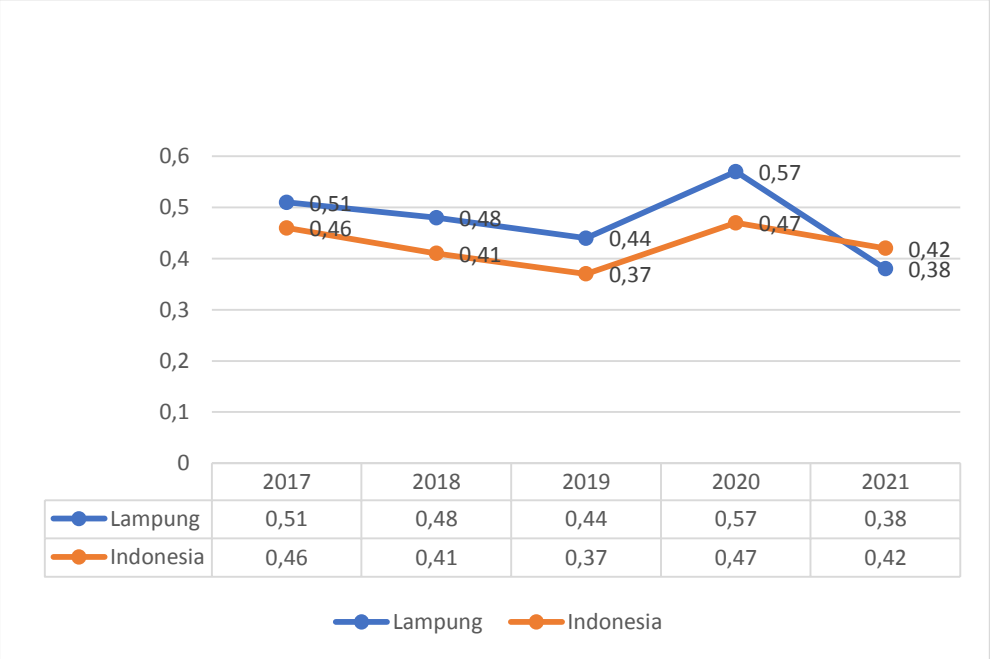

	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	0,51	0,48	0,44	0,57	0,38
Indonesia	0,46	0,41	0,37	0,47	0,42

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selama periode tahun 2016 s.d. 2021 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 67,65 di tahun 2016 menjadi 69,90 di tahun 2021. Namun, peningkatan IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 72,29. Peningkatan IPM pada Tahun 2021di Provinsi Lampung terjadi pada semua dimensi baik umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standard hidup layak. Berbeda pada peningkatan IPM Tahun 2020 yang hanya didukung peningkatan pada dimensi umur panjang dan sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standard hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita (yang disesuaikan) meningkat dari Rp. 9,982 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp. 10.083 Juta, semakin mendekati nominal sebelum terjadinya Pandemi Covid 19.

Grafik II - 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia

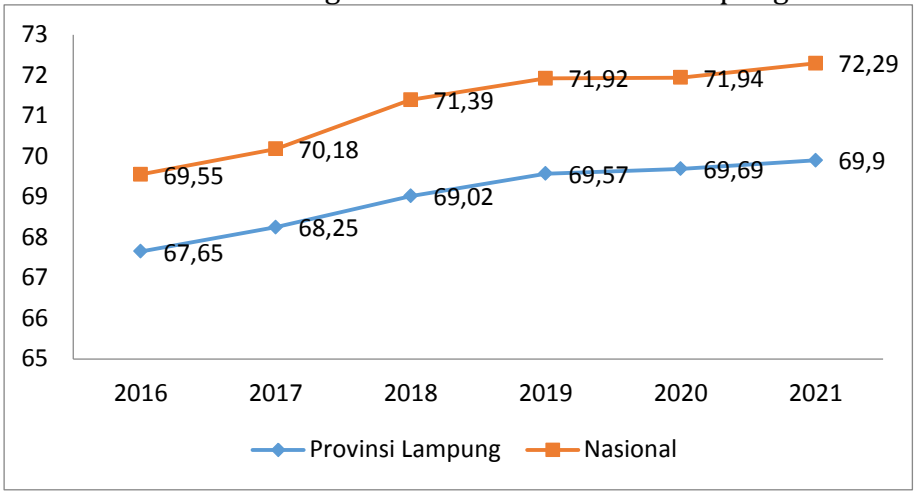

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,73 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,65 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,03 tahun, dari 8,05 tahun

menjadi 8,08 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,73 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung adalah 69,12 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 70,73 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Lampung tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, HLS Lampung telah meningkat rata-rata 1,45 persen per tahun, sementara RLS meningkat rata-rata 0,98 persen per tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, RLS dan HLS masih dapat tumbuh meskipun dengan perlambatan.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,04 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,56 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Lampung, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan.

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69.95	70.18	70.51	70.65	70.73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.46	12.61	12.64	12.65	12.73
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.79	7.82	7.92	8.05	8.08
Standard Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	9,413	9,858	10,114	9,982	10,038
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		**68.25**	**69.02**	**69.57**	**69.69**	**69.90**

Tabel II - 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit 2017-2021

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (72,29). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2021 berada pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, PemerintahProvinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik II - 12 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2021

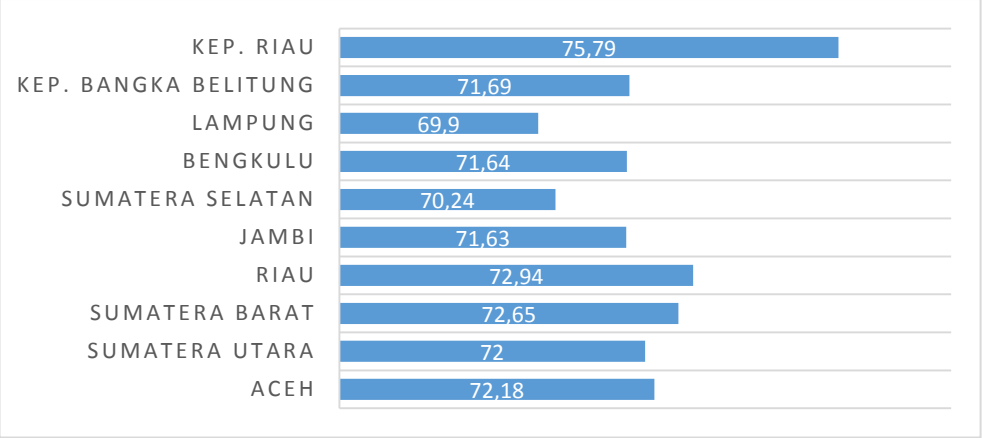

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (64,04), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (77,58). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2021 adalah sebanyak 4, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan 11 kabupaten lainnya berstatus "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus "rendah" (IPM < 60). Sejak tahun 2016, tidak ada lagi kabupaten dengan status pembangunan manusia "rendah" setelah IPM Kabupaten Mesuji meningkat statusnya dari "rendah" menjadi "sedang".

Tabel II - 26 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016 – 2021

Wilayah	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,50	67,80	67.90
Kabupaten Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42	66.65
Kabupaten Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36	68.49
Kabupaten Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37	69.66
Kabupaten Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16	70.23
Kabupaten Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67	67.89
Kabupaten Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	67.57
Kabupaten Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52	68.73
Kabupaten Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79	66.14
Kabupaten Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,30	70.45
Kabupaten Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63	64.04
Kabupaten Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97	66.22
Kabupaten Pesisir Barat	61,5	62,2	62,96	63,79	63,91	64.30
Kota Bandar Lampung	75,34	75,98	75,63	77,33	77,44	77.58
Kota Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	77.49
Provinsi Lampung	**67,65**	**68,25**	**69,02**	**69,57**	**69,69**	69.90

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dari 90,30 tahun 2016 menjadi 90,33 tahun 2020 namun angka ini masih dibawah angka nasional. Meskipun dibawah nasional, dengan adanya peningkatan nilai IPG tersebut, mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten berusaha untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Grafik II - 13 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia (2016 – 2021)

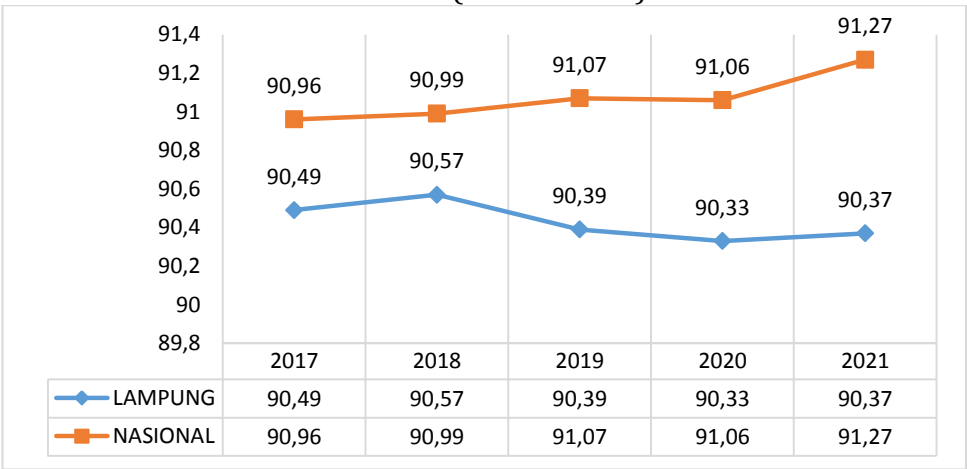

	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	90,49	90,57	90,39	90,33	90,37
NASIONAL	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Peningkatan IPG Provinsi Lampung diikuti juga dengan peningkatan IPG Kabupaten/Kota, tercatat pada tahun 2021 dari 15 Kabupaten/kota terdapat 6 Kabupaten/Kota yang nilai IPG nya berada diatas Provinsi yaitu ; Kota Metro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu. Sedangkan Kabupaten dengan tingkat IPG terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 84,37.

Tabel II - 27 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	91,65	92,47	92,74	92,55	92.95	93.00
Tanggamus	89,79	90,71	91,14	90,88	91.13	90.98
Lampung Selatan	88,89	89,52	89,87	89,54	89.6	89.61
Lampung Timur	87,51	87,85	88,67	88,78	88.83	88.78
Lampung Tengah	89,08	89,23	89,57	89,88	89.87	89.94
Lampung Utara	87,85	88,69	89,34	89,48	89.46	89.58
Way Kanan	87,54	87,85	88,25	88,22	88.19	88.32
Tulang Bawang	88,08	88,51	88,69	89,17	89.31	89.56
Pesawaran	86,13	87,25	87,57	87,30	87.2	87.22
Pringsewu	92,37	92,26	92,59	92,37	92.33	92.29
Mesuji	84,38	83,82	84,49	84,22	84.17	84.37
Tulang Bawang Barat	87,93	88,08	88,53	88,45	88.56	88.96
Pesisir Barat	92,07	92,84	93,40	93,22	93.21	93.51
Kota Bandar Lampung	93,69	93,53	93,55	93,96	93.86	93.93
Kota Metro	94,64	94,97	94,98	95,02	95.55	95.89
LAMPUNG	**89,89**	**90,49**	**90,57**	**90,39**	**90.33**	**90.37**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 67,96, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,26. *Trend* IDG Provinsi Lampung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik II - 14 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021

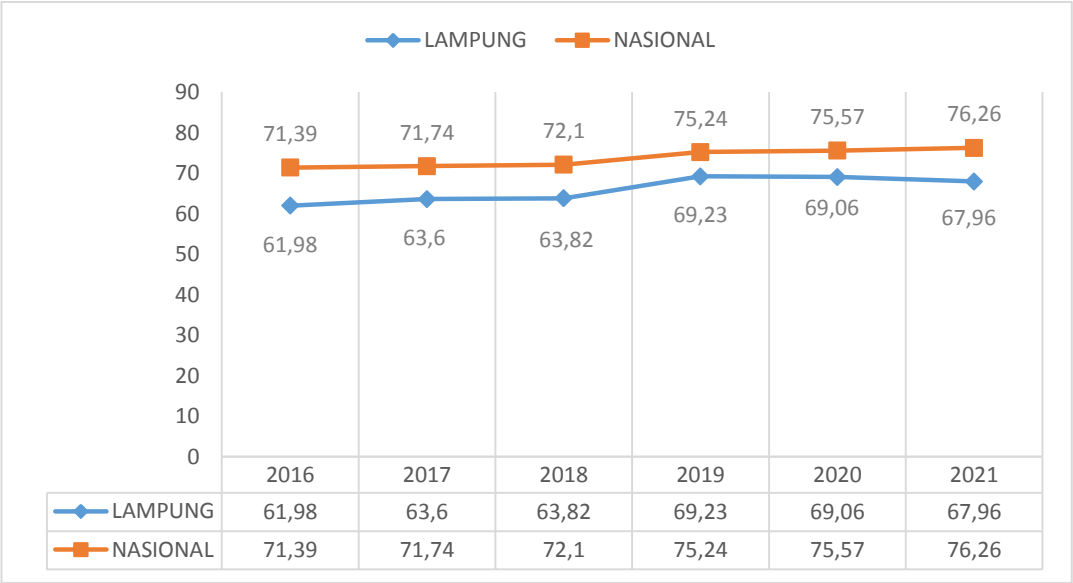

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	61,98	63,6	63,82	69,23	69,06	67,96
NASIONAL	71,39	71,74	72,1	75,24	75,57	76,26

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 76,98 dikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 72,21 dan Kota Bandar Lampung sebesar 71,88. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 51,25.

Tabel II - 28 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	60,47	63,84	68,21	68.24	69.14
Tanggamus	69,77	69,90	56,97	56.80	56.39
Lampung Selatan	57,66	58,14	59,40	59.59	59.27
Lampung Timur	60,01	60,73	63,42	63.13	63.14
Lampung Tengah	55,75	53,52	62,22	61.96	61.01
Lampung Utara	60,90	61,41	64,87	65.21	64.94
Way Kanan	68,46	65,30	61,46	60.72	61.82
Tulang Bawang	62,78	62,52	65,94	64.10	64.76
Pesawaran	70,51	67,03	72,59	72.21	73.70
Pringsewu	62,95	63,81	67,05	67.32	65.86
Mesuji	61,40	61,71	69,27	68.89	68.45
Tulang Bawang Barat	62,74	59,74	51,46	51.25	52.10

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Pesisir Barat	64,34	63,90	56,21	56.02	54.93
Kota Bandar Lampung	62,11	62,39	71,54	71.88	71.69
Kota Metro	78,92	78,75	77,02	76.98	74.23
LAMPUNG	**63,60**	**63,82**	**69,23**	69.06	67,96

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.10. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja, Penduduk Yang Berkerja dan Pengangguran

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami trend yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lampung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 6,48 juta orang, naik sebanyak 81,6 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 41,1 ribu orang jika dibanding Februari 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 69,35 persen (4,49 juta orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri atas 4,28 juta orang penduduk yang bekerja dan 210,6 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 yaitu kondisi dimana sudah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 5,3 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 4,2 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 1,1 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2021 jumlah angkatan kerja berkurang sebanyak 124,7 ribu orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 125,4 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 0,7 ribu orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 69,35 persen, yaitu turun sebesar 0,8 persen poin dibanding Agustus 2020 dan turun 2,38 persen poin dibanding Februari 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel II - 29 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2021

STATUS KETENAGAKERJAAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penganggur	196,9	190,3	176,3	171,7	171,5	209.6	210.6
Bukan angkatan Kerja	2.009,90	1.799,50	1.931,20	1.842,60	1.900,70	1.909,9	1.986,2
Persentase angkatan kerja yang bekerja	94.86	95.38	95.67	95.94	95.56	95,33	95,31
TPAK	65.59	69.61	67.83	69.67	69.09	70.16	69.35

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Distribusi Tenaga Kerja

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB pada Tahun 2021 sebesar 28,39%, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,67% dan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 11,70%. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut yakni, serapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 43,59%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,36%. Adapun sektor industri pengolahan menyerap 9,29% dari total penduduk bekerja.

Grafik II - 15 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Februari 2021

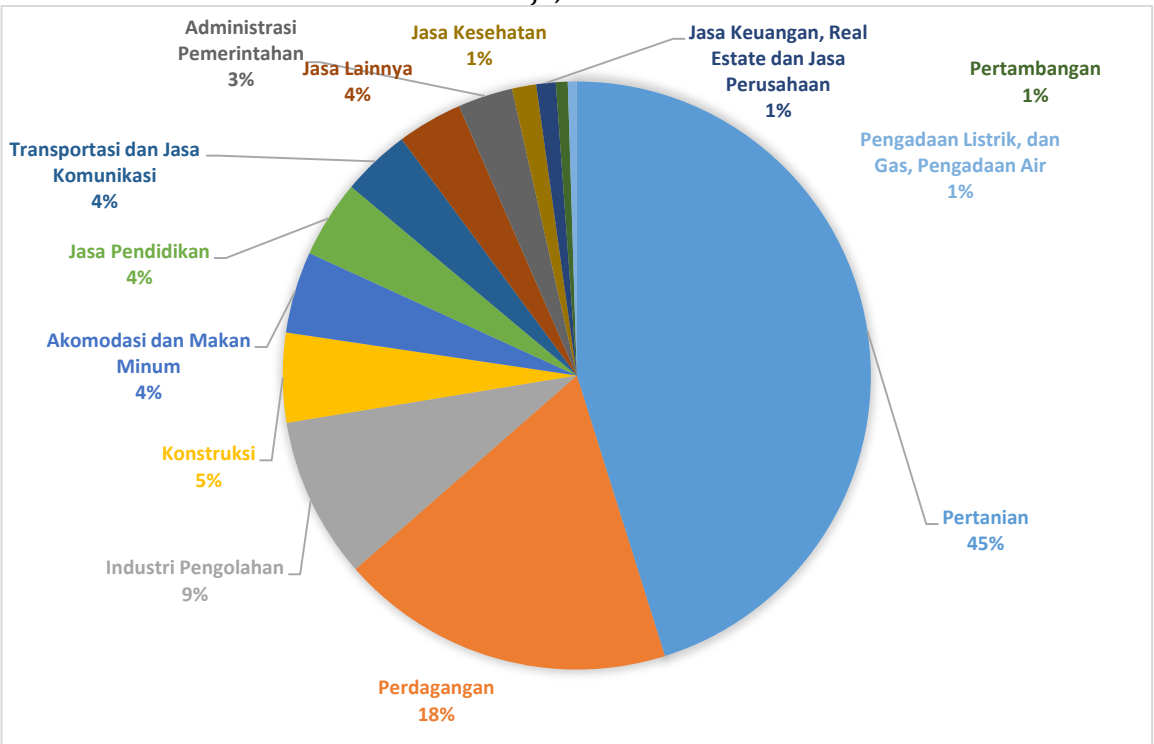

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Distribusi tenaga kerja dapat juga dilihat dari status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap, (3) berusaha dibantu buruh tetap, (4) buruh/karyawan, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di nonpertanian dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama diatas, kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan termasuk Kategori pekerja formal dan sisanya termasuk dalam kategori pekerja informal.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,06 juta orang (71,31%), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,23 juta orang (28,69%). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 turun sebesar 0,95 persen jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja informal turun sebesar 0,65 persen.

Grafik II - 16 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal (2017-2021)

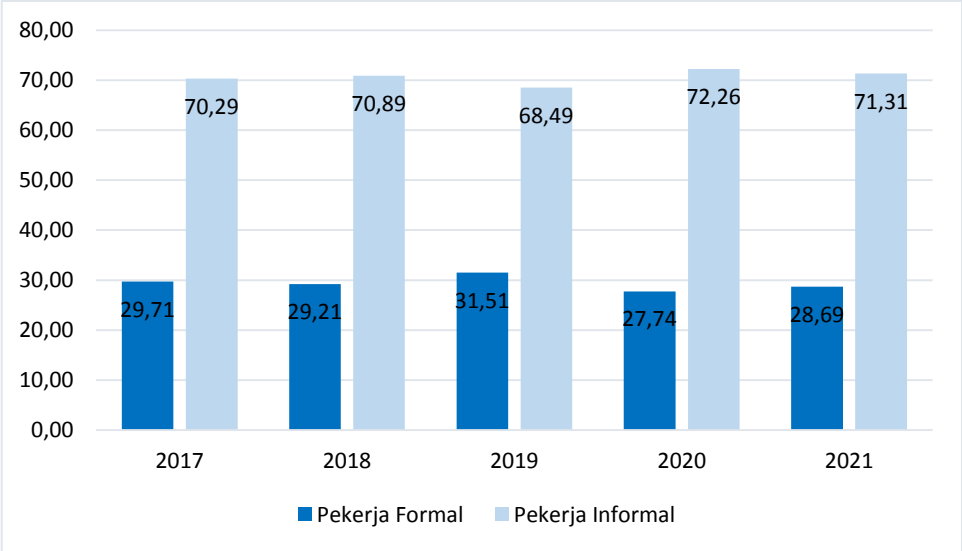

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Namun bila dibandingkan secara nasional, selama periode 2016-2021, TPT Provinsi Lampung selalu berada di bawah TPT Nasional (6,49) pada Tahun 2021.

Tabel II - 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung (%)	4,62	4,33	4,06	4,03	4,67	4,69
Indonesia (%)	5,61	5,5	5,34	5,28	7,07	6,49

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Agustus 2021, TPT perkotaan sebesar 7,85 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,26 persen). Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan naik sebesar 0,27 persen sedangkan TPT perdesaan turun sebesar 0,14 persen. Jika dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,29 persen poin. Hal ini disebabkan menurunnya aktivitas industry dan perdagangan akibat pandemic Covid 19 serta masih cukup tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di pedesaan.

Grafik II - 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021 (Persen)

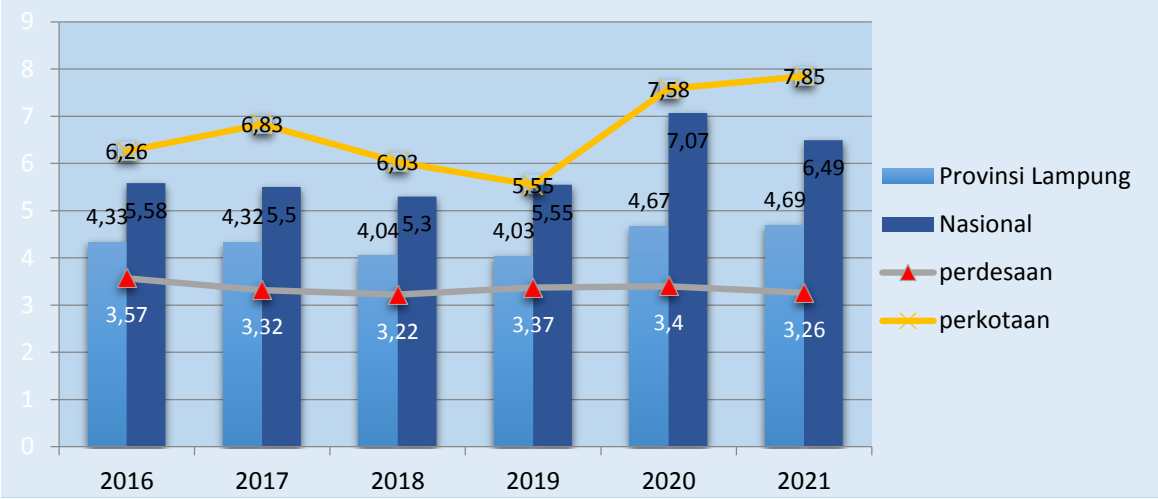

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14), Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan

Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik II - 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota

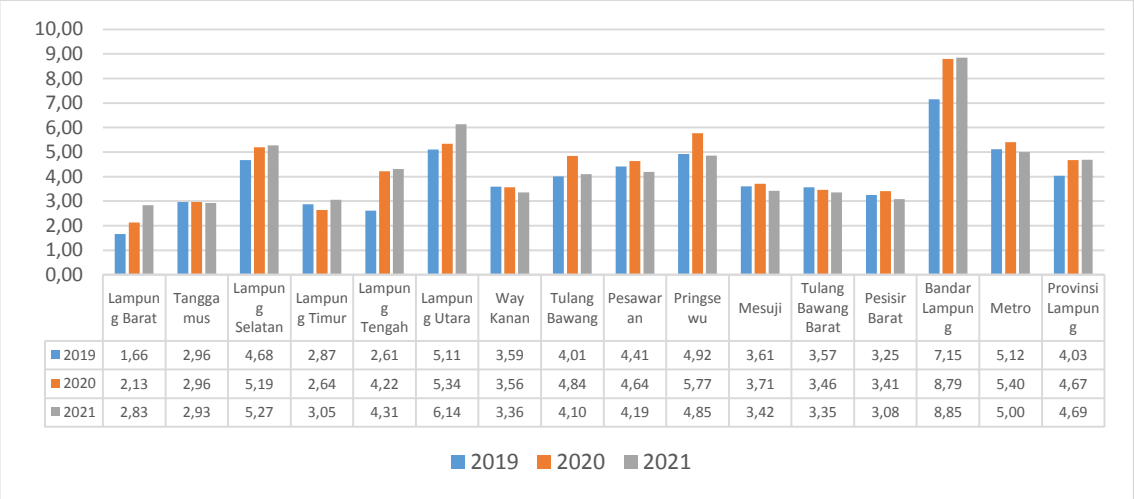

	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Way Kanan	Tulang Bawang	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Bandar Lampung	Metro	Provinsi Lampung
2019	1,66	2,96	4,68	2,87	2,61	5,11	3,59	4,01	4,41	4,92	3,61	3,57	3,25	7,15	5,12	4,03
2020	2,13	2,96	5,19	2,64	4,22	5,34	3,56	4,84	4,64	5,77	3,71	3,46	3,41	8,79	5,40	4,67
2021	2,83	2,93	5,27	3,05	4,31	6,14	3,36	4,10	4,19	4,85	3,42	3,35	3,08	8,85	5,00	4,69

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.11. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio Target PAD terhadap target APBD dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi, diawali 47,40% di tahun 2015 dan sebesar 43,62% di tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II-31.

Tabel II - 31 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2021

Thn	Target APBD (Rp.)	Target PAD (Rp.)	Rasio Target PAD thd Target APBD %	Realisasi APBD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Rasio Realisasi PAD thd Realisasi APBD %
2015	4,987,226,142,596	2,363,789,222,943	47.40	4,789,035,573,578	2,247,288,679,813	46.93
2016	5,825,907,142,160	2,739,699,673,189	47.03	5,585,023,474,025	2,365,097,213,971	42.35
2017	7,725,116,345,282	3,080,908,289,668	39.88	6,822,818,640,215	2,759,859,176,654	40.45
2018	7,935,916,843,959	3,565,784,165,917	44.93	7,137,049,975,851	2,902,313,507,327	40.67
2019	7,371,432,528,025	2,987,249,600,061	40,52	7,277,774,464,693	3,029,324,859,696	41.62
2020	7.354.235.707.663	2.949.184.797.051	40,10	7.381.124.107.714	2.863.527.923.556	38,80
2021	7,538,150,772,809	3,336,257,494,574	44.26	7,484,454,616,938	3,264,656,067,658	43.62

Sumber: Bapenda/BPKAD, 2021

2.1.2.12. Opini BPK

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2016-2021 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Provinsi Lampung pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2015, yaitu dari predikat **CC** tahun 2015 menjadi predikat **B** pada tahun 2016. Untuk tahun selanjutnya Provinsi Lampung terus mendapatkan Predikat B. Pada Tahun 2021, predikat B didapatkan dengan Nilai 66,04.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari Nilai 21,37 (D) pada tahun 2015 menjadi 56,13 (CC) pada tahun 2016. Sedangkan untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 57,63 (C) dan 58,49 (CC) dan sejak Tahun 2019-2021, Nilai RB Provinsi Lampung meningkat menjadi CC senilai 58,38 pada Tahun 2021.

2.1.2.13. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik, dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayuran dan buah, serta (9) lain-lain. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Indikator kualitas konsumsi pangan dijabarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat tergantung oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor PPH ini digunakan sebagai perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Pemanfaatan data konsumsi pangan dalam perencanaan pangan menjadi sangat penting, mengingat data tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi permintaan pangan sebagai cerminan preferensi, ketersediaan dan daya beli aktualnya. Disamping itu, data konsumsi pangan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi pencapaian ketahanan pangan dari sisi konsumsi (tingkat konsumsi, dan skor PPH), serta evaluasi kemampuan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH Provinsi Lampung ditunjukkan pada TAbel II-32 berikut :

Tabel II - 32 Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2014-2021

Keterangan	2014	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hr)	2062,4	1841,5	1856,5	1963,9	2091,5	2037,5	2.068	2.221
Angka Kecukupan Protein (Gram/kap/hr)	54,6	49,6	50,3	54,46	63,3	58	58,1	57,65
Skor PPH	83,4	79,3	78	90,6	90,4	91,1	85,3	89,0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung 2022

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar : 89,0, di atas PPH Nasional yang Hanya 87,2, dan juga meningkat dibandingkan PPH Lampung tahun 2020 yang sebesar 85,3.
b. Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kap/hr) Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar : 2221, masih dibawah AKE Nasional 2143, namun meningkat dibandingkan AKE Lampung Tahun 2020 yang hanya 2068.

c. Angka Kecukupan Protein / AKP (gr/kap/hr) Provinsi Lampung pada tahun 2021, yaitu : 57,65, dibawah AKP Nasional 62,3 dan menurun dibandingkan AKP Lampung tahun 2020 yang sebesar 58,1

2.1.2.14. Penguatan Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU 18/2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia sebagai negara agraris yang juga merupakan negara maritim, mempunyai potensi sumber pangan yang relatif berlimpah. Oleh karena itu, sumberdaya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya. Dalam konteks kemandirian pangan, Pemerintah melaksanakan program swasembada untuk lima bahan pangan pokok, yaitu untuk beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Mengingat bahwa produksi beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung dan kedelai bersifat musiman, maka untuk menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan.

Pada Tahun 2020 produksi padi Lampung secara Nasional berada pada urutan ke 6 dengan capaian produksi sebesar 2,595 Juta Ton. Produksi Jagung sebesar 2,57 Juta Ton atau peringkat 3 Nasional, Singkong 5,07 Juta Ton atau peringkat 1 Nasional, produksi Nanas 699,24 Ribu Ton dan Pisang 1,21 Juta Ton yang merupakan terbesar Nasional, produksi kopi 118,14 Ribu Ton atau peringkat 2 Nasional, produksi Lada sebesar 15, 23 Ribu Ton terbesar ke 2 Nasional, Kakao 59,06 Ribu Ton terbesar ke 6 Nasional, Tebu

terbesar ke 2 Nasional dengan produksi 771,289 Ribu Ton. Begitu pula komoditas peternakan, produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,67 % terhadap produksi daging sapi nasional, produksi udang Lampung berada pada urutan ke-5 Nasional dengan capaian produksi tahun 2019 sebesar 65.955,58 Ton, dan capaian produksi pada tahun 2020 sebesar 127.258 ton.

Tabel II - 33 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2016-2021

No.	Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		produksi	surplus/ minus	Produksi	produksi	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus
1	Beras	2,355,419.00	1,467,655	2,489,323	1,226,022	1,226,022	1,666,860	1,226,022	1,896,705	1.497.058	772.026,80
2	Jagung	1,720,196.00	1,525,040	2,518,895	2,113,202	2,113,202	2,176,657	2,113,202	2,321,178	1.044.963	1.036.125,43
3	Kedelai	9,960.00	-92.41	8,027	12,318	12,318	(37,339)	12,318	(4,294)	1.994	-92846
4	Kc. Tanah	4,842.00	1,633	4,401	4,043	4,043	1,634	4,043	2,263	3.989	2364
5	Kc. Hijau	1,347.00	264	1,265	1,096	1,096	227	1,096	106	1.521	618
6	Ubi Kayu	6,481,382.00	5,457,744	5,451,312	4,929,044	4,929,044	4,245,841	4,929,044	5,735,377	4.843.283	4.796.314
7	Ubi Jalar	23,603.00	3,957	22.78	17,545	17,545	(2,655)	17,545	(6,193)	22.755	1.077
8	Daging Sapi	12,609.00	6,177	12,991	13,475	13,475	11,794	13,475	11,794	21.213	19.677,28
9	Daging Ayam ras/buras	47,303.00	6,656	50,045	42,487	42,487	24,436	42,487	24,436	39.089,04	12.262,83
10	Telur (ayam, itik)	51,893.00	59,937	79,783	80,116	80,116	991	80,116	991	93.040,08	20.487,18
11	Gula Pasir	788,783.00	35,915	788,783	630,440	630,440	547,359	630,440	547,359	631.152,00	555.280,54
12	Bawang Merah	2,567.00	-314.6	2,821	36,282	36,282	(27,152)	36,282	(27,939)	3.263,00	-21498
13	Minyak Goreng	130187	1412	129,167	542,902	542,902	421,248	542,902	421,248	542.901,60	431.803,14
14	Cabe Merah	47,883.00	20,732	50,203	401,010	401,010	25,631	401,010	32,796	99.920,07	79.242,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pendidikan

2.1.3.1.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya AMH Provinsi Lampung tahun 2017-2021 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 berada pada angka 96,89 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun

2021 menjadi 97,28 sejalan dengan kenaikan Angka Melek Huruf Nasional yang pada tahun 2021 sebesar 96,04. Kenaikan Angka Melek Huruf ini dikarenakan semakin tingginya minat penduduk di Provinsi Lampung untuk memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis untuk ikut serta dalam program kejar paket A. Grafik Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II - 19 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Walaupun Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional, akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera. Keadaan ini sangat memperhatinkan, sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung sudah menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 pada pasal 31. Sedangkan Provinsi dengan angka melek huruf tertinggi di Sumatera adalah Sumatera Barat dengan nilai 99,26%.

Tabel II - 34 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2017-2021

Provinsi	Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
INDONESIA	95.5	95.66	95.9	96	96.04
LAMPUNG	96.89	96.93	97.11	97.24	97.28
BENGKULU	97.9	97.91	98.01	98.01	97.88
JAMBI	98.09	98.15	98.2	98.19	98.08
KEP. BANGKA BELITUNG	97.79	97.76	98.09	98.08	98.1
ACEH	97.94	98.03	98.21	98.25	98.24
SUMATERA SELATAN	98.54	98.66	98.76	98.75	98.78
KEP. RIAU	98.83	98.87	99	99	99.09
SUMATERA UTARA	98.89	99.07	99.15	99.16	99.19
RIAU	99.17	99.2	99.21	99.23	99.2
SUMATERA BARAT	98.85	99.07	99.17	99.17	99.26

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II - 20 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia Lampung dan Nasional

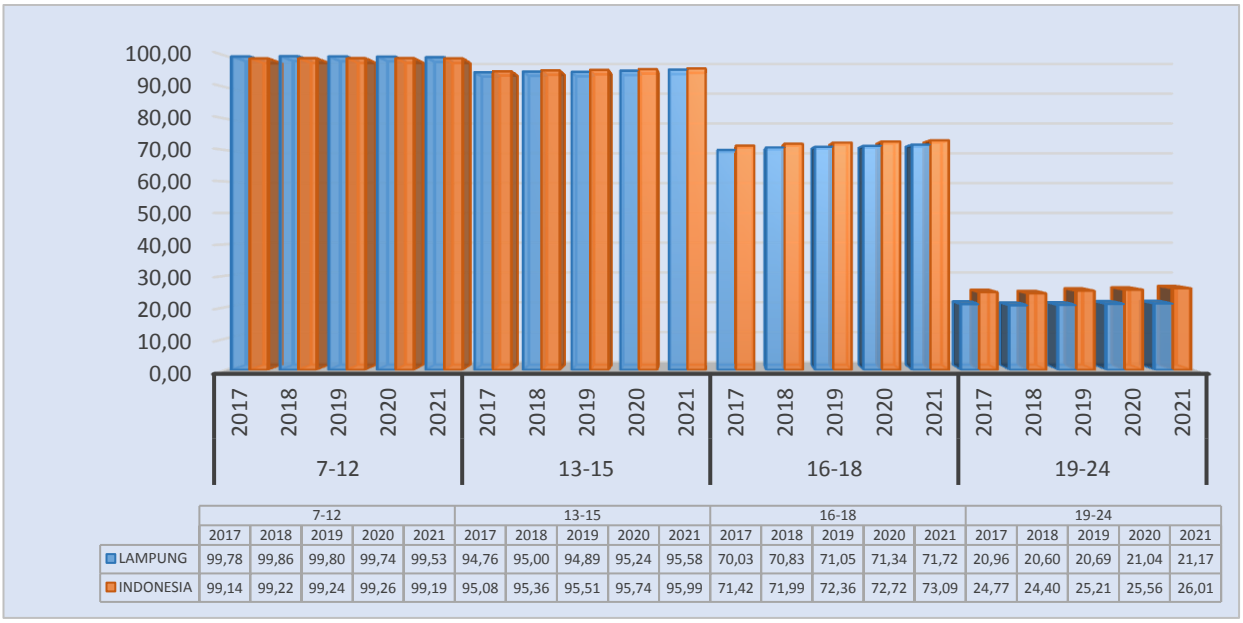

	7-12					13-15					16-18					19-24				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	99,78	99,86	99,80	99,74	99,53	94,76	95,00	94,89	95,24	95,58	70,03	70,83	71,05	71,34	71,72	20,96	20,60	20,69	21,04	21,17
INDONESIA	99,14	99,22	99,24	99,26	99,19	95,08	95,36	95,51	95,74	95,99	71,42	71,99	72,36	72,72	73,09	24,77	24,40	25,21	25,56	26,01

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Berdasarkan pengamatan pada grafik di atas, secara keseluruhan APS Provinsi Lampung terus meningkat pada setiap tahunnya hingga tahun 2020 terkecuali APS kelompok umur 07-12 yang selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 99,86 hingga tahun 2021 menjadi 99,53, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan APS pada kelompok usia 07-12 periode 2021 ditingkat rata-rata Nasional, yaitu pada tahun 2020 sebesar 99,26 persen menurun menjadi 99,19 persen ditahun 2021. Salah satu penyebab penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2021 pada kelompok umur 7-12 tahun karena pandemi Covid-19.

Walaupun APS tingkat 16-18 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarannya tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,72 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,09 persen). Jika diteliti lebih lanjut, rendahnya APS Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan menengah atas lebih disebabkan pada faktor motivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Jarak sekolah dan biaya pendukung pendidikan merupakan dua faktor utama yang diduga menjadi penyebab rendahnya minat penduduk.

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah pada hampir setiap tingkatan umur. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 35 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkatan Umur se-Sumatera Tahun 2021

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Tahun 2021			
	19-24	16-18	13-15	7-12
INDONESIA	26.01	73.09	95.99	99.19
SUMATERA UTARA	27.05	78.66	96.99	99.32
KEP. BANGKA BELITUNG	18.02	68.15	93.17	99.47
LAMPUNG	21.17	71.72	95.58	99.53
SUMATERA BARAT	36.41	84.07	96.63	99.61
KEP. RIAU	19.83	84.4	98.85	99.62
SUMATERA SELATAN	18.81	71.53	94.85	99.65
RIAU	28.79	77.81	95.66	99.65
JAMBI	24.14	72.5	96.39	99.66
ACEH	32.61	83.28	98.42	99.67
BENGKULU	30.46	79.75	97.49	99.76

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik II - 21 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan

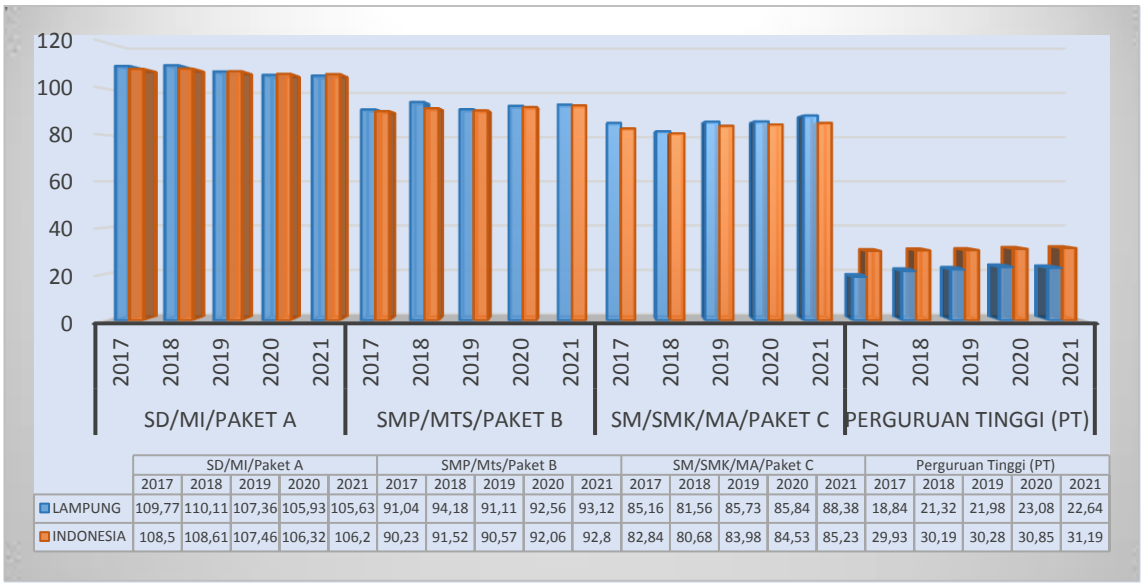

	SD/MI/Paket A					SMP/Mts/Paket B					SM/SMK/MA/Paket C					Perguruan Tinggi (PT)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	109,77	110,11	107,36	105,93	105,63	91,04	94,18	91,11	92,56	93,12	85,16	81,56	85,73	85,84	88,38	18,84	21,32	21,98	23,08	22,64
INDONESIA	108,5	108,61	107,46	106,32	106,2	90,23	91,52	90,57	92,06	92,8	82,84	80,68	83,98	84,53	85,23	29,93	30,19	30,28	30,85	31,19

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 APK jenjang SD dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan dari tahun 2020, sedangkan APK SMP dan SMA mengalami peningkatan dari tahun 2020. Penurunan APK SD dan PT tersebut di pengaruhi oleh faktor Covid-19 baik dari sektor kesehatan maupun sektor ekonomi yang mempengaruhi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SD maupun Perguruan Tinggi. Besaran APK SD maupun APK Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung juga berada di bawah angka Nasional, sedangkan APK SMP dan SMA Provinsi Lampung berada di atas angka Nasional.

Sejalan dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar Provinsi Lampung di jenjang SD dan Perguruan Tinggi, maka APK pada jenjang ini juga rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 terbawah, setelah Provinsi Riau pada jenjang SD dan setelah Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang Perguruan Tinggi, yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 36 Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera Tahun 2021

Provinsi	SD/ MI / Paket A	SMP / Mts / Paket B	SM/SMK/MA /Paket C	Perguruan Tinggi (PT)
RIAU	105.52	95.25	84.11	35.97
LAMPUNG	105.63	93.12	88.38	22.64
INDONESIA	106.2	92.8	85.23	31.19
KEP. RIAU	106.6	94.12	86.31	27.59
KEP. BANGKA BELITUNG	107.16	88.44	86.49	15.23
SUMATERA UTARA	107.85	91.87	96.75	31.1
ACEH	108.1	97.74	92.63	44.65
SUMATERA BARAT	108.66	93.24	90.38	44.25
BENGKULU	109.31	92.11	93.79	38.66
JAMBI	109.48	88.96	84.47	30.74
SUMATERA SELATAN	111.39	89.44	82.3	26.32

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Grafik II - 22 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Nasional

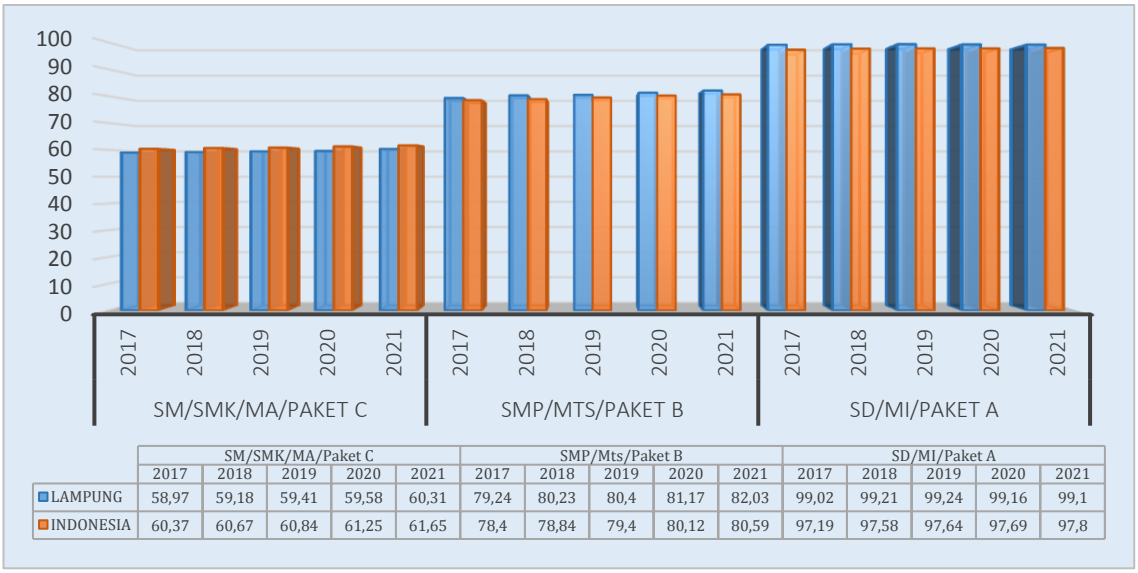

	SM/SMK/MA/Paket C					SMP/Mts/Paket B					SD/MI/Paket A				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	58,97	59,18	59,41	59,58	60,31	79,24	80,23	80,4	81,17	82,03	99,02	99,21	99,24	99,16	99,1
INDONESIA	60,37	60,67	60,84	61,25	61,65	78,4	78,84	79,4	80,12	80,59	97,19	97,58	97,64	97,69	97,8

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari grafik di atas, terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah di Provinsi Lampung yang bersekolah tepat waktu pada setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin tinggi serta fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung semakin memadai dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2021, APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di atas rata-rata Nasional, sedangkan APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA masih berada di bawah rata-rata Nasional. APM Provinsi Lampung Tahun 2021 pada jenjang SD mengalami penurunan sebesar 0,06 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini kemungkinan juga disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan orangtua menunda untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar.

Sejalan dengan rendahnya Angka Partisipasi Murni Provinsi Lampung di jenjang SMA, maka APK pada jenjang ini juga rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 terbawah,

setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 37 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera

Provinsi	SM/SMK/MA/Paket C	SMP/Mts/Paket B	SD/MI/Paket A
KEP. BANGKA BELITUNG	58.79	74.6	97.89
LAMPUNG	60.31	82.03	99.1
SUMATERA SELATAN	60.53	78.31	98
JAMBI	61.56	79.88	99.41
INDONESIA	61.65	80.59	97.8
RIAU	64	80.52	97.85
BENGKULU	66.08	80.25	98.61
SUMATERA UTARA	67.99	81.13	97.69
SUMATERA BARAT	68.99	78.75	98.82
ACEH	70.8	86.95	98.95
KEP. RIAU	73.36	86.6	99.26

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.5. Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APS digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

Grafik II - 23 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional

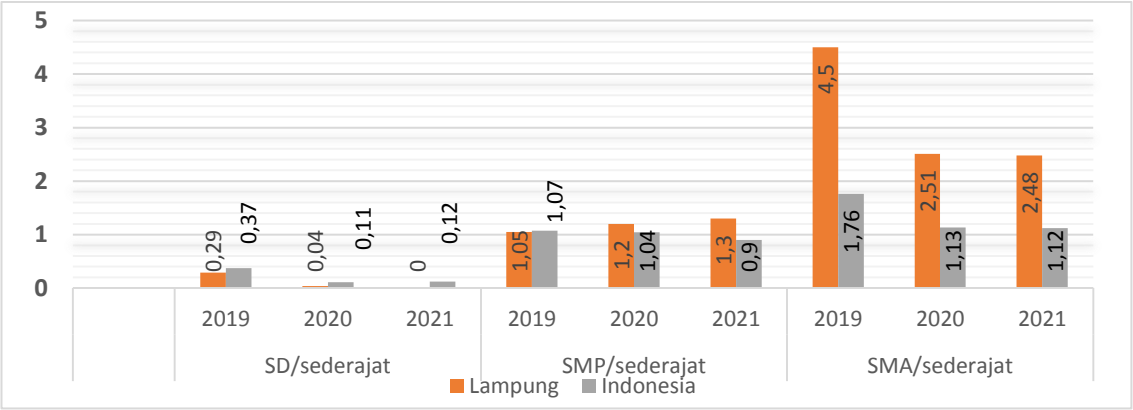

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2020-2022, diolah

Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada jenjang SD berada di bawah angka Nasional, akan tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum berada di atas angka Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mencapai 1,3 persen. Sedangkan Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga.

Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 38 Tabel Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2021

PROVINSI	SD/SEDERAJAT	SMP/SEDERAJAT	SMA/SEDERAJAT
Aceh	0,04	n/a	0,58
Sumatera Barat	0,11	0,60	0,76

PROVINSI	SD/SEDERAJAT	SMP/SEDERAJAT	SMA/SEDERAJAT
Riau	0,11	1,16	0,98
Indonesia	0,12	0,9	1,12
Sumatera Selatan	0,11	0,82	1,14
Sumatera Utara	0,08	0,74	1,19
Jambi	n/a	0,75	1,35
Bengkulu	n/a	0,65	1,76
Lampung	n/a	1,30	2,48
Kep. Bangka Belitung	n/a	1,28	3,45
Kep. Riau	n/a	n/a	n/a

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2022, diolah

2.1.3.1.6. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik II - 24 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021

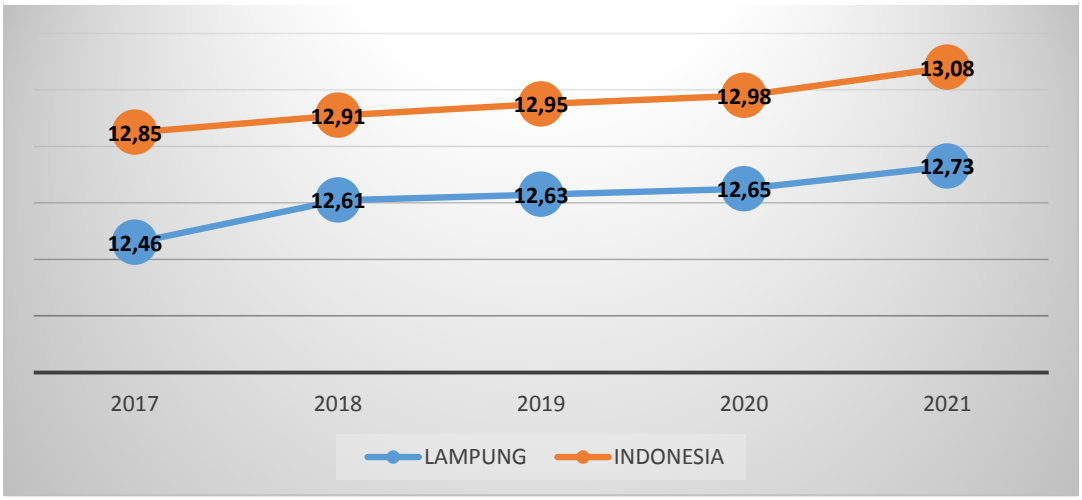

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2021, HLS Provinsi Lampung telah mencapai 12,73, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,73 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,08.

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.

Tabel II - 39 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2017-2021

Provinsi/Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KEP. BANGKA BELITUNG	11.83	11.87	11.94	12.05	12.17
SUMATERA SELATAN	12.35	12.36	12.39	12.45	12.54
LAMPUNG	12.46	12.61	12.63	12.65	12.73
KEPULAUAN RIAU	12.81	12.82	12.83	12.87	12.98
JAMBI	12.87	12.9	12.93	12.98	13.04
INDONESIA	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08
RIAU	13.03	13.11	13.14	13.2	13.28
BENGKULU	13.57	13.58	13.59	13.61	13.67
SUMATERA BARAT	13.94	13.95	14.01	14.02	14.09
ACEH	14.13	14.27	14.3	14.31	14.36

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2021, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,75 dan Kota Bandar Lampung 14,0 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten

Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik II - 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

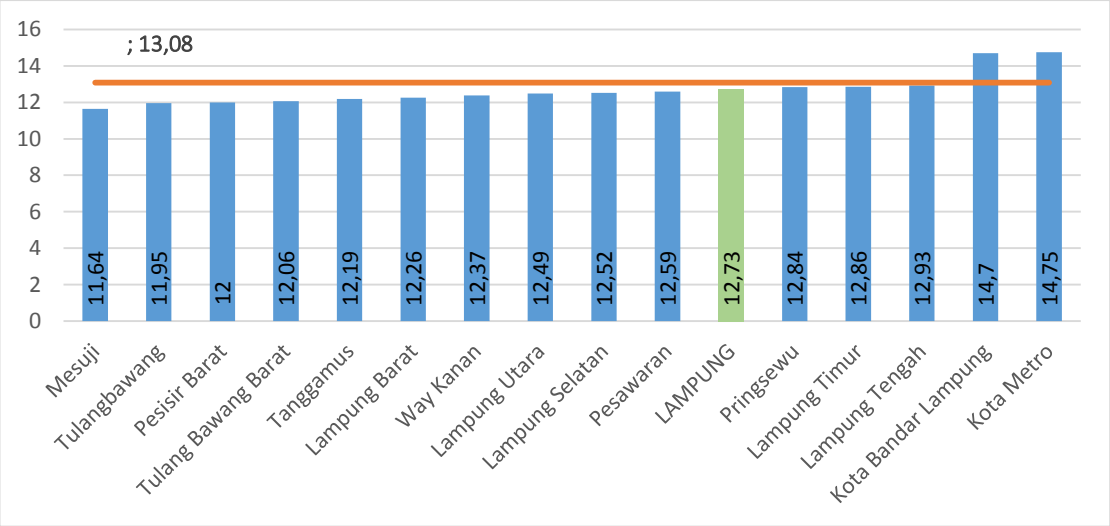

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022, diolah

2.1.3.1.7. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Grafik II - 26 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia,

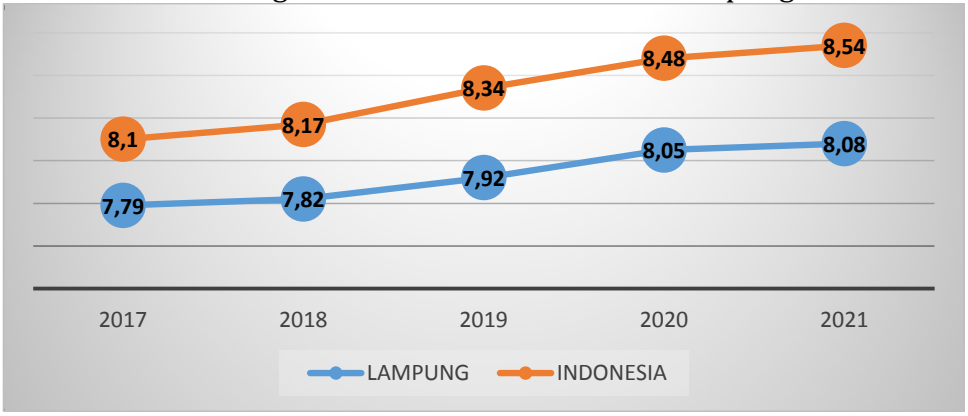

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS Provinsi Lampung sebesar 8,08 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,08 tahun. Namun angka tersebut masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,54.

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang masih rendah, maka posisi Lampung pun masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2021, Provinsi Lampung menempati peringkat terbawah se Sumatera. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Tabel II - 40 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021

Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	7.79	7.82	7.92	8.05	8.08
SUMATERA SELATAN	7.99	8	8.18	8.24	8.3
INDONESIA	8.1	8.17	8.34	8.48	8.54
JAMBI	8.15	8.23	8.45	8.55	8.6
BENGKULU	8.47	8.61	8.73	8.84	8.87
SUMATERA BARAT	8.72	8.76	8.92	8.99	9.07
RIAU	8.76	8.92	9.03	9.14	9.19
ACEH	8.98	9.09	9.18	9.33	9.37
SUMATERA UTARA	9.25	9.34	9.45	9.54	9.58

Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	9.79	9.81	9.99	10.12	10.18

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2021, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 10,97 dan Kota Bandar Lampung 10,95 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

Grafik II - 27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

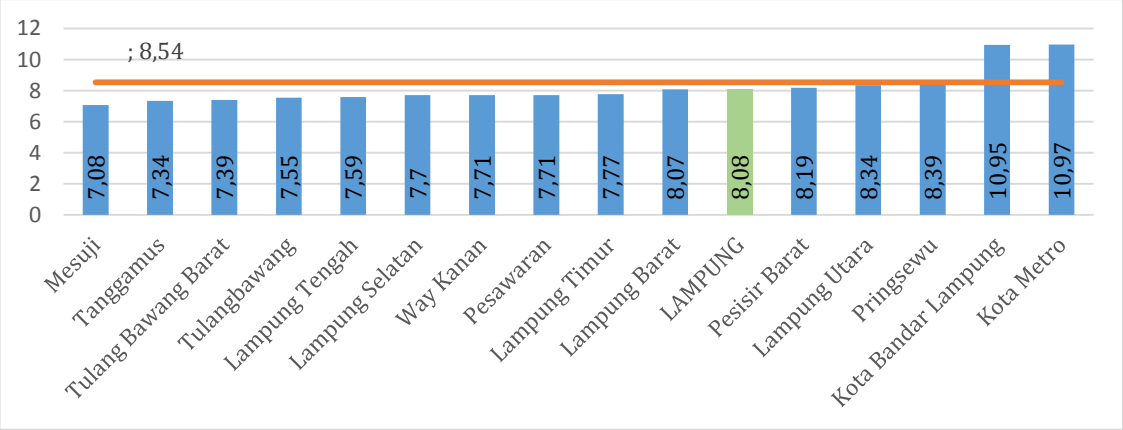

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.8. Sarana Dan Prasarana

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMA menurun, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2020/2021 keadaan

menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (Tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di Tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2923 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Grafik II - 28 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

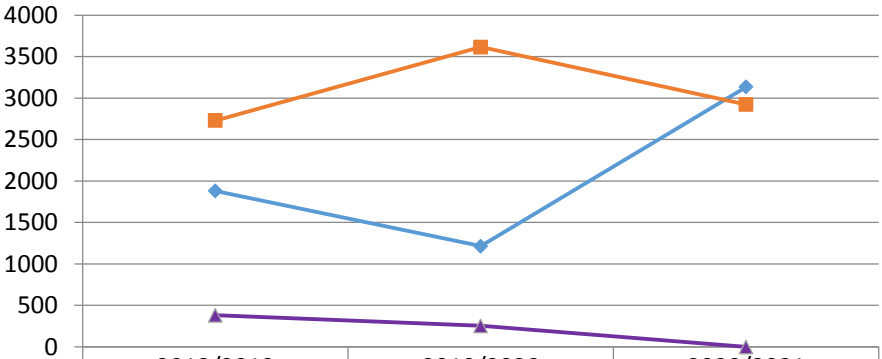

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Baik	1881	1214	3134
Rusak Ringan	2730	3615	2923
Rusak Berat	381	253	0

Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2022, diolah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA, dimana pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMK menurun, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534

sekolah (Tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di Tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2.598 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Grafik II - 29 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

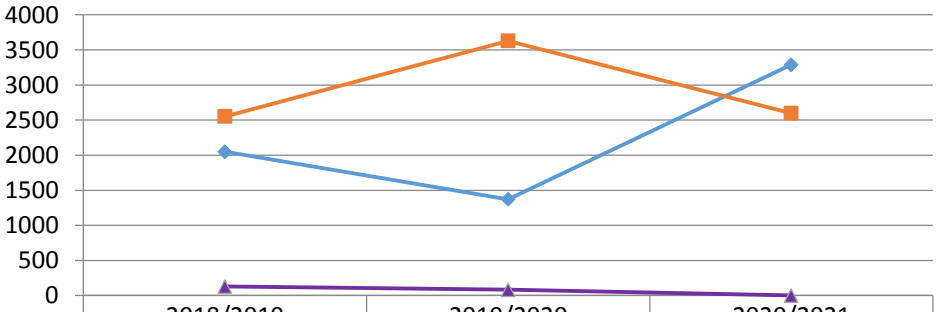

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Baik	2048	1372	3289
Rusak Ringan	2553	3629	2598
Rusak Berat	129	83	0

Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2022, diolah

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sejak Tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan Tahun Ajaran 2020/2021, jumlah sarana dan prasarana SLB baik, selalu bertambah, akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang yang rusak ringan juga meningkat. jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan mencapai angka 0 (nol).

Grafik II - 30 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

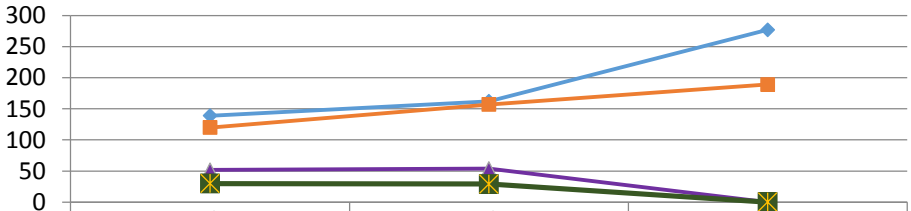

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Baik	139	162	277
Rusak Ringan	120	157	189
Rusak Sedang	52	54	0
Rusak Berat	30	29	0

Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2022, diolah

Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK

Berdasarkan data murid baik SMA maupun SMK dari tahun 2017-2021 secara signifikan mengalami peningkatan pada tahun 2020, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 walaupun tetap berada di atas besaran tahun 2019, yaitu 157.688 murid SMA dan 150.842 murid SMK. Jumlah guru SMA dan SMK juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan menurun kembali pada tahun 2021, yaitu menjadi 11.048 guru SMK dan 10.436 guru SMK. Walaupun terjadi peningkatan jumlah guru SMA dan SMK pada tahun 2020, tetapi tidak sebanding dengan penambahan jumlah siswa pada tahun 2020. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II - 31 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021

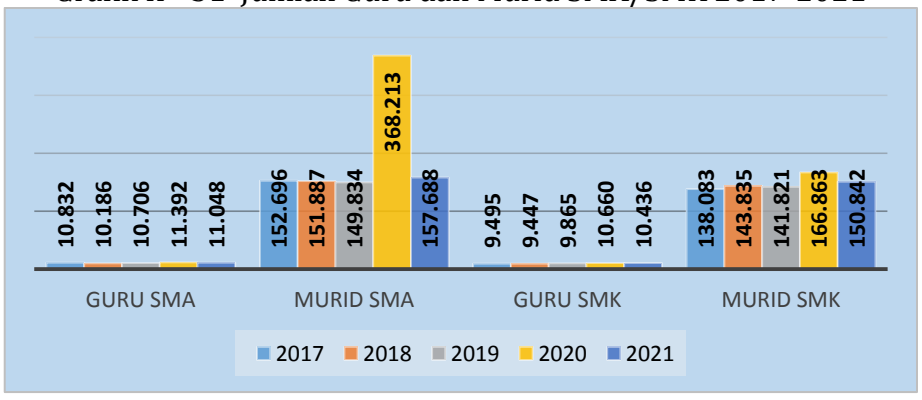

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2020 dan Dapodik, Desember 2021

Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA selalu mengalami naik turun per tiap tahunnya, pada tahun 2017 rasio nya 1:14 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019, lalu turun kembali pada tahun 2020 dan naik kembali lagi pada tahun 2021 menjadi 1:14. Hal yang sama juga dialami pada rasio perbandingan guru dengan murid pada jenjang SMK, dimana pada tahun 2017 sebesar 1:14, dan terjadi perbaikan pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi besarannya kembali naik seperti tahun 2019, yaitu 1:14. Penurunan rasio guru dan murid pada tahun 2020 disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah siswa yang cukup signifikan, sedangkan penambahan guru pada tahun tersebut sangat kecil.

Walaupun data ini menunjukan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan (rasio guru SMA dan murid 1:20 dan rasio guru SMK dengan murid 1:15) tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan guru yang PNS, maka rasio ini akan turun jauh, sehingga tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel II - 41 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2017 – 2021

Perbandingan	2017	2018	2019	2020	2021
Guru: Siswa SMA	1:14	1:15	1:14	1:32	1:14
Guru: Siswa SMK	1:15	1:15	1:14	1:16	1:14

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

2.1.3.2. Kesehatan

2.1.3.2.1. Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung pada tahun 2013 - 2021 berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2021 mengalami tren yang positif, dimana pada tahun 2021 Provinsi Lampung telah mencapai target yang ditetapkan (21,1 persen) yaitu 18,5 persen. Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena aksi konvergensi stunting penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2018.

Grafik II - 32 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2021

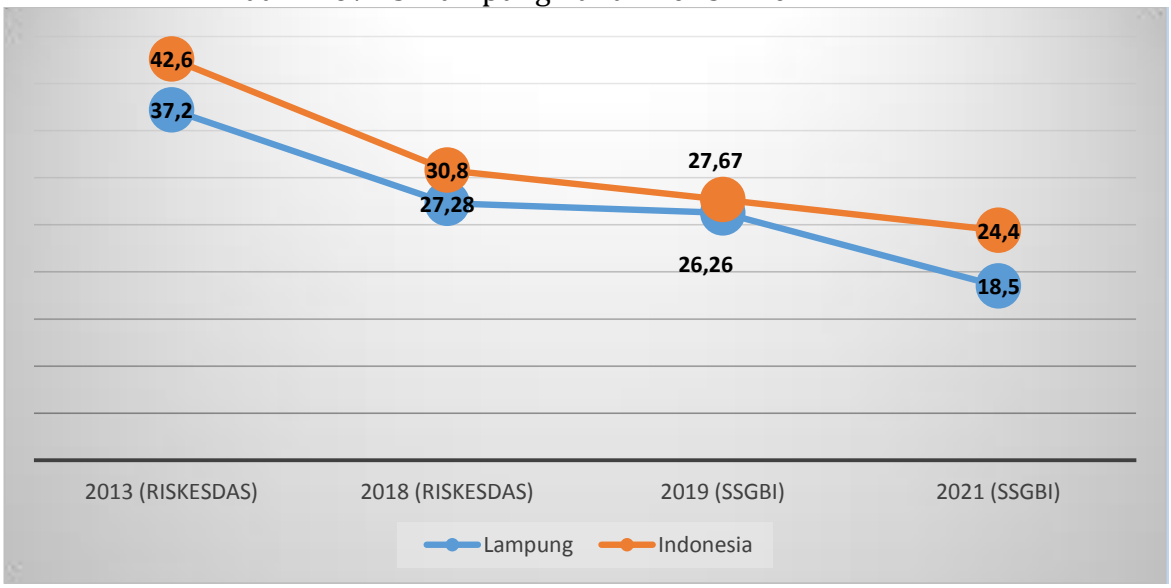

Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2022

Aksi konvergensi penurunan stunting dilakukan oleh semua pihak, baik seluruh OPD provinsi maupun kabupaten/kota hingga tingkat desa, instansi vertikal dan lintas sektor terkait lainnya. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menetapkan 3 Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur dan pada tahun 2019 ditetapkan Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten lokus. Pada tahun 2020 Pemerintah pusat menambahan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten

Lampung Utara dan Pesawaran sedangkan pada tahun 2021 ditambahkan 4 Kab/Kota yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung. Untuk Tahun 2022 ditetapkan sisanya, yaitu 5 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Metro, sehingga pada tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah menjadi kabupaten/kota lokus penurunan stunting.

Aksi konvergensi penurunan stunting memberikan efek positif dalam penurunan stunting seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik II - 33 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2021

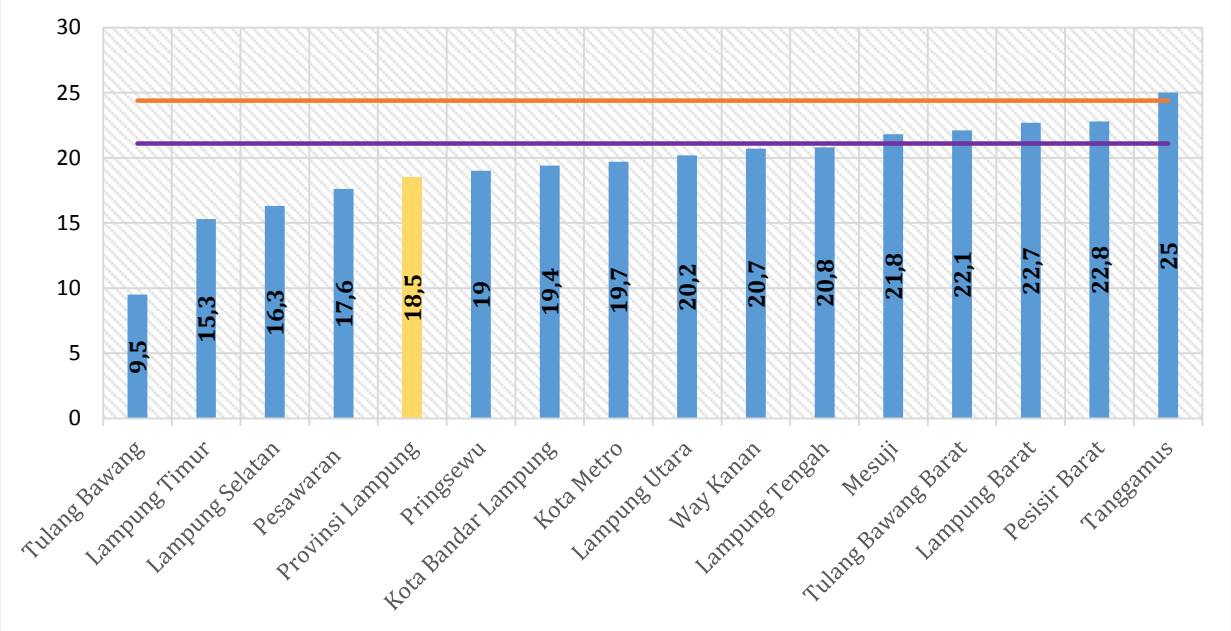

Sumber: SSGBI Tahun 2021

Dari grafik terlihat bahwa masih terdapat 5 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target prevalensi stunting tahun 2021, yaitu Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus. Dari ke-5 Kabupaten tersebut, hanya Kabupaten Tanggamus yang telah melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021, tetapi angka stuntingnya masih tinggi. Untuk itu diharapkan Kabupaten Tanggamus untuk lebih fokus

lagi dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting. Sedangkan 4 kabupaten lainnya akan melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting pada tahun 2022, diharapkan setelah melakukan aksi konvergensi tersebut, angka stunting di Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Pesisir Barat akan menurun.

2.1.3.2.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 – 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun).

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung sejak Tahun 2017-2021 selalu mengalami penurunan akan tetapi pada Tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus dari 484 kasus pada Tahun 2019 menjadi 537 kasus dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 484 kasus. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kematian bayi di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 tinggi, akan tetapi dengan seiringnya melandainya kasus Covid-19 pada tahun 2021 maka jumlah kasus kematian bayi juga ikut menurun. Penyebab kasus kematian bayi terbanyak disebabkan karena asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir) dan karena BBLR (berat badan lahir rendah) serta faktor lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terlihat trendnya kasus kematian bayi seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik II - 34 Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

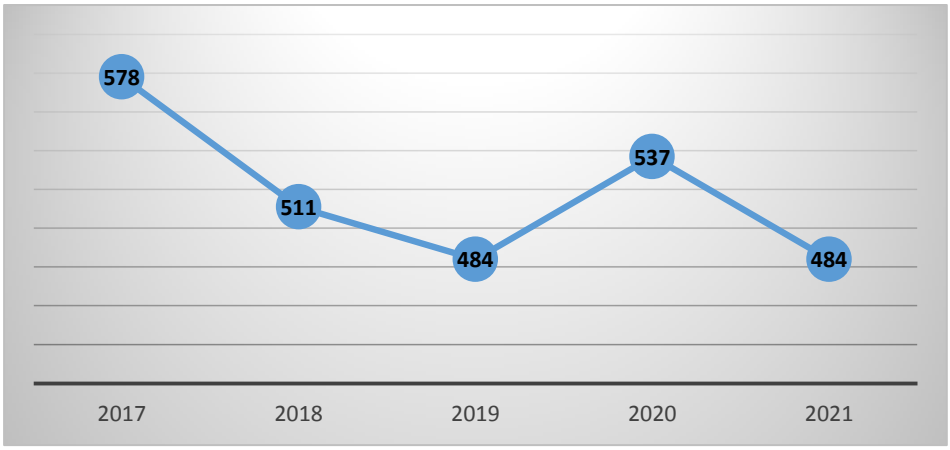

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan Kasus Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2021, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 100 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 77 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 58 kasus, sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Kota Metro dengan 10 kasus kematian Bayi.

Grafik II - 35 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

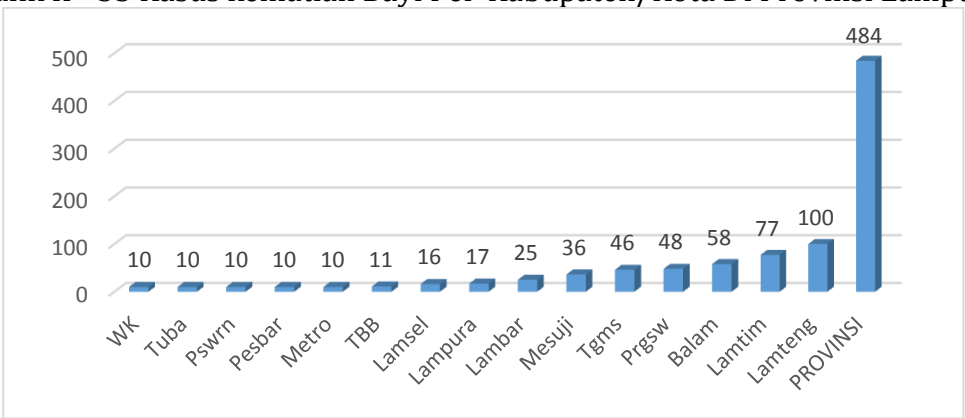

Sumber : Data Dinas Kesehatan 2022

2.1.3.2.3. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak umur 0-<5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Akaba menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Jumlah kasus kematian balita di Provinsi Lampung dari Tahun 2017-2019 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang cukup berarti hingga mencapai 537 kasus, kejadian ini diperparah dengan munculnya kasus Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah kasus kematian balita mengalami penurunan, walaupun masih belum mencapai angka pada tahun 2019, yaitu menjadi 507 kasus.

Grafik II - 36 Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2017 –2021

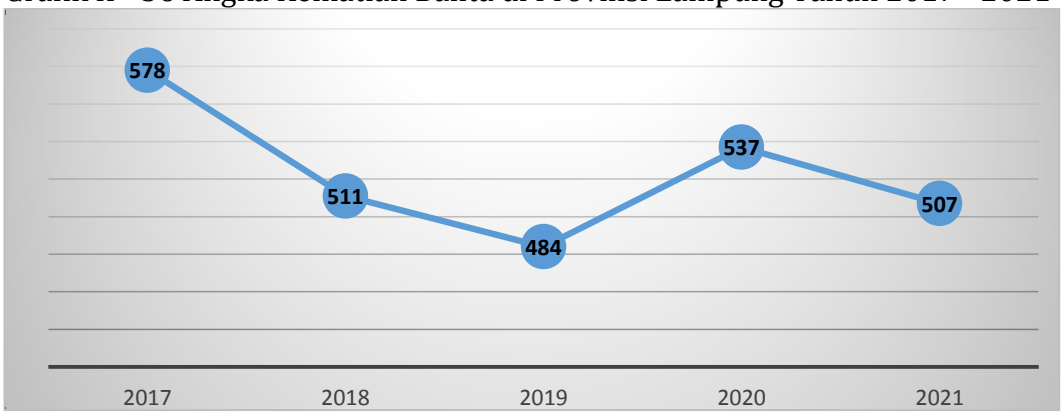

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2022

Kasus kematian balita berdasarkan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tahun 2021, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 112 kasus, Kabupaten Lampung Timur 78 kasus dan Kota Bandar Lampung sebanyak 60 kasus. Kasus terendah yaitu hanya 10 kasus kematian balita berada di Kabupaten Tulang Bawang, Pesawaran dan Pesisir Barat. Jumlah kasus kematian balita dan kasus kematian bayi tidak terlalu berbeda jauh dan kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kasus kematian bayi juga menjadi kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kematian balita. Artinya kematian balita didominasi pada umur kurang dari 1 tahun, sedangkan kematian balita umur 1-5 tahun sangat sedikit.

Grafik II - 37 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

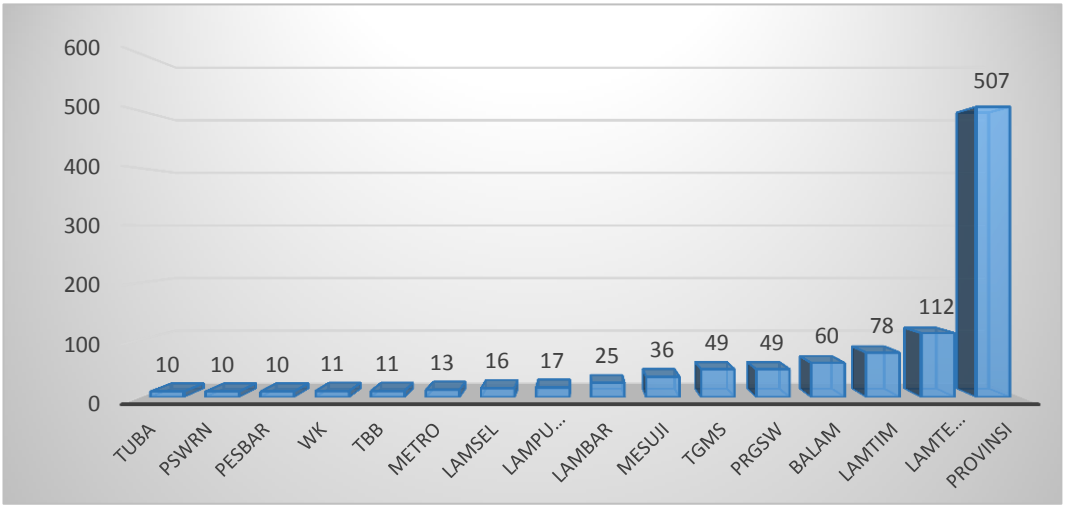

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Lampung, 2022

2.1.3.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah kasus kematian ibu terus meningkat, hingga mencapai 187 kasus pada tahun 2021. Peningkatan kasus ini juga disebabkan karena kasus Covid-19, dimana ibu hamil terpapar kasus Covid sehingga meningkatkan resiko kematian. Peningkatan jumlah kasus kematian ibu tiap tahunnya dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik II - 38 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

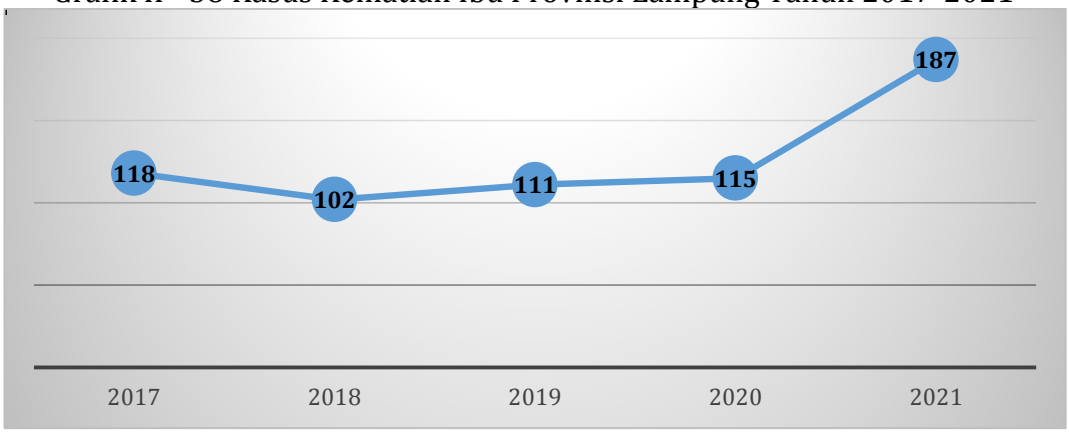

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2022

Sejalan dengan kasus kematian bayi dan balita, pada kasus kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2021, yang terbanyak juga terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (38 kasus), Lampung Timur (37 kasus) dan Kota Bandar Lampung (15 kasus). Permasalahan kesehatan di 3 kabupaten/kota ini harus segera dibenahi agar jumlah kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus kematian balita di kabupaten/kota ini dapat diturunkan. Distribusi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II - 39 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung

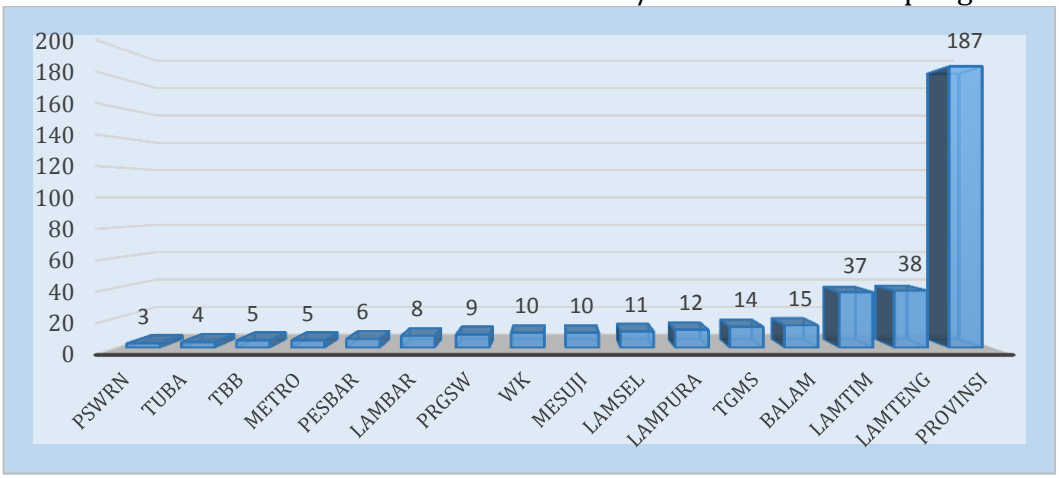

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2022

2.1.3.2.5. Angka Harapan Hidup

Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 69,95 pada tahun 2017, menjadi 70,73 pada tahun 2021, meski terus meningkat, AHH Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata AHH Nasional. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

Grafik II - 40 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia

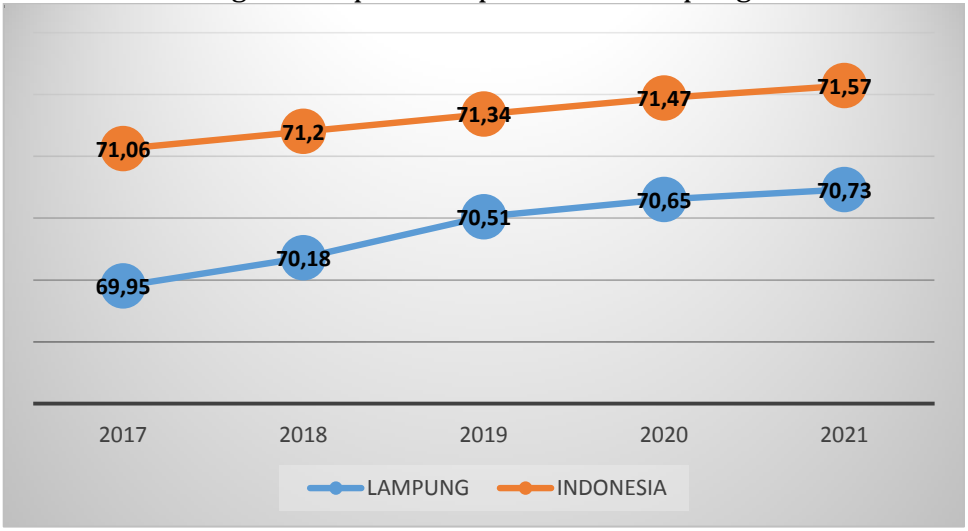

Sumber : BPS Indonesia, 2021, diolah

Tabel II - 42 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021

PROVINSI	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
SUMATERA UTARA	68.37	68.61	68.95	69.1	69.23
BENGKULU	68.59	68.84	69.21	69.35	69.42
SUMATERA BARAT	68.78	69.01	69.31	69.47	69.59
ACEH	69.52	69.64	69.87	69.93	69.96
SUMATERA SELATAN	69.18	69.41	69.65	69.88	69.98
KEPULAUAN RIAU	69.48	69.64	69.8	69.96	70.12
LAMPUNG	69.95	70.18	70.51	70.65	70.73
KEP. BANGKA BELITUNG	69.95	70.18	70.5	70.64	70.73
JAMBI	70.76	70.89	71.06	71.16	71.22
INDONESIA	71.06	71.2	71.34	71.47	71.57
RIAU	70.99	71.19	71.48	71.6	71.67

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-4 tertinggi di Sumatera, walaupun begitu besarannya masih berada di bawah angka Nasional. Hanya Provinsi Riau yang AHH nya berhasil melampaui angka Nasional.

Grafik II - 41 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

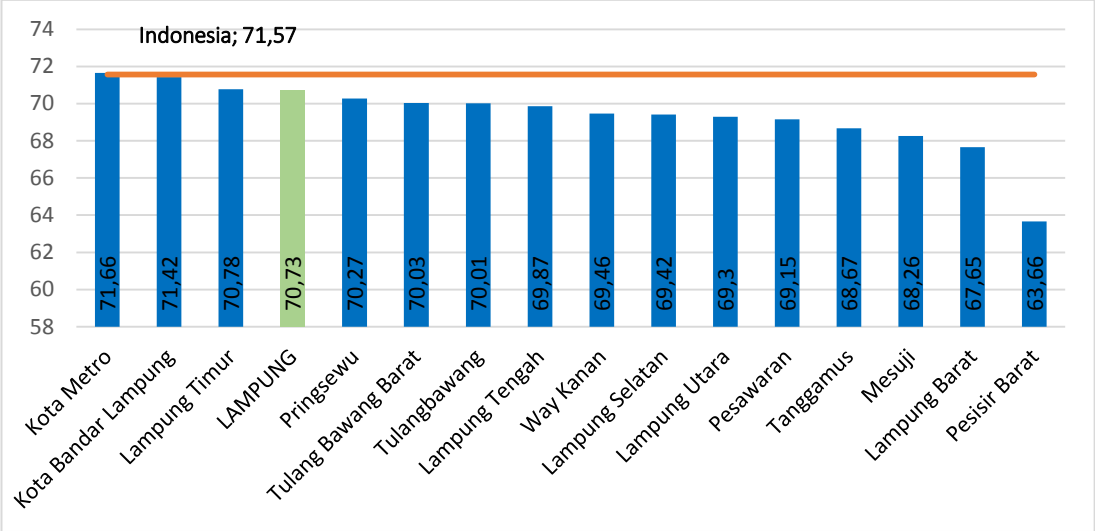

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Metro (71,66), Kota Bandar Lampung (71,42), dan Kabupaten Lampung Timur (70,78) berada di atas AHH Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 67,65 dan Pesisir Barat sebesar 63,66. Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Rooadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

2.1.3.2.6. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal.

Jumlah Puskesmas terus bertambah setiap tahunnya, dari 299 unit pada tahun 2017 meningkat menjadi 315 unit pada tahun 2021. Namun demikian, peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 Puskesmas menanggani 1 Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Pada tahun 2021, rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung mencapai 1,35 dan tingkat nasional mencapai 1,39. Walaupun rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung berada di bawah angka nasional, namun angka ini telah mencapai rasio ideal.

Tabel II - 43 Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Provinsi	Jumlah Puskesmas				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	299	302	310	312	315

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2022

Grafik II - 42 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung

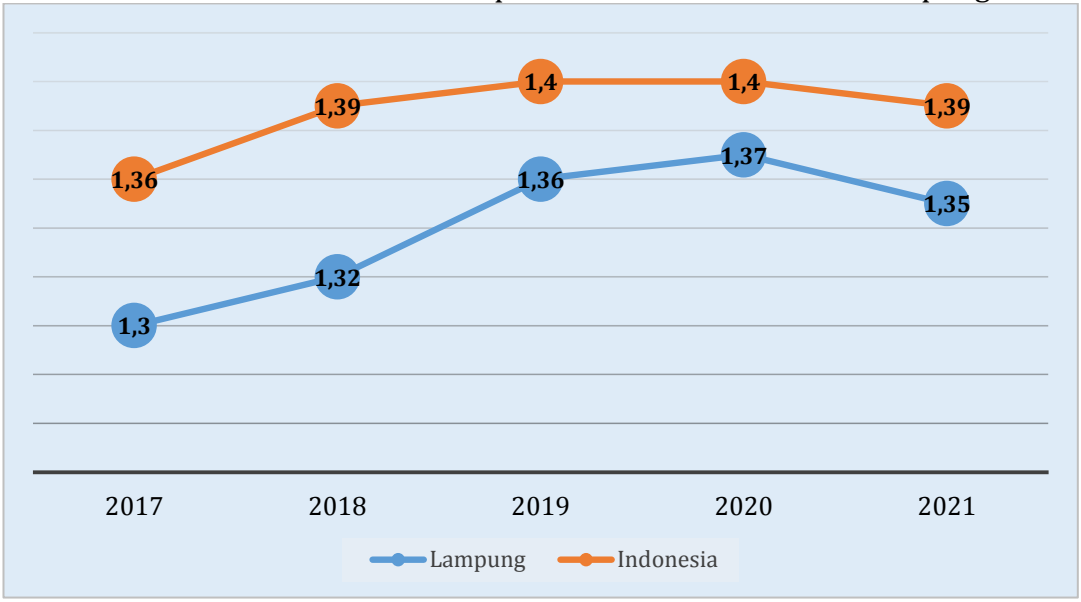

Sumber: Profil Kesehatan, 2022

2.1.3.2.7. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit)

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/I/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Peraturan tersebut juga mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu

bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Jumlah Rumah Sakit di Lampung dari tahun 2017 s.d 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD hanya 14 daerah, pada tahun 2021 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RSUD sendiri dan jumlahnya telah mencapai 17 RSUD di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk jumlah RS Swasta, pada tahun 2017 berjumlah 46 yang terdiri dari 31 RS Umum dan 15 RS Khusus, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 59 Rumah Sakit terdiri dari 39 RS Umum dan 20 RS Khusus. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah RS Khusus sebanyak 3 RS, dimana pada tahun 2020 berjumlah 23 berkurang menjadi 20 RS.

Tabel II - 44 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

No.	Parameter	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Rumah Sakit Pemerintah**	**19**	**20**	**20**	**20**	**22**
	a RSUD Provinsi	2	2	2	2	2
	b RSUD Kabupaten/Kota	14	15	15	15	17
	c RS. Khusus Provinsi	1	1	1	1	1
	d RS. Polri	1	1	1	1	1
	e RS. Tentara	1	1	1	1	1
2	**Rumah Sakit Swasta**	**46**	**57**	**58**	**59**	**59**
	a RS. Umum	31	36	36	36	39
	b RS. Khusus	15	21	22	23	20

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2022

Standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2020 sekitar 1 per 1.000 penduduk. Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 tercantum, bahwa jumlah tempat tidur di Provinsi Lampung sudah tercukupi, yaitu mencapai 1,0 walaupun masih

berada di bawah angka nasional (1,4). Sedangkan untuk tahun 2021, terdapat jumlah tempat tidur sebanyak 8.254, sehingga rasio tempat tidur dirumah sakit Provinsi Lampung sebesar 0,91.

2.1.3.2.8. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.

Rasio Dokter

Capaian rasio dokter di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 11 naik menjadi 15,99 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 18,3 pada tahun 2020.

Grafik II - 43 Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung

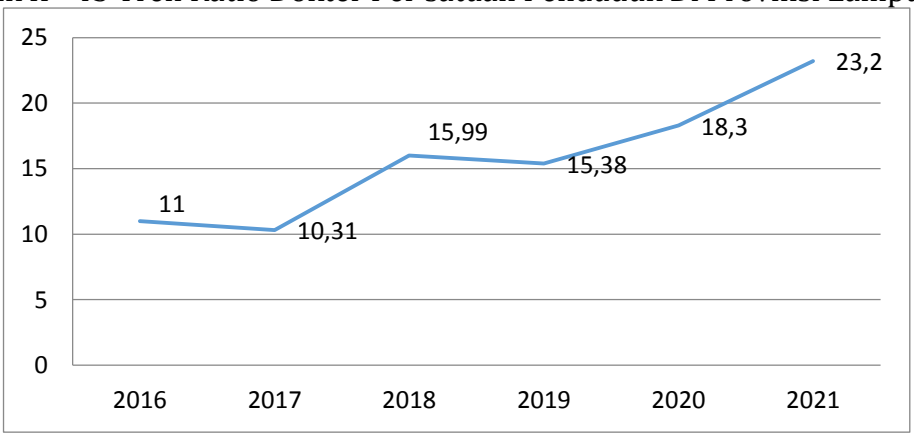

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Selain melihat rasio dokter umum dengan 100.000 penduduk perlu juga dilihat rasio dokter umum terhadap sarana puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tahun 2017 yaitu 1,65 artinya setiap puskesmas memiliki rata-rata satu hingga dua dokter.

Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2021 Rasio Dokter spesialis di Provinsi Lampung terhadap 100.000 penduduk, mencapai 13,6 dokter spesialis per 100.000 penduduk angka ini telah mencapai target Nasional yang diharapkan.

Grafik II - 44 Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015 - 2021

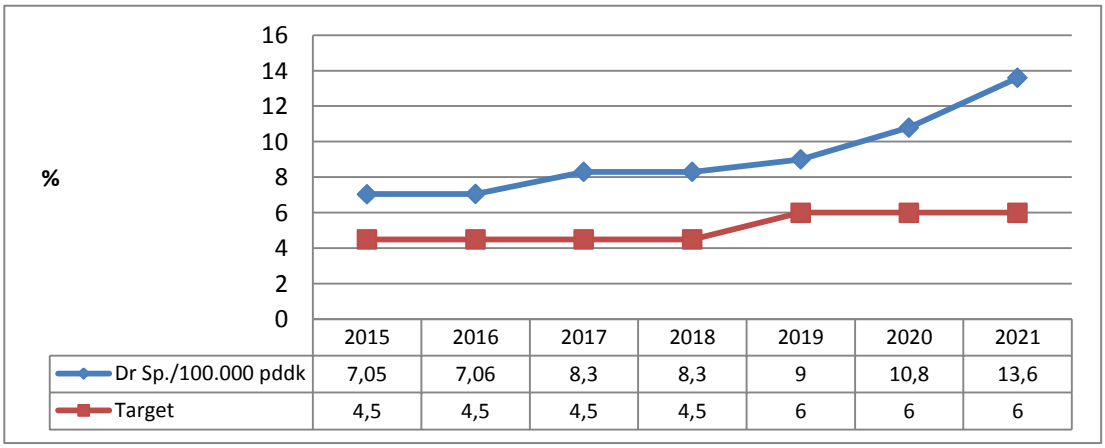

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dr Sp./100.000 pddk	7,05	7,06	8,3	8,3	9	10,8	13,6
Target	4,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2019 rasio bidan terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 103,6 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Rasio Bidan terhadap penduduk selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat, rasio pada tahun 2019 adalah 103,6% artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 103 bidan.

Grafik II - 45 Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015-2021

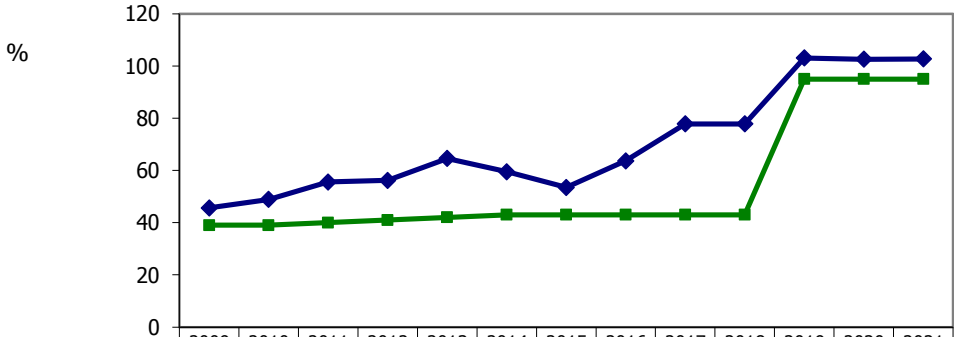

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bidan/100.000 pddk	45,64	48,89	55,60	56,16	64,6	59,51	53,5	63,69	77,83	77,83	103,1	102,6	102,7
Target	39	39	40	41	42	43	43	43	43	43	95	95	95

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

2.1.3.2.9. Pandemi Covid – 19 di Provinsi Lampung

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang setelah diidentifikasi bahwa pneumonia tersebut sebagai jenis baru corona virus (Novel Corona Virus) dan WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus dengan sebutan *Corona virus Disease* (COVID-19).

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Penyebaran Covid 19 di Provinsi Lampung pertama kali dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditemukan satu pasien positif Covid 19.

Situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung sampai tanggal 4 Januari 2022 sudah dapat dikendalikan namun belum sepenuhnya aman, meskipun kasus sudah sangat rendah. Masih ditemukan kasus baru sebanyak 68 kasus pada bulan Desember 2021 di 12 Kabupaten Kota dan 1 kasus kematian di 1 kabupaten. Akan tetapi bulan Januari sd tanggal 4 Januari 2022 belum ada kasus baru dan kasus kematian. Angka kesembuhan sudah mencapai lebih dari 91,54% dengan CFR/Case Fatality Rate kumulatif (kasus meninggal dunia) sebanyak 7,69% sedangkan proporsi kasus aktif hanya ada 0,77%.

Tabel II-1
Situasi Covid-19 Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	KAB KOTA	KASUS KONFIRMASI											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Bandar Lampung	1,176	730	417	392	354	464	2,214	2,107	586	98	27	16
2	Lampung Selatan	234	138	100	126	208	347	1,290	1,241	147	55	15	4
3	Lampung Timur	384	292	113	201	232	491	2,181	1,438	242	77	7	5
4	Lampung Utara	314	169	99	286	286	344	1,230	527	126	32	8	1
5	Metro	255	115	84	189	201	253	558	710	254	80	2	3
6	Tulang Bawang	36	48	47	38	50	23	161	212	26	26	2	0
7	Tulang Bawang Barat	108	10	22	30	43	41	329	466	72	32	2	3
8	Mesuji	37	11	7	23	27	22	98	244	40	33	0	1
9	Tanggamus	193	41	16	39	25	220	914	691	79	38	5	3
10	Pringsewu	131	90	82	145	178	437	1,197	1,338	234	32	7	1
11	Pesawaran	170	93	48	151	186	280	744	573	99	41	6	2
12	Pesisir Barat	37	60	77	28	10	83	338	172	19	23	2	0
13	Lampung Barat	191	129	81	92	148	154	1,122	628	236	65	2	0
14	Lampung Tengah	420	586	291	194	251	287	655	665	197	60	7	28
15	Way Kanan	32	14	-	22	23	29	64	575	33	20	5	1
	Lampung	3,718	2,526	1,484	1,956	2,222	3,475	13,095	11,587	2,390	712	97	68

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2022

Kasus Covid-19 terus mengalami penurunan di tiap bulannya dan penurunan terbesar terlihat pada bulan November dan Desember. Pada bulan Desember masih ditemukan kasus baru di 12 Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang merupakan kolaborasi dengan masyarakat. Vaksinasi telah dilakukan melalui 3 dosis, dimana capaian vaksinasi dosis I di seluruh Kabupaten/Kota per tanggal 3 Januari 2022 telah mencapai di atas 70% bahkan di tingkat Provinsi telah mencapai 83,24 persen. Sedangkan dosis II di Kabupaten/Kora rata-rata telah mencapai 41,24 – 63,96 persen dengan capaian Provinsi Lampung mencapai 51,65 persen. Untuk dosis ke III, capaiannya hanya 0,49%. Grafik cakupan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung dapat terlihat dari grafik di bawah ini.

Grafik II - 46 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Tanggal 3 Januari 2022 Berdasarkan Asal KTP

	Kab. Tulang Bawang Barat	Kab. Tulang Bawang	Kab. Mesuji	Kab. Pesawaran	Kab. Way Kanan	Kab. Lampung Utara	Kab. Pringsewu	Kab. Lampung Selatan	Kota Metro	Kab. Lampung Timur	Kab. Lampung Tengah	Kab. Lampung Barat	Kota Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Kab. Pesisir Barat	Provinsi Lampung
% divaksin_1	101,49	88,42	88,38	87,40	86,53	85,80	84,19	82,61	82,59	81,97	81,38	79,94	79,66	79,65	73,56	83,24
% divaksin_2	46,93	51,25	45,54	44,80	52,87	45,71	54,97	58,70	58,62	41,24	53,98	49,81	63,96	42,99	45,83	51,65
% divaksin_3	0,43	0,39	0,34	0,33	0,39	0,57	0,62	0,36	1,43	0,35	0,39	0,53	0,92	0,33	0,40	0,49

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2022

2.1.3.3. Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selama kurun waktu jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga, menurunnya kemiskinan dan mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung;
2. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hortikultura Berkelanjutan.

Tabel II - 45 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dinas KPTPH, 2021

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	
			TARGET	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Pangan**			
1.1	Capaian Indek Ketahanan Pangan	Indeks	77	78,25
1.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	cv ≤ 5	1,27
1.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	1	2,63
1.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB).	Persen	86	85,3
1.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji.	Persen	98,5	100
2	**Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)**			
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu)	Persen	100	99,48

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	
			TARGET	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nanas, Pisang dan Manggis)	Persen	100	134,37

Sumber: Dinas TPH & KP Provinsi Lampung 2022

Secara umum, pembangunan ketahanan pangan yang telah dilakukan mampu meningkatkan status ketahanan pangan di Provinsi Lampung, ditunjukkan dengan peningkatan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 74,98 di tahun 2018 menjadi 76,98 di tahun 2019 dan 77,33 di tahun 2020, dan 78,25 di tahun 2021. Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung adalah sebagai daerah sentra/penghasil padi (peringkat 6 Nasional dan peringkat 2 di Sumatera) juga sebagai sentra/penghasil jagung (peringkat 3 Nasional).

Tabel II - 46 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2021

No.	Komoditas Unggulan	Sasaran (ton)	Produksi (ton)*	Persentase capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Padi	2.705.290	2.474.828	91,48
2	Jagung	2.675.403	2.941.027	109,93
3	Ubi Kayu	6.146.948	5.965.031	97,04
Persentase capaian tanaman pangan				99,48

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

*Ket: * Angka Perkiraan Produksi*

Berdasarkan Angka Sementara KSA-BPS pada tahun 2021 *perkiraan* capaian produksi padi di Provinsi Lampung mengalami penurunan 6,62 % jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020. Perkiraan produksi padi tahun 2021 sebesar 2,47 ton GKG dan produksi padi 2020 sebesar 2,65 juta ton GKG atau mengalami penurunan 180 ribu ton dari tahun 2020. Perkiraan produktivitas rata-rata padi Lampung 2021 sebesar 50,44 ton/ha, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan produktivitas 2020 sebesar 4,86 ton/ha.

Turunnya perkiraan produksi padi 2021 disebabkan oleh berkurangnya luas tanam padi seluas ***54.456*** hektar atau penurunan 9,99 % dibandingkan dengan luas panen padi 2020. Salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya luas tanam adalah adanya perbaikan/normalisasi saluran induk pada Daerah Irigasi Way Rarem sejak awal tahun 2020, dan dengan adanya pandemi Covid 19 terjadi pengurangan anggaran sehingga penyelesaian perbaikan/normalisasi saluran hingga tahun 2022.

Grafik II - 47 Perbandingan Luas Panen Padi Lampung-Indonesia Tahun 2019-2021 (ha)

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Grafik II - 48 Produksi Padi Lampung – Indonesia Tahun 2019 – 2021 (ton)

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Perkiraan produksi jagung Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebesar 2,94 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 1,55 % dari

Produksi jagung tahun 2020 sebesar 2,89 juta ton. Peningkatan produksi ini sebagai akibat dari harga jagung yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2021 banyak petani yang melakukan budidaya jagung.

Grafik II - 49 Produksi Jagung Lampung Tahun 2019 – 2021 (ton)

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Tabel II - 47 Persentase Capaian Produksi Tanaman Hortikultura, 2021

No.	Komoditas Unggulan	Sasaran (ton)	Produksi (ton)*	Persentase capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Cabai Besar	39.885	33.329	83,56
2	Bawang Merah	2.251	1700	75,52
3	Nenas	664.899	807.996	121,52
4	Pisang	1.221.045	1.128.955	92,46
5	Manggis	4.178	12.483	298,78
Persentase capaian tanaman hortikultura				134,37

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

*Ket: * Angka Perkiraan Produksi*

Untuk kinerja bidang hortikultura, perkiraan produksi cabe besar 2021 menurun dari target yang harus dicapai. Capaian produksi 33.329 ton dari target 39.885 ton sehingga capaian kinerjanya 83,56%. Salah satu faktor penyebab turunnya produksi cabe merah antara lain pada saat panen, harga rendah/turun sehingga petani mengalami kerugian dan kesulitan modal untuk tanam musim berikutnya, yang menyebabkan petani beralih tanam ke

komoditas lain yang biaya tanamnya lebih ringan dan yang umur panennya lebih singkat.

Perkiraan produksi bawang merah pada tahun 2021 juga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, target 2.251 ton terealisasi 1.700 ton (75,52%). Sedangkan untuk komoditi nenas dan manggis sebagai komoditas ekspor mengalami peningkatan produksi pada tahun 2021.

Dalam menyelenggarakan fungsi produksi tanaman pangan dan hortikultura, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian;
2. Konversi lahan yang tak terkendali;
3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani;
4. Terjadi pola deagrarianisi dalam kebijakan pembangunan nasional. Misalnya, kontribusi sektor perrtanian terhadap PDRB tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian tetapi lebih banyak digunakan untuk sektor non pertanian;
5. Kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nufta yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehinga banyak potensi lokal yang hilang;
6. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik;
7. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik; dan
8. Belum ada keseragaman data tentang persediaan beras atau pangan sehingga terjadi perbedaan dan menimbulkan perdebatan antara Kementan, Kemendag dan Bulog.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura antara lain:

1. Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam mempermudah dan memperlancar petani dalam berusahatani padi

2. Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan peningkatan indeks pertanaman
3. Pembangunan/pengembangan jaringan irigasi pertanian, pembuatan embung, pompanisasi, dan sumur bor.
4. Optimalasisi Lahan Rawa
5. Bantuan benih tanaman pangan dan hortikultura
6. Pengamanan Produksi dengan menekan populasi serangan OPT
7. Peningkatan dan pengembangan budidaya padi semai kering
8. Dukungan alsintan pra tanam, panen dan pascapanen
9. Merubah pola pertanian tradisional menuju pertanian modern
10. Dukungan pengairan dari Way Rarem dan Way Sekampung

2.1.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung pada bulan Mei Tahun 2021 mencapai sekitar konsumsi 4.278,62 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,50 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,32 persen, namun demikian Pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar 10,04% per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.027,5 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 968,55 MW sehingga defisit sebesar 350 – 450 MW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik ini, provinsi Lampung masih dibantu oleh jaringan transinterkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera). Yang merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi, yang bertugas menginterkoneksikan energi Listrik dari pusat pembangkit menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

Gambar II-10
Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung

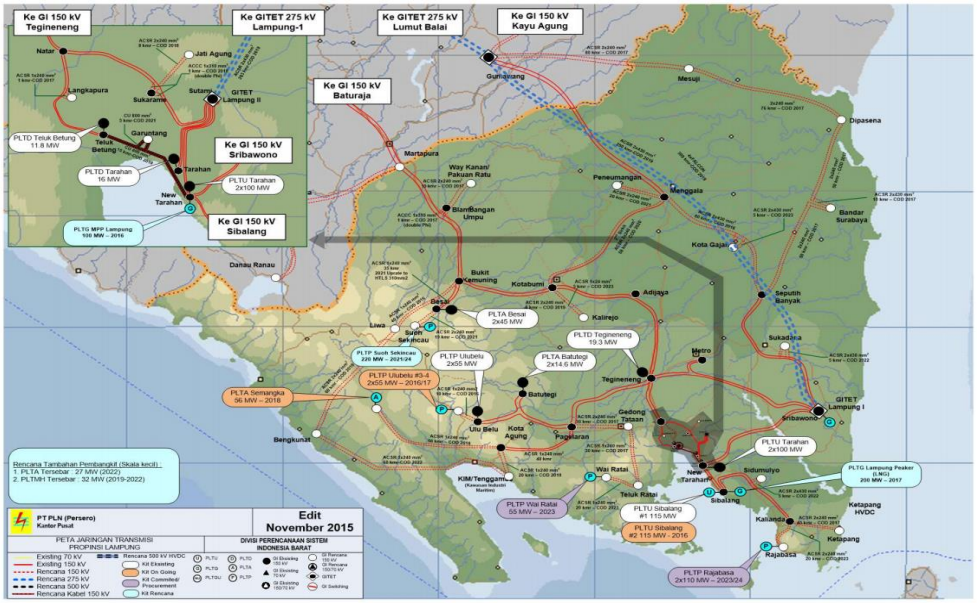

Sumber Peta : RUPTL Tahun 2018 -2027 PT.PLN

Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang . Alternatif solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum Energi Daerah berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25 September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis permodelan energi

dengan skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015 menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025 dan 12.106 pada tahun 2050 atau meningkat sekitar 5,2% pertahun dengan tiga sektor energi final tertinggi dari sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Pada tahun 2015 bauran EBT Provinsi Lampung masih sangat kecil yaitu kurang dari 11% dan setelah dilakukan skenario RUED ini maka bauran EBT di proyeksikan akan meningkat menjadi 36% pada Tahun 2025 dan pada tahun 2050 sebesar 47%. Sedangkan capaian bauran EBT Provinsi Lampung pada tahun 2020 baru sebesar 18,55%. Untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun PLTS Rooftop dan penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), selain itu juga pemanfaatan tenaga air, Biogas, Biomass.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi di bangunan-bangunan perkantoran, maka dikembangkan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan modul surya fotovoltaik yang dipasang di atap bangunan (rooftop). Total kapasitas terpasang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 sebesar 0,37 MW.

Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 – 2021

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan instalasi biogas tidak kurang dari 1.184 unit kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II - 48 Tabel Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020

Kapasitas Biogas Rumah Tangga			Jumlah Unit	m3/tahun
Lokasi		Ukuran Digester (m3)		Produksi Biogas (m3/hari)
1	Desa/Kec/Kab/Kota Metro	77	149	3.441,90
2	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Barat	29	17	147,9
3	Desa/Kec/Kab/Kota Pesawaran	36	27	291,6
4	Desa/Kec/Kab/Kota Tanggamus	33	27	267,3
5	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Selatan	86	134	3.457,20
6	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Timur	51	269	4.115,70
7	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Tengah	89	316	8.437,20
8	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Utara	3	11	9,9

Kapasitas Biogas Rumah Tangga			Jumlah Unit	m3/tahun
Lokasi		Ukuran Digester (m3)		Produksi Biogas (m3/hari)
9	Desa/Kec/Kab/Kota Way Kanan	3	11	9,9
10	Desa/Kec/Kab/Kota Pringsewu	19	76	433,2
11	Desa/Kec/Kab/Kota Pesisir Barat	12	50	180
12	Desa/Kec/Kab/Kota Mesuji	3	11	9,9
13	Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang	9	11	29,7
14	Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bwang Barat	29	75	652,5
	Total Konsumsi (m3/tahun)		**1184**	**7.841.623,50**

Sumber : Dinas ESDM 2021

Capaian rasio elektrifikasi rumah tangga tahun 2021 telah mencapai 97,07% dari target 96%. Dari data terlihat bahwa capaian kinerja telah mencapai 101,11%. Sedangkan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,47%, dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.625 desa dari total desa yang ada di Provinsi Lampung yang berjumlah 2.640 desa. Angka ini ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam menaikkan capaian persentase desa teraliri listrik tersebut.

Tabel II - 49 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	96,50	96,00	97,07	101,11	99,00	98,05
2.	Persentase Desa Teraliri Listrik	99, 39	99,43	99,47	100,04	100	99,43

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2022

Dalam rangka upaya pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil telah dilakukan:

- Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) dusun Kalayang Pulau Pahawang dilengkapi jaringan tegangan menengah sepanjang 9,74 kms dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA

- Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV
- Di Pulau Legundi telah di bangun PLTD kapasitas 2 x 50 KV, Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 18 Kilowatt peak (Kwp), untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 66 kepala keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran

2.1.3.5. Pariwisata

Di tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 3.000.000 orang per tahun dan realisasinya sebesar 97,97% atau sebanyak 2.939.152 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2020, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini di tahun 2021 mencapai 0,9% dengan realisasi sebesar 100,2%. Peningkatan ini dipastikan akibat mulai berkurangnya dampak dari pandemic covid-19.

Secara nasional, kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2021 meningkat sebesar 6,68 %. Peningkatan ini terjadi akibat mulai longgarnya pembatasan perjalanan yang ditetapkan negara-negara di dunia akibat semakin menurunnya pandemic Covid-19. Semakin menurunnya dampak pandemic ini tidak hanya berpengaruh pada wisatawan mancanegara saja, tapi juga pada pergerakan wisatawan nusantara.

Berdasarkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung realisasi di tahun 2021 tidak mencapai target yaitu selama 1,97 hari dari target 2,1 hari. Namun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 0,1 hari. Begitu juga dengan rata-rata pengeluaran wisatawan, terjadi penurunan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan realiasasi di tahun 2020 dengan selisih capaian sebesar Rp. 37.000,-. Untuk capaian di tahun 2021 hanya terseralisasi sebesar 97,6% dari target di tahun 2021.

Tabel II - 50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata

No.	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	2.913.053 orang	3.000.000 orang	2.939.152 orang	97,97	15.000.000 orang	26.099 orang
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,87 hari	2,1 hari	1,97 hari	93,80	2,88 hari	0,1 hari
3.	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp. 695.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. . 732.000,-	97,60	Rp. 900.000,-	Rp. 37.000,-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov Lampung, 2022

Berdasarkan data dari jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan menurun cukup drastis pada tahun 2020 karena pandemic covid 19. Selisih jumlah wisatawan mancanegara dalam periode 5 tahun yang berkunjung ke Provinsi Lampung adalah sebesar 243.615 orang wisatawan. Sedangkan untuk selisih jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2017 sampai 2021 adalah sebesar 8.458.432 orang.

Tabel II - 51 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2017 – 2021

No.	TAHUN	WISATAWAN		TOTAL
		NUSANTARA	MANCANEGARA	
1.	2017	11.395.827	245.372	11.641.199
2.	2018	11.933.207	274.742	14.207.949
3.	2019	10.445.855	298.063	10.743.918
4.	2020	2.911.406	1.647	2.913.053
5.	2021	2.937.395	1.757	2.939.152

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2022

Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung untuk menarik wisatawan yang berkunjung tetap dilakukan di tahun 2021 dengan membangun Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City. Kawasan ini dirancang dengan konsep *Integrated Tourism Complex,* dimana beberapa *specific-magnet* yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya

tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata.

Sejak tahun 2020 sampai 2021, banyak progress yang telah dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City, yaitu :

1. Kawasan Pariwisata Bakauheni Harbour City sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
2. Pembahasan final masterplan dan feasibility Study (FS) Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
3. Lahan yang belum dikuasai pada Vision Masterplan, saat ini sudah dikuasi oleh PT. GKI. PT. GKI sudah menyatakan bersedia masuk dalam konsorsium Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
4. Telah dilaksanakan *Grand Breaking* Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN dan Gubernur Lampung. *Grand Breaking* meliputi Pembangunan Masjid BSI, Revisi Menara Siger, Pembangunan UMKM Menara Center, Creatif Hub dan *Housing Development Entrepreneur Center* (HDEC)

2.1.3.6. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan kualitas. Selama kurun waktu 5 tahun, produksi perikanan Budidaya Provinsi Lampung cenderung berfluktuasi dengan trend peningkatan dari 158.977ton pada tahun 2017 menjadi 182.258ton** pada tahun 2021. Sedangkan pada sektor perikanan tangkap, mengalami perkembangan fluktuatif, dengan trend menurun. Pada tahun 2017 sektor perikanan tangkap menghasilkan 126.702ton kemudian terus naik menjadi 157.209 pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 141.777ton** pada tahun 2021. Secara rinci kinerja bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

Tabel II - 52 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2021

NO.	Jenis Perikanan	TAHUN (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021 **
1.	Perikanan Budidaya	158.977	160.582	181.129	153.894	182.258
2.	Perikanan Tangkap	126.702	141.537	157.209	144,638	141.777
	Total Produksi	285.679	302.119	338.338	298.532	324.036

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2021 (** Angka Sementara)*

2.1.3.7. Perdagangan

1) *Ekspor*

Perkembangan ekspor sampai dengan tahun 2017 baik dilihat dari nilainya menunjukkan peningkatan dan setelah fluktuasi cenderung turun sampai tahun 2019 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2021 dengan nilai Ekspor sebanyak US$ 4.837,1.

Grafik II - 50 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2016-2021

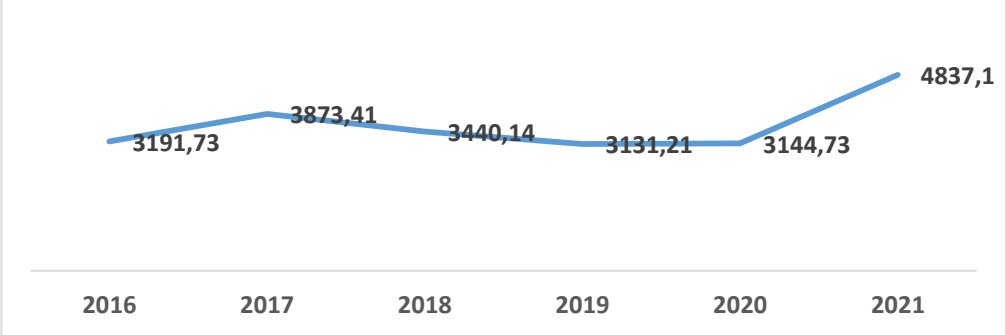

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2021

Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2020 – 2021) secara komulatif mengalami peningkatan sebesar US$ 1.692 juta. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi unggulan Minyak sawit/CPO naik sebesar 57,9 persen, diikuti dengankomoditas molasses naik 42,01 persen. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II - 53 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditas Unggulan Tahun 2020-2021 (US$ Juta)

NO	KOMODITI UNGGULAN	Tahun 2020 Nilai (dalam juta $)	Tahun 2021 Nilai (dalam juta $)	Persentase
1	MINYAK SAWIT/CPO	1.057	1.668,9	57,90
2	KOPI ROBUSTA	367,0	393,7	7,29
3	NANAS/TURUNAN	283,1	350,9	23,93
4	UDANG BEKU/OLAHAN	213,3	242,9	13,91
5	PULP	170,9	206,5	20,88
6	KARET SIR 20	108,5	121,0	11,54
7	LADA HITAM	56,2	44,2	(21,39)
8	MOLASSES	55,0	78,0	42,01
9	KELAPA KERING /SEGAR	5,8	4,6	(20,92)
10	BIJI KAKAO	0,1	0	(100,00)
LAINNYA		828,0	1.726	34,27
TOTAL EKSPOR		3.144,8	4.837,1	

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan negara tujuan, ekspor terbesar provinsi Lampung Tahun 2021 yaitu China dengan nilai ekspor US $ 925,27 juta atau 19,13 % dari total ekspor Lampung tahun 2021. Selanjutnya United State merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai ekspor US$ 832,46 atau 17,21 % dari total ekspor Lampung tahun 2021. Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II - 54 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2020-2021

NEGARA TUJUAN	Tahun 2020 Nilai (dalam juta $)	Tahun 2021 Nilai (dalam juta $)	Persentase
UNITED STATES	504.256.653,3	832.454.731,3	17,21
CHINA	327.631.379,9	925.265.460,0	19,13
PAKISTAN	253.031.187,9	359.915.792,3	7,44
INDIA	305.432.884,2	144.958.070,6	3,00
JAPAN	116.840.407,5	194.700.192,5	4,03
KOREA	77.369.558,3	139.545.564,8	2,88
NETHERLANDS	186.505.764,9	283.186.683,2	5,85
ITALY	249.771.830,5	414.018.940,2	8,56
PHILIPPINES	94.409.418,5	248.345.512,2	5,13
ASEAN LAINNYA	220.926.186,2	274.610.345,9	5,68
LAINNYA	808.586.601	1.020.089.122	21,09
TOTAL EKSPOR	3.144.761.872,4	4.837.090.415	

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

2) Impor

Jumlah impor di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 1.247,31. Perkembangan Impor dari tahun 2019 cenderung menurun sebagai akibat dari covid-19, pada tahun 2020 penurunan impor cukup besar yaitu sebesar

53 persen dari jumlah impor pasa tahun 2019. Sejalan dengan semakin berkurang dampak dari covid-19 jumlah impor menunjukkan peningkatan dimana data jumlah impor tahun 2021 sampai dengan bulan Juli sudah mencapai US$ 1247,31 dan diprediksi sampai akhir 2021 jumlah impor akan melebihi jumlah impor tahun 2020.

Grafik II - 51 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2016 – 2021 (juta US$)

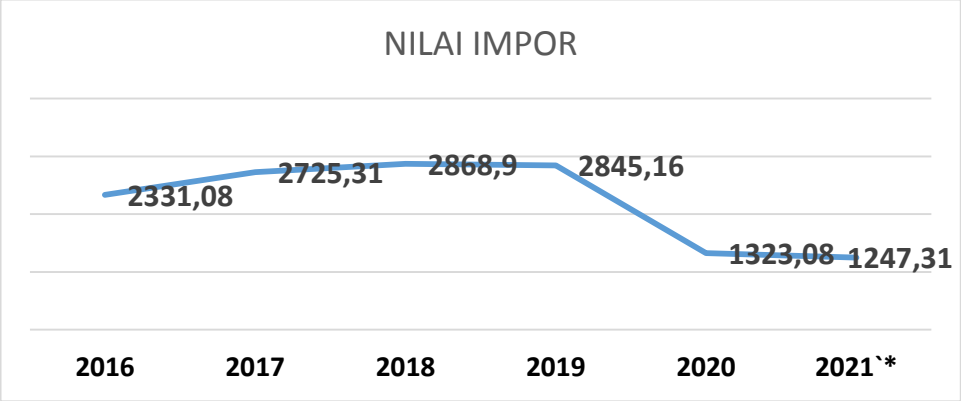

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022
Ket : * Data sampai bulan Juli

3) Neraca Perdagangan

Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuatif . Walaupun fluktuatif, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan Tahun 2020 mengalami surplus sebesar 1.821,65 dimana Ekspor 3.144,73 lebih besar dari impor 1.323,08.

Tabel II - 55 Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d 2020

TAHUN	EKSPOR (dalam juta $)	IMPOR (dalam juta $)	NERACA PERDAGANGAN
2016	3191,73	2331,08	860,65
2017	3873,41	2725,31	1148,1
2018	3440,14	2868,9	571,24
2019	3131,21	2845,16	286,05
2020	3144,73	1323,08	1821,65

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

4) Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Ekspor

Jumlah Sertifikasi mutu barang yang telah diterbitkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Dinas Perdagangan Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebanyak 1.476 Sertifikat yang terdiri dari; Kopi sebanyak 1.330 Sertifikat, Lada sebanyak 100 Sertifikat, Coklat sebanyak 2 Sertifikat, Kayu Manis sebanyak 6 Sertifikat, Gabah sebanyak 13 Sertifikat, Beras sebanyak 12 Sertifikat, Jagung sebanyak 3 Sertifikat, Karet sebanyak 4 Sertifikat dan Kalibrasi Ceratester sebanyak 6 Sertifikat.

2.1.3.8. Perindustrian

Kondisi industri pengolahan di Provinsi Lampung secara umum menunjukkan peningkatan produksi sepanjang tahun 2017-2019, namun pada tahun 2020 industri pengolahan turun sebesar 5,27 persen dan pada tahun 2021 membaik dan kembali naik hingga 4,57 persen. Walaupun secara total industri pengolahan pada tahun 2021 mengalami kenaikan, akan tetapi sebagian besar jenis industri pengolahan mengalami penurunan. Industri pengolahan yang mengalami kenaikan adalah industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kertas dan barang dari kertas; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; dan industri barang galian bukan logam.

Tabel II - 56 PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Harga Konstan Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan-2010				
		2017	2018	2019	2020	2021
Industri Pengolahan		39.633.960,82	43.218.138,58	46.778.086,94	44.314.281,84	46.337.644,28
1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	18.291,11	19.595,74	20.103,98	18.775,44	18.646,91
2.	Industri Makanan dan Minuman	28.480.886,40	32.933.093,87	37.264.343,16	35.555.787,30	37.509.497,83
3.	Industri Pengolahan Tembakau	22.268,08	23.838,96	24.455,91	21.029,71	18.422,79
4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	23.025,16	24.621,04	27.370,07	23.077,41	24.437,87

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan-2010				
		2017	2018	2019	2020	2021
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6.	Industri Kayu dan sejenisnya	533.857,32	457.641,23	481.915,87	355.261,17	268.938,30
7.	Industri Kertas dan Sejenisnya	336.494,76	349.518,97	367.267,28	343.450,94	362.529,93
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.701.425,47	2.205.670,88	1.941.788,61	1.822.532,39	1.922.236,90
9.	Industri Karet, Plastik dan Sejenisnya	3.646.108,19	4.001.324,93	3.921.257,09	3.741.751,07	3.636.307,73
10.	Industri Barang Galian Bukan Logam	2.122.461,33	1.388.755,02	876.505,31	791.362,79	795.950,76
11.	Industri Logam Dasar	148.281,94	155.184,56	165.338,35	172.703,99	170.309,31
12.	Industri Barang Logam dan Sejenisnya	294.507,83	317.183,81	317.351,84	277.998,84	276.617,15
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan	991.139,13	1.011.400,99	1.022.312,08	881.055,81	1.028.468,75
14.	Industri Alat Angkutan	127.874,66	131.642,57	132.465,42	120.638,05	130.138,73
15.	Industri Furnitur	132.285,77	140.946,82	156.581,49	132.872,37	119.202,32
16.	Industri Pengolahan Lainnya	55.053,69	57.719,17	59.030,48	55.984,55	55.939,01

Sumber: BPS Lampung, 2022

Industri yang berkontribusi paling besar di Provinsi Lampung adalah industri makanan dan minuman, dimana industri ini rata-rata berkontribusi selama 5 tahun terakhir sebesar 77,78 persen dimana pada tahun 2021 kontribusi industri makanan dan minuman sebesar 80,95 persen dari total industri pengolahan.

Dari total 16 sub sektor industri pengolahan, sub sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling besar pada tahun 2021 adalah industri makanan dan minuman (5,49), hal ini disebabkan oleh bahan baku industri makanan dan minuman yang berlimpah. Selain industri makanan dan minuman, industri lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan diatas 5 (lima) persen adalah industri tekstil dan pakaian jadi (5,90); industri kimia, farmasi dan obat tradisional (5,47); Industri kertas dan barang dari kertas (5,56); Industri Mesin dan Perlengkapan (16,73); serta Industri Alat Angkutan (7,88).

2.1.3.9. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mancapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relative terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015-2020 adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel II - 57 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2021

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemantapan Jalan Provinsi	75,92 %	74,00 %	1.276,5	75,386 %	78,00%	94,87%

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2022 diolah

Berdasarkan tabel II-53 tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 75,386 % dari target yang ditetapkan sebesar 74 %. Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran dalam penanganan jalan, sebagaimana terjadi refocusing anggaran pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran penanganan fisik jalan sebesar ± Rp. 520 Milyar mengalami refocusing menjadi ± Rp.364 Milyar.

Pada Tahun 2021 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.693,273 Km dengan target penanganan jalan sepanjang 169 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 440,25 Km dan Kondisi baik dan sedang sepanjang 1.253 Km. Dari Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat tersebut hanya tertangani sepanjang 54,22 Km terdiri atas 30,09 Km Pekerjaan Pembangunan Jalan dan 23,31 Km berupa pekerjaan rehabilitasi jalan. Sedangkan penanganan jalan untuk pemeliharaan rutin pada kondisi baik dan sedang hanya dapat mencover sepanjang 446,21 Km sehingga terdapat kondisi jalan sepanjang 1192,84 Km belum tertangani.

Tabel II - 58 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2021

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85
2019	74,41	25,58	-5,47
2020	75,92	24,08	1,51
2021	74	26	-1,92

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2020 diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan provinsi Lampung tahun 2015-2021 kondisi mantap terus mengalami peningkatan dari 67,02% tahun 2015 menjadi 74% pada tahun 2021. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya kondisi jalan tidak mantap dari 32,98% tahun 2015 menjadi

26% pada tahun 2021. Peningkatan kondisi ruas jalan mantap dan tidak mantap dapat dilihat pada grafik II-45.

Grafik II - 52 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015–2021

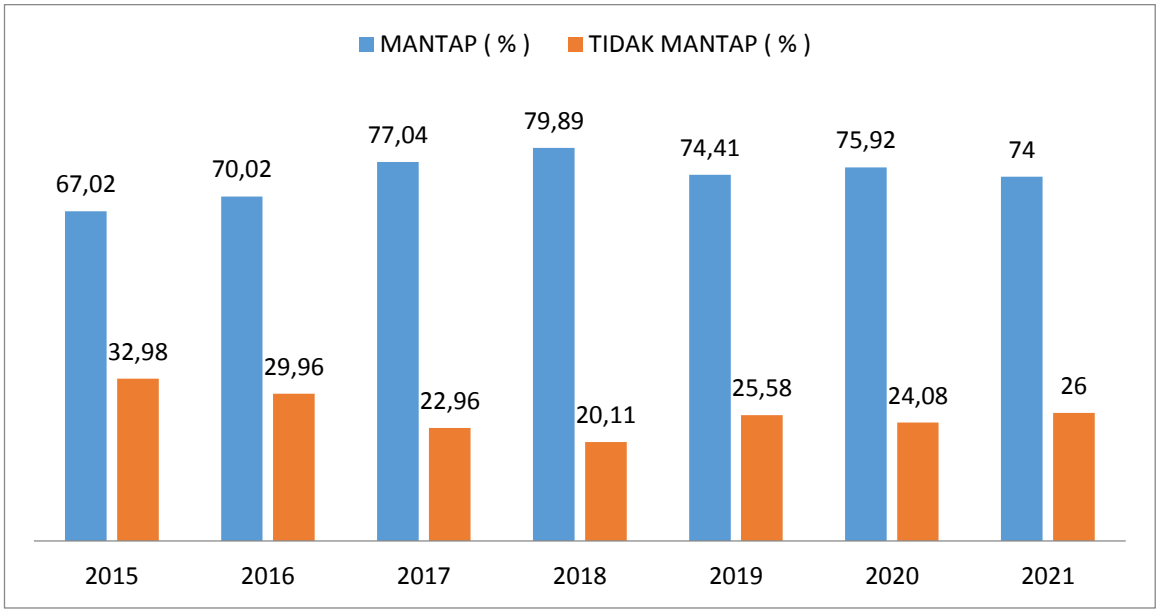

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2022 diolah

Jika dilihat dari kondisi jalan menurut tingkat kerusakan, maka dapat dijelaskan bahwa kondisi jalan provinsi dengan kondisi baik mengalami peningkatan dari 1.134 Km pada tahun 2015 menjadi 1.253.022 Km pada tahun 2021. Untuk kondisi rusak juga mengalami penurunan dari 558,44 tahun 2015 menjadi 440,25 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang konsisten dalam berkomitmen untuk menangani ruas jalan provinsi menjadi lebih baik. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penanganan infrastruktur Jalan Provinsi meliputi :

- Pembangunan jalan sepanjang ±22,92 km
- Rehabilitasi Jalan Sepanjang ± 52,5 Km
- Pembangunan Jembatan sebanyak 7 unit
- Rehabilitasi Jembatan sebanyak 8 unit
- Pemeliharaan Rutin Jalan melalui UPTD sepanjang 717,71 Km
- Pemeliharaan Jembatan melalui UPTD sepanjang 17.118 m

Secara rinci dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik II - 53 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2015-2021

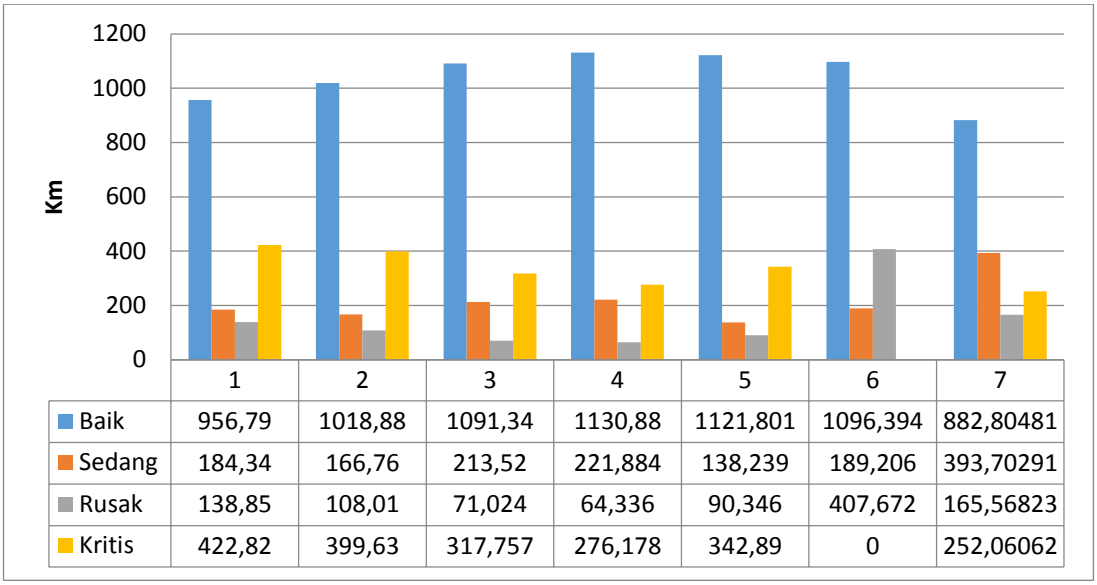

	1	2	3	4	5	6	7
Baik	956,79	1018,88	1091,34	1130,88	1121,801	1096,394	882,80481
Sedang	184,34	166,76	213,52	221,884	138,239	189,206	393,70291
Rusak	138,85	108,01	71,024	64,336	90,346	407,672	165,56823
Kritis	422,82	399,63	317,757	276,178	342,89	0	252,06062

Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2019 mencapai 91,01% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km. Perbandingan kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 59 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2020

Tahun	Panjang Ruas Nasional (km)	Kondisi			
		Mantap		Tidak Mantap	
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
		Km	Km	Km	Km
2020	1,292.25	401.83	791.97	54.38	48.43
% Mantap		92.07			
% Tidak Mantap				7.93	

Sumber: BPJN Lampung 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebesar 101,23. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (109,37) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (108,04). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2021, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik II - 54 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2021

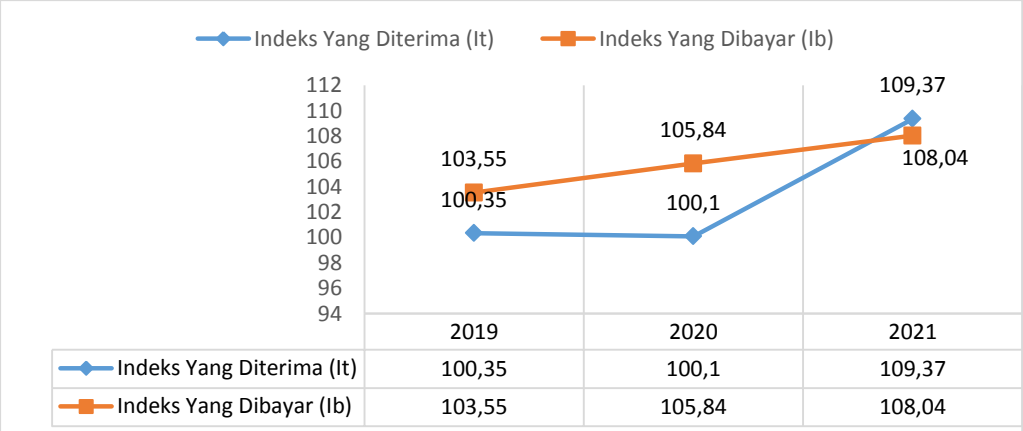

	2019	2020	2021
Indeks Yang Diterima (It)	100,35	100,1	109,37
Indeks Yang Dibayar (Ib)	103,55	105,84	108,04

Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2022

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 12,92% (yoy) dari 98,93 (Tahun 2020) menjadi 111,71 (Tahun 2021). Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terbesar adalah hortikultura yaitu sebesar -0,28% (yoy) sejalan

dengan konsumsi masyarakat yang masih rendah diiringi dengan distribusi hasil panen yang kurang optimal sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas, faktor cuaca serta harga produk hortikultura yang fluktuatif.

Grafik II - 55 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2021

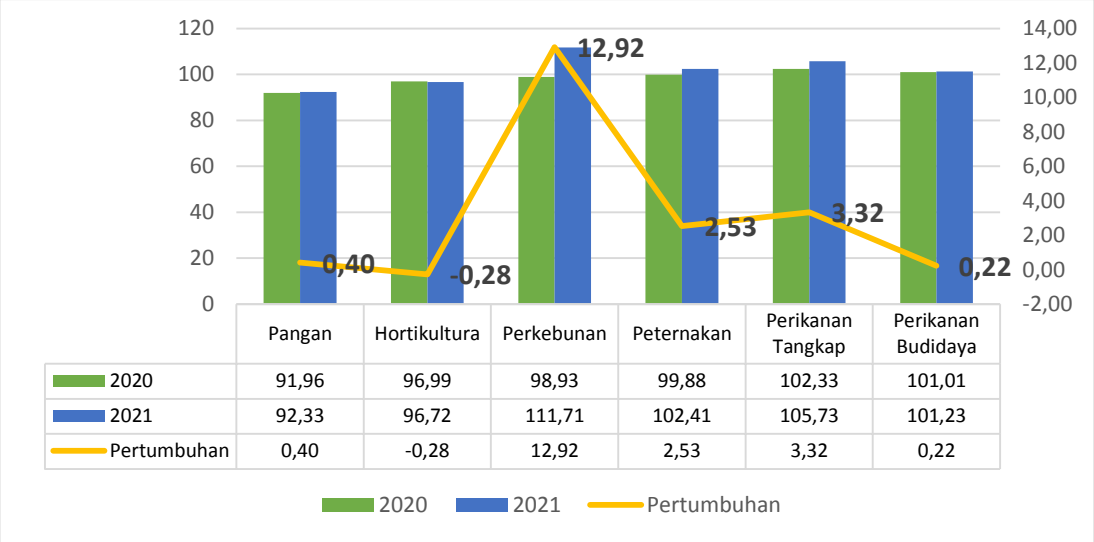

	Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
2020	91,96	96,99	98,93	99,88	102,33	101,01
2021	92,33	96,72	111,71	102,41	105,73	101,23
Pertumbuhan	0,40	-0,28	12,92	2,53	3,32	0,22

Selain sub sektor perkebunan, NTP sub sektor Perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peternakan juga memiliki nilai yang cukup baik sedangkan NTP dari Padi dan Palawija menyumbang NTP terkecil yaitu sebesar 92,33.

Grafik II - 56 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2021

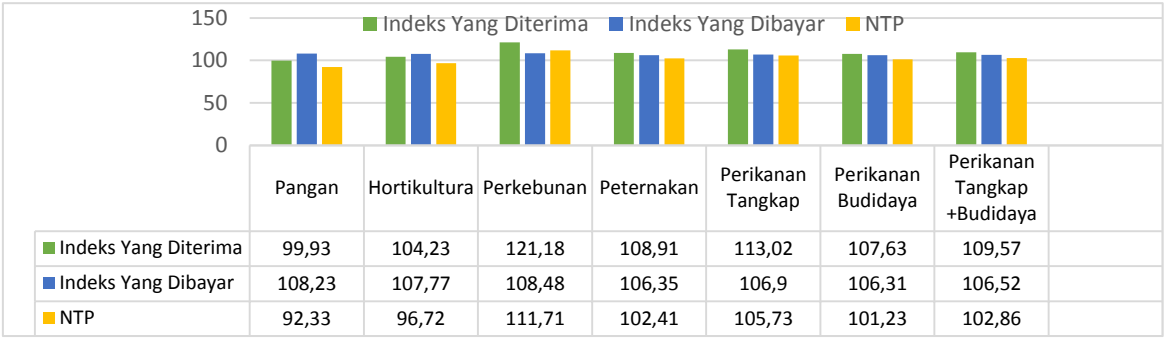

	Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap +Budidaya
Indeks Yang Diterima	99,93	104,23	121,18	108,91	113,02	107,63	109,57
Indeks Yang Dibayar	108,23	107,77	108,48	106,35	106,9	106,31	106,52
NTP	92,33	96,72	111,71	102,41	105,73	101,23	102,86

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah kedua. NTP tertinggi

dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 138,72 dan Provinsi Bengkulu (132,6) diikuti dengan Provinsi Jambi (126,89). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik II-57

Grafik II - 57 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021

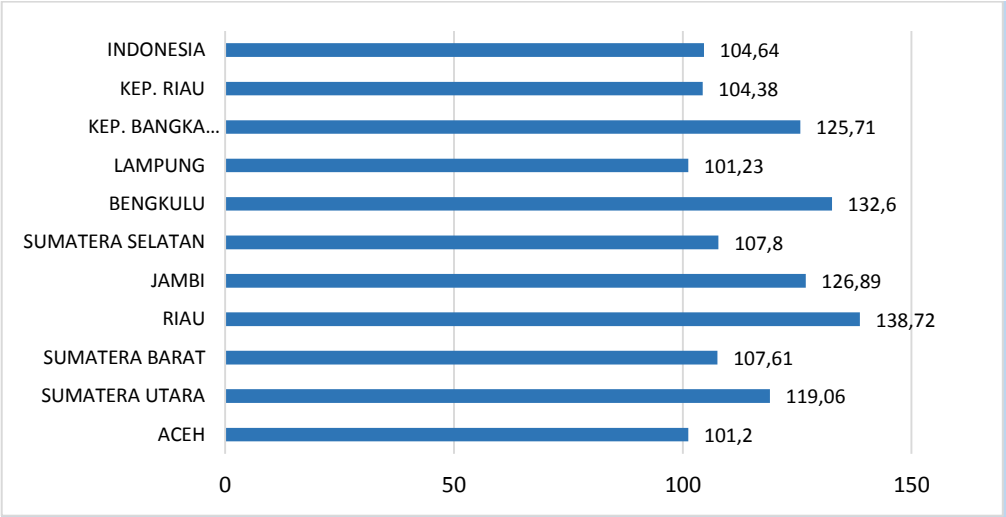

Sumber: BPS 2022

Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 107,35. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2021, dan mulai mengalami peningkatan dengan NTP senilai 101,23.

Grafik II - 58 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2021)

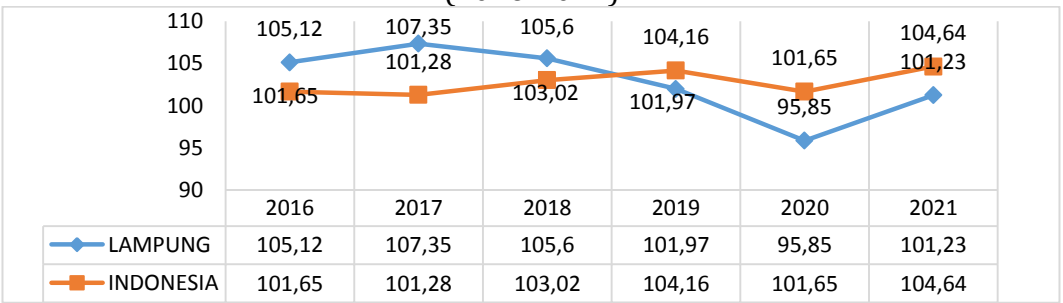

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	105,12	107,35	105,6	101,97	95,85	101,23
INDONESIA	101,65	101,28	103,02	104,16	101,65	104,64

Sumber: BPS 2022

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung

2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, terdapat 20 Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama. Terjadi penyederhanaan terhadap indikator sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Lampung dari 33 indikator menjadi hanya 20 indikator. Penyederhanaan indikator ini bertujuan untuk mempermudah penilaian terhadap pencapaian keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui target kinerja setiap tahunnya. Penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan/menyatukan beberapa indikator yang dinilai sempit dan menggantinya dengan indikator yang lebih luas. Sedangkan indikator sasaran yang digabungkan, dipindahkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2021 di evaluasi terhadap realisasi dan kinerja yang dilakukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II - 60 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			OPD PENGAMPU
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69	73,1	73,3	72,44	98,83	Biro Kesra / RSJ
2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	72	72,79	73	72,79	99,71	Kesbangpol
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	54,3	54,8	55,38	101,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B (60-70)	CC (58,38)	97,3	Biro Perekonomian/Biro OTDA/Biro Umum/Badan Penghubung/Biro organisasi/ biro adbang/Inspektorat/ Bappeda/Disdukcapil/BKD/BPSDM/ Dinas

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			OPD PENGAMPU
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	
								Perpustakaan dan Arsip /Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Indeks	B	70,65	70,8	70,73	99,90	Dinas Kesehatan/RSJ/RSUAM, Dinas PPPA
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	72,1	12,65	12,66	12,73	101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12,64	8,05	8,10	8,08	99,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	7,8	4,67	4-4,5	4,69	95,78	Dinas Tenaga Kerja
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	65,07	67,66	-	-	Dinas PPPA, Dinsos,Kesehatan, Dinas Pendidikan
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Persen	64,24	69,06	69,10	67,96	98,35	Dinas PPPA
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	-	70,69	74	75,386	101,87	Dinas BMBK/Dinas Perhubungan
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	-	90.21	91,20	91,22	100,02	Dinas PKPCK
13	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	94	96,5	96	99,94	104,1	Dinas ESDM
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-	-1,67	2,5-3,5	2,79	111,6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Dinas KPTPH/Dinas Perikanan/Dinas Perternakan & Kesehatan Hewan/Dinas Kehutanan /Dinas Perkebunan.
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	106,98	94,73	101 - 102	101,23	100,23	Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan,
16	Laju Inflasi	Persen	3,0 - 3,5	2	3±1	2,19	127	Dinas KPTPH, Dinas Perdagangan .
17	Angka Kemiskinan	Persen	11,1	12,76	12,76-12,4	11,67	108,54	Dinas KPTPH, Dinas Sosial, Dinas PMDT.
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,63	66,95	68,23	68,56	100,48	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, DKP.
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	-	6,86	6,74	6,74	100	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, sektor lahan (dinas KPTPH), sektor energi(ESDM DINAS PERHUBUNGAN , DINAS PERINDUSTRIAN),

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			OPD PENGAMPU
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	
								sektor limbah (PKPCK).
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	144,7	146,78	142,9	145,42	98,24	BPBD, Dinkes, Dinsos, BMBK,PSDA,PKPCK.

Pencapaian kinerja Indikator kinerja Utama pada tahun 2021, rata-rata telah mencapai di atas 91% denga kriteria sangat tinggi. Walaupun begitu, masih terdapat 8 indikator yang belum mencapai target yang diinginkan, yaitu: Indeks Kerukunan Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, Nilai Reformasi Birokrasi, Angka harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Resiko Bencana (IRB)

2.2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah**.**

Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2021 di evaluasi terhadap realisasi dan kinerja yang dilakukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II - 61 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2021

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Nilai Reformasi	Indeks	B	CC*	97,3	Sangat	Biro

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Birokrasi					Tinggi	Organisasi
2	Nilai SAKIP (TPB)	Predikat	B	B*	100	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/nilai	82	82	100,00	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
4	Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Nilai SKM untuk Fasilitasi Pelayanan Penataan produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan di Sekretariat Daerah	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B	persen	68	68	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	persen	97,33	75,11	77,17	Tinggi	Biro Kesejahteraan Rakyat
10	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan	Persen	88,5	88,5	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	90	99,23	110,26	Sangat Tinggi	Biro Umum
12	Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan	Persen	90	98,27	109,19	Sangat Tinggi	Biro Umum
13	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen	90	98,3	109,22	Sangat Tinggi	Biro Umum

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	yang Berlaku						
14	Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Nilai (skor)	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
15	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik	persen	75,00	91,6	122,13	Sangat Tinggi	Biro Adbang
16	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	%	91	102,2	112,31	Sangat Tinggi	Biro PBJ
17	Persentase pelayanan keprotokolan	%	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Biro Administrasi Pimpinan
18	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD	persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
19	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung	persen	75	78	104,00	Sangat Tinggi	Badan Penghubung
20	Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian	persen	85	85	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
1	**Pendidikan**						
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat	Angka	94,83	87,59	92,37	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat	Angka	66,24	63,55	95,94	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**Kesehatan**						
2.1	Prevalensi stunting	persen	23,08	18,5	124,76	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	170	187	90,91	Tinggi	Dinas Kesehatan
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	kasus	590	489	120,65	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2.4	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	persen	90	94	104,44	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2.5	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa	Orang	733	667	91,00	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Jiwa Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah Provinsi Lampung						
2.6	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Dasar	46,67	Sangat Rendah	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	80	75	93,75	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.8	Akreditasi rumah sakit		Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 85%	Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
2.9	Nilai SPM	persen	83%	83%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
2.10	Tingkat Layanan Sub Spesialis	persen	70%	70%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
2.11	Survey Kepuasaan Pasien/Penerima Layanan	persen	82%	82%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	persen	74	75	101,35	Sangat Tinggi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3.2	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2	persen	40	40	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
4.1	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang	Persen	83	100	120,48	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
4.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	82,03	82,27	100,29	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
4.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	Persen	77,47	77,49	100,02	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	70,61	71,11	100,70	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
4.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	persen	96,87	100	103,23	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	Persen	65	65	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP
5.2	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan	Persen	65	65	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP
5.3	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Nilai	5,45	4,8	88,07	Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.4	Persentase Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	persen	45	100	222,22	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
5.5	Pesentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	persen	100	97,75	97,75	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
5.6	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	80	100	125,00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.7	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	persen	72,25	74,09	102,55	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	**Sosial**						
6.1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	1,7	1,7	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
6.2	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan	Persen	20	20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)						
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	96,24	95,31	99,03	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.2	Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	Persen	82	80,97	98,74	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
2.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persen	2,82	4,59	162,77	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	Persen	86,67	86,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	**Pangan**						
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77	78,25	101,62	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	cv ≤ 5%	1,27	393,70	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	persen	1,00	2,63	263,00	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	86	85,3	99,19	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	persen	98,5	100	101,52	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Lingkungan Hidup**						
4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,34	57,77	99,02	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,24	85,46	101,45	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	72,71	79,56	109,42	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	38,67	33,54	86,73	Tinggi	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup
4.5	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	7,71	15,23	197,54	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	87	94,32	108,41	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
5.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	77	103,31	134,17	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	48	53	110,42	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
6.1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	Persen	16,58	16,58	100,00	Sangat Tinggi	Dinas PMDT
6.2	Persentase Desa	Persen	3,33	3,33	100,00	Sangat	Dinas

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mandiri					Tinggi	PMDT
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
7.1	Cakupan KB Aktif	Persen	66,88	74,52	111,42	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	**Perhubungan**						
8.1	Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Rasio	0,69	0,68	98,55	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	83	72,62	87,49	Tinggi	Dinas Perhubungan
8.3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persen	30	29	96,67	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
9	**Komunikasi dan Informatika**						
9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,9 (Baik)	2,76	95,17	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
9.2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	57 (cukup informatif)	87,98	154,35	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
9.3	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9.4	Skoring LPPD Provinsi din Tingkat Nasional	Skor	Tinggi	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9.5	Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah	persen	90	90	100,00	Sangat Tinggi	Biro Administrasi Pimpinan
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
10.1	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	persen	2,16	2,28	105,56	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Akumulasi)						
10.2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	persen	33,54	35,17	104,86	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
11	**Penanaman Modal**						
11.1	Realisasi investasi	Triliyun	11 Trilyun	13,05	118,64	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	**Kepemudaan dan Olahraga**						
12.1	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional	Persen	35	50	142,86	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
12.2	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	Persen	51,16	73,08	142,85	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	**Statistik**						
13.1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update	persen	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
14	**Persandian**						
14.1	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN	Persen	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
15	**Kebudayaan**						
15.1	Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional	persen	68,75	67,5	98,18	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	**Perpustakaan**						
16.1	Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	Persen	30	142	473,33	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	**Kearsipan**						
17.1	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	Persen	25	50	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	LAYANAN URUSAN PILIHAN						

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pariwisata**						
1.1	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	32,5	8,9	27,38	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.2	Presentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	32,5	9,7	29,85	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.3	Presentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	32,5	4,8	14,77	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.4	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung	Nilai	3,25	2,16	66,46	Sedang	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	**Pertanian**						
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu)	persen	100	99,48	99,48	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis)	Persen	100	91,3	91,30	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
2.3	Jumlah produksi lada rakyat	TON	15.235	15.412	101,16	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.4	Jumlah produksi kopi robusta rakyat	TON	116.039	117.311	101,10	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.5	Jumlah produksi tebu rakyat	TON	186.804	148.549	79,52	Tinggi	Dinas Perkebunan
2.6	Jumlah produksi Karet rakyat	TON	162.272	192.601	118,69	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.7	Jumlah produksi kakao rakyat	TON	60.345	57.507	95,30	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.8	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat	TON	197.004	197.639	100,32	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.9	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat	TON	84.951	81.475	95,91	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	Jumlah Populasi Ternak	Potong					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	-Sapi Potong		832.677	860.951	103,40	Sangat Tinggi	
	- Ayam Pedaging		84.599.700	94.254.495	111,41	Sangat Tinggi	
	- Ayam Petelur		9.455.209	13.230.147	139,92	Sangat Tinggi	
2.11	Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)	potong	108.286	108.286	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.12	Jumlah Produksi Telur	Telur	169.474	195.204	115,18	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**Kehutanan**						
3.1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam, Rehabilitasi maupun Restorasi	persen	2,55	2,63	103,14	Sangat Tinggi	Dinas Kehutanan
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
4.1	Rasio Dusun Berlistrik	Rasio	52	52,96	101,85	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	**Perdagangan**						
5.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	5	4,57	91,40	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.2	Nilai Ekspor Non Migas	Nilai	3,33	4,83	145,05	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Persen	≤1,5	1,1	136,36	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	**Perindustrian**						
6.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	5,3	8,26	155,85	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	**Kelautan dan**						

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perikanan						
7.1	Prosentase Produksi Perikanan	Persen	100	90	90,00	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.2	Prosentase Ekspor Perikanan	Persen	100	84,7	84,70	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PENUNJANG URUSAN						
1	**Keuangan**						
1.1	Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah
1.2	Persentasse Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	12,66	14,86	117,38	Sangat Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Persen	84	85,02	101,21	Sangat Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
2	**Pengawasan**						
2.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level (Skor)	3 (3,01)	3	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2.2	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	82%	96	117,07	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2.3	Persentase Peraturan daerah (Perda)yang ditetapkkan.	Persen	60	58,3	97,17	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2.4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2.5	Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2.6	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	3	3		Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2.7	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan	Persen	80	80	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)						
3	**Perencanaan Pembangunan**						
3.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	30%	23,92	79,73	Tinggi	BAPPEDA
3.3	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3.4	Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3.5	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	85%	85%	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
4	**Penelitian dan Pengembangan**					**Sangat Tinggi**	
4.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	80	80	100	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**						
5.1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi	Persen	65	64.56	99,32	Sangat Tinggi	BKD
5.2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	Persen	58	50	86,20	Tinggi	BKD
5.3	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Persen	25,34	25,34	92,71	Sangat Tinggi	BPSDM

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	Nilai	B	B	100	Sangat Tinggi	BPSDM
	ASPEK DAYA SAING						
1	**Fokus Iklim Berinvestasi**						
1.1	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai	84	82,94	98,73	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
1.2	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	10,8 trilyun	13,05 trilyun	120,8	Sangat Tinggi	DPMPTSP

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Kesejahteraan Masyarakat tahun 2021 berada di atas 91 ≤ 100% (sangat tinggi) hanya 1 (satu) indikator dengan kriteria tinggi yaitu 76% ≤ 90%. Indikator yang berkriteria tinggi adalah indikator Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan dari Biro Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja 77,17%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terjadi refocusing terhadap anggaran kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan sehingga target kegiatan yang ditetapkan tidak tercapai.

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar tahun 2021 berada di atas 91 ≤ 100% (sangat tinggi) dan hanya 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian tinggi 76% ≤ 90%, yaitu indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu dan indikator Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana serta 1 indikator dengan kriteria capaian sangat rendah ≤ 50% yaitu indikator Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit.

Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu tidak tercapai dikarenakan peningkatan jumlah kasus kematian ibu yang mencapai 187 orang, disebabkan karena Covid-19 sebanyak 82 ibu hamil (47%) meninggal,

meninggal karena perdarahan sebanyak 39 ibu hamil (22%), dan meninggal karena hipertensi dalam kehamilan sebanyak 37 ibu hamil (15%).

Indikator Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana tidak tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

- Refocusing Anggaran baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota untuk Penanganan Covid-19
- Dalam proses pengumpulan data yang dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2021, hanya 5 Kabupaten/Kota diantaranya: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu, dari 15 Kabupaten/Kota yang mengirimkan data
- Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berpengaruh pada proses Pengumpulan dan Verifikasi data Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengumpulan dan Verifikasi Indeks Kapasitas Daerah belum di Anggarkan secara Khusus di Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.

Indikator Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit tidak tercapai dengan kriteria sangat rendah (46,67%) dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan pada Tanggal 16 Juli 2020, maka penilaian akreditasi di RSJD Provinsi Lampung tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian yang ditetapkan untuk tahun 2021 ini sama seperti tahun lalu yaitu Akreditasi Tingkat Dasar.

Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2021 rata-rata diatas 91 ≤ 100% (sangat tinggi) hanya pada beberapa indicator seperti Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi yang capaiannya diatas 96 ≤ 90% (tinggi).

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas tutupan lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan aktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung.

Tahun 2021 didominasi berada dibawah target dan hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Timur. Capaian indeks kualitas lahan berada di bawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Capaian Urusan Pilihan tahun 2021 rata-rata sangat tinggi hanya pada urusan Pariwisata capaiannya sangat rendah dan sedang dikarenakan pada Tahun 2021 masih adanya pandemi CORONA (COVID-19) yang berimbas terbesar pada sektor jasa khususnya di pariwisata dengan adanya pembatasan kerumunan, pembatasan penerbangan serta event-event parisiwata yang tidak dilaksanakan. Saat ini telah dilaksanakan Sosialisasi kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota dan *Stakeholder* mengenai Keputusan Menteri Kesehatan No.H.K.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat, tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan

pengendalian COVID-19 sehingga dapat menerapkan SOP Protokol kesehatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di usahanya masing-masing.

Capaian indikator urusan penunjang pemerintahan hampir seluruhnya masuk dalam kriteria sangat tinggi. Hanya 2 (dua) indikator yang masuk kategori tinggi (76%-90%), yaitu Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

Capaian Penunjang Urusan, secara keseluruhan untuk realisasi capaian Tahun 2021, sebagian besar memiliki nilai sangat tinggi. Nilai sangat tinggi dicapai oleh semua IKD yaitu IKU Renstra masing-masing Perangkat Daerah yaitu: BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Bappeda, Balitbangda dan BPSDM. Dari 2 IKU Renstra BKD yaitu "Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi" juga bernilai Sangat Tinggi, hanya satu indikator yaitu "Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik" yang bernilai tinggi dengan nilai capaian 86,20%. Pada akhirnya, seluruh Perangkat Daerah pengampu Penunjang Urusan telah berhasil merealisasikan Target IKU Perangkat Daerah yang pada akhirnya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pembiayaan pemerintah, dan neraca perdagangan. Melambatnya perekonomian akibat pandemic covid serta melemahnya neraca perdagangan, menjadikan investasi sebagai komponen penting untuk mendukung perekonomian. Peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong kemudahan berusaha. Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Lampung pada Tahun 2021 realisasi sebesar 13,05 Trilyun melebihi dari target sebesar 10,8 Trilyun sehingga capaian Tahun 2021 sebesar 120,80%.

2.2.1.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial

Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bidang	Capaian (%)
1.	Pendidikan	43
2.	Kesehatan	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	100
6.	Sosial	98

Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2022

Rata-rata capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2021 telah tercapai dengan realisasi yang cukup tinggi. Capaian SPM pada bidang Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat telah mencapai 100%. Begitu pula pada bidang sosial yang telah mencapai 98% sedangkan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 80%. Capaian SPM Provinsi Lampung yang terkecil berada pada bidang Pendidikan, yaitu hanya sebesar 43%.

2.2.1.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periodisasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024. Sama seperti pada tahun 2020, pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2021 masih menghadapi kendala utama, yaitu adanya pandemi *COVID-19* yang berdampak pada semua aspek kehidupan diantaranya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan bahkan pemerintahan. Realisasi capaian TPB/SDGs Provinsi Lampung terlihat pada tabel berikut:

Tabel II - 62 Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2021

TPB		Kategori TPB				Indikator	
Goals	Keterangan	Sudah Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Ada Data	Tidak Ada di Wilayah Kajian	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan	18	7	4	0	29	13,1%
2	Tanpa Kelaparan	10	1	2	0	13	5,9%
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	22	4	7	1	34	15,3%
4	Pendidikan Berkualitas	14	2	3	0	19	8,6%
5	Kesetaraan Gender	13	0	2	0	15	6,8%
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	5	3	0	12	5,4%
7	Energi Bersih dan Terjangkau	3	0	0	0	3	1,4%
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	12	4	2	0	18	8,1%
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	3	3	0	0	6	2,7%
10	Berkurangnya Kesenjangan	2	2	6	0	10	4,5%
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	6	3	0	0	9	4,1%
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	1	0	0	3	1,4%
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1	0,5%
14	Ekosistem Laut	3	2	1	0	6	2,7%
15	Ekosistem Darat	0	3	0	0	3	1,4%
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	25	2	7	0	34	15,3%
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	1	4	0	7	3,2%
Jumlah		**140**	**40**	**41**	**1**	**222**	**100%**
Persentase		**63,06**	**18,02**	**18,47**	**0,45**	**100**	

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022

Dari data di atas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi Lampung sebagian besar telah tercapai (63,06%), sedangkan yang belum tercapai hanya 18,02% dan tidak ada data 18,47% serta tidak ada di

wilayah kajian 0,45%. Sedangkan capaian 222 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum dan tata kelola, kategori capaian terhadap 4 pilar tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel II - 63 Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Pilar Tahun 2021

No	Pilar	Jumlah Indikator TPB	Kategori Capaian			
			Sudah Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian
1	Sosial	110	77	14	18	1
2	Lingkungan	34	16	14	4	0
3	Ekonomi	44	22	10	12	0
4	Hukum dan Tata Kelola	34	25	2	7	0
	Jumlah	**222**	**140**	**40**	**41**	**1**

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Lampung Tahun 2021, diperoleh rekapitulasi data capaian kinerja pelaksanaan Renja PD sebagai berikut :.

Tabel II - 64 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA SMK dan SLB yang Berakreditasi minimal B	75	2.424.935.771.038	69	544.251.271.000	69	425.376.121.837	100,0	78,2	69	425.376.121.837	92,0	17,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	01.01.04	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	66	47.479.476.400	60	12.439.800.000	60	12.365.900.000	100,0	99,4	60	12.365.900.000	90,9	26,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	92	8.275.998.000	40	2.195.000.000	40	1.952.682.498	100,0	89,0	40	1.952.682.498	43,5	23,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase warisan budaya tak benda yang difilemkan (dokumenter)	77	4.516.608.000	37	1.000.000.000	37	999.305.000	100,0	99,9	37	999.305.000	47,5	22,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
5	02.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	80	1.020.321.600	69	200.000.000	69	168.239.000	100,0	84,1	69	168.239.000	85,9	16,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	02.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57	13.253.374.000	15	3.325.000.000	15	3.253.938.400	100,0	97,9	15	3.253.938.400	25,7	24,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	32.952.017.817	100	3.856.680.603	95	3.375.509.950	95,5	87,5	95	3.375.509.950	95,5	10,2	Rumah Sakit Jiwa	
8	01.02.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia	100	1.439.846.600	100	72.074.000	95	38.580.900	95,3	53,5	95	38.580.900	95,3	2,7	Rumah Sakit Jiwa	
9	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Wasting	4,51	33.780.244.000	8	2.805.784.650	8	2.534.040.942	100,0	90,3	8	2.534.040.942	77,2	7,5	Dinas Kesehatan	
10	01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai	47	52.661.231.946	33	40.621.231.946	33	23.695.290.163	100,0	58,3	33	23.695.290.163	70,2	45,0	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Kesehatan	Standar														
11	01.02.04	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi Alkes dan Makanan Minuman	100	1.401.000.000	90	150.000.000	90	135.424.868	100,0	90,3	90	135.424.868	90,0	9,7	Dinas Kesehatan	
12	01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kenijakan Germas	75	2.092.130.491	48	419.429.491	48	325.017.700	100,0	77,5	48	325.017.700	64,0	15,5	Dinas Kesehatan	
13	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telaksananya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	295.571.104.786	100	66.695.043.946	35	17.956.429.266	35,2	26,9	35	17.956.429.266	35,2	6,1	Rumah Sakit Abdul Moeloek	
14	01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM	100	2.377.602.500	100	492.303.000	44	150.000.000	44,4	30,5	44	150.000.000	44,4	6,3	Rumah Sakit Abdul Moeloek	
15	02.11.02	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	510.690.600	100	3.288.000	100	3.288.000	100,0	100,0	100	3.288.000	100,0	0,6	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
16	02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	4.463.082.800	100	3.379.984.000	100	3.330.032.424	100,0	98,5	100	3.330.032.424	100,0	74,6	Dinas Lingkungan Hidup	
17	02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional	100	1.495.474.900	100	81.526.000	100	5.400.000	100,0	6,6	100	5.400.000	100,0	0,4	Dinas Lingkungan Hidup	
18	02.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup	100	1.655.449.400	100	78.046.000	100	71.690.800	100,0	91,9	100	71.690.800	100,0	4,3	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
19	02.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal	100	319.364.000	100	16.276.000	100	15.876.000	100,0	97,5	100	15.876.000	100,0	5,0	Dinas Lingkungan Hidup	
20	02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	724.964.000	100	40.830.600	100	40.830.600	100,0	100,0	100	40.830.600	100,0	5,6	Dinas Lingkungan Hidup	
21	02.11.10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup	100	2.531.426.000	100	297.188.000	100	152.232.000	100,0	51,2	100	152.232.000	100,0	6,0	Dinas Lingkungan Hidup	
22	02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional	100	4.075.094.800	100	408.747.000	100	386.728.000	100,0	94,6	100	386.728.000	100,0	9,5	Dinas Lingkungan Hidup	
23	01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	78	925.197.681.601	78	409.265.036.872	100	371.649.255.951	128,2	90,8	100	371.649.255.951	128,2	40,2	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
24	01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Target Orang yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100	8.101.965.200	41	1.379.491.500	27	900.675.600	65,3	65,3	27	900.675.600	27,0	11,1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
25	01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi	100	141.177.307.966	100	112.176.229.874	100	96.054.977.997	100,0	85,6	100	96.054.977.997	100,0	68,0	Dinas Pengelolaan SDA	
26	01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	100	15.405.000.000	100	500.000.000	100	471.488.000	100,0	94,3	100	471.488.000	100,0	3,1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
27	01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	100	4.300.000.000	100	1.730.394.000	100	2.435.492.700	100,0	140,7	100	2.435.492.700	100,0	56,6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
28	01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		100	1.900.000.000	100	100.000.000	100	99.723.000	100,0	99,7	100	99.723.000	100,0	5,2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
29	01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	100	38.698.592.000	100	8.471.192.000	100	11.518.122.223	100,0	136,0	100	11.518.122.223	100,0	29,8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
30	01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100	217.247.483.548	100	58.459.430.100	100	55.405.465.381	100,0	94,8	100	55.405.465.381	100,0	25,5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
31	01.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan-nya	100	11.722.351.190	100	2.528.969.900	67	2.363.487.898	66,7	93,5	67	2.363.487.898	66,7	20,2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
32	01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100	11.400.000.000	100	1.207.035.618	100	1.060.967.435	100,0	87,9	100	1.060.967.435	100,0	9,3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
33	01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	6.400.000.000	100	2.742.116.200	100	1.250.413.200	100,0	45,6	100	1.250.413.200	100,0	19,5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
34	01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan tertangani	100	49.600.000.000	100	6.010.731.800	100	5.815.262.155	100,0	96,7	100	5.815.262.155	100,0	11,7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
35	01.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	100	151.471.294.337	100	17.139.018.000	100	24.671.525.357	100,0	143,9	100	24.671.525.357	100,0	16,3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
36	2.10.06	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100	2.950.000.000	100	231.542.280	100	152.627.400	100,0	65,9	100	152.627.400	100,0	5,2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
37	01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100	57.697.048.072	100	19.638.147.500	98	23.219.010.979	97,9	118,2	98	23.219.010.979	97,9	40,2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
38	01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	17.673.506.200	100	4.634.115.400	88	5.083.082.799	87,5	109,7	88	5.083.082.799	87,5	28,8	Satpol PP	
39	01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	100	2.656.132.021	100	368.965.400	50	314.734.300	50,0	85,3	50	314.734.300	50,0	11,8	Dinas Sosial	
40	01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tndak Kekerasan	100	1.057.115.716	100	208.200.000	100	204.035.531	100,0	98,0	100	204.035.531	100,0	19,3	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
41	01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	40.392.484.112	100	7.614.433.960	98	7.446.574.902	97,5	97,8	98	7.446.574.902	97,5	18,4	Dinas Sosial	
42	01.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	2.096.285.072	100	540.800.000	100	539.554.300	100,0	99,8	100	539.554.300	100,0	25,7	Dinas Sosial	
43	01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	3.134.017.599	100	645.752.000	100	608.516.000	100,0	94,2	100	608.516.000	100,0	19,4	Dinas Sosial	
44	01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100	1.577.058.756	100	404.040.000	100	368.487.700	100,0	91,2	100	368.487.700	100,0	23,4	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
45	02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akirasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	86	737.000.000	80	50.000.000	80	49.590.000	100,0	99,2	80	49.590.000	93,0	6,7	Dinas Tenaga Kerja	
46	02.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas bersertifikat	100	15.395.200.000	100	1.760.551.750	100	1.655.393.050	100,0	94,0	100	1.655.393.050	100,0	10,8	Dinas Tenaga Kerja	
47	02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan	75	4.875.302.600	60	525.000.000	60	413.111.475	100,0	78,7	60	413.111.475	80,0	8,5	Dinas Tenaga Kerja	
48	02.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100	3.085.000.000	100	384.640.000	100	362.687.000	100,0	94,3	100	362.687.000	100,0	11,8	Dinas Tenaga Kerja	
49	02.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerjaa dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100	3.325.000.000	100	519.592.250	100	340.902.850	100,0	65,6	100	340.902.850	100,0	10,3	Dinas Tenaga Kerja	
50	02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100	2.014.345.000	100	388.145.000	93	388.139.000	93,3	100,0	93	388.139.000	93,3	19,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
51	02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	5.346.298.000	100	1.273.390.950	33	1.176.392.367	32,7	92,4	33	1.176.392.367	32,7	22,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
52	02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	100	2.369.934.400	100	416.100.400	100	573.348.236	100,0	137,8	100	573.348.236	100,0	24,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
53	02.08.05	Pengelolaan Program Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	100	2.177.093.200	100	359.027.200	100	357.725.450	100,0	99,6	100	357.725.450	100,0	16,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
54	02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100	2.924.532.000	100	494.532.000	100	489.509.100	100,0	99,0	100	489.509.100	100,0	16,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
55	02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100	768.598.000	100	111.098.000	100	111.098.000	100,0	100,0	100	111.098.000	100,0	14,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
56	02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	8	488.652.000	8	48.652.000	8	52.593.500	100,0	108,1	8	52.593.500	107,9	10,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
57	02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	100	416.302.000	100	61.302.000	100	58.302.000	100,0	95,1	100	58.302.000	100,0	14,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
58	02.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	1.066.086.000	47	176.086.000	47	169.406.000	100,6	96,2	47	169.406.000	47,0	15,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
59	02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	10	1.322.508.000	10	131.451.000	10	129.988.800	100,0	98,9	10	129.988.800	100,0	9,8	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
60	02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	87	8.314.600.000	86	2.146.000.000	86	1.942.162.200	100,6	90,5	86	1.942.162.200	98,9	23,4	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
61	02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah kerawanan pangan	100	949.200.000	100	200.000.000	100	199.966.000	100,0	100,0	100	199.966.000	100,0	21,1	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
62	02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji	94	5.418.959.100	91	910.557.500	91	866.849.200	100,0	95,2	91	866.849.200	96,8	16,0	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
63	03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100	32.206.158.500	100	13.247.567.200	100	13.082.527.400	100,0	98,8	100	13.082.527.400	100,0	40,6	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
64	03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	77.271.104.000	100	17.733.089.800	100	18.861.880.190	100,0	106,4	100	18.861.880.190	100,0	24,4	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
65	03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	2.629.369.600	100	250.000.000	100	249.921.700	100,0	100,0	100	249.921.700	100,0	9,5	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
66	03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengelolaan Penyuluhan Pertanian	100	17.295.000.000	100	1.843.067.200	100	1.809.829.139	100,0	98,2	100	1.809.829.139	100,0	10,5	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
67	02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota se-Provinsi	100	32.206.158.500	100	6.858.790.000	100	53.198.281	100,0	0,8	100	53.198.281	100,0	0,2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Lampung														
68	02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	77.271.104.000	100	9.564.430.000	100	87.590.100	100,0	0,9	100	87.590.100	100,0	0,1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
69	02.12.04	Program Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	2.629.369.600	100	16.302.800.000	80	128.480.902	80,0	0,8	80	128.480.902	80,0	4,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
70	02.12.04	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100	17.295.000.000	100	9.102.400.000	100	83.747.000	100,0	0,9	100	83.747.000	100,0	0,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
71	01.12.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25	10.051.341.000	25	1.340.329.499	25	1.285.161.000	100,0	95,9	25	1.285.161.000	100,0	12,8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
72	02.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama	25	793.000.000	25	141.646.000	25	128.449.000	100,0	90,7	25	128.449.000	100,0	16,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
73	02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	25	9.684.667.200	25	2.969.524.585	25	2.844.562.464	100,0	95,8	25	2.844.562.464	100,0	29,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
74	03.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100	714.646.000	100	106.134.200	100	53.737.800	100,0	50,6	100	53.737.800	100,0	7,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
75	03.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	100	774.180.000	100	138.060.000	100	115.752.000	100,0	83,8	100	115.752.000	100,0	15,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
76	03.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	100	800.778.120	100	150.194.530	100	106.356.230	100,0	70,8	100	106.356.230	100,0	13,3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
77	02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	8.803.302.300	100	1.469.716.500	100	1.383.354.700	100,0	94,1	100	1.383.354.700	100,0	15,7	Dinas Perhubungan	
78	02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran	100	2.030.800.000	80	210.000.000	80	91.039.300	100,0	43,4	80	91.039.300	80,0	4,5	Dinas Perhubungan	
79	02.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapia	Persentase pengelolaan perkeretaapian	100	295.000.000	100	45.000.000	100	4.416.000	100,0	9,8	100	4.416.000	100,0	1,5	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		n															
80	02.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemprov. Lampung	100	38.874.779.360	80	6.887.801.000	80	14.070.270.517	100,0	204,3	80	14.070.270.517	80,0	36,2	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
81	02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung	100	50.237.255.702	80	13.878.966.658	80	13.399.201.888	100,0	96,5	80	13.399.201.888	80,0	26,7	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
82	02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pengumpulan pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Provinsi Lampung	95	1.277.990.732	80	95.444.000	80	147.714.138	100,0	154,8	80	147.714.138	84,2	11,6	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
83	02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	95	1.312.154.300	85	118.983.200	85	167.603.400	100,0	140,9	85	167.603.400	89,5	12,8	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
84	02.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah	79	650.000.000	57	6.294.300	57	61.789.000	99,8	981,7	57	61.789.000	72,5	9,5	Dinas Koperasi dan UMKM	
85	02.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu)	27	10.814.784.000	27	260.093.310	27	2.550.689.500	100,0	980,7	27	2.550.689.500	100,0	23,6	Dinas Koperasi dan UMKM	
86	02.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24	2.097.840.000	14	39.276.680	14	392.359.800	100,0	999,0	14	392.359.800	60,0	18,7	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
87	02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)	2,5	5.372.840.000	0,5	117.283.500	0,5	1.063.516.800	100,0	906,8	1	1.063.516.800	20,0	19,8	Dinas Koperasi dan UMKM	
88	02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha (Persen)	11	1.854.000.000	4	39.350.300	4	391.803.000	100,0	995,7	4	391.803.000	38,4	21,1	Dinas Koperasi dan UMKM	
89	02.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	100	2.859.500.000	40	787.783.000	40	746.500.000	100,0	94,8	40	746.500.000	39,6	26,1	Dinas Koperasi dan UMKM	
90	02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	100	950.000.000	31	94.539.000	31	90.395.000	100,0	95,6	31	90.395.000	30,7	9,5	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
91	02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Laju pertumbuhan investasi	7	3.658.827.635	7	482.624.000	7	395.672.225	100,0	82,0	7	395.672.225	100,0	10,8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
92	02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Peringkat tujuan investasi nasional	7	2.786.170.000	7	626.170.000	7	610.049.250	100,0	97,4	7	610.049.250	100,0	21,9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
93	02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan	14	3.455.393.000	14	755.393.000	14	635.925.925	100,0	84,2	14	635.925.925	100,0	18,4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
94	02.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100	843.536.000	100	143.536.000	100	143.536.000	100,0	100,0	100	143.536.000	100,0	17,0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
95	2.18.06	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100	2.061.493.000	100	50.746.700.000	100	507.497.000	100,0	1,0	100	507.497.000	100,0	24,6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
96	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	100	15.161.890.800	88	451.488.110.000	88	5.085.526.100	100,0	1,1	88	5.085.526.100	88,2	33,5	Dinas Pemuda dan Olahraga	
97	02.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yang ditingkatkan	100	66.071.268.054	50	30.489.620.000	50	26.823.183.524	100,0	88,0	50	26.823.183.524	50,0	40,6	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
98	02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	100	180.993.500	55	65.038.000	55	130.076.000	100,0	200,0	55	130.076.000	55,0	71,9	Dinas Pemuda dan Olahraga	
99	02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pembinaan perpustakaan	20	6.426.711.152	20	113.370.500	20	521.879.100	100,0	460,3	20	521.879.100	100,0	8,1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
100	02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	10	780.000.000	10	20.000.000	10	124.580.000	100,0	622,9	10	124.580.000	100,0	16,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
101	02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip	100	4.300.000.000	100	65.000.000	100	103.907.400	100,0	159,9	100	103.907.400	100,0	2,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
102	03.25.03	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	184.186	42.823.932.000	151.870	8.665.900.000	151.870	7.629.430.735	100,0	88,0	151.870	7.629.430.735	82,5	17,8	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
103	03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	206.995	28.028.568.301	161.589	9.353.297.000	161.589	8.948.640.245	100,0	95,7	161.589	8.948.640.245	78,1	31,9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
104	03.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)	22.797.911	24.932.418.000	18.361.350	1.121.349.000	18.361.350	1.677.668.865	100,0	149,6	18.361.350	1.677.668.865	80,5	6,7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
105	03.25.02	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada	100	6.905.500.000	80	1.857.678.100	80	993.736.516	100,0	53,5	80	993.736.516	80,0	14,4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Kecil	alokasi														
106	03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	100	6.888.918.000	100	1.121.349.000	100	616.340.555	100,0	55,0	100	616.340.555	100,0	8,9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
107	03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya	95	22.872.506.400	80	6.267.556.700,00	67	5.386.355.001	83,4	85,9	67	5.386.355.001	70,2	23,5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
108	03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	95	9.951.279.016	80	2.687.036.000,00	75	729.281.200	93,8	27,1	75	729.281.200	78,9	7,3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
109	03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	95	6.934.015.800	80	1.233.608.400,00	80	625.096.200	100,0	50,7	80	625.096.200	84,2	9,0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
110	03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI	Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya	5	22.872.506.400	4	933.884.000,00	4	112.067.800	100,0	12,0	4	112.067.800	70,0	0,5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		KREATIF															
111	03.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan	100	23.666.105.173	100	7.507.974.700	100	6.969.824.894	100,0	92,8	100	6.969.824.894	100,0	29,5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
112	03.27.03	Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100	14.140.994.000	100	1.799.318.500	100	1.717.545.196	100,0	95,5	100	1.717.545.196	100,0	12,1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
113	03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100	2.329.276.400	50	620.962.800	50	609.593.600	100,0	98,2	50	609.593.600	50,0	26,2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
114	03.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	100	473.400.000	100	125.050.000	100	122.275.880	100,0	97,8	100	122.275.880	100,0	25,8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
115	03.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Dibina	100	214.266.100	100	28.942.100	100	44.536.000	100,0	153,9	100	44.536.000	100,0	20,8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
116	03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	100	2.423.915.900	100	261.006.400	95	256.566.400	95,4	98,3	95	256.566.400	95,4	10,6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
117	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit	25	3.161.022.500	25	302.372.400	25	257.664.300	100,0	85,2	25	257.664.300	100,0	8,2	Dinas Perkebunan	
118	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan benih bermutu dan sarana pertanian	5	2.975.000.000	5	6.045.434.993	5	174.220.100	100,0	2,9	5	174.220.100	100,0	5,9	Dinas Perkebunan	
119	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produkstivitas komoditas perkebunan	3	34.071.891.093	3	461.022.500	3	5.346.226.693	100,0	1.159,6	3	5.346.226.693	100,0	15,7	Dinas Perkebunan	
120	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase penilaian usaha perkebunan	30	1.268.000.000	30	175.000.000	100	146.989.000	333,3	84,0	100	146.989.000	333,3	11,6	Dinas Perkebunan	
121	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan mutu produk pertanian	20	12.945.562.750	20	1.768.617.500	100	1.259.534.800	500,0	71,2	100	1.259.534.800	500,0	9,7	Dinas Perkebunan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
122	03.28.02	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	20	18.696.858.600	5	13.936.281.100	5	12.764.874.400	100,0	91,6	5	12.764.874.400	25,0	68,3	Dinas Kehutanan	
123	03.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan (ha)	87	33.047.764.500	87	6.217.015.753	87	6.022.492.958	100,0	96,9	87	6.022.492.958	100,0	18,2	Dinas Kehutanan	
124	03.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas lahan Konservasi yang di pulihkan	100	6.938.784.500	100	3.479.972.800	100	3.787.747.749	100,0	108,8	100	3.787.747.749	100,0	54,6	Dinas Kehutanan	
125	03.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	100	1.608.883.000	25	1.789.442.700	25	1.711.756.200	100,0	95,7	25	1.711.756.200	25,0	106,4	Dinas Kehutanan	
126	03.29.02	Program Pengolaan Aspek Kegeologian	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100	2.900.000.000	30	142.669.000	30	142.309.000	100,0	99,7	30	142.309.000	30,2	4,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
127	03.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	60	2.006.340.000	30	222.794.000	30	211.093.600	100,0	94,7	30	211.093.600	50,0	10,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
128	03.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Bauran Energi Daerah	100	11.136.569.535	31	445.646.000	31	444.850.530	100,0	99,8	31	444.850.530	30,5	4,0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
129	03.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	100	9.346.920.000	40	5.523.528.600	40	1.153.353.800	100,0	20,9	40	1.153.353.800	40,0	12,3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
130	03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		-	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
131	03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5	2.200.000.000	5	511.080.000	5	506.482.000	100,0	99,1	5	506.482.000	100,0	23,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
132	03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Pelaku usaha yang menjadi eksportir	10	2.528.000.000	10	362.696.000	10	340.900.000	100,0	94,0	10	340.900.000	100,0	13,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
133	03.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	20	4.473.540.000	13	405.330.000	13	376.129.600	100,0	92,8	13	376.129.600	62,5	8,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
134	03.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	100	4.166.000.000	100	43.795.000	100	93.778.000	100,0	214,1	100	93.778.000	100,0	2,3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
135	03.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase rata – rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung	200	30.877.255.000	150	8.491.448.000	150	4.634.165.850	100,0	54,6	150	4.634.165.850	75,0	15,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			tujuan RPIP														
136	03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	25	1.020.000.000	10	178.569.000	10	177.844.200	100,0	99,6	10	177.844.200	40,0	17,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
137	03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri	45	607.198.000	30	50.000.000	30	17.810.000	100,0	35,6	30	17.810.000	66,7	2,9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
138	04.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100	6.243.123.268	100	1.382.123.000	100	1.028.234.500	100,0	74,4	100	1.028.234.500	100,0	16,5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
139	04.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai ditenderkan	94	11.702.317.393	100	2.665.649.000	100	2.210.953.200	100,0	82,9	100	2.210.953.200	106,4	18,9	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
140	04.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Presentasi jumlah perangkat daerah yang dokumen DPA nya baik, pelaksanaan program/kegiatannya sesuai perencanaannya	100	5.231.222.068	100	1.577.500.000	100	1.550.791.340	100,0	98,3	100	1.550.791.340	100,0	29,6	Biro Administrasi Pembangunan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
141	04.01.04	Program kesejahteraan rakyat	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	100	2.762.447.700	100	33.104.628.600	95	24.701.097.738	95,5	74,6	95	24.701.097.738	95,5	894,2	Biro Kesejahteraan Rakyat	
142	04.01.02	Program Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100	6.287.549.400	100	1.187.802.600	100	852.443.800	100,0	71,8	100	852.443.800	100,0	13,6	Biro Organisasi	
143	08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	100	4.245.765.300	15	799.866.600	82	765.150.900	544,5	95,7	82	765.150.900	81,7	18,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembanga	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	73	3.415.890.400	72	296.444.300	64	222.531.500	89,0	75,1	64	222.531.500	88,1	6,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		n Etika serta Budaya Politik															
145	08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosiala dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	1.443.972.000	15	149.395.000	15	143.831.000	100,0	96,3	15	143.831.000	50,0	10,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
146	08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentasa Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100	2.227.400.000	15	370.989.000	15	365.389.000	100,0	98,5	15	365.389.000	15,0	16,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
147	08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	90	3.695.375.200	80	310.097.250	62	108.039.217	78,0	34,8	62	108.039.217	69,3	2,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
148	06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	88	30.917.790.000	82	6.503.151.000	82	4.034.710.458	100,0	62,0	82	4.034.710.458	93,2	13,0	Inspektorat	
149	06.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100	4.514.698.000	100	898.096.000	100	512.385.465	100,0	57,1	100	512.385.465	100,0	11,3	Inspektorat	
150	05.07.02	Program pelayanan penghubung	Persentase Pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100	5.707.165.180	100	1.146.884.000	100	820.868.600	100,0	71,6	100	820.868.600	100,0	14,4	Badan Penghubung	
151	05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan ke PD/Stakeholder lainnya	100	12.064.319.282	100	2.090.914.500	100	2.062.683.100	100,0	98,6	100	2.062.683.100	100,0	17,1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
152	05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	100	52.432.919.989	100	14.426.321.240	100	8.372.560.397	100,0	58,0	100	8.372.560.397	100,0	16,0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
153	05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	100	61.409.314.209	100	7.745.753.786	98	5.898.579.632	97,7	76,2	98	5.898.579.632	97,7	9,6	Badan Kepegawaian Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
154	05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100	8.507.609.500	100	14.664.215.500	100	13.358.831.707	100,0	91,1	100	13.358.831.707	100,0	17,0	Badan Pendapatan Daerah	
155	05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	100	27.300.332.982	100	5.697.048.900	100	5.305.323.410	100,0	93,1	100	5.305.323.410	100,0	19,4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
156	05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100	6.000.537.110.823	100	1.321.752.152.591	95	1.128.073.408.757	95,1	85,3	95	1.128.073.408.757	95,1	18,8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
157	05.01.02	Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data. dan penyusunan dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan	100	22.612.550.651	100	2.318.172.400	75	864.602.300	74,6	37,3	75	864.602.300	74,6	3,8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
158	05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. bidang Perekonomian. serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100	30.039.527.166	100	4.506.882.430	100	1.556.392.300	100,0	34,5	100	1.556.392.300	100,0	5,2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
159	04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	167.984.759.868	100	155.434.922.112	94	176.634.048.749	94,4	113,6	94	176.634.048.749	94,4	105,1	Sekretariat DPRD	
160	04.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	100	8.106.714.503	100	1.608.585.400	104	935.036.600	104,2	58,1	104	935.036.600	104,2	11,5	Biro Perekonomian	
161	04.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	- Persentase rancangan produk hukum daerah dan provinsi yang di harmonisasikan	100	6.191.347.218	100	1.209.373.100	100	1.273.420.648	100,0	105,3	100	1.273.420.648	100,0	20,6	Biro Hukum	

2.3. Permasalahan Pembangunann Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024. erdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, beberapa permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung antara lain :

1. Masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah pada sektor pertanian.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan rendahnya angka IPM dibandingkan nasional dan regional Sumatera.
3. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur, baik yang terkait dengan konektivitas wilayah maupun infrastruktur dasar wilayah.
4. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan transformasi digital dalam pelayanan publik.
5. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibanding rata-rata nasional.
6. Efek luka *(scaring effect*) pasca Covid, yang mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal, *learning loss* pada aspek pendidikan, *Job Loss* serta pemulihan dunia usaha yang lambat.
7. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan masih rendahnya mitigasi terhadap bencana.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19 yang bukan hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak kepada perekonomian terangkum dalam uraian sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata rata lama sekolah penduduk lampung pada tahun 2021 adalah 8,08 tahun masih dibawah angka nasional sebesar 8,54.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai 12,73, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,73 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,08.
- Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,28 mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,04), akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami

peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarannya tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,72 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,09 persen). Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah.

- Angka Partisipasi Murin (APM) Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA sebesar 60,31 masih berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 61,65.
- Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen
- Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Bidang Kesehatan

- Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 18,5 jauh dibawah angka nasional 24,4 akan tetapi masih diperlukan kerja keras agar target stunting tahun 2024, yaitu sebesar 14% dapat tercapai.
- Angka Kematian Bayi (AKB) sepanjang tahun 2021 mencapai 484 kasus dan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 187 kasus sehingga diperlukan tindakan agar kasus kematian bayi dan ibu dapat ditekan.
- Meski Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung terus meningkat, AHH Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 70,73 masih di bawah rata-rata AHH Nasional sebesar 71,57.
- Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan.

c. Bidang Pertanian

- Upaya peningkatan produksi dan hilirisasi hasil produksi pertanian. Provinsi Lampung adalah sebagai daerah sentra/penghasil padi (peringkat 6 Nasional dan peringkat 2 di Sumatera) juga sebagai

sentra/penghasil jagung (peringkat 3 Nasional).

- Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran.

d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- **Rasio elektrifikasi** rumah tangga tahun 2021 telah mencapai 97,07% dan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,47%.
- Namun, masih adanya deficit kebutuhan listrik sebesar 350-450 Watt. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.027,5 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 968,55 MW.

e. Bidang Pariwisata

- Menurunnya junlah wisatwan dari 10.743.918 pada tahun 2019 menjadi hanya sekitar 2.939.152 pada tahun 2021 karena factor pandemic Covid-19.
- **Kontribusi Sektor Pariwisata** dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil sebesar 2,16% dalam PDRB Provinsi Lampung.

f. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu, dan rajungan.
- Harga Pakan Pabrikan yang cenderung meningkat karena ketergantungan dengan bahan baku impor (tepung ikan).
- Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan budidaya serta ancaman serangan penyakit.

g. Bidang Perdagangan

- Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung mengalami fluktuatif . Walaupun fluktuatif, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan Tahun 2020 mengalami surplus sebesar 1.821,65 dimana Ekspor 3.144,73 lebih besar dari impor 1.323,08.

h. Bidang Perindustrian

- **Pemulihan sektor indutri akibat dampak pandemi Covid-19** dengan membangkitkan kembali Industri Kecil Menengah (IKM). Industri yang berkontribusi paling besar di Provinsi Lampung adalah industri makanan dan minuman, dimana pada tahun 2021 kontribusi industri makanan dan minuman sebesar 80,95 persen dari total industri pengolahan.

i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai 74 persen, namun masih perlu terus ditingkatkan.

j. Bidang Lingkungan Hidup

- Masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan luas lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Hutan sebagai penyangga sumber daya air dan keragaman hayati memerlukan penanganan secara berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup manusia sebagai pelaku dan objek pembangunan;
- Masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kualitas tutupan lahan.

k. Kapasitas Fiskal Daerah

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan PAD pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 14,27 persen dari sebesar Rp 2.842.286.479 pada 2020 menjadi -Rp. 3.247.848.123 pada tahun 2021. Peningkatan tersebut bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi

budgeter penting untuk meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah guna mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

l. Bidang Koperasi dan UMKM

- Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan
- Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;
- Keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM
- Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

m. Bidang Penangggulangan Bencana

- Tingginya potensi bencana di Provinsi Lampung
- Kurangnya kesiapsiagaan perugas dalam penanganan bencana
- Sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai;
- Belum adanya Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;

n. Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

- Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
- Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;
- Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan;
- Potensi perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

o. Bidang Kebudayaan

- Masih banyaknya warisan budaya tak benda yang belum

tersertifikasi;

- Masih banyaknya warisan budaya benda sebagai objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- Kurangnya perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan nilai kebudayaan dalam pembangunan;
- Kurangnya tenaga ahli yang memahami tentang kebudayaa (Pamong Budaya);
- Masih rendahnya apresiasi generasi muda terhadap perlindungan dan pelestarian kebudayaan.

p. Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:

- Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dalam berwirausaha;
- Kurangnya pembinaan terhadap generasi muda dalam hal kepemimpinan dan kepeloporan;
- Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional di sentra-sentra pembinaan;
- Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;
- Belum tertatanya sistem maupun pola pembinaan dan pembibitan terhadap atlet;
- Belum terfasilitasinya kegiatan olahraga secara berkesinambungan yang melibatkan masyarakat.

q. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak

- Masih tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung
- Masih lemahnya perlindungan dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak hak anak. Belum optimalnya penanganan masalah *traficking* terhadap perempuan dan anak.

r. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses

kesempatan berusaha;

- Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
- Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.

s. Bidang Sosial

- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi
- Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang baik
- Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (**DTKS**) sebagai basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial ekonomi
- Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program intervensi kemiskinan
- Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan indivudu lainnya.

t. Bidang Ketenagakerjaan

- Dampak Covid 19 menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Lampung
- Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- Keterbatasan tenaga pengajar/instruktur Balai Latihan Kerja.
- Sarana dan prasarana peralatan praktek pada Balai Latihan Kerja

yang terbatas dan perlu peremajaan.

u. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

- Terbatasnya inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung

v. Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- Perlunya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
- Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
- Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
- Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
- Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, radikalisme karena latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

2.3.3. Isu Strategis

1. Bidang Ekonomi :

- **Pemulihan dan penguatan ekonomi Lampung pasca pandemic Covid-19**. Selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 capaian ekonomi Lampung cukup baik rata diatas 5% dan selalu diatas pertumbuhan nasional, namun masuk dalam masa pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, tahun 2020 berkontraksi hingga mencapai -1,67%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung

menunjukkan tren positif mencapai 2,79%, akan tetapi belum mencapai angka pertumbuhan sebelum Covid-19.

- **Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam**, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global. Namun demikian, neraca perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalami surplus senilai 1.490,6 juta US $, namun nilai tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020.
- **Laju pertumbuhan Investasi/PMTB belum optimal** untuk pertumbuhan ekonomi Lampung.
- **Sektor Pertanian berkontribusi terbesar** dalam Struktur Ekonomi Lampung (rata-rata ± 30 %), akan tetapi Tingkat Pertumbuhan relatif lambat dan mengalami tren penurunan dari 0,68% (2020) menjadi -0,40% (2021).
- **Kontribusi Sektor Pariwisata dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil** dikarenakan belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata Lampung sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian daerah, sehingga perlu dioptimalkan dan dibangkitkan kembali dari dampak pandemi Covid-19.
- **Sektor industri pengolahan kembali membaik dan tumbuh positif** pada tahun 2021 (4,57) setelah sebelumnya berkontraksi -5,27 pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu untuk mempercepat transformasi ekonomi, mendorong investasi dan peningkatan daya saing daerah, perlu dilakukan percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung.
- **Inflasi Gabungan Provinsi Lampung 5 tahun terakhir terkendali dalam rentang target**, perlu terus dijaga untuk mendorong daya beli masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan

- **Antisipasi terhadap Faktor Eksternal** seperti ketidakpastian ekonomi global, kondisi geo-politik, perang dagang, dan wabah penyakit

2. **Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia :**
   - **Indek Pembangunan Manusia (IPM)** meningkat dari 66,69 (2020) menjadi 69,9 (2021). Namun masih cukup rendah di bandingkan Nasional dan wilayah Sumatera.
   - **Tingkat Kemiskinan mengalami tren penurunan** dari 12,76 persen (2020) menjadi 11,67 persen (2021). *Akan tetapi,* masih cukup tinggi dibanding rata-rata Nasional (9,71).
   - **Masih tingginya angka prevalensi stunting** tahun 2021 yaitu 18,5 yang diharapkan dapat turun menjadi 14 pada tahun 2024.
   - **Ketimpangan Antar kelompok Pendapatan/ Indeks Gini** mengalami penurunan dari 0,32 pada tahun 2020 menjadi 0,31 pada tahun 2021, angka ini lebih baik dari Nasional (0,38).
   - **Belum optimalnya implementasi *Reformasi Birokrasi*:** Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintahan
   - **Kesetaraan Perempuan dalam Pembangunan** yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender, semakin membaik dari 90,33 (2020) meningkat menjadi 90,37 (2021), sudah berada di atas angka nasional tahun 2021 (91,27) namun masih perlu terus diupayakan meningkat.

3. **Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup :**
   - **Kesenjangan pertumbuhan wilayah timur dengan barat** (diperlukan infrastruktur penghubung (ruas utara, tengah dan selatan) yang memenuhi persyaratan untuk menghubungkan jalan lintas nasional (barat, tengah dan timur).
   - **Optimalisasi nilai manfaat Jalan Tol Trans Sumatera**,

diperlukan penanganan exit toll yang terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengungkit perekonomian wilayah sekitar

- **Tingkat kemantapan Jalan Provinsi** membaik dari 70,02 % (2016) menjadi 74 % (2021); masih terkendala dengan terbatas kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan
- **Pelayanan Dasar terkait Akses Masyarakat** terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak dan Aman masih memerlukan strategi dan pembiayaan:
  - ❖ Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
  - ❖ Kawasan Kumuh dan/atau serta Permukiman Kumuh.
  - ❖ Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan standar rumah MBR;
  - ❖ Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- **Irigasi sebagai pendukung Sektor Pertanian** :
  - ❖ Luas baku jaringan irigasi kewenangan provinsi 21.045 Ha mengalami kerusakan mencapai 10%.
  - ❖ Krisis cadangan air pada 3 bendungan (Batutegi, Way Rarem, dan Way Jepara) karena *catchment area* yang rusak.
- **Lampung sebagai daerah rawan bencana** memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang antisipatif bencana.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

a) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan

produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

c) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2023 didasarkan pada kinerja ekonomi pada Tahun 2020-2021, rencana target Tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023. Pasca Pandemi Covid-19, kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diarahkan pada penguatan ekonomi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

3.1.3. Kinerja Makro Ekonomi Daerah

3.1.3.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Merujuk data PDRB harga berlaku, perekonomian Provinsi Lampung meningkat dari Rp. 306,70 Triliun menjadi Rp. 356,68 Triliun pada periode 2017-2019. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sempat menekan kapasitas perekonomian Lampung menjadi Rp. 353,53 Triliun. Melalui serangkaian implementasi kebijakan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat; perekonomian Lampung tahun 2021 mulai membaik. PDRB (ADHB) Lampung di tahun 2021 mencapai Rp. 371,90 Triliun membaik dari tahun 2020 (masa bencana Covid-19). Demikian pula tinjauan PDRB berdasarkan Harga Konstan (ADHK 2010), PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2021 mencapai Rp. 247 Triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 240,29 Triliun.

Tabel III - 1 Nilai PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

TAHUN	ADHK (Juta Rupiah)	ADHB (Juta Rupiah)
2017	220.626.096,76	306.700.430,70
2018	232.165.986,99	332.446.070,68
2019	244.380.371,81	356.676.828,00
2020	240.306.857,37	353.530.039,00
2021	247.001.670,00	371.903.172,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Secara spasial, kapasitas perekonomian Lampung menunjukkan peran yang cukup strategis di Pulau Sumatera maupun nasional. Pada periode 2017-2021, secara rata-rata peran ekonomi Lampung pada **lingkup Pulau Sumatera** berada pada kisaran **10,11 – 10,50 persen**, dimana pada masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mampu berkontibusi sebesar 10,50 persen; dan berkontribusi **2,19 – 2,24 persen** secara **nasional**. Kontribusi tertinggi justru terjadi di tahun 2020 dimana pandemic Covid-19 sedang mewabah di berbagai wilayah tanah air.

Tabel III - 2 Kontribusi PDRB (ADHB) Prov. Lampung terhadap PDRB Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021

TAHUN	Nilai PDRB (ADHB) Prov. Lampung (Rp. Triliun)	Kontribusi Lampung terhadap Sumatera (%)	Kontribusi Lampung terhadap Nasional (%)
2017	306,70	10,27	2,23
2018	332,45	10,30	2,22
2019	356,68	10,45	2,22
2020	353,53	10,50	2,24
2021	371,90	10,11	2,19

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.2 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Meninjau PDRB menurut sisi Lapangan Usaha, perekonomian Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2021 didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu : sektor Pertanian (kisaran 28-30 persen); sektor Industri Pengolahan (kisaran 19-20 persen); dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (kisaran 11 persen); diikuti dengan peran sektor Transportasi/Pergudangan; sektor Pertambangan; dan sektor Informasi & Komunikasi.

Hasil pengamatan terhadap kecenderungan kontribusi kelompok lapangan usaha pada periode 2017 s.d. 2021, menunjukkan bahwa:

- Kontribusi kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menurun; dari sekitar 30 % di tahun 2017 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi sekitar 28 % di tahun 2021.
- Sepanjang tahun 2017-2021 kontribusi kelompok Industri Pengolahan berada pada kisaran 19 - 20 %. Porsi tertinggi Sektor Industri Pengolahan terjadi di tahun 2019 (sebelum Covid-19) yang sebesar 20%. Di tahun 2020 (pemberlakuan PSBB saat Pandemi Covid-19) peran Sektor Industri Pengolahan sedikit menurun menjadi 19,42 %, dan kembali meningkat menjadi 19,65 % di tahun 2021 sejalan dengan kebijakan pelonggaran aktifitas di sektor ekonomi.
- Pada pengamatan tahun 2017-2021, kontribusi kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; secara relatif berada pada level 11%. Secara historis, kontribusi terbesar tertinggi sektor ini terjadi di tahun 2019 (sebelum Covid-19) yang sebesar 11,59 %. Di tahun 2020 (berlakunya PSBB saat Pandemi Covid-19) peran Sektor Perdagangan sedikit menurun menjadi 11,18 %, dan kembali meningkat menjadi 11,70 % di tahun 2021 seiring bergairahnya aktifitas ekonomi pasca pandemi.
- Terjadinya pandemic Covid-19 di tahun 2020, telah meningkatkan kontribusi Jasa Layanan kesehatan di tahun 2020-2021. Demikian pula halnya dengan kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi, meningkat secara signifikan sejalan dengan banyaknya pola aktifitas masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi secara masif.

Tabel III - 3 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,57	29,90	28,79	29,78	28,39
B. Pertambangan dan Penggalian	5,65	5,74	5,55	5,01	5,58
C. Industri Pengolahan	19,02	19,50	20,00	19,42	19,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11
F. Konstruksi	9,34	9,48	9,53	9,38	9,89
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	11,04	11,16	11,59	11,18	11,70
H. Transportasi dan Pergudangan	5,28	5,18	5,24	5,03	4,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,58	1,63	1,57	1,48
J. Informasi dan Komunikasi	3,92	3,93	3,99	4,32	4,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,15	2,09	2,19	2,22
L. Real Estat	2,91	2,84	2,96	3,00	2,91
M,N. Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,51	3,45	3,39	3,63	3,58
P. Jasa Pendidikan	2,78	2,82	2,92	3,10	3,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	0,95	0,94	0,95	1,07	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,90	0,92	0,95	0,91	0,85
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.3 Struktur PDRB menurut Pengeluaran

PDRB (ADHB) Menurut Pengeluaran menggambarkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. PDRB Menurut Pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga; (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga; (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah; (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) Ekspor Netto (ekspor dikurangi impor).

Merujuk tinjauan data PDRB menurut sisi Pengeluaran, struktur perekonomian Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2021 ditopang dari Konsumsi Rumah Tangga (pada kisaran 60 %), diikuti dengan PMTB (kisaran 31-33 %) dan konsumsi belanja pemerintah (pada kisaran 7 – 8 %), dengan *share* kegiatan ekspor yang lebih rendah dibanding kegiatan impor selama periode pengamatan. Pada lingkup perdagangan global, meskipun porsi

impor meningkat, namun porsi ekspor juga terus mengalami peningkatan yang menggembirakan dari sekitar 38 % di tahun 2017 menjadi sekitar 47% di tahun 2021. Secara keseluruhan, struktur perekonomian menurut kelompok pengeluaran pada periode pengamatan tersebut belum banyak berubah secara signifikan.

Tabel III - 4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	59,47	60,38	61,77	62,28	61,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,48	1,66	1,73	1,69	1,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,68	8,39	8,19	8,29	7,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,46	32,79	33,47	32,85	33,78
5. Perubahan Inventori	0,42	0,50	0,11	0,53	0,22
6. Ekspor	38,62	41,14	40,26	40,59	47,00
7. Impor	40,14	44,85	45,51	46,24	52,47
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.4 Rasio PMTB dan ICOR

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam suatu perekonomian dapat menggambarkan besarnya nilai investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang terjadi di suatu wilayah. Secara umum, peran investasi dalam perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan trend yang meningkat dari 31,46 % di tahun 2017 menjadi 33,78 % pada 2021 (meskipun sempat terjadi perlambatan di tahun 2020). Berkenaan dengan hal itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Lampung tahun 2017 hingga 2019 juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namu, sejalan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021, Nilai ICOR Provinsi Lampung mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 12,22 di tahun 2021. Nilai ICOR tersebut tentunya

memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin bertambah; yang tentunya kurang efisien secara ekonomi.

Tabel III - 5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio PMTB terhadap PDRB	31,46	32,79	33,48	32,95	33,78
ICOR	6,73	6,86	6,78	-19,32	12,22

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2016-2019 perekonomian Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meningkat dari tahun ke tahun dari 5,14% di tahun 2016 menjadi 5,26 % pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan pada periode tersebut adalah sebesar 5,19 % per tahun. Terjadinya pandemi global Covid-19 pada tahun 2020 telah menekan target-target pembangunan di bidang ekonomi baik pada skala global, nasional hingga ke tingkat daerah. Catatan statistik menunjukkan bahwa perekonomian Lampung di tahun 2020 terkontraksi menjadi minus 1,67 %.

Meski demikian, bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih lebih baik dibandingkan perekonomian Nasional yang tertahan pada angka minus 2,07 %. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi dan mulai terkendalinya Covid-19 pada skala global dan nasional, perekonomian Lampung pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,79 % beriring dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69 % maupun perekonomian pulau Sumatera yang sebesar 3,18 % pada periode yang sama.

Grafik III - 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017– 2021

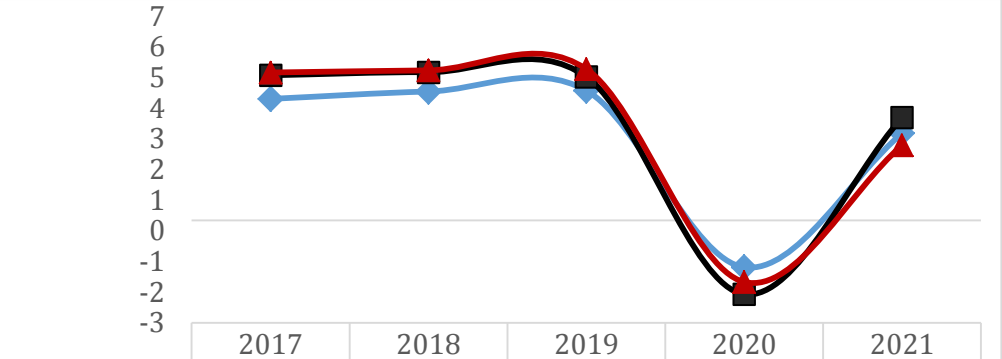

	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera	4,3	4,54	4,57	-1,19	3,18
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69
Lampung	5,16	5,23	5,27	-1,67	2,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2021 mengalami perbaikan seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional. Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2021 terhadap triwulan III tahun 2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar minus 6,37 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,49 persen, diikuti Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 6,68 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 2,79 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,26 persen.

Tabel III - 6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017– 2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	0,97	1,34	0,66	-0,4
B. Pertambangan dan Penggalian	6,39	2,03	2,7	-3,5	-5,28
C. Industri Pengolahan	6,18	9,04	8,24	-5,25	4,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,43	6,54	9,35	-0,6	-6,8

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	7,15	3,59	5,29	5,06	6,94
F. Konstruksi	10,96	8,35	6,01	-2,05	6,95
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	6,51	6,87	7,2	-6,64	8,26
H. Transportasi dan Pergudangan	6,6	5,96	8,08	-5,61	2,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,03	10,49	9,1	-5,01	-1,54
J. Informasi dan Komunikasi	10,74	8,14	7,96	8,02	6,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	2,27	2,85	3,76	2
L. Real Estat	5,96	3,5	5,88	-1,73	1,31
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	2,19	3,97	-1,43	1,05
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	4,19	5,84	4,78	4,94	4,21
P. Jasa Pendidikan	5,05	9,09	8,33	4,11	1,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	4,77	6,29	6,81	10,93	3,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,92	9,32	8,08	-4,59	-2,15
PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.7 Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Lampung menurut pengeluaran Tahun 2021 mengalami peningkatan setelah mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar minus 1,67 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,37 persen, yang didorong oleh pertumbuhan negatif komponen ekspor sebesar 4,02 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,60 persen.

Pada tahun 2021, seluruh Komponen Pengeluaran mengalami pertumbuhan tumbuh sebesar 2,79 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,94 persen

dan Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,63 persen;

Tabel III - 7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2017 –2021

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,54	5,69	5,63	-1,64	1,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,19	16,29	10,15	-4,16	3,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,14	1,7	2,88	-1,47	0,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,93	9,99	5,18	-5,53	3,94
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	5,77	11,64	5,06	-4,17	13,78
7. Impor	7,67	14,26	4,10	-5,43	11,62
Pertumbuhan PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.8 Pendapatan Perkapita

Merujuk data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada kurun waktu tahun 2017 s.d. 2019 PDRB Perkapita penduduk Lampung meningkat dari Rp. 37 Juta menjadi Rp. 42,17 juta. Selanjutnya, berkenaan dengan melemahnya perekonomian di tahun 2020, nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung juga menurun menjadi Rp. 39,35 Juta. Meski demikian, seiring dengan membaiknya perekonomian daerah, nilai PDRB Perkapita penduduk Lampung di tahun 2021 mencapai Rp. 40,95 Juta meningkat dibanding dengan tahun 2020. Meninjau periode waktu pengamatan tersebut, besaran nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel III - 8 PDRB Perkapita Provinsi Lampung (ADHB) Tahun 2017 – 2021

Tahun	PDRB Perkapita (ADHB) Provinsi Lampung (Juta Rupiah)
2017	37,00
2018	39,86
2019	42,17

Tahun	PDRB Perkapita (ADHB) Provinsi Lampung (Juta Rupiah)
2020	39,35
2021	40,95

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Lebih lanjut, dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tampak bahwa PDRB Perkapita penduduk Lampung pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 26,615 Juta dan meningkat hingga ke tahun 2019 yang sebesar Rp. 28,895 juta. Namun, catatan nilai tersebut sempat tertekan di tahun 2020 menjadi Rp. 26,744 juta ; dan kembali meningkat menjadi Rp. 27,197 juta di tahun 2021. Adapun, nilai PDRB per Kapita Provinsi Lampung pada periode 2017-2021 tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel III - 9 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK) Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pendapatan Perkapita (ADHK) Provinsi Lampung (Juta Rupiah)	Pendapatan Perkapita (ADHK) Nasional (Juta Rupiah)
2017	26,615	37,851
2018	27,741	39,341
2019	28,895	41,022
2020	26,744	39,779
2021	27,197	40,776

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.9 Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017-2021 inflasi umum secara tahunan di Provinsi Lampung berada pada kisaran 2,00 - 3,61 persen, sementara tingkat inflasi

nasional berkisar 1,68 - 3,02 persen. Secara umum, laju inflasi Lampung dan Nasional masih stabi dan cukup terkendali. Inflasi tertinggi Provinsi Lampung terjadi di tahun 2017 yang tercatat 3,61% dan terendah di tahun 2020 pada tingkat 2 %. Selama lima tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan Lampung berada di atas laju inflasi nasional.

Grafik III - 2 Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017– 2021

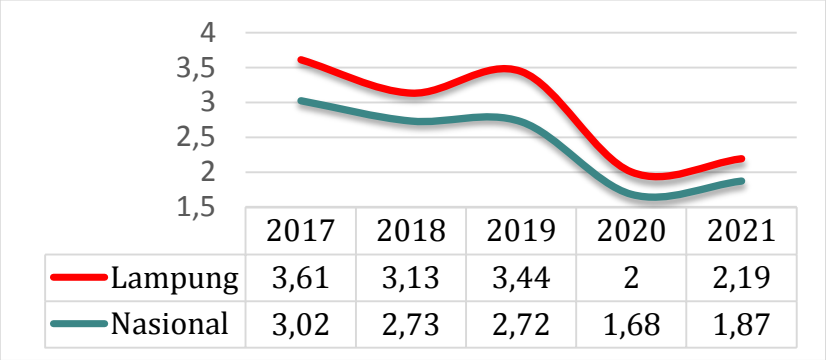

	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	3,61	3,13	3,44	2	2,19
Nasional	3,02	2,73	2,72	1,68	1,87

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.10 Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah (Indeks Wiliamson)

Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pada prakteknya dapat dapat berdampak pada munculnya ketimpangan/ketidakmerataan. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kapasitas ekonomi daerah, keadaan geografis dan demografis wilayah dan lain sebagainya. Indeks Williamson merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
	0,26261	0,26360	0,26458	0,26314	Data belum di publikasi oleh BPS

Sumber; BPS Lampung 2022 (Data indeks wiliamson terakhir 2020, belum ada data terbaru)

Secara umum, ketimpangan ekonomi antar wilayah (IndeksWilliamson) periode tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan masih pada kisaran 0,262 s.d. 0,264 dimana nilai indeks tertinggi terjadi di tahun

2019 yang sebesar 0,26458 dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 0,26314. Secara theoritis, tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Lampung masih dalam kategori rendah, yang dapat diartikan bahwa perekonomian antar wilayah relatif merata.

3.1.1.11 Rangkuman Kinerja Ekomoni Lampung Tahun 2020-2021

Terjadinya pandemi global Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menekan target-target pembangunan di bidang ekonomi secara cukup tajam pada skala global, nasional hingga ke tingkat daerah. Dalam waktu yang singkat, dampak pandemi Covid-19 telah mengubah arah perekonomian secara drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran; dan telah berdampak pula pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat secara umum.

Mengawali tahun 2021, perekonomian Lampung terus menunjukkan trend perbaikan menuju arah yang positif. Meskipun masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,10 persen (yoy) pada Triwulan I-2021, perekonomian Lampung bangkit dan tumbuh positif sebesar 5,15 persen pada Triwulan II-2021 dan 3,05 persen pada Triwulan III tahun 2021 sejalan dengan optimisme masyarakat dan pelaku usaha terhadap keberhasilan implementasi vaksinasi COVID-19, pelonggaran aktifitas dibeberapa sektor ekonomi dan sosial yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, maupun dukungan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta peningkatan ekspor sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung di beberapa negara mitra dagang dan tren peningkatan harga komoditas yang mendongkrak nilai ekspor komoditas Lampung.

Pada Triwulan III-2021 perekonomian Lampung tumbuh sebesar 3,05% (yoy), meskipun melambat bila dibandingkan triwulan II-2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2020 yang tercatat terkontraksi 2,41% (yoy). Dari **sisi pengeluaran**, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III-2021 didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, serta komponen pengeluaran lainnya yang masih tumbuh positif.

Kinerja sektor eksternal tercatat positif didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor yang juga tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan. Kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,01% (yoy) pada triwulan III 2021, melambat dibandingkan triwulan II-2021 yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy). Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang melambat dipengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Konsumsi Pemerintah tumbuh 2,00% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,70% (yoy). Sejalan dengan itu, Konsumsi LNPRT tumbuh 1,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Selain itu, kinerja investasi pada triwulan III 2021 tumbuh lebih rendah sebesar 3,63% (yoy) dibandingkan 4,47% (yoy) pada triwulan II 2021. Di **sisi lapangan usaha** (LU), pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2021 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja kinerja Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh masing-masing sebesar 7,23% (yoy) dan 10,23% (yoy). Sementara itu, meskipun sempat tumbuh positif pada periode triwulan sebelumnya, pada triwulan III-2021 ini lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki pangsa terbesar terhadap PDRB Provinsi Lampung tercatat terkontraksi minus 1,53% (yoy).

Pada Triwulan IV-2021, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 3,00% (yoy). Realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2020 yang tercatat terkontraksi sebesar 2,25% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2021 didorong oleh peningkatan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kinerja PMTB/Investasi pada triwulan IV 2021 juga tumbuh sebesar 6,41% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (3,63%, yoy). Di sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh

kinerja positif dari LU utama Lampung yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan LU Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 16,81% (yoy) dan 14,63% (yoy).

Secara keseluruhan, perekonomian Lampung tahun 2021 tercatat meningkat sebesar 2,79 persen (yoy), lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi hingga minus 1,67 persen. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan nasional yang didukung oleh perluasan Vaksin Covid-19 dan penerapan protocol Kesehatan di setiap sektor kehidupan masyarakat

Geliat perekonomian juga diikuti dengan membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka di Lampung meningkat dari 4,67 persen pada Agustus 2020 menjadi 4,69 persen pada bulan Agustus 2021. Demikian pula dengan angka kemiskinan, yang bergerak dari 12,76 persen pada September 2020 menjadi 11,67 persen pada September 2021. Di tengah kondisi perekonomian 2021 yang mulai membaik, dinamika perkembangan tingkat harga di Provinsi Lampung masih dalam rentang batas yang terkendali, dimana inflasi gabungan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 2,19 persen.

Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Lampung diprakirakan berada pada kisaran 4,47%–5,29%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2021 yang tumbuh sebesar 2,79%. Pemulihan ekonomi global dan nasional diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2022, di tengah termoderasinya pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu terus di waspadai yang bersumber dari meningkatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Disisi pengeluaran, akselerasi pemulihan ekonomi akan didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, mobilitas masyarakat yang relatif lebih tinggi, dan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi. Prakiraan

pertumbuhan konsumsi sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi, peningkatan omset penjualan, perbaikan disposable income, perbaikan keyakinan konsumen, dan pelonggaran mobilitas masyarakat. Capaian realisasi program vaksinasi yang terus meningkat turut mendukung peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong perekonomian Provinsi Lampung. Hal ini berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja sejalan dengan semakin berkurangnya dampak penyebaran Covid-19 terhadap pasar tenaga kerja. Perkiraan ekonomi yang membaik tersebut yang diimbangi dengan peningkatan serapan tenaga kerja akan mendorong peningkatan omset kegiatan usaha sehingga berdampak pada peningkatan disposable income masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil kajian KPw BI Provinsi Lampung, terdapat peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap peningkatan penjualan, tingkat upah, jumlah tenaga kerja, harga jual, dan investasi pada tahun 2022 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sejalan dengan adanya perkiraan peningkatan kinerja LU utama Provinsi Lampung. Ekspektasi pelaku usaha tersebut juga didukung oleh beberapa faktor pendorong peningkatan kinerja LU Utama Provinsi Lampung, yaitu meningkatnya kapasitas produksi tanaman pangan, terjaganya produksi tanaman sawit di tengah harga acuan CPO dunia yang tetap tinggi, serta berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung, yaitu logistik kereta api Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan. Dari sisi pendapatan masyarakat, perkiraan peningkatan disposable income sejalan dengan perkiraan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2022

Seiring terakselerasinya pemulihan ekonomi, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penghambat pertumbuhan, diantaranya penyebaran Covid-19 varian Omicron di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022 serta perkiraan tertahannya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor karena berakhirnya pelonggaran ketentuan uang muka bagi

pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) paling sedikit 0% dan adanya penyesuaian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada tahun 2022, meski terdapat beberapa penyesuaian besaran insentif PPnBM pada kendaraan yang berjenis low-cost green car (LCGC) pada setiap triwulan tahun 2022.

Disisi Lapangan Usaha (LU), **perekonomian Lampung masih bertumpu pada tiga LU utama yakni LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU industri pengolahan, serta LU perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor.** Sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian Lampung akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung di tahun 2022. Peningkatan kinerja komponen permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, akan tercermin pada akselerasi pertumbuhan yang terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat dari peningkatan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Setelah terkontraksi pada tahun 2021, output LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan, **Lapangan Usaha pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun 2022 diindikasikan dapat tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.** Hal ini akan didorong oleh peningkatan produktivitas kegiatan pertanian yang didukung oleh proses pengairan yang lebih optimal sejalan dengan telah selesainya proyek rehabilitasi saluran irigasi sentra pertanian di tahun 2021 pada Januari 2022. Selain itu, terdapat perkiraan peningkatan produksi kelapa sawit akibat pengelolaan perkebunan yang lebih baik seiring semakin terkendalinya penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. Adapun peningkatan permintaan kelapa sawit yang lebih tinggi didukung oleh meningkatnya permintaan oleofood dan kebutuhan CPO untuk biodiesel di dalam negeri. Potensi peningkatan output yang lebih tinggi juga didukung oleh berbagai program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung untuk meningkatkan kuantitas

dan kualitas produksi tanaman pangan melalui penyaluran sarana pasca panen sejumlah 70 unit, pengembangan kawasan ubi kayu seluas 1.200 Ha, pengembangan kawasan padi seluas 4.000 Ha, pengembangan kawasan padi biofortifikasi seluas 900 Ha, serta bantuan benih padi inbrida (25kg/Ha) pada lahan seluas 35.000 Ha.

Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat potensi pertumbuhan output LU pertanian, diantaranya adalah fenomena La Nina dengan intensitas rendah sampai dengan sedang pada triwulan IV 2021 dan triwulan I 2022, El Nino pada paruh kedua tahun 2022, serta harga pupuk dan pestisida yang diperkirakan tetap tinggi pada paruh pertama tahun 2022 sebagai dampak dari adanya gangguan rantai pasokan, permintaan yang lebih tinggi, serta kenaikan biaya pengiriman dan input.

Sejalan dengan peningkatan kinerja LU Pertanian, pemulihan kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan berlanjut pada keseluruhan tahun 2022, dan berpotensi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perkiraan peningkatan produksi crude palm oil (CPO) karena pengelolaan perkebunan yang lebih baik dan optimalnya operasional pabrik didukung oleh dampak La Nina yang relatif terkendali jika dibandingkan dengan kondisi di Malaysia yang dilanda banjir pada triwulan I-2022. Permintaan CPO juga diperkirakan mengalami peningkatan seiring berlanjutnya pemulihan sektor Horeca dan adanya peningkatan alokasi kuota biodiesel B30 menjadi 10 juta kiloliter pada tahun 2022. Adapun produksi gula kristal dan rafinasi juga diperkirakan mengalami peningkatan, sejalan dengan kuota perizinan impor (PI) gula rafinasi untuk tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,4 juta ton, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuota tahun 2021 (3,1 juta ton).

Hasil liaison KPw BI Provinsi Lampung juga mendukung perkiraan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dimana responden (korporasi) liaison menyatakan optimismenya atas peningkatan utilisasi faktor produksi dan permintaan domestik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan output yang lebih tinggi

diperkirakan tertahan oleh risiko terhambatnya aktivitas produksi dan tertahannya peningkatan permintaan di tengah peningkatan kasus baru varian omicron Covid-19 pada triwulan I 2022. Selain itu, kebijakan DMO dan DPO untuk CPO yang diterapkan pada Januari 2022 berpotensi menghambat pertumbuhan output industri pengolahan CPO, terutama bagi pelaku usaha yang hanya menjual produknya ke pasar domestik dan tidak memiliki perkebunan sawit terintegrasi.

Pemulihan kinerja LU Perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan berlanjut dan juga berpotensi tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut didorong oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik sejalan dengan meningkatnya optimisme konsumen terhadap perekonomian ke depan serta peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan penjualan yang didukung oleh akselerasi program vaksinasi dan booster vaksin Covid-19.

Beberapa faktor yang turut mendukung peningkatan volume perdagangan diantaranya penerapan standar emisi Euro 4 pada kendaraan diesel dan meredanya krisis chip semikonduktor global yang mendorong peningkatan produksi kendaraan bermotor dan alat-alat elektronik. Peningkatan ekspektasi dan volume perdangan tersebut juga akan tercermin dari mobilitas masyarakat tahun 2022 yang diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama pada momen Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Nataru (Natal dan Tahun Baru) tahun 2022. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022 diperkirakan tertahan akibat adanya penyebaran Covid-19 varian omicron serta berakhirnya pelonggaran ketentuan uang muka bagi pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) paling sedikit 0% dan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100% pada 31 Desember 2021, meskipun terdapat penyesuaian pada insentif PPnBM pada setiap triwulan di tahun 2022.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 saat ini dan tahun 2023 mendatang. Keadaan tersebut turut pula didukung dengan optimisme perekonomian global dan nasional yang terus menuju perbaikan pasca Covid-19 di tahun 2020. Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen yang akan didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Selain itu keberhasilan program vaksinasi, pengendalian atas pelonggaran sektor ekonomi dan aktifitas sosial, dan stimulus lanjutan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 serta hadirnya perbaikan kinerja perekonomian di tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkitnya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan optimisme yang lebih baik di tahun 2023.

Meski demikian, pemerintah daerah meyakini bahwa pengendalian dan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan tetap menjadi kunci keberhasilan menuju kebangkitan ekonomi. Oleh karenanya, sikap waspada terus dikedepankan, mengingat hingga saat ini ancaman gelombang ke-3 virus Covid-19 masih ada di tengah masyarakat. Akselerasi program vaksinasi secara masif dan peningkatan protokol kesehatan secara simultan akan terus dilanjutkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan prospek ekonomi dalam jangka pendek.

Di samping itu, terdapat resiko pada ***sisi eksternal*** yang terkait dengan adanya dinamika geopolitik perekonomian global (adanya ketegangan politik antara Rusia- Ukraina-Amerika serta persaingan ekonomi Amerika dan China) perlu menjadi pertimbangan, dimana goncangan (=perlambatan) akan menahan laju permintaan perekonomian global yang dapat berdampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pada ***sisi internal***, Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa pembangunan yang tengah dan

yang akan kita laksanakan ke depan masih menghadapi berbagai tantangan dalam banyak aspek pembangunan. Perekonomian Lampung memerlukan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan ditopang oleh basis ekonomi yang tangguh. Derajat kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang handal serta perbaikan kualitas lingkungan harus terus ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan kualitas layanan publik dan layanan birokrasi tetap perlu terus dilakukan, yang diikuti dengan pengelolaan alokasi fiskal pembangunan secara lebih disiplin dan produktif. Untuk menjawab tantangan ke depan, dibutuhkan sinergi, inovasi, penguasaan teknologi dan sikap antisipatif.

3.1.5. Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Daerah.

Dalam Rancangan RKP Tahun 2023 bahwa pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemic COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Dalam Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023 Pasal 2 bahwa RKPD Provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dalam RKPD Tahun 2023 masih memprioritaskan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 di daerah.

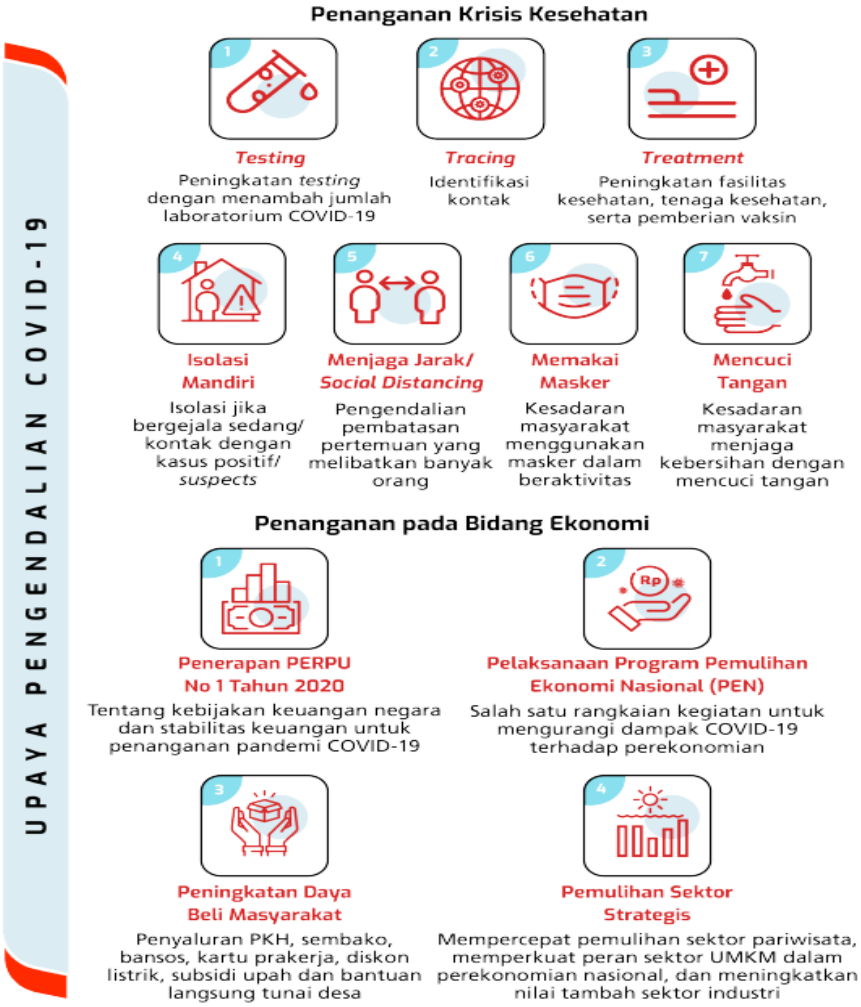

Sumber : Rancangan RKP 2023

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian herd immunity. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren

positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023.

Memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tanggal 5 Februari 2022, Provinsi Lampung menetapkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kriteria Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung.

Situasi Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 sudah terlihat trend kenaikan kasus mulai minggu ke-3 Januari 2022 jumlah kasus bulan Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 sebesar 695 kasus yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Adanya peningkatan kasus baru perlu disikapi dengan positif, karena merupakan kinerja petugas di lapangan yang melakukan skrining secara aktif; termasuk skrining pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Satuan Pendidikan untuk menekan penularan dengan segera melakukan Isolasi dan Karantina. Ada kecenderungan peningkatan kasus baru dalam 1 minggu terakhir dan sudah ditemukan Varian Omicron di Provinsi Lampung sebanyak 5 kasus (Berdasarkan hasil WGS yang dikirimkan dari Litbangkes). Terkait adanya omicron di Lampung sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat dengan Satgas COVID-19 tanggal 31 Januari 2022, dilanjutkan dengan Rapat Gubernur Bersama Forkopimda tanggal 4 Februari 2022.

Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ada beberapa kegiatan yang dilakukan :

Kegiatan pada Sektor Hulu :

1. Pengetatan PROTOKOL KESEHATAN dan Pelaksanaan Aplikasi Peduli Lindungi pada Area Publik;
2. Percepatan Vaksinasi untuk mencapai *Herd Immunity;*
3. Surveilans Faktor Risiko : ILI, SARI untuk mendeteksi kasus secara dini;

4. Surveilans PTM di Satuan Pendidikan (RDT Antigen) dan populasi berisiko pada *Closed Residence;*
5. Surveilans GENOM;
6. Mengintensifkan Testing dan Tracing dalam pencarian Kontak Erat;
7. Aktifkan Posko pada PPKM Mikro pada level Kelurahan/RT/RW;
8. Pengetatan pintu masuk.

Kegiatan pada Sektor Hilir :

1. Persiapan Fasilitas Sarana Kesehatan , SDM Kesehatan, Obat-obatan dan Oksigen;
2. Persiapan Sarana Isolasi dan Karantina terpusat (Pemerintah), masyarakat dengan isolasi mandiri sesuai standar;
3. Persiapkan Laboratoium untuk penegakkan diagnostik (saat ini sarana PCR di Lampung sudah ada 13 sarana PCR Pemerintah dan Swasta).

Pada awal tahun 2022, vaksinasi *booster* juga akan mulai dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan antibody. Disamping itu, strategi pengendalian COVID-19 terus dilanjutkan melalui :

1. Pelaksanaan 3-TI : Testing, Tracing, Treatment (Isolasi Terpusat dan Karantina)
2. Penegakan disiplin Masyarakat dengan PROTOKOL KESEHATAN atau 3M atau 5 M
3. Akselerasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dengan Kolaborasi PEMERINTAH dengan MASYARAKAT
4. Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di masyarakat
5. Pembatasan Mobilitas Pelaku Perjalanan Pengetatan pintu masuk dari perjalanan Luar negeri dan antar provinsi, Penerapan PPKM
6. Pemantauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba dari Luar Negeri

Lebih lanjut, sebagai upaya percepatan *herd immunity* di Provinsi Lampung, dilakukan pula beberapa antara lain :

1. Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi pada publik area, perkantoran, sekolah dan lain-lain, bila ditemukan ada yang belum lengkap dosis vaksinasinya diarahkan ke fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi di tempat (On site)
2. Melakukan vaksinasi dan percepatan *booster* secara onsite dan mobile
3. Menjadikan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap (2 Dosis) sebagai syarat untuk melakukan :
   - Acara keagamaan dan acara sosial
   - Pemberian bantuan sosial
   - Syarat Administrasi perjalanan, Pendidikan/bea siswa, area mall, area publik dan administrasi lainnya

Informasi Monitoring Vaksinasi COVID-19 Provinsi Lampung Per Juni 2022

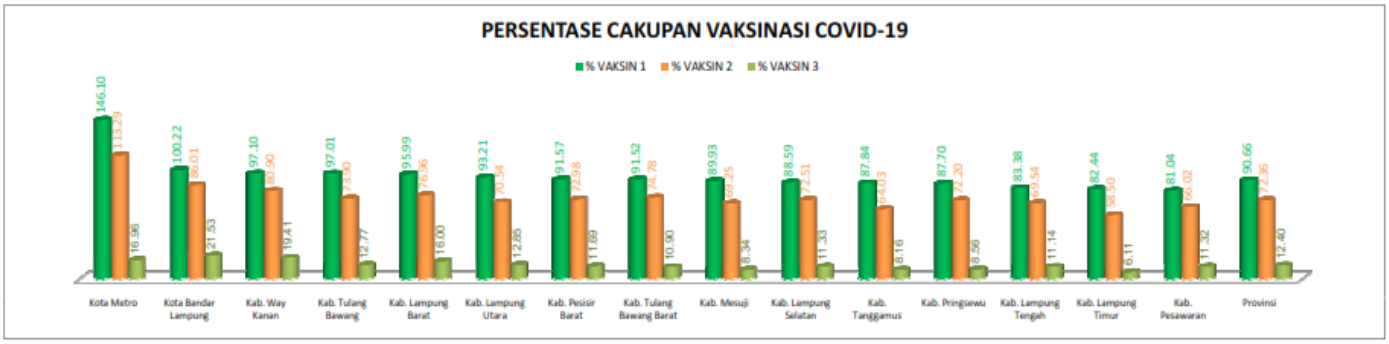

Kab/Kota	Sasaran	VAKSINASI DOSIS 1	% VAKSINASI DOSIS 1	VAKSINASI DOSIS 2	% VAKSINASI DOSIS 2	VAKSINASI DOSIS 3	% VAKSINASI DOSIS 3
Kab. Lampung Barat	220,417	211,587	95.99	169,633	76.96	35,267	16.00
Kab. Lampung Selatan	774,818	686,416	88.59	561,810	72.51	87,769	11.33
Kab. Lampung Tengah	1,096,836	914,501	83.38	762,775	69.54	122,189	11.14
Kab. Lampung Timur	830,734	684,835	82.44	485,938	58.50	50,753	6.11
Kab. Lampung Utara	458,561	427,436	93.21	323,486	70.54	58,948	12.85
Kab. Mesuji	166,216	149,483	89.93	115,100	69.25	13,864	8.34
Kab. Pesawaran	347,394	281,533	81.04	229,343	66.02	39,311	11.32
Kab. Pesisir Barat	115,175	105,464	91.57	84,055	72.98	13,468	11.69
Kab. Pringsewu	299,339	262,515	87.70	216,113	72.20	25,628	8.56
Kab. Tanggamus	471,722	414,360	87.84	302,039	64.03	38,471	8.16
Kab. Tulang Bawang	312,547	303,210	97.01	230,962	73.90	39,902	12.77
Kab. Tulang Bawang Barat	210,123	192,298	91.52	157,136	74.78	22,911	10.90
Kab. Way Kanan	341,283	331,397	97.10	276,087	80.90	66,238	19.41
Kota Bandar Lampung	875,285	877,207	100.22	752,861	86.01	188,407	21.53
Kota Metro	124,776	182,296	146.10	141,353	113.29	21,167	16.96
Provinsi	6,645,226	6,024,538	90.66	4,808,691	72.36	824,293	12.40

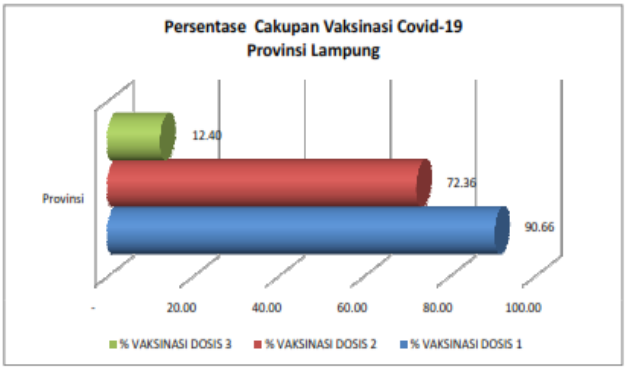

Sumber : *Control Tower Vaksin KPCPEN-Dinas Kesehatan Prov Lampung, 2022*

Dalam rangka upaya pemantapan pemulihan ekonomi, salah satunya adalah melalui Peningkatan Investasi. Penting untuk terus diupayakan peningkatan Investasi dalam rangka percepatan pemantapan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi, pemberian insentif pajak bagi investor, jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan, promosi investasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi. Beberapa rencana program strategis Provinsi Lampung yang sedang dilakukan untuk mendorong peningkatan Investasi antara lain: Pembangunan Kawasan pariwisata Terpadu Bakauheni, Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Way Pisang, Pengembangan Food Estate dan Rencana Pengembangan Sport Center.

Upaya lain yang dilakukan adalah **Memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan**, sesuai dengan basis ekonomi Lampung, dimana hampir 50 persen penduduk usia kerja berkecimpung pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki program "Kartu Petani Berjaya" yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian (holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan). Selanjutnya adalah **Pemulihan sektor UMKM, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata**, untuk optimalisasi sektor-sektor industri unggulan daerah secara bertahap; Untuk menggerakkan ekonomi dan membangkitkan kembali potensi Pariwisata daerah, pemerintah melakukan pembukaan kembali Destinasi Wisata dengan disiplin menerapkan protocol kesehatan terutama destinasi wisata yang berresiko rendah misalnya wisata alam yang banyak terdapat di Provinsi Lampung, yang didukung dengan peningkatan pemasaran destinasi wisata daerah; seraya memastikan bahwa aktifitas tersebut tetap mengedepankan aspek kesehatan.

3.1.6. Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi

Pemulihan Ekonomi mensyaratkan adanya keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 dapat terkendali, perekonomian Lampung tahun 2023 diarahkan untuk tetap tumbuh sejalan dengan optimisme perekonomian nasional yang terus menuju perbaikan.

Pada **sisi penawaran**, data statistik ekonomi Lampung tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 29 persen). Di tengah masa pandemi Covid-19 yang melanda, porsi (=*share*) ekonomi dan tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian sepanjang tahun 2020-2021, secara simultan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sektor pertanian menyerap lebih dari 40 persen penduduk yang bekerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, guna

memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten melaksanakan dan melanjutkan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) ditahun-tahun mendatang, dimana petani peserta akan menerima kemudahan berupa ketersediaan pupuk dan alsintan, fasilitasi permodalan, pendampingan manajemen usaha pertanian, termasuk jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu, serta beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu. Disamping itu, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk unggulan pertanian juga menjadi bagian penting untuk meningkatan daya saing dan nilai tambah.

Demikian pula dengan Lapangan Usaha **sektor industri pengolahan** dengan pangsa 19,70 persen dan **sektor perdagangan** dengan pangsa mencapai 11,39 persen. Kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan tentunya tidak terlepas dari **peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** di Provinsi Lampung, yang memiliki potensi yang sangat tinggi. Hingga tahun 2019 tercatat bahwa di Provinsi Lampung terdapat 65,4 juta unit UMKM dengan proporsi Mikro sebesar 64,6 juta unit (98,67%), Kecil sebesar 798 ribu unit (1,22%), dan Menengah sebesar 65 ribu unit (0,1%). Dari sisi jumlah tenaga kerja, usaha Mikro mempekerjakan sebanyak 109 juta orang (89,04%), Kecil sebanyak 5,9 juta orang (4,81%), dan Menengah sebanyak 3,7 juta orang (3,07%). Dari sisi kontribusi terhadap PDB atas dasar harga berlaku, usaha Mikro berkontribusi sebanyak Rp5,9 Milyar (36,77%), Kecil sebanyak Rp1,5 Milyar (9,6%), dan Menengah sebanyak Rp2,1 Milyar (13,7%). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat, kebijakan ekonomi ke depan tetap diarahkan pada penguatan akses keuangan yang inklusif, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen serta fasilitasi transformasi ekonomi digital bagi pelaku usaha; sehingga kegiatan UMKM dapat semakin berdaya saing dan membuka peluang akses lapangan kerja bagi Angkatan Kerja yang terus bertambah (usia produktif).

Lebih lanjut, keberlanjutan program pengembangan wilayah yang telah dicanangkan yaitu Bakauheni Harbour City (BHC) akan terus diakselerasi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dengan menggandeng pihak swasta, sehingga akan mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru, berkembangnya potensi ekonomi daerah, yang dapat berdampak *multiplayer effect* pada banyak sektor usaha dan berbagai kalangan pelaku usaha.

Pada **sisi permintaan**, komponen utama penggerak ekonomi Lampung didominasi oleh **konsumsi rumah tangga** dengan pangsa pada kisaran 55-60 persen dari total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung. Meskipun terbatas, kemampuan konsumsi masyarakat di masa pandemi masih tumbuh positif sejalan dengan pembukaan aktivitas ekonomi yang didukung oleh perluasan program vaksinasi, serta perbaikan pendapatan masyarakat secara umum seiring pemulihan ekonomi daerah. Program peningkatan pendapatan dan program bantuan sosial ikut menopang terjaganya kemampuan konsumsi masyarakat tahun 2021. Selain itu, adanya perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tercatat mengalami peningkatan yakni sebesar 8,91% (yoy) pada triwulan III 2021 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (8,33%; yoy), dimana sektor pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Lampung dan memiliki kontribusi yang besar (29,94%) pada perekonomian Lampung cukup berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat secara umum. Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga akan dipertahankan untuk tumbuh positif seiring dengan meningkatnya optimisme konsumen terhadap kinerja perekonomian ke depan. Perluasan dan percepatan program vaksinasi untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19, serta penerapan protokol kesehatan diyakini dapat berpengaruh terhadap laju pemulihan ekonomi di berbagai daerah, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Disamping itu, guna menahan laju meningkatnya kemiskinan secara makro, pemerintah akan terus melanjutkan program pengendalian inflasi serta lanjutan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, yang dikombinasikan dengan

program bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro dan kecil.

Demikian pula konsumsi **Belanja pemerintah** terhadap perekonomian, akan diarahkan pada pelaksanakan pelayanan publik dan Belanja Prioritas yang benar-benar memiliki dampak untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Terkait hal tersebut, distribusi fiskal dari sisi waktu dan disiplin dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat memberi dukungan positif terhadap perekonomian.

Terkait dengan upaya untuk mendorong tetap tumbuhnya **Investasi,** Pemerintah Daerah akan terus menjaga persepsi positif investor swasta, yang dilakukan melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha termasuk aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi); aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi); aspek komunikasi dan program (strategi promosi dengan public relation yang handal, jejaring investor domestik dan internasional yang luas, serta visi, program dan timeline yang jelas). Disamping itu, upaya-upaya untuk memperkuat sinergi antar Pemerintah Daerah dan stake holder terkait, termasuk mempersiapkan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata dengan dukungan regulasi dan infrastruktur dasar yang memadai sehingga dapat menarik minat investor. Demikian pula dengan kegiatan **ekspor** di daerah. Kinerja ekspor yang membaik di tahun 2021 diperkirakan akan terus menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan masih meningkatnya permintaan global dan perbaikan harga komoditas dunia. Meskipun harga produk di pasar global masih dibayangi dengan ketidakpastian dimasa pendemi, namun ketersediaan produk yang berkualitas dan inovasi produk menjadi hal penting untuk mendorong peningkatan nilai ekspor. Oleh karenanya peningkatan dan perluasan akses pasar melalui penguatan fasilitasi dan informasi ekspor akan terus dilakukan.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika global dan nasional, , maka beberapa sasaran kinerja ekonomi dan sosial Provinsi Lampung tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III - 10 Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2023

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,5-4,5
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43-44
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,3-70,6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,0-4,3
5	Kemiskinan (Persen)	11,4-11,9
6	Gini Rasio (Poin)	0,302-0,319
7	Inflasi (Persen)	3±1
8	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	74,87
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	104-105
10	Persentase Peningkatan PAD (Persen)	2,04
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Persen)	7.066

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutya, perencanan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan

Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS). Lebih lanjut, kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah "**PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH "** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan; 2)Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 3)Pembangunan infrastruktur; 4)Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya; 6)Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Selanjutnya, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: mobilisasi pendapatan yang terukur dan realistis, belanja berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah termasuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid-19; penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 dan 2020 serta target pendapatan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021, serta asumsi pendapatan 2022 dan 2023. Sesuai dengan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023.

Tabel III - 11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024

NO	URAIAN (PP No. 58/2005)	REALISASI		NO	URAIAN (PP No. 12/2019)	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
		2019	2020						
1	**PENDAPATAN**	**7.277.774.464.693,53**	**7.041.401.501.207,57**	**1**	**PENDAPATAN**	**7.467.646.672.484,51**	**6.558.085.742.933,00**	**6.468.952.345.093,00**	**7.905.474.971.302,84**
01.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.029.324.859.696,53**	**2.863.527.923.555,57**	**01.01**	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.247.848.123.204,51**	**3,447.849.161.718,00**	**3.368.158.527.678,00**	3.590.574.404.562,84
01.01.01	Pajak Daerah	2.627.888.230.394,00	2.386.345.268.304,00	01.01.01	Pajak Daerah	2.721.138.045.704,00	2.678.859.165.839,00	2.760.298.551.971,00	2.990.347.024.353,54
01.01.02	Retribusi Daerah	11.071.757.866,00	15.176.408.104,00	01.01.02	Retribusi Daerah	27.160.007.996,00	8.424.510.038,00	8.315.825.518,00	14.638.071.549,30
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	27.837.905.348,92	29.873.630.623,14	01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	33.335.927.752,08	276.855.820.869,00	115.247.133.261,00	100.925.001.063,00
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	362.526.966.087,61	432.132.616.524,43	01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	466.214.141.752,43	483.709.664.972,00	484.297.016.928,00	484.664.307.597,00
01.02	**Dana Perimbangan**	**4.192.583.693.214,00**	**4.122.603.929.957,00**	**01.02**	**Pendapatan Transfer**	**4.209.156.682.009,00**	**3.090.977.700.680,00**	**3.087.055.157.680,00**	4.300.856.525.740,00
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak	84.263.676.420,00	125.017.499.210,00	01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	4.201.782.231.009,00	3.062.179.175.100,00	3.062.179.175.100,00	4.271.479.149.796,00
01.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak	53.804.116.325,00	32.776.463.916,00	01.02.02	Transfer Antar Daerah	7.374.451.000,00	28.798.525.580,00	24.875.982.580,00	29.377.375.944,00
01.02.03	DAU	1.906.780.297.000,00	1.732.551.921.000,00						
01.02.04	DAK	283.772.374.173,00	263.393.488.870,00						
01.02.05	DAK Non Fisik	1.863.963.229.296,00	1.968.864.556.961,00						
01.03	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**55.865.911.783,00**	**55.269.647.695,00**	**01.03**	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**10.641.867.271,00**	**19.258.880.535,00**	**13.738.659.735,00**	14.044.041.000,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	11.362.590.000,00	8.835.549.695,00	01.03.01	Pendapatan Hibah	10.564.474.321,00	19.258.880.535,00	13.738.659.735,00	14.044.041.000,00
01.03.03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.756.363.000,00	46.434.098.000,00	01.03.02	Dana Darurat	-			
01.03.04	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.746.958.783,00	-	01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	77.392.950,00			

Sumber : Bappeda, 2022

Struktur pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah Tahun 2023 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 1,36 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2022, penurunan tersebut bersumber diantaranya dari PAD yang ditargetkan turun sebesar 2,31 persen, pendapatan transfer turun sebesar 0,13 persen dan lain–lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 28,66 persen

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan

diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBP.

Adapun langkah-langkah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung pasca pandemi Covid-19 antara lain:

1. Penetapan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pengurangan denda pajak dan keringanan pajak.
2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).
4. Bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret guna mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
6. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
7. Peningkatan Sosialisasi kesadaran membayar pajak melalui door to door yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan unsur pemerintahan Kecamatan dan aparat desa.
8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

9. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
10. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian bahan bakar minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
11. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
13. Kerjasama dengan Ditlantas Polda Lampung, Dinas Perhubungan, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat guna mengotimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.
14. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
15. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
16. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
17. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.
18. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
19. Optimalisasi penerapan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Retribusi Daerah.
20. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
21. Mengoptimalkan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

Sedangkan dari Sektor Pendapatan Transfer, Provinsi Lampung akan terus berupaya meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat guna mendukung Struktur Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai upaya peningkatan fiskal daerah Provinsi Lampung antara lain :

a. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21,
b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
c. Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yag bersumber dana transfer.
d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada **sisi Belanja Daerah** tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti kebijakan *mandatory* dari pemerintah pusat tentang dukungan untuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca pendemi Covid-19.

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow*

program) dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2023 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah dan nasional pasca *Covid*-19; yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

Pada tahun 2023 mendatang, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 6,2 trilyun, terdiri atas : Belanja Operasi sebesar Rp. 4,01 trilyun; Belanja Modal sebesar Rp. 893 Milyar; Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 31,5 milyar ; dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1,32 trilyun. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024

NO	URAIAN (PP No. 58/2005)	REALISASI		NO	URAIAN (PP No. 12/2019)	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
		2019	2020						
2	**Belanja Daerah**	**7.058.713.890.790,72**	**6.967.358.447.958,34**	**5**	**Belanja Daerah**	**7.098.396.074.346,04**	**7.011.699.025.933,00**	**6.267.380.101.556,73**	7.840.187.971.302,84
02.01	**Belanja Tidak Langsung**	**4.601.397.973.966,79**	**4.551.254.974.409,56**	**5.1**	**Belanja Operasi**	**5.151.586.135.630,83**	**4.179.969.568.216,18**	**4.017.059.780.328,45**	4.712.827.849.386,24
02.01.01	Belanja Pegawai	1.761.589.035.076,00	1.731.078.969.141,00	5.1.1	Belanja Pegawai	1.934.793.255.335,00	2.003.181.082.229,69	2.119.479.959.762,78	2.215.937.102.841,26
02.01.02	Belanja Hibah	1.329.394.600.511,00	1.437.518.594.295,00	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.506.811.447.462,71	1.641.319.600.959,29	1.487.906.275.017,67	1.914.991.860.164,64
02.01.03	Belanja Bantuan Sosial	1.030.000.000,00	352.400.000,00	5.1.3	Belanja Bunga	22.161.585.802,00	25.490.000.000,00	3.547.643.288,00	22.694.508.528,07
02.01.04	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota Dan Pemdes	1.459.179.743.870,73	1.231.408.694.144,94	5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	
02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kabupaten/ Kota/ Pemdes Serta Parpol	15.896.272.800,00	-	5.1.5	Belanja Hibah	1.682.979.652.202,12	500.615.433.027,20	391.579.192.260,00	549.906.460.652,27
02.01.06	Belanja Subsidi	926.015.480,00	-	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.840.194.829,00	9.363.452.000,00	14.546.710.000,00	9.297.917.200,00
02.01.07	Belanja Bunga	33.382.304.468,00	31.583.615.813,00	**5.2**	**Belanja Modal**	**850.097.992.024,21**	**1.492.878.044.644,80**	**893.861.334.848,58**	1.682.647.155.669,12
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	-	119.312.701.296,00	**5.3**	**Belanja Tidak Terduga**	**126.400.000,00**	**31.500.000.000,00**	**31.500.000.000,00**	34.728.750.000,00
02.02	**Belanja Langsung**	**2.457.315.916.823,93**	**2.416.103.473.548,78**	**5.4**	**Belanja Transfer**	**1.096.585.546.691,00**	**1.307.351.413.072,02**	**1.324.958.986.379,70**	1.409.984.216.247,48
02.02.01	Belanja Pegawai	166.083.743.332,00	240.233.396.093,00						
02.02.03	Belanja Barang Dan Jasa	1.277.194.649.465,29	1.423.341.867.179,80						
02.02.04	Belanja Modal	1.014.037.524.021,39	752.528.210.219,89						

Sumber : Bappeda, 2022

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi **Penerimaan Pembiayaan** dan **Pengeluaran Pembiayaan**. Secara umum, kebijakan pembiayaan yang ditempuh akan terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah dan Belanja Belanja yang diuraikan sebelumnya, dalam hal Belanja Daerah diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah maka kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup defisit. Terkait hal tersebut, **Penerimaan Pembiayaan** direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Disaat yang bersamaan, **Pengeluaran Pembiayaan** juga akan dialokasikan untuk melaksanakan kewajiban keuangan pemerintah daerah untuk membayar pokok utang kepada pihak ketiga (PT. Sarana Multi Infrastruktur/SMI)**, serta penyertaan modal pada BUMD Provinsi Lampung untuk memperkuat skala usaha BUMD, penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel III - 13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024

NO.	URAIAN	REALISASI			TARGET 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
		2019	2020	2021			
3	**PEMBIAYAAN**	**127.852.838.338,84**	**6.967.358.447.958,34**	**362.093.411.843,04**	**453.613.283.000,00**	**- 201.572.243.536,00**	**- 65.287.000.000,00**
03.01	Penerimaan Pembiayan Daerah	213.992.353.291,31	336.132.388.142,31	190.917.079.139,04	644.793.283.000,00	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00
03.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	86.138.166.352,00	197.176.332.704,00	171.176.332.704,00	191.180.000.000,00	226.572.243.536,00	115.287.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**127.852.838.338,84**	**6.967.358.447.958,34**	**19.740.746.435,04**	**453.613.283.000,00**	**- 201.572.243.536,00**	**- 65.287.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)					-	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun RPJMN Tahun 2020-2024. Diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi daerah pasca keluar dari pandemic Covid 19 sekaligus mengejar pencapaian visi dan misi melalui pencapaian target indikator kinerja daerah dan agenda kerja utama yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 DAN RKP 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :

1. **Pembangunan SDM**

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**

   Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi**

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. **Penyederhanaan Birokrasi**

   Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan stuktural).

5. **Transformasi Ekonomi**

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh raykat Indonesia.

Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.

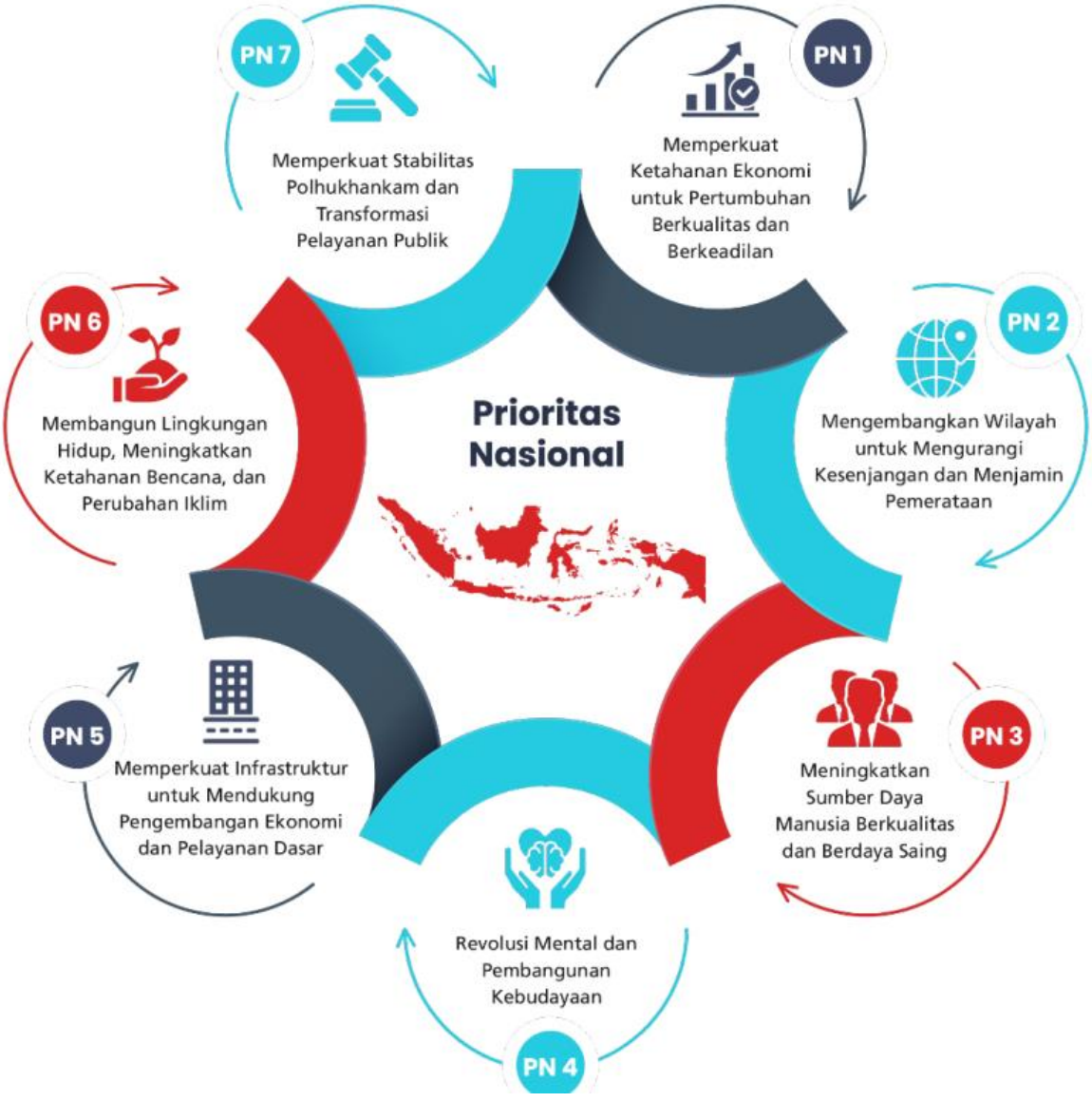

Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2023, yang mengakomodasi hasil Rakortekrenbang Provinsi Lampung Tahun 2023 disajikan pada Tabel IV- 1 Berikut ini.

Tabel IV - 1 Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2023, Sesuai Hasil Rakortekrenbang Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Program Prioritas/Major Project	Kegiatan Hasil Rakortekrenbang	Lokasi
1.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar/Rumah Susun Perkotaan	Pembangunan Rumah Susun ASN/TNI/Polri	Kota Bandar Lampung
2.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar/Rumah Susun Perkotaan	Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja	Kota Bandar Lampung
3.	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan/*Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan	Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Padi di Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat
4.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi/Penguatan Jaminan Usaha serta 350	Pengembangan Sentra Usaha Pangan dan Holtikultura Berbasis Korporasi Petani	Kab. Way Kanan dan Kab. Mesuji

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Program Prioritas/Major Project	Kegiatan Hasil Rakortekrenbang	Lokasi
			Korporasi Petani dan Nelayan.		
5.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi/Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.	Pengembangan Kawasan Peternakan Kambing Berbasis Korporasi di Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu
6.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Infrastruktur Ekonomi/Bukan Major Project	Pengembangan Pelabuhan Mesuji/Tanah Merah	Kab. Mesuji
7.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Infrastruktur Ekonomi/Bukan Major Project	Penanganan Jalan Akses Pelabuhan Mesuji/Tanah Merah	Kab. Tulang Bawang
8.	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan/Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.	Pengembangan Ayam Buras Berbasis Kawasan Integrated Farming/Korporasi	Kab. Pesawaran
9.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi	Demonstrasion Area (DEM AREA) Pengembangan Area	Kab. Lampung Tengah, Kab.

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Program Prioritas/Major Project	Kegiatan Hasil Rakortekrenbang	Lokasi
	Terapan	Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	di Sektor Riil dan Industrialisasi/Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Pengembangan Kakao di Kabupaten Lampung Tengah dan Pringsewu Provinsi Lampung	Pringsewu
10.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar/Bukan Major Project	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Tulang Bawang, Tanggamus, Kab. Lampung Timur, Kab. Way Kanan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung
11.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Transformasi Digital/Bukan Major Project	Penyelenggaraan Aplikasi Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Provinsi Lampung
12.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi	Infrastruktur Ekonomi/Bukan Major Project	Pengembangan Bandara M. Taufik Kiemas (Pekon serai)	Pesisir Barat

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Program Prioritas/Major Project	Kegiatan Hasil Rakortekrenbang	Lokasi
	antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	dan Pelayanan dasar			
13.	Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing/Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Pendidikan Vokasi Berbasis Dual System dan Kompetensi Industri	Kota Bandar Lampung
14.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar/Bukan Major Project	Pembangunan Taman Edukasi di Lampung	Kab. Lampung Selatan
15.	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam negeri (TKDN)/Bukan Major Project	Export Coaching Program, Bimtek dan pendampingan Digital Marketing	Kab. Tanggamus
16.	Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *decent job*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi/Bukan Major Project	Pelatihan dasar SDM bagi Masyarakat di Sekitar Destinasi Wisata	Kab. Pesisir Barat
17.	Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing/Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Provinsi Lampung

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Program Prioritas/Major Project	Kegiatan Hasil Rakortekrenbang	Lokasi
18.	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan/Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Provinsi Lampung
19.	Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing/Bukan Major Project	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Provinsi Lampung
20	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi/Pengelolaan terpadu UMKM.	Pelatihan Akuntansi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Provinsi Lampung
21.	Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan/Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Lampung

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel IV - 2 Indikator Sasaran Makro RKP 2023

	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2023
SASARAN MAKRO RKP 2023	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,9
	- Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy)	3 ± 1
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3–6,0
	- Tingkat Kemiskinan (%)	7,0–8,0
	- Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29–73,35
	- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
	- Nilai Tukar Petani (NTP)	103–105
	- Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105–107

Sumber : Rancangan RKP 2023

4.1.2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019 – 2024

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :

"Rakyat Lampung Berjaya"

Dengan visi pembangungan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi *"subyek utama"* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas *(smart)* dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui Komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :

a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah.

2. Misi-2 : Mewujudkan *"good govemance"* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, melalui komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
   a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokarsi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya

mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekaonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

3. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas:
   a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;

b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
d. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, komitmen dalam pelaksanaan melalui pokok-pokok program prioritas :
   a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
   b. Mengembangakan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut,

pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;

c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandarian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
   a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
   b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui

BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;

c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
   a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
   b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);

c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahateraan masyarakat;
h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal loging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Pencapaian Visi dan Misi dengan dibarengi komitmen yang dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama dan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, sepanjang Tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada kondisi Pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah, yang dipicu oleh penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat global serta implikasinya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif serta sektor-sektor penopang di dalamnya. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, baik yang dilaksanakan dalam

rangka penanganan dampak Covid-19 maupun prioritas lainnya tergambar dalam Agenda Kerja Utama, yaitu :

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai

Agenda Kerja :

1. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukuanan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
    a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama;
    b. memberatas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan;
    c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi.

Misi 2 : Mewujudkan "*Good Governance*" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

Agenda Kerja :

6. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
   a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetesi
   b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi;
   c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan;
   d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokerasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja;
   e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi;
   f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
   g. Meningatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha.
7. APBD Rakyat Berjaya :
   a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik;
   b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Smart Village
   a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa;
   b. memfasilitasi digitaliasi administrasi desa;
   c. *e-participation* : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi.

9. Pendampingan program pembangunan desa
    a. Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa;
    b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Agenda Kerja :

10. Perempuan Berjaya :
    a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga;
    b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi;
    c. Memfasilitsi pendampingan hukum bagi perempuan.
11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
    a. Mengembangkan fasiltas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak;
    b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak;
    c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak;
    d. Menyediakan dan menfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempt kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik;
    e. Memfasiltasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak;
    f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu.
12. Anak Muda Berjaya :
    a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas;

b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda;
c. Mencetak wirausahawan muda;
d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota.

13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:
    a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga;
    b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi;
    c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten.
14. Lampung Sehat :
    a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas;
    b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit;
    d. Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;
    e. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor kesehatan.
15. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
    a. Menyediakan fasiltas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
    b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA;
    c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya.
16. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
    a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha;

b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri;
c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi.

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

Agenda Kerja :

17. Infrastruktur Lampung Berjaya
    a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota;
    b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya;
    c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
    d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
18. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :
    a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermurah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur;
    b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat;
    c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong.
19. Lampung Terang Berjaya. Memproritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
    a. Memepercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik;

b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi;
c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian.

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Agenda Kerja :

20. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
    a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani;
    b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani;
    c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani;
    d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi.
21. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
22. Mencegah dan memberatas peredaran pupuk palsu.
23. Revitalisasi Lada (Lampung *Black Pepper*). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitiasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan.
24. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
25. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :

a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan;
b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengelolahan perikanan;
c. Memberikan asurasi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia;
d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan.

26. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar.
27. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
    a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
    b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
    c. Mempercepat pembangunan infrastrutur untuk mendukung pengembangan pariwisata
    d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
28. Mengembangkan industri pengelolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
    a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasi sumber daya dan keunggulan lokal;
    b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran;
    c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan;
    d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota);
    a. Menyederhanakan perizinan.

30. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
    a. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha;
    b. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan;
    c. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi.
31. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Agenda Kerja :

32. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
    a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan;
    b. mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahtraan rakyat;
    c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan.
33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional.

4.2 TEMA, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk: **"PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH".**

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2023. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel IV - 3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023	INDIKATOR	TAHUN 2023
SASARAN MAKRO	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 4,5
	- PDRB Perkapita (Juta Rp)	43 - 44
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,3 - 70,6
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 4,3
	- Kemiskinan (%)	11,4 - 11,9
	- Gini Rasio (Poin)	0,302 - 0,319
	- Inflasi (%)	3 ± 1
	- Tingkat Kemantapan Jalan (%)	74,87
	- Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	104 – 105
	- Persentase Peningkatan PAD (%)	2,04
	- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.066

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional; Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2023 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar IV - 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023

SASARAN DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
PRIORITAS 1 : Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	❑ Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi ❑ Meningkatkan kesejahteraan petani ❑ Menjaga stabilitas harga ❑ Menurunnya Kemiskinan
PRIORITAS 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	❑ Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ❑ Meningkatnya Aksesibiltas dan Kualitas Pendidikan Menengah ❑ Meningkatnya penyerapan tenaga kerja ❑ Meningkatnya pengarusutamaan Gender ❑ Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
PRIORITAS 3 : Pembangunan Infrastruktur	❑ Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi ❑ Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah ❑ Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
PRIORITAS 4 : Reformasi Birokrasi	❑ Meningkatnyan kualitas Implementasi reformasi birokrasi
PRIORITAS 5 : Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	❑ Meningkatnya kerukunan antar umat beragama ❑ Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah ❑ Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
PRIORITAS 6 : Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	❑ Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ❑ Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca ❑ Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. yang dilakukan melalui pendekatan perencananaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023 terhadap RKP 2023 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel IV - 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap RKP 2023

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
1.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		1.2	Meningkatkan kesejahteraan petani		1.2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.3	Menjaga stabilitas harga		1.3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		1.4	Menurunnya Kemiskinan		1.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
					1.5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi
					1.6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
					1.7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
					1.8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	2.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
					2.2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
					2.3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
					2.4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		2.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		2.5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		2.3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		2.6	Pengentasan kemiskinan
		2.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender		2.7	Peningkatan produktivitas dan daya saing
		2.5	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak			
3.	Pembangunan Infrastruktur	3.1	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.1	Infrastruktur pelayanan dasar
		3.2	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah		3.2	Infrastruktur ekonomi
					3.3	Infrastruktur perkotaan
		3.3	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi		3.4	Energi dan Ketenagalistrikan
					3.5	Transformasi digital

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.5	Pembangunan Wilayah Sumatera
4.	Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnyan kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.1	Konsolidasi Demokrasi
					4.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					4.3	Reformasi birokrasi dan tata kelola
					4.4	Menjaga stabilitas keamanan nasional
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
		5.2	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah		5.2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
		5.3	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya		5.3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
					5.4	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
6.	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi	6.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	6.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		6.2	Menurunnya		6.2	Peningkatan ketahanan

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
	Bencana		tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Bencana dan Perubahan Iklim		bencana dan iklim
		6.3	Pembangunan rendah karbon		6.3	Pembangunan rendah karbon

Selanjutnya, penyelarasan prioritas pembangunan RKPD 2023 terhadap Visi dan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel IV - 5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2023	Sasaran RKPD 2023	
1.	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	a.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
			b.	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah
			c.	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
2.	Mewujudkan "*Good Governance*" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
3	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			b.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah
			c.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
			d.	Meningkatnya pengarusutamaan gender
			e.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
4.	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi
			b.	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah
			c.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
5	Membangun kekuatan ekonomi	Peningkatan Investasi dan Nilai	a.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2023	Sasaran RKPD 2023	
	masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Tambah Produk Unggulan	b.	Meningkatkan kesejahteraan petani
			c.	Menjaga stabilitas harga
			d.	Menurunnya Kemiskinan
6	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	a.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			b.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
			c.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Selain itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional; penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi :

1. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel IV - 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PENDIDIKAN	1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Menengah	1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa 2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; 2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;

2. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas :

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel IV - 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
KESEHATAN	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana nsi; dan 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi :

1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel IV - 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PEKERJAAN UMUM	1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota; dan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/kota	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaran SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan

Selain itu, perumusan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan :

1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
   a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK);
   b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
   c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
   d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7) Pengentasan permukiman kumuh;
8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;

Tabel IV - 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PERUMAHAN RAKYAT	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

5. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan, antara lain:

1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;

2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
5) Program Keluarga Harapan (PKH);
6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
13) Pencegahaan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Tabel IV - 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
SOSIAL	1. rehabsosdas penyandang disabilitas telantar 2. rehabsosdas anak telantar; 3. rehabsosdas lansia telantar	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas	1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
	4. Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan 5. perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	personel/sumber daya manusia; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	sosial dasar anak telantar di dalam panti; 3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam; 5. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi adalah yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain :

1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
4) Penegakan Peraturan Daerah.

Tabel IV - 11 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
TRANTIBUMLINMAS	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warganegara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

4.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI LAMPUNG

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2023 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan proses revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola Ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan revisi RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui dan Laut Krakatau;
2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut :
    a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
    b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
    c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
    d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir,

tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.
f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
   a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
   b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
   c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
   d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.

e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.

4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:

a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.

c. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

d. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

e. Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten

Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

f. Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

g. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

h. Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

4.4 RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pola ruang ditinjau berdasarkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, sebagai berikut :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini

terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional.

2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
3. Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-

kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi. Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :

   a. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

   - Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun

penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.

- Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan).
- Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan *Aeropolitan* Natar yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.
- Kawasan Teluk Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi Bakauheni *Harbour City (BHC)*. Kawasan Teluk Lampung tersebut mengintegrasikan destinasi wisata disekitar teluk lampung yang meliputi wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR. Kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan.
- Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.

- Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung.

b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat.

Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

2) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup :

a. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawa-san pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli.

b. Kawasan Batutegi di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya

Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Lampung dalam Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2017-2037, disajikan pada Gambar II-16 di bawah ini.

Gambar IV - 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung

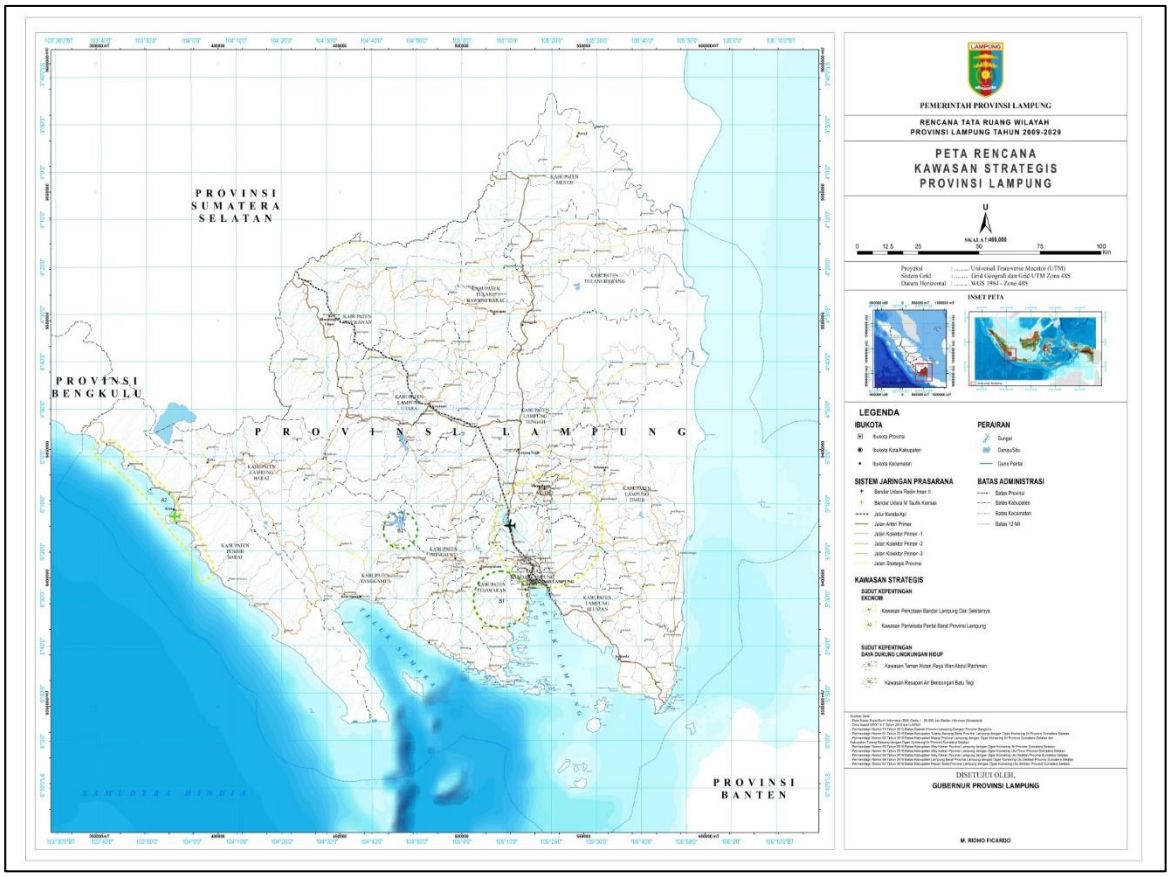

4.5 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (EMISI GAS RUMAH KACA)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah penurnan emisi gas rumah kaca (RAD–GRK). Dokumen ini sangat diperlukan mengingat target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 hanya dapat dicapai jika dilakukan secara bersama dan dengan kontribusi dari pemerintah di daerah.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi GRK. Berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah tentu saja akan mengemisikan GRK. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 pasal 7, kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri atas 6 (enam)

sektor yaitu energi, limbah, proses produksi dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gas Rumah Kaca sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO_2), dinitro oksida (N_2O), metana (CH_4), sulfur-heksaflorida (SF_6), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menghitung tingkat emisi GRK untuk seluruh sektor yang potensial menghasilkan emisi GRK serta pelaporan PEP RAD-GRK secara online. Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK. Penurunan emisi GRK tahun 2021 sebesar 6,74% atau setara dengan 19.760.690,17 ton CO2 eq.

Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Pertanian & Peternakan

Aksi Mitigasi dari Subsektor Pertanian tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,188% atau setara dengan 6.584.309,20 ton CO_2-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 7.908.650,65 ton CO_2-eq atau sebesar 0,156 % dengan aksi mitigasi antara lain:

1. Optimasi Lahan
2. Pelatihan dan Penerapan Metode SRI (*System of Rice Intensification*)
3. Pengaturan Pola dan Teknik Pengairan
4. Pengembangan Embung
5. Peningkatan Penggunaan Pupuk Organik dan Biomasa

Adapun untuk Aksi Mitigasi dari Subsektor peternakan tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,0152% atau setara dengan 702.561,75 ton CO_2-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 721.435,59 ton CO_2-eq atau sebesar 0,050 %dengan aksi berikut:

1. Pengembangan Pengolahan Biogas Limbah Ternak
2. Pengembangan Teknologi Pakan Ternak Fermentasi
3. Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik

Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Kehutanan

Sasaran utama terkait penurunan emisi sektor kehutanan adalah meningkatkan luasan atau kualitas tutupan lahan yang akan berperan dalam penyerapan emisi GRK dan mengurangi perubahan lahan yang menghasilkan emisi GRK. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial
2. Meningkatkan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Memantapkan Status Kawasan Hutan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif diubah sebagai kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan sesuai potensi komoditas
5. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan emisi GRK, strategi yang ditempuh meliputi :

1. Melakukan penanaman untuk meningkatkan penyerapan emisi GRK
2. Melakukan penurunan perambahan dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan
3. Melakukan penataan batas & pembangunan unit KPH
4. Melakukan pemanfaatan lahan tidur dan kurang produktif untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan emisi GRK
5. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang rusak

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang dilakukan maka Program dan Kegiatan di Provinsi Lampung yang diusulkan menjadi aksi mitigasi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
3. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKM) & Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
4. Perlindungan dan Pengamanan hutan, melalui kegiatan patrol pengamanan, pencegahan kebakaran hutan, penurunan perambah dan berbagai macam kegiatan & penyuluhan
5. Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
6. Peningkatan Promosi Kehutanan dan Pembinaan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
7. Peningkatan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman.

Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Energi

Emisi dari bidang energi meliputi emisi penggunaan bahan bakar fosil dan pemakaian listrik di sektor industri, rumah tangga, komersial dan pemerintah. Konsumsi energi di Provinsi Lampung akan seiring meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan laju ekonomi. Pada Tahun 2021 penggunaan energi di Provinsi Lampung menghasilkan emisi 11.450.000,00 CO_2-eq setara dengan 10,83%. Diprediksi tahun 2030 akan menghasilkan emisi sebesar 17.870.000 CO_2-eq setara dengan 12,087%.

Skenario yang paling mempengaruhi besarnya emisi GRK sektor energi di Provinsi Lampung adalah faktor pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan pemakaian energi. Hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan sektor lainnya seperti (industri, transportasi dan lain-lain). Dan sebagai konsekuensi, maka pemakaian energi di sektor lain juga akan meningkat.

Faktor yang mempengaruhi Produksi GRK pada Sektor Energi di luar energi pada Industri dan Transportasi :

1. Konsumsi Energi Rumah Tangga dengan menghitung pemakaian minyak tanah dan LPG
2. Konsumsi Energi pada Pembangkit Listrik (PLN): PLTD dan PLTU

Terkait rencana aksi yang diusulkan oleh satker penanggung jawab sektor energi (Dinas ESDM Provinsi Lampung) telah merencanakan langkah-langkah strategis terkait rencana penurunan emisi sebagai tabel berikut:

1. Bantuan PLTS
2. Bantuan PLTMH
3. Bantuan PLTBayu
4. Bantuan Biogas
5. Sosialisasi Koordinasi Hemat Energi dan Konservasi Energi
6. *Road Map* Biogas (Sosialisasi)

Jika tidak ada upaya mitigasi di sektor transportasi, maka diperkirakan emisi GRK dari sektor ini akan meningkat hingga sebesar hampir 4 (empat) kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu, Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan aksi mitigasi yang pada dasarnya mengadopsi rencana mitigasi GRK nasional. Adapun rencana aksi mitigasi di sektor transportasi Provinsi Lampung akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan angkutan umum berbasis sistem transit (BRT)
2. Manajemen Parkir untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi
3. Peremajaan Armada Angkutan Umum

Pada industri-industri yang menggunakan banyak energi pada saat melakukan proses produksi, Dinas Perindustrian memberikan usulan mitigasi yang lebih terkait kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang bertujuan untuk meminimalisir emisi CO_2 yang dihasilkan. Berikut Rencana Aksi Mitigasi Sektor Industri di Provinsi Lampung:

1. Kegiatan sistem monitoring & manajemen energi di sector industri.
2. Pengunaan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan

3. Penggunaan bahan bakar alternatif (biomasa) pada proses produksi di sektor industri.
4. Proses daur ulang hasil produk dan limbah
5. Peningkatan Efisiensi dan Mutu Proses Produksi.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang berdasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

5.1 Program Prioritas Nasional bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

Dalam rangka kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP) ke 7 wilayah, yaitu Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan wilayah Sumatera dan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Pusat rencana melaksanakan proyek pembangunan bagi kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang dituangkan dalam RKP 2023, yaitu:

No.	Proyek Pembangunan	Volume	Lokasi
1.	Pembangunan Rumah Susun ASN/TNI/Polri	1 tower	Kota Bandar Lampung
2.	Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja	1 tower	Kota Bandar Lampung

No.	Proyek Pembangunan	Volume	Lokasi
3.	Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Padi di Provinsi Lampung	2.150 Ha	Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat
4.	Pengembangan Sentra Usaha Pangan dan Holtikultura Berbasis Korporasi Petani	2 paket	Kab. Way Kanan dan Kab. Mesuji
5.	Pengembangan kawasan Peternakan Kambing Berbasis Korporasi di Provinsi Lampung	1000 ekor	Kab. Pringsewu
6.	Pengembangan Pelabuhan Mesuji/Tanah Merah	1 Pelabuhan	Kab. Mesuji
7.	Penanganan Jalan Akses Pelabuhan Mesuji/Tanah Merah	11,92 Km	Kab. Tulang Bawang
8.	Pengembangan Ayam Buras Berbasis Kawasan Integrated Farming/korporasi	10.000 ekor	Kab. Pesawaran
9.	Demonstrasion Area (DEM AREA) Pengembangan Area Pengembangan Kakao di Kabupaten Lampung Tengah dan Pringsewu Provinsi Lampung	150 Ha	Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu
10.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5000 unit	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Tulang Bawang, Tanggamus, Kab. Lampung Timur, Kab. Way Kanan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung
11.	Penyelenggaraan Aplikasi Cloud sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 kegiatan	Provinsi Lampung
12.	Pengembangan Bandara M. Taufik Kiemas (Pekon serai)	4 kegiatan	Pesisir Barat
13.	Pendidikan vokasi berbasis dual system dan kompetensi	180 orang	Kota Bandar Lampung

No.	Proyek Pembangunan	Volume	Lokasi
	industri		
14.	Pembangunan Taman Edukasi di Lampung	1 paket	Kab. Lampung Selatan
15.	Export Coaching Program, Bimtek dan pendampingan Digital Marketing	60 orang	Kab. Tanggamus
16.	Pelatihan dasar SDM bagi Masyarakat disekitar destinasi wisata	120 orang	Kab. Pesisir Barat
17.	Pelatihan berbasis kompetensi	1200 orang	Provinsi Lampung
18.	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	35 orang	Provinsi Lampung
19.	Pembinaan sekolah menengah kejuruan	100 orang	Provinsi Lampung
20.	Pelatihan akuntansi bagi petugas penyuluh koperasi lapangan	54 orang	Provinsi Lampung
21.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	15 Kab/Kota	Provinsi Lampung

Terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ini diharapkan dapat didukung oleh Kabupaten/Kota bersangkutan dengan cara menyiapkan program dan kegiatan pendukung proyek pembangunan dimaksud.

5.2 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk :

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses - tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara operasional, regulasi yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD**.** Di dalam permendagri tersebut, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut :

Gambar V - 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

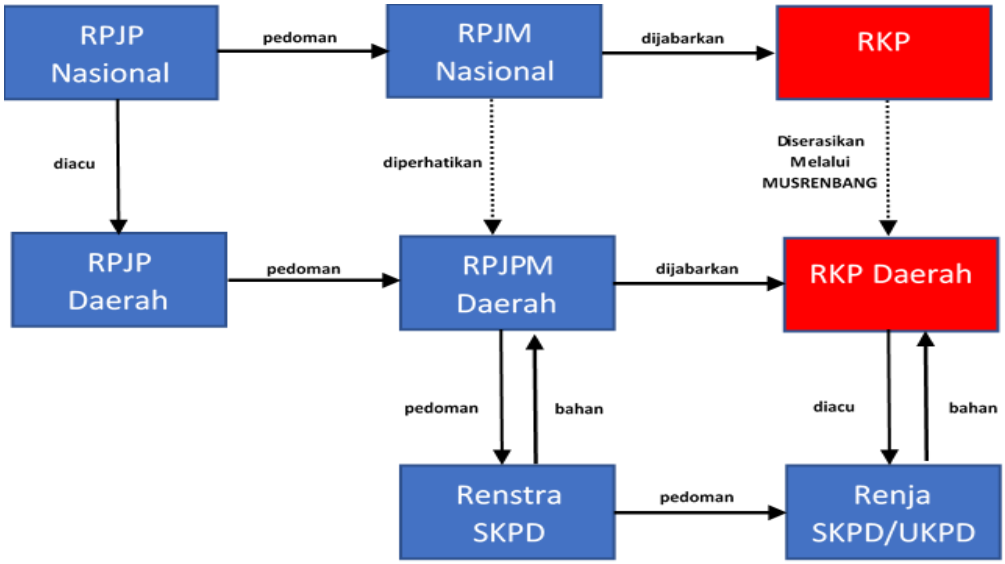

Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : "Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2023 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel V - 1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
Memperkuat Infrastruktur untuk	Pembangunan Infrastruktur

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi

Adapun tema dan prioritas pembangunan kabupaten/kota Tahun 2023, sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TEMA : ***"Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi melalui Akselerasi Pertumbuhan Sektor-Sektor Potensial Daerah, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial;
b) Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
c) Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana;
d) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata
e) Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas.

2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TEMA : *"Percepatan Transformasi Ekonomi dan Reformasi Struktural"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
b) Akselerasi Penurunan Kemiskinan melalui Efektifitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Pariwisata, Tenaga Kerja Perindustrian dan UKM serta Kemudahan Investasi;
c) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Dasar;
d) Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur; dan
e) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TEMA : *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Inovasi untuk Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
b) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar;
c) Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi;
d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana; dan
e) Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur.

4. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TEMA : *"Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
b) Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup;
c) Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
d) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel); dan
e) Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmonisasi sosial masyarakat.

5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TEMA : *"Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Memacu Pemulihan Ekonomi;
b) Memacu Pembangunan Infrastuktur;
c) Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter;
d) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
e) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi; dan
f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TEMA : *"Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan;
b) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
c) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas;
d) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
e) Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana; dan
f) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

7. KABUPATEN WAY KANAN

TEMA : *"Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Ketersediaan Infrastruktur"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan SDM yang Berkualitas;
b) Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata;
c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
e) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik.

8. KABUPATEN TULANG BAWANG

TEMA : ***"Peningkatan Kualitas SDM & Infrastruktur Menuju Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi;
c) Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan;
d) Meningkatkan kesejahteraan kampung;
e) Terwujudnya SDM yang berkualitas;
f) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas; dan
g) Penataan ruang dan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

9. KABUPATEN PESAWARAN

TEMA : ***"Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing;
b) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi;
c) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
d) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif; dan
e) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal.

10. KABUPATEN PRINGSEWU

TEMA : ***"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Menunjang Pemulihan Ekonomi Daerah"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b) Pembangunan Manusia yang Berkualitas
c) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertumpu pada Sektor Strategis
d) Penataan Kawasan Perkotaan yang Berkelanjutan
e) Peningkatan Kualitas Tatanan sosial masyarakat

11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TEMA : "*Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Ekonomi Daerah*"

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jarring pengaman social dan perngembangan ekonomi rakyat kreatif;
b) Pengembangan SDM Berkarakter dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar;
c) Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian BudayaPembangunan infrastruktur;
d) Pembangunan Infrastruktur; dan
e) Reformasi Birokrasi.

12. KABUPATEN MESUJI

TEMA : *"Penguatan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada peningkatan Infrastruktur Pertanian"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan;
b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan;
c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah;
d) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;

e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penaggulangan kemiskinan.

13. KABUPATEN PESISIR BARAT

TEMA : *"Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Memantapkan Infrastruktur Daerah"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Pembangunan SDM;
b) Pembangunan Infrastruktur dan Aksesbilitas Daerah;
c) Pembangunan Infrastruktur dan Aksesbilitas Daerah;
d) Pengentasan Kemiskinan Daerah;
e) Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
f) Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

14. KOTA BANDAR LAMPUNG

TEMA : *"Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjuan"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi;
b) Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas;
c) Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
d) Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah;
f) Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan.

15. KOTA METRO

TEMA : ***"Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat melalui Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
b) Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan;
c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)*;
d) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing.

5.3. Indikator Makro Kabupaten/Kota

Penentuan target Indikator Makro Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 telah mempertimbangkan data capaian dan analisis trend selama 5 tahun terakhir. Pencapaian Target Indikator Makro Provinsi Lampung merupakan agregat dari pencapaian indikator makro Kab/Kota.. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja makro Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi,
2. Pendapatan Perkapita,
3. Indeks Pembangunan Manusia,
4. Tingkat Pengangguran Terbuka,
5. Kemiskinan,
6. Rasio Gini,
7. Inflasi,
8. Tingkat Kemantapan Jalan,
9. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Target dukungan terhadap 9 (sembilan) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 disajikan pada Tabel V-2 sebagai berikut :

Tabel V - 2 KESELARASAN SASARAN MAKRO RKPD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO.	SASARAN MAKRO	KABUPATEN/KOTA															
		Provinsi	L. Utara	L. Barat	Tuba	Tubaba	Mesuji	Way Kanan	Tanggamus	Pringsewu	Lamsel	Pesawaran	Lamtim	Lamteng	Pesbar	Metro	Balam
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5-4,5	4.2	4.08	4.23	4.24	4.17	4.17	4.05	4.12	4.15	3.95	2.5	4.32	4.05	4.5	4.97
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43-44	39,64-40,02	26,786	48,8	43,45	55,454	31,61	27,60	30,00	45,44-46,44	23.59	38.90	54-55	28,60-29.04	42	57,00-59,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,3-70,6	69,72-70,41	68,95	68,94	66,38	65,01	68,39	66,85	71,00	69,76	70	70.86	70,10-70,50	64,31	78,48	78,00-78,49
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3-4,0	4,44-4,10	2,60	4,07	3,24	3,30	3,50	2,89	4,00	4,50 - 4,75	4.04	2.89	4,1-4,5	2,80	5,02	8,1
5	Kemiskinan (%)	11,9-11,4	17,9-17,4	12,37	-	8,20	7,0075	11,90	10.84	9,50	13,0–12,5	13.2	14.62	11,4-12	13,65	7,20	91,57
6	Rasio Gini (Poin)	0,302-0,319	>0,31	0,269	0,265	0,216-0,285	0,252	-	0,290	0,295	0,282-0,292	0.3	0.34	0,285-0,302	0,32	0,3271	0,3226
7	Inflasi (%)	3±1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 ± 1	3,0 ± 1
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	74,87	65,21	-	-	64,43	24,63	58,51	52,00	36,82	85,75	86.76	60-62	63-65	41,50	92,06	86.31
9.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7,066	-	-	-	4,23	-	-	7,00	-	7,066	-	-	-	10,50	-	-

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 (tahun keempat) pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, dimana dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*); oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut. Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses teadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu : 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 dan terakhir melalui pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Ngeri nomor 050-5889 tahun 2021 yang memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Uraian pokok pada bab ini terdiri dari ; (1) Program Prioritas Berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana Undang-Undang 23 Tahun 2014; (2) Sinkronisasi Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah; (3) Program Prioritas Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah; (4) Sinkronisasi Program Prioritas Daerah Provinsi Lampung dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

6.1 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut ditampilkan tabel mengenai pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan

Tabel VI-1

Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PENDIDIKAN	**1.746.344.691.046,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	954.854.974.046,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	779.687.817.000,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.801.900.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KEBUDAYAAN	**7.465.000.000,00**

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.300.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	415.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	400.000.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	350.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.000.000.000,00
2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**11.216.074.451,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.017.683.751,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.198.390.700,00
3	**Dinas Sosial**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	SOSIAL	**39.407.835.753,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.146.027.666,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	526.682.950,00
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	249.999.500,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.833.813.022,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.370.059.665,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	947.505.677,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	333.747.273,00
4	**Dinas Tenaga Kerja**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	TENAGA KERJA	**31.990.707.909,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.561.707.909,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	142.000.000,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.550.000.000,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	825.000.000,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	422.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	490.000.000,00
5	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**420.855.000,00**
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	70.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	84.967.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	265.888.000,00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**16.071.455.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.457.983.000,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	882.615.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.054.584.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	585.780.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	191.243.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.012.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	262.238.000,00
6	**Dinas Lingkungan Hidup**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	LINGKUNGAN HIDUP	**18.788.387.800,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.373.853.900,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.569.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.277.011.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.306.481.000,00
	PROGRAM PEN GEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	303.848.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000,00
	PROGRAM PEN GEND ALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	96.136.900,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	160.078.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	36.191.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.219.000,00
7	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**9.200.124.163,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.654.561.713,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	86.300.000,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.210.879.450,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.261.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	89.122.000,00
8	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**16.547.951.396,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.747.951.396,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	200.000.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.300.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.300.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	TRANSMIGRASI	**1.000.000.000,00**
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	650.000.000,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00
9	**Dinas Perhubungan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PERHUBUNGAN	**23.962.617.300,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.246.538.897,05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.435.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	246.078.402,95
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	35.000.000,00
10	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**39.053.043.607,48**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.918.389.707,48
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.248.405.700,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.886.248.200,00
	STATISTIK	**186.497.000,00**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	186.497.000,00
	PERSANDIAN	**247.561.300,00**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	247.561.300,00
11	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	**19.003.984.200,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.253.984.200,00
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	400.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	250.000.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.550.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	400.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.400.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	600.000.000,00
12	**Dinas Kesehatan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	KESEHATAN	**283.547.144.158,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.616.265.260,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	209.830.878.898,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.130.000.000,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	315.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	655.000.000,00
13	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PENANAMAN MODAL	**19.046.198.524,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.952.172.524,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	440.000.000,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000.000,00
	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	854.026.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00
14	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**56.986.583.920,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.396.244.920,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.107.042.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.424.912.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.058.385.000,00
15	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PERPUSTAKAAN	**15.003.700.347,10**

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.200.624.347,10
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.620.454.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	182.622.000,00
	KEARSIPAN	**1.210.000.000,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.210.000.000,00
16	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	**46.599.380.884,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.237.594.684,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.275.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.986.928.200,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.032.858.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.172.000.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERI KAN AN	2.895.000.000,00
17	**Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PARIWISATA	**20.970.168.033,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.170.168.033,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA	3.200.000.000,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.075.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.475.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000,00
18	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PANGAN	**4.348.837.500,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	227.687.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.598.710.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	300.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.222.440.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERTANIAN	**84.968.225.372,50**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.071.288.733,50
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.635.167.700,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.628.212.639,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	838.556.300,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.795.000.000,00
19	**Dinas Perkebunan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERTANIAN	**30.381.348.343,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.209.560.793,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	900.000.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.917.960.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	375.000.000,00
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	350.000.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.628.827.550,00
20	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERTANIAN	**34.245.177.200,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.296.336.458,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.438.198.500,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.643.900.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.151.046.242,00
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	149.328.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	566.368.000,00
21	**Dinas Kehutanan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	KEHUTANAN	**80.046.854.470,00**

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.951.612.470,00
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.955.275.000,00
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	487.122.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.310.777.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.342.068.000,00
22	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**21.317.028.400,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.363.918.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	600.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	519.110.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.659.790.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KETEN AGALISTRI KAN	1.174.210.000,00
23	**Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KESEHATAN	**384.896.699.372,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	361.403.699.372,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.000.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	493.000.000,00
24	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERDAGANGAN	**25.017.682.690,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.479.682.690,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	70.000.000,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	380.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	750.000.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.538.000.000,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK	800.000.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	DALAM NEGERI	
	PERINDUSTRIAN	**3.805.065.910,00**
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.550.065.910,00
	PROGRAM PENGENDALI AN IZIN USAHA INDUSTRI	175.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.000.000,00
25	**Inspektorat**	
	UNSUR PENGAWASAN	
	INSPEKTORAT DAERAH	**43.401.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.606.363.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.727.475.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.067.162.000,00
26	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
	UNSUR PENUNJANG	
	PERENCANAAN	**33.402.565.182,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.918.576.582,00
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.346.616.000,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.137.372.600,00
27	**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**	
	UNSUR PENUNJANG	
	KEUANGAN	**1.479.317.029.403,70**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.114.165.436,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.370.289.321.767,70
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.913.542.200,00
28	**Badan Pendapatan Daerah**	
	UNSUR PENUNJANG	
	KEUANGAN	**118.044.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	98.753.662.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.290.337.500,00
29	**Badan Kepegawaian Daerah**	
	UNSUR PENUNJANG	
	KEPEGAWAIAN	**21.800.758.096,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14.111.089.211,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	DAERAH PROVINSI	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.689.668.885,00
30	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	UNSUR PENUNJANG	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**30.049.405.992,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.056.427.392,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.992.978.600,00
31	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
	UNSUR PENUNJANG	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**12.460.357.434,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.438.488.534,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.021.868.900,00
32	**Badan Penghubung**	
	UNSUR PENUNJANG	
	PENGHUBUNG	**18.712.432.951,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.878.418.551,00
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.834.014.400,00
33	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**3.200.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.800.536.000,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.399.464.000,00
34	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**62.084.157.980,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	823.609.000,00
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	61.260.548.980,00
35	**Biro Hukum**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**3.350.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.623.164.000,00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.726.836.000,00
36	**Biro Perekonomian**	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**3.000.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.178.285.500,00
	PROGRAM PEREKO NO MI AN DAN PEMBANGUNAN	1.821.714.500,00
37	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**3.960.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.702.253.300,00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.257.746.700,00
38	**Biro Administrasi Pembangunan**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**3.200.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	919.500.000,00
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.280.500.000,00
39	**Biro Organisasi**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**3.500.000.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.726.758.600,00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.773.241.400,00
40	**Biro Umum**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**151.771.883.388,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.771.883.388,00
41	**Biro Administrasi Pimpinan**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	**6.804.923.490,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.804.923.490,00
42	**Rumah Sakit Jiwa**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KESEHATAN	**42.823.468.349,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.042.220.284,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	663.927.565,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	117.320.500,00
43	**Sekretariat DPRD**	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DPRD	**320.276.703.600,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	152.313.379.312,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	167.963.324.288,00
44	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**18.142.953.826,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.663.366.226,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	957.226.600,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.092.819.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	258.433.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	346.600.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	824.509.000,00
45	**Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**559.051.710.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.491.745.460,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	496.846.546.540,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.713.418.000,00
46	**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**99.361.844.940,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	55.344.427.167,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	DAERAH PROVINSI	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.017.417.773,00
47	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**38.843.034.000,00**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.420.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	843.574.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	750.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	727.700.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.101.760.000,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	25.779.598.950,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.220.401.050,00
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**49.338.580.500,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.761.614.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.500.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.576.966.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PERTANAHAN	**580.000.000,00**
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	280.000.000,00
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	300.000.000,00
48	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**47.606.411.375,99**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.156.563.675,99
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.449.847.700,00

6.2 Sinkronisasi Program Prioritas Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel VI-2
Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp 25.852.238.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 4.546.355.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Rp 8.692.493.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Rp 15.051.503.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 1.716.319.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 1.362.516.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan	Rp 4.043.562.000,00	Dinas Pendidikan dan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kebudayaan
8	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rp 5.312.867.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 10.413.141.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 3.716.608.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Rp 694.731.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Rp 238.930.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Rp 3.019.469.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan	Rp 129.276.000,00	Dinas Pendidikan dan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Kebudayaan
15	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 1.336.818.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rp 487.485.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 19.105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Rp 4.477.118.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp 13.886.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Rp 247.786.980.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Menengah Atas/ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
22	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 1.448.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Rp 14.645.367.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Rp 46.155.480.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Ruang Laboratorium	Rp 6.626.024.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 1.186.584.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 1.340.217.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/	Rp 1.000.320.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
29	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rp 1.431.012.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Rp 317.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 54.325.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 6.095.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 3.900.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Rp 246.465.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Menengah Kejuruan/ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
36	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Rp 2.231.818.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 171.591.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 664.447.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 962.782.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembangunan Kantin Sekolah	Rp 748.640.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Rp 738.353.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rp 200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
44	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Rp 200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 540.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Rp 3.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Rp 100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rp 8.929.060.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi/ Perhitungan	Rp 6.591.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
52	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi/ Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp 5.210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 35.000.000,00	Dinas Kesehatan
54	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 36.915.900,00	Rumah Sakit Jiwa
55	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 35.000.000,00	Dinas Kesehatan
56	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran,	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
57	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 35.000.000,00	Dinas Kesehatan
58	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 25.000.000,00	Dinas Kesehatan
59	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
60	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 359.319.900,00	Rumah Sakit Jiwa
61	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
62	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 21.496.497.105,00	Rumah Sakit Jiwa
63	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 46.341.288.520,00	Dinas Kesehatan
64	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 71.261.699.372,40	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
65	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 74.999.999,60	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
66	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 2.550.000.000,00	Dinas Kesehatan
67	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
68	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 21.320.100,00	Rumah Sakit Jiwa
69	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
70	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
71	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
72	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
73	Meningkatkan	PROGRAM PENUNJANG	Rp 10.000.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kesehatan
74	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
75	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
76	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
77	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
78	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 102.874.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
79	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
80	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 84.432.300,00	Rumah Sakit Jiwa
81	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 125.000.000,00	Dinas Kesehatan
82	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 412.106.840,00	Dinas Kesehatan
83	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 100.000.000,00	Dinas Kesehatan
84	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 240.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
85	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 27.539.500,00	Rumah Sakit Jiwa
86	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
87	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 88.622.570,00	Rumah Sakit Jiwa
88	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 300.000.000,00	Dinas Kesehatan
89	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
90	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.015.059.000,00	Dinas Kesehatan
91	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik	Rp 150.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Mebel		
92	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 225.000.000,00	Dinas Kesehatan
93	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70.000.000,00	Dinas Kesehatan
94	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 250.000.000,00	Dinas Kesehatan
95	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 643.063.221,00	Rumah Sakit Jiwa
96	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.447.196.900,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
97	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.373.296.200,00	Rumah Sakit Jiwa
98	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 8.663.400.000,00	Dinas Kesehatan
99	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 10.067.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
100	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.856.000,00	Rumah Sakit Jiwa
101	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 232.206.000,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
102	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.579.900.000,00	Dinas Kesehatan
103	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 115.000.000,00	Dinas Kesehatan
104	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 748.500.000,00	Dinas Kesehatan
105	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
106	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 5.310.940.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
107	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 16.500.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
108	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 280.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
109	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Rumah Sakit	Rp 1.200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
110	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Rumah Sakit	Rp 2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
111	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan	Rp 3.719.592.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Fasilitas Kesehatan Lainnya		
112	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
113	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
114	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 100.000.000,00	Dinas Kesehatan
115	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/	Rp 134.166.350,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Bebudaya.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
116	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 3.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
117	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 20.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
118	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Rp 87.143.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		
119	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 65.457.000,00	Dinas Kesehatan
120	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp 130.000.000,00	Dinas Kesehatan
121	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Rp 39.788.450,00	Rumah Sakit Jiwa
122	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		
123	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp 65.000.000,00	Dinas Kesehatan
124	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Rp 42.361.400,00	Rumah Sakit Jiwa
125	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Barang Penunjang Operasional	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Rumah Sakit		
126	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 87.126.000,00	Dinas Kesehatan
127	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
128	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
129	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Rp 59.652.400,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
130	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 177.327.600,00	Rumah Sakit Jiwa
131	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rp 146.452.305,00	Rumah Sakit Jiwa
132	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp 64.179.060,00	Rumah Sakit Jiwa
133	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Rp 117.320.500,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi/ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
134	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi/ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
135	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi/ Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 108.400.000,00	Dinas Kesehatan
136	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi/ Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 772.750.000,00	Dinas Kesehatan
137	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi/ Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 48.850.000,00	Dinas Kesehatan
138	Meningkatkan	PROGRAM SEDIAAN	Rp 90.000.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/ Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Kesehatan
139	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/ Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
140	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)/ Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
141	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)/ Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
142	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	Rp 130.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi/ Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
143	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi/ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
144	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi/ Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 250.000.000,00	Dinas Kesehatan
145	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi/ Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
146	Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG	Rp 610.838.000,00	Dinas Bina

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Infrastruktur.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Marga dan Bina Konstruksi
147	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 33.712.586.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
148	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 38.204.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
149	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 20.498.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
150	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 140.302.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
151	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan	Rp 29.314.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
152	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
153	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 191.981.300,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
154	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 800.263.700,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
155	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 823.185.500,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
156	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 126.400.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
157	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 8.027.200,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
158	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 588.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
159	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 220.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
160	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 205.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
161	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 250.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
162	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 500.494.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
163	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik	Rp 880.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Alat Besar		
164	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.314.627.600,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
165	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 400.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
166	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.255.655.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
167	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 200.015.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
168	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM/ Pengelolaan dan	Rp 843.574.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota/ Penyusunan Rencana, Kebiiakan, Strategi dan Teknis SPAM		dan Cipta Karya
169	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional/ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp 727.700.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
170	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN/ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi/ Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Rp 3.801.760.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
171	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN/ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi/ Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Rp 300.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
172	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG/ Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi/	Rp 12.333.661.350,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
173	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG/ Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi/ Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp 13.445.937.600,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
174	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA/ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 255.413.850,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
175	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA/ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp 263.677.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
176	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA/ Penyelenggaraan Penataan	Rp 1.701.310.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penataan Bangunan dan Lingkungan		dan Cipta Karya
177	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 12.431.382.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
178	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pembebasan Lahan / Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp 2.023.066.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
179	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pengelolaan Leger Jalan	Rp 2.150.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
180	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 3.200.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
181	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pembangunan Jalan	Rp 25.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
182	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 6.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
183	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pelebaran Jalan	Rp 15.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Menambah Lajur		
184	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Rekonstruksi Jalan	Rp 178.384.250.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
185	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Rehabilitasi Jalan	Rp 178.096.156.540,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
186	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 6.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
187	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 32.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
188	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pembangunan Jembatan	Rp 8.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
189	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Penggantian Jembatan	Rp 4.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
190	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pelebaran Jembatan	Rp 4.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
191	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Rehabilitasi Jembatan	Rp 3.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
192	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 3.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
193	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Berkala Jembatan	Rp 1.994.700.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
194	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Rp 1.066.992.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
195	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Rp 11.500.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
196	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI/ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi/ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp 554.611.500,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
197	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI/ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi/ Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 286.207.500,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
198	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang/ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
199	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/	Rp 500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Permukiman dan Cipta Karya
200	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/ Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 1.720.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
201	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN/ Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 2.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
202	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)/ Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman/ Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp 1.650.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
203	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)/ Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman/ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp 11.926.966.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
204	Kehidupan Masyarakat Yang Religius,	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/	Rp 3.512.642.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Aman dan Bebudaya.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
205	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 185.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
206	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur/ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp 111.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
207	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi/ Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp 70.184.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
208	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi/ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Rp 135.297.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 178.834.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
210	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 162.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
211	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Pengelolaan Risiko Bencana	Rp 100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
212	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 328.551.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
213	Pengelolaan	PROGRAM	Rp 95.600.000,00	Badan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Kontijensi		Penanggulangan Bencana Daerah
214	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 203.175.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
215	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp 50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
216	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 164.859.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
217	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 20.066.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
218	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 259.861.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
219	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
220	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Rp 66.481.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
221	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Kerjasama An tar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Rp 50.960.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
222	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp 89.650.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
223	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Rp 197.872.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
224	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 19.927.335.753,00	Dinas Sosial
225	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 275.000.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
226	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 25.450.000,00	Dinas Sosial
227	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 5.100.000,00	Dinas Sosial
228	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.150.000,00	Dinas Sosial
229	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 15.000.000,00	Dinas Sosial
230	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Rp 18.000.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Milik Daerah pada SKPD		
231	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 17.000.000,00	Dinas Sosial
232	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 28.000.000,00	Dinas Sosial
233	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 84.300.000,00	Dinas Sosial
234	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 60.000.000,00	Dinas Sosial
235	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 374.618.950,00	Dinas Sosial
236	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/	Rp 363.558.100,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
237	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 41.200.000,00	Dinas Sosial
238	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 91.025.482,00	Dinas Sosial
239	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 75.000.000,00	Dinas Sosial
240	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 45.000.000,00	Dinas Sosial
241	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 956.238.000,00	Dinas Sosial
242	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.112.000,00	Dinas Sosial
243	Meningkatkan	PROGRAM PENUNJANG	Rp 440.192.731,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
244	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.000.000,00	Dinas Sosial
245	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.302.899.900,00	Dinas Sosial
246	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 507.710.000,00	Dinas Sosial
247	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Mebel	Rp 19.500.000,00	Dinas Sosial
248	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 175.515.500,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
249	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 105.376.000,00	Dinas Sosial
250	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 81.864.000,00	Dinas Sosial
251	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp 71.391.450,00	Dinas Sosial
252	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Rp 70.639.400,00	Dinas Sosial
253	Meningkatkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp 69.866.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		
254	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp 232.922.100,00	Dinas Sosial
255	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN/ Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal/ Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten / Kota Asal	Rp 249.999.500,00	Dinas Sosial
256	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan	Rp 573.637.500,00	Dinas Sosial
257	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 89.906.700,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
258	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 241.165.100,00	Dinas Sosial
259	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Alat Bantu	Rp 66.000.000,00	Dinas Sosial
260	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Rp 53.109.000,00	Dinas Sosial
261	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Rp 236.319.399,00	Dinas Sosial
262	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Rp 50.000.000,00	Dinas Sosial
263	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 1.000.000,00	Dinas Sosial
264	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 14.850.000,00	Dinas Sosial
265	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial	Rp 4.740.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
266	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 5.000.000,00	Dinas Sosial
267	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 53.932.800,00	Dinas Sosial
268	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 12.160.142,00	Dinas Sosial
269	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan	Rp 975.602.000,00	Dinas Sosial
270	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 65.612.279,00	Dinas Sosial
271	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Rp 149.999.700,00	Dinas Sosial
272	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Alat Bantu	Rp 14.250.000,00	Dinas Sosial
273	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial	Rp 35.153.700,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		
274	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 169.934.300,00	Dinas Sosial
275	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Rp 12.960.000,00	Dinas Sosial
276	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 2.500.000,00	Dinas Sosial
277	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 7.100.000,00	Dinas Sosial
278	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 22.084.000,00	Dinas Sosial
279	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 22.084.000,00	Dinas Sosial
280	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	Rp 20.452.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	di dalam Panti/ Pemulasaraan		
281	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan	Rp 273.750.000,00	Dinas Sosial
282	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 19.302.500,00	Dinas Sosial
283	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Rp 120.022.900,00	Dinas Sosial
284	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 6.304.429,00	Dinas Sosial
285	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 51.570.000,00	Dinas Sosial
286	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 122.911.597,00	Dinas Sosial
287	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp 24.611.200,00	Dinas Sosial
288	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial	Rp 2.000.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		
289	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 7.225.000,00	Dinas Sosial
290	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemulangan ke Daerah Asal	Rp 9.790.000,00	Dinas Sosial
291	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp 10.108.000,00	Dinas Sosial
292	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan	Rp 656.867.600,00	Dinas Sosial
293	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 105.000.000,00	Dinas Sosial
294	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah	Rp 872.828.964,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
295	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 1.608.266.000,00	Dinas Sosial
296	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp 76.990.000,00	Dinas Sosial
297	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 28.999.660,00	Dinas Sosial
298	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi/ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 283.026.665,00	Dinas Sosial
299	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi/ Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Rp 103.153.000,00	Dinas Sosial
300	Meningkatkan	PROGRAM PERLINDUNGAN	Rp 983.880.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	DAN JAMINAN SOSIAL/ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi/ Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
301	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penyediaan Permakanan	Rp 180.316.320,00	Dinas Sosial
302	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penyediaan Sandang	Rp 19.012.000,00	Dinas Sosial
303	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp 230.000.000,00	Dinas Sosial
304	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp 266.200.000,00	Dinas Sosial
305	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 251.977.357,00	Dinas Sosial
306	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN/ Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 44.171.000,00	Dinas Sosial
307	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Rp 289.576.273,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	PAHLAWAN/ Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi/ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
308	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
309	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
310	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
311	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 25.953.093.708,00	Dinas Tenaga Kerja
312	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan	Rp 10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
313	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
314	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
315	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
316	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 17.268.201,00	Dinas Tenaga Kerja
317	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
318	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 16.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
319	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 32.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
320	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
321	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 89.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
322	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 69.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
323	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
324	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
325	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
326	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 631.676.000,00	Dinas Tenaga Kerja
327	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 373.670.000,00	Dinas Tenaga Kerja
328	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
329	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
330	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp 92.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
331	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
332	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
333	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja/ Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Rp 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
334	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah/ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Rp 175.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
335	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
336	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelayanan an tar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota/ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
337	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelayanan an tar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota/ Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Rp 150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
338	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pengelolaan Informasi Pasar Kerja/ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
339	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi/ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
340	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi/ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Rp 300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
341	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di	Rp 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Provinsi/ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		
342	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota/ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp 107.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
343	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 115.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
344	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		
345	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)/ Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
346	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan/ Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rp 200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
347	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan/ Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Rp 90.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
348	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan/ Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp 200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
349	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah		
350	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.782.610.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
351	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
352	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
353	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
354	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
355	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian	Rp 75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Anak
356	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 28.280.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
357	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 75.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
358	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
359	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
360	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 33.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
361	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi	Rp 79.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kunjungan Tamu		
362	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.576.476.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
363	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 200.938.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
364	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 148.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
365	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 515.340.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
366	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 292.908.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
367	Meningkatkan	PROGRAM PENUNJANG	Rp 58.960.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
368	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 183.670.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
369	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi/ Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Rp 181.168.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
370	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi/ Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 519.420.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
371	Meningkatkan	PROGRAM	Rp 182.027.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
372	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 201.118.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
373	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
374	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi	Rp 262.044.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
375	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi/ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 191.422.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
376	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi/ Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp 585.780.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
377	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi/ Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp 82.204.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
378	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Rp 109.039.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		
379	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 197.888.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
380	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 74.121.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
381	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ Penguatan Jejaring An tar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Rp 365.003.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
382	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	Rp 227.687.500,00	Dinas Ketahanan Pangan,

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Produk Unggulan.	KEMANDIRIAN PANGAN/ Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		Tanaman Pangan dan Hortikultura
383	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/ Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
384	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
385	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam	Rp 80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		
386	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi/ Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp 410.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
387	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi/ Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 1.601.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
388	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Rp 277.610.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
389	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN/ Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi dan	Rp 300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi		Hortikultura
390	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Rp 475.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
391	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 340.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
392	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 340.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
393	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp 67.440.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
394	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi Pengelolaan	Rp 100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Keuangan Desa		
395	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK/ Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk/ Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Rp 70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
396	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)/ Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal/ Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Rp 84.967.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
397	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)/ Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Rp 180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
398	Meningkatkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp 85.888.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Kualitas sumber daya manusia.	DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)/ Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/ Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
399	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Dinas Perhubungan
400	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 30.000.000,00	Dinas Perhubungan
401	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 13.274.686.897,05	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
402	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
403	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000,00	Dinas Perhubungan
404	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi/ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rp 700.000.000,00	Dinas Perhubungan
405	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi/ Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
406	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Rp 1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi		
407	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
408	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
409	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B/ Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Rp 210.000.000,00	Dinas Perhubungan
410	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 25.000.000,00	Dinas Perhubungan
411	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
412	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp 70.000.000,00	Dinas Perhubungan
413	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
414	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan/ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
415	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan/ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
416	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Audit dan	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan/ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
417	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang An tar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang An tar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
418	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang An tar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 520.000.000,00	Dinas Perhubungan
419	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Perumusan Kebijakan	Rp 200.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		
420	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 75.000.000,00	Dinas Perhubungan
421	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kemas		
422	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional/ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp 161.078.402,95	Dinas Perhubungan
423	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
424	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN/ Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi/ Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
425	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL/ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Modal		
426	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL/ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
427	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL/ Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi/ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Rp 240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
428	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL/ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp 200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
429	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/ Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
430	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/ Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terpadu Satu Pintu
431	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/ Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
432	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 454.026.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
433	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
434	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL/ Urusan Pengelolaan	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi/ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terpadu Satu Pintu
435	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
436	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 25.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
437	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
438	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
439	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 15.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
440	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
441	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 130.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
442	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
443	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 687.936.100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
444	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
445	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
446	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 20.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
447	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.301.530.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
448	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 214.978.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
449	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 22.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
450	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 800.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
451	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Rp 35.788.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
452	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Rp 100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
453	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
454	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Rp 983.124.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		
455	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Rp 1.589.310.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
456	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
457	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Rp 1.100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
458	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Pemberdayaan dan	Rp 118.820.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi/ Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		
459	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Rp 2.415.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
460	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Rp 11.350.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
461	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Rp 400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
462	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING	Rp 1.130.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/ Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi		
463	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/ Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Rp 16.219.912.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
464	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi/ Seleksi Atlet Daerah	Rp 200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
465	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi/ Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
466	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi/ Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Rp 110.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
467	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga/ Standardisasi	Rp 450.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Organisasi Keolahragaan		
468	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan/ Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Rp 1.058.385.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
469	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 966.245.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
470	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp 1.179.566.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
471	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Rp 154.189.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
472	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL/ Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp 415.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
473	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH/ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi/ Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Rp 400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
474	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA/ Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi/ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Rp 350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
475	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN/ Pengelolaan Museum Provinsi/ Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Rp 1.067.671.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
476	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN/ Pengelolaan Museum Provinsi/ Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Rp 2.439.873.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
477	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN/ Pengelolaan Museum Provinsi/ Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp 492.454.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
478	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 1.250.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
479	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Pemberdayaan	Rp 750.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
480	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 150.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
481	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA/ Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 1.120.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
482	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 300.000.000,00	Dinas Perkebunan
483	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 67.388.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
484	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran,	Rp 80.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Unggulan.	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
485	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 83.109.000,25	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
486	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.578.607.388,00	Dinas Perkebunan
487	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 42.772.723.340,25	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
488	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 21.166.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
489	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
490	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan	Rp 44.088.405,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Unggulan.	Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
491	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
492	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
493	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 95.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
494	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
495	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Rp 20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		SKPD		
496	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
497	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 922.357.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
498	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 62.000.000,00	Dinas Perkebunan
499	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 52.137.993,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
500	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
501	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Rp 24.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		undangan		
502	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
503	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 210.000.000,00	Dinas Perkebunan
504	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
505	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 50.000.000,00	Dinas Perkebunan
506	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 120.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
507	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 626.400.000,00	Dinas Perkebunan
508	Meningkatkan Kualitas sumber daya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 1.227.047.400,00	Dinas Ketahanan Pangan,

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	manusia.	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tanaman Pangan dan Hortikultura
509	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 293.700.000,00	Dinas Perkebunan
510	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 609.590.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
511	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 133.416.000,00	Dinas Perkebunan
512	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 702.930.000,00	Dinas Perkebunan
513	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.134.040.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
514	Meningkatkan	PROGRAM PENUNJANG	Rp 521.502.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perkebunan
515	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.005.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
516	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Perkebunan
517	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 65.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
518	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp 325.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
519	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 879.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
520	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 60.000.000,00	Dinas Perkebunan
521	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 75.000.000,00	Dinas Perkebunan
522	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 474.775.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
523	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran	Rp 6.664.080.700,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Sarana Pertanian		
524	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Rp 225.000.000,00	Dinas Perkebunan
525	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Rp 250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
526	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Rp 370.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
527	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Rp 626.312.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
528	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Rp 600.000.000,00	Dinas Perkebunan
529	Meningkatkan Investasi dan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 250.000.000,00	Dinas Ketahanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Nilai Tambah Produk Unggulan.	SARANA PERTANIAN/ Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi/ Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
530	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp 4.317.960.000,00	Dinas Perkebunan
531	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp 13.834.737.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
532	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp 4.036.153.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
533	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Rp 175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
534	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pembangunan	Rp 300.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian		
535	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 1.582.322.139,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
536	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Rp 300.000.000,00	Dinas Perkebunan
537	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN/ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi/ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 275.000.000,00	Dinas Perkebunan
538	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN/ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi/ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 838.556.300,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
539	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN/	Rp 100.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Produk Unggulan.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi/ Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
540	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN/ Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 350.000.000,00	Dinas Perkebunan
541	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian/ Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Rp 150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
542	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp 450.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
543	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp 4.178.827.550,00	Dinas Perkebunan
544	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Rp 3.945.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
545	Meningkatkan Investasi dan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan	Rp 450.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Nilai Tambah Produk Unggulan.	Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan/ Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		
546	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan/ Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Rp 250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
547	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Rp 460.418.000,00	Dinas Kehutanan
548	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)/ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Rp 339.485.000,00	Dinas Kehutanan
549	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Rp 489.613.500,00	Dinas Kehutanan
550	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Rp 57.412.800,00	Dinas Kehutanan
551	Pengelolaan	PROGRAM PENGELOLAAN	Rp 62.500.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Kehutanan
552	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp 4.351.649.000,00	Dinas Kehutanan
553	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp 1.499.980.000,00	Dinas Kehutanan
554	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rp 24.772.000,00	Dinas Kehutanan
555	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Rp 957.375.000,00	Dinas Kehutanan
556	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Rp 47.845.000,00	Dinas Kehutanan
557	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Pencegahan dan	Rp 437.819.700,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	bencana.	Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		
558	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Rp 46.959.000,00	Dinas Kehutanan
559	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 13.472.000,00	Dinas Kehutanan
560	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/ Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Rp 28.558.000,00	Dinas Kehutanan
561	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/ Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Rp 22.861.000,00	Dinas Kehutanan
562	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Rp 67.128.000,00	Dinas Kehutanan
563	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Rp 4.180.000,00	Dinas Kehutanan
564	Pengelolaan	PROGRAM PENGELOLAAN	Rp 26.990.000,00	Dinas

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	HUTAN/ Perbenihan Tanaman Hutan/ Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan / atau Bibit Terdaftar		Kehutanan
565	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Rp 8.328.000,00	Dinas Kehutanan
566	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Rp 9.533.000,00	Dinas Kehutanan
567	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Rp 349.292.000,00	Dinas Kehutanan
568	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Rp 50.563.000,00	Dinas Kehutanan
569	Pengelolaan Lingkungan yang	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	Rp 4.887.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi		
570	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Rp 3.998.000,00	Dinas Kehutanan
571	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Rp 5.985.000,00	Dinas Kehutanan
572	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Rp 2.896.000,00	Dinas Kehutanan
573	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi/	Rp 45.789.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
574	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam/ Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 5.851.000,00	Dinas Kehutanan
575	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN/ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Rp 680.726.000,00	Dinas Kehutanan
576	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN/ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Rp 2.175.086.000,00	Dinas Kehutanan
577	Meningkatkan Investasi dan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Rp 454.965.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Nilai Tambah Produk Unggulan.	DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN/ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		
578	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Rp 203.957.000,00	Dinas Kehutanan
579	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Rp 1.126.080.000,00	Dinas Kehutanan
580	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Rp 6.405.000,00	Dinas Kehutanan
581	Pengelolaan Lingkungan yang	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan	Rp 5.626.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS		
582	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota / Pameran Dagang Internasional/Nasional	Rp 350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
583	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota / Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Rp 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
584	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI/ Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri/ Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Rp 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
585	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI/ Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Rp 100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
586	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 450.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
587	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
588	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 2.250.065.910,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
589	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 26.405.900,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
590	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/	Rp 61.339.800,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
591	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
592	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 124.768.400,00	Biro Hukum
593	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 663.000.000,00	Biro Umum
594	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 18.698.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
595	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/	Rp 8.152.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
596	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.364.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
597	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 21.842.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
598	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 127.696.500,00	Biro Organisasi
599	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 509.000.000,00	Biro Umum
600	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 75.072.378.104,00	Biro Umum
601	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/	Rp 240.784.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
602	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 663.000.000,00	Biro Umum
603	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 16.948.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
604	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 13.280.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
605	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 26.880.100,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
606	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 425.000.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
607	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 597.500.000,00	Biro Umum
608	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.245.400,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
609	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 405.000.000,00	Biro Umum
610	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 364.500.000,00	Biro Umum
611	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.500.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
612	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/	Rp 90.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
613	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 140.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
614	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 645.941.250,00	Biro Umum
615	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 129.630.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
616	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 161.675.600,00	Biro Hukum
617	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 176.952.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
618	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum	Rp 206.728.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
619	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 230.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
620	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 384.750.000,00	Biro Umum
621	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 190.100.000,00	Biro Umum
622	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 202.499.000,00	Biro Umum
623	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 193.900.000,00	Biro Umum
624	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat	Rp 232.790.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
625	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 200.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
626	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 811.184.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
627	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.209.040.000,00	Biro Hukum
628	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.404.003.400,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
629	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 3.000.000.000,00	Biro Umum
630	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 2.750.000.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
631	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.175.000.000,00	Biro Umum
632	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 162.000.000,00	Biro Umum
633	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 5.896.400.000,00	Biro Umum
634	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 303.960.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
635	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 127.680.000,00	Biro Hukum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
636	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 11.739.785.000,00	Biro Umum
637	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 3.361.760.000,00	Biro Umum
638	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1.395.000.000,00	Biro Umum
639	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 4.410.000.000,00	Biro Umum
640	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/	Rp 271.594.600,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
641	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 3.374.400.000,00	Biro Umum
642	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 7.235.840.284,00	Biro Umum
643	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 100.000.000,00	Biro Umum
644	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya	Rp 2.120.000.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
645	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 1.390.000.000,00	Biro Umum
646	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 9.500.000.000,00	Biro Umum
647	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp 178.353.700,00	Biro Organisasi
648	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Rp 115.331.300,00	Biro Organisasi
649	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Penataan Analisis Jabatan	Rp 322.678.500,00	Biro Organisasi
650	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/	Rp 214.324.000,00	Biro Organisasi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
651	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 351.944.000,00	Biro Organisasi
652	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 97.933.500,00	Biro Organisasi
653	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp 151.769.100,00	Biro Organisasi
654	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 340.907.300,00	Biro Organisasi
655	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Pelaksanaan Tugas Pemerintahan/ Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp 235.761.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
656	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Pelaksanaan Otonomi Daerah/ Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 322.277.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
657	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Fasilitasi Kerjasama Daerah/ Fasilitasi Kerjasama an tar Pemerintah	Rp 142.859.700,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
658	Reformasi	PROGRAM PEMERINTAHAN	Rp 14.936.000,00	Biro

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Birokrasi.	DAN OTONOMI DAERAH/ Fasilitasi Kerjasama Daerah/ Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta		Pemerintahan dan Otonomi Daerah
659	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Fasilitasi Kerjasama Daerah/ Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp 122.574.300,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
660	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/ Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp 13.895.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
661	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/ Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp 43.664.158.180,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
662	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/ Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp 100.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
663	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/ Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp 751.390.800,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
664	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/ Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja	Rp 1.900.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
665	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar/ Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Rp 765.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
666	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar/ Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 185.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
667	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan/ Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Rp 318.242.400,00	Biro Hukum
668	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan/ Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Rp 50.894.000,00	Biro Hukum
669	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan/ Pendokumentasian Produk	Rp 151.343.500,00	Biro Hukum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		
670	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan/ Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten / Kota	Rp 257.707.000,00	Biro Hukum
671	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitasi Bantuan Hukum/ Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Rp 476.172.500,00	Biro Hukum
672	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitasi Bantuan Hukum/ Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Rp 472.476.600,00	Biro Hukum
673	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEREKO NO MI AN DAN PEMBANGUNAN/ Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD/ Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rp 123.791.000,00	Biro Perekonomian
674	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 107.974.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
675	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 600.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
676	Reformasi	PROGRAM KEBIJAKAN DAN	Rp 180.436.000,00	Biro Pengadaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Birokrasi.	PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Barang dan Jasa
677	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Rp 330.649.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
678	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 156.293.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
679	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 136.394.700,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
680	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 365.641.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
681	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Pembinaan Kelembagaan	Rp 159.759.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengadaan Barang dan Jasa		
682	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 220.600.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
683	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
684	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
685	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 480.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
686	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
687	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 750.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
688	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 1.033.230.400,00	Sekretariat DPRD
689	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Pembahasan Rancangan Perda	Rp 6.958.286.800,00	Sekretariat DPRD
690	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 1.432.271.000,00	Sekretariat DPRD
691	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Rp 1.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
692	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp 397.409.600,00	Sekretariat DPRD
693	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran,	Rp 221.293.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
694	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 128.959.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
695	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.494.945.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
696	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 76.281.692,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
697	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 41.080.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
698	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 165.850.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
699	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 102.146.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
700	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 115.328.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
701	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 25.486.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
702	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 30.815.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
703	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 184.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
704	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 133.214.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
705	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 424.000.000,00	Badan Perencanaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembangunan Daerah
706	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 66.675.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
707	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.779.171.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
708	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 337.434.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
709	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 26.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
710	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik	Rp 333.189.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
711	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan/ Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 121.842.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
712	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan/ Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rp 257.595.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
713	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan/ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp 921.169.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
714	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 118.138.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
715	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Rp 314.298.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		
716	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 122.830.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
717	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Rp 465.807.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
718	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp 49.232.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
719	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 532.990.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
720	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 228.639.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
721	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah/ Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 127.560.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
722	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah/ Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 43.432.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
723	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	Rp 43.083.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bidang Pembangunan Daerah/ Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		
724	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 37.770.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
725	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 205.472.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
726	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 471.453.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
727	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Rp 154.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Daerah
728	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 340.180.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
729	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
730	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Rp 154.688.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Manusia		
731	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 205.651.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
732	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 223.294.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
733	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 50.350.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
734	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/	Rp 70.089.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
735	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 197.184.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
736	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 103.714.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
737	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 141.424.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
738	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Rp 85.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Daerah
739	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 47.567.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
740	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 283.076.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
741	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 231.044.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
742	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Rp 25.508.000,00	Badan Perencanaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Pembangunan Daerah
743	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 32.324.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
744	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 425.228.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
745	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 108.802.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
746	Reformasi	PROGRAM KOORDINASI DAN	Rp 35.428.000,00	Badan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Birokrasi.	SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Perencanaan Pembangunan Daerah
747	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 307.924.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
748	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 33.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
749	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 138.523.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
750	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran,	Rp 28.730.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
751	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 28.631.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
752	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 23.751.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
753	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 111.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
754	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 149.600.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
755	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 78.916.179.577,00	Badan Pendapatan Daerah
756	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 81.551.494.736,00	Badan Pengelolaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Keuangan Dan Aset Daerah
757	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 13.057.208.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
758	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
759	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 46.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
760	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
761	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 50.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
762	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
763	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 43.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
764	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 13.100.000,00	Badan Pendapatan Daerah
765	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
766	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah/ Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp 414.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
767	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 108.000.000,00	Badan Pendapatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Daerah
768	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
769	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 520.814.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
770	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 85.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
771	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 803.152.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
772	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.491.286.270,00	Badan Pendapatan Daerah
773	Reformasi	PROGRAM PENUNJANG	Rp 10.000.000,00	Badan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Birokrasi.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
774	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
775	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 1.530.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
776	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 88.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
777	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 112.359.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
778	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 134.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
779	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum	Rp 147.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu		
780	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 486.209.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
781	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.000.874.430,00	Badan Pendapatan Daerah
782	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.359.904.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
783	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.165.525.223,00	Badan Pendapatan Daerah
784	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 581.400.000,00	Badan Pendapatan Daerah
785	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang	Rp 973.078.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
786	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.820.124.000,00	Badan Pendapatan Daerah
787	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 352.840.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
788	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 778.173.000,00	Badan Pendapatan Daerah
789	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 2.923.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
790	Reformasi	PROGRAM PENUNJANG	Rp 322.456.400,00	Badan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Birokrasi.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
791	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 413.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
792	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penyusunan Standar Harga	Rp 366.540.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
793	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 230.459.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
794	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 167.168.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
795	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 343.228.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
796	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik	Rp 2.559.635.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah/ Pengamanan Barang Milik Daerah		Aset Daerah
797	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 365.662.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
798	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 476.921.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
799	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 665.733.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
800	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 785.038.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
801	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 2.156.587.000,00	Badan Pendapatan Daerah
802	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 1.434.740.200,00	Badan Pendapatan Daerah
803	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/	Rp 3.104.075.000,00	Badan Pendapatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Daerah
804	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
805	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 6.423.619.500,00	Badan Pendapatan Daerah
806	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penagihan Pajak Daerah	Rp 5.268.315.800,00	Badan Pendapatan Daerah
807	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 803.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
808	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/ Pengembangan Kompetensi Teknis/ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.501.171.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
809	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/	Rp 184.690.100,00	Badan Pengembangan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota		Sumber Daya Manusia
810	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/ Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 117.680.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
811	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 163.191.984,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
812	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp 51.800.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		SKPD		
813	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.042.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
814	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.910.447.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
815	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 15.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
816	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.624.300,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
817	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 149.109.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
818	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah	Rp 6.312.400,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Tangga		
819	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 15.493.600,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
820	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 25.906.450,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
821	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 25.200.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
822	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.257.196.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
823	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 93.240.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
824	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 38.740.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
825	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 464.658.600,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
826	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 160.027.200,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
827	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 21.500.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
828	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan/ Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp 45.008.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
829	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	Rp 99.747.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Kependudukan/ Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
830	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/ Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Rp 244.028.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
831	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp 118.525.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
832	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp 402.429.100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
833	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Rp 160.820.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
834	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Lingkungan	Rp 72.239.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Hidup		
835	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Rp 119.257.800,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
836	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 133.084.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
837	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp 102.923.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
838	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp 141.300.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
839	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.377.000,00	Badan Penghubung
840	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp 32.374.500,00	Badan Penghubung

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
841	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.875.845.951,00	Badan Penghubung
842	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 37.408.700,00	Badan Penghubung
843	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Penghubung
844	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 8.300.000,00	Badan Penghubung
845	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 65.000.000,00	Badan Penghubung
846	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum	Rp 188.069.000,00	Badan Penghubung

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
847	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1.221.539.100,00	Badan Penghubung
848	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 44.929.800,00	Badan Penghubung
849	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 33.000.400,00	Badan Penghubung
850	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 303.100.000,00	Badan Penghubung
851	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.846.346.000,00	Badan Penghubung
852	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 30.994.000,00	Badan Penghubung

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
853	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 724.603.900,00	Badan Penghubung
854	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.504.824.000,00	Badan Penghubung
855	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.481.984.000,00	Badan Penghubung
856	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 237.951.200,00	Badan Penghubung
857	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.208.771.000,00	Badan Penghubung
858	Reformasi	PROGRAM PELAYANAN	Rp 901.708.500,00	Badan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Birokrasi.	PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		Penghubung
859	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Rp 167.656.500,00	Badan Penghubung
860	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Rp 279.865.400,00	Badan Penghubung
861	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Rp 294.190.500,00	Badan Penghubung
862	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp 190.593.500,00	Badan Penghubung
863	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 1.806.109.000,00	Inspektorat
864	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 576.560.000,00	Inspektorat
865	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Rp 300.022.000,00	Inspektorat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI/ Pendampingan dan Asistensi/ Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
866	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI/ Pendampingan dan Asistensi/ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 172.929.000,00	Inspektorat
867	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/ Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 30.141.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah dan Nasional

Tabel VI-3
Program Prioritas berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		DAERAH PROVINSI	manusia	Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
14	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
15	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
16	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
17	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
18	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
19	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
20	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
21	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
22	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
23	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
27	Dinas Perumahan, Kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Permukiman dan Cipta Karya	SISTEM AIR LIMBAH		Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Cipta Karya	(PSU)		Ekonomi dan Pelayanan Dasar
36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
39	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
40	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	
42	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
43	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
44	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
45	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
46	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
47	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
48	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
49	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
50	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
51	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
52	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
53	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				Berdaya Saing
54	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
55	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Non-Program	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
63	Dinas Pemberdayaan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Sumber Daya

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Perempuan dan Perlindungan Anak	(KB)	sumber daya manusia	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
65	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
66	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEN GEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
67	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
68	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEN GEND ALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
69	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
70	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		YANG TERKAIT DENGAN PPLH	bencana	Bencana, dan Perubahan Iklim
71	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
72	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
73	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
74	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
75	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
76	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
77	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
78	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
86	Dinas Perhubungan	Non-Program	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
87	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
88	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
89	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
92	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
93	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
			Unggulan	yang Berkualitas dan Berkeadilan
95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
96	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
97	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
98	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
99	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
100	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Pintu			dan Berkeadilan
103	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
104	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
105	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
106	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
107	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
108	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
109	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	
110	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
111	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				dan Berkeadilan
112	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
113	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
114	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
115	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
116	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERI KAN AN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
117	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
118	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
119	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
120	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
121	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
122	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
123	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
124	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
125	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
126	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
127	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
128	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
129	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
130	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
131	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
132	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
133	Dinas Perkebunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
134	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
135	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
136	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
137	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
139	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
140	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
141	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
142	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
143	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
144	Dinas Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
145	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
146	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
147	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
148	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
149	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
150	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETEN AGALISTRI KAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
151	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
152	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
153	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
154	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
155	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
156	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
157	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
158	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
159	Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Reformasi Birokrasi	

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		DAERAH PROVINSI		
160	Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Reformasi Birokrasi	
161	Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Reformasi Birokrasi	
162	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Non-Program	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
163	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
164	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
165	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
166	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
167	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
168	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
169	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
170	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
171	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
172	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
173	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	
174	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	
175	Badan Penghubung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
176	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
177	Sekretariat Daerah	Non-Program	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
178	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
179	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
180	Sekretariat Daerah	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	
181	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
182	Sekretariat Daerah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
183	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKO NO MI AN DAN PEMBANGUNAN	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
184	Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
185	Sekretariat Daerah	Non-Program	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
186	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
187	Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
188	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				Pelayanan Publik
189	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
190	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
191	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
192	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
193	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
194	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
195	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
196	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
197	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Bebudaya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

6.4. Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel VI-4
Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penambahan Ruang Kelas Baru	25.852.238.000,00
2	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.546.355.000,00
3	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	8.692.493.000,00
4	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	15.051.503.000,00
5	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.043.562.000,00
6	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.413.141.000,00
7	Pendidikan Menengah	Dinas	PROGRAM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	3.893.263.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
		Pendidikan dan Kebudayaan	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menengah Atas / Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
8	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	19.105.000.000,00
9	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.477.118.000,00
10	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	247.786.980.000,00
11	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.448.500.000,00
12	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Penambahan Ruang Kelas Sekolah	14.645.367.000,00
13	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Sarana, Prasarana	1.000.320.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
				dan Utilitas Sekolah	
14	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.431.012.000,00
15	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	54.325.000.000,00
16	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.095.750.000,00
17	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	246.465.400.000,00
18	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.231.818.000,00
19	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	962.782.000,00
20	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
		Kebudayaan	PENDIDIKAN		
21	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	540.000.000,00
22	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.050.000.000,00
23	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.929.060.000,00
24	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.915.900,00
25	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	359.319.900,00
26	Pelayanan kesehatan bagi penduduk	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan	21.496.497.105,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Gaji dan Tunjangan ASN	
27	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.320.100,00
28	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.432.300,00
29	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.151.488,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
30	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.539.500,00
31	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan / Material	88.622.570,00
32	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	643.063.221,00
33	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.373.296.200,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	berpotensi bencana provinsi				
34	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.856.000,00
35	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.206.000,00
36	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan BLUD / Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16.500.000.000,00
37	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,	134.166.350,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
38	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	39.788.450,00
39	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	42.361.400,00
40	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	59.652.400,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
41	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	177.327.600,00
42	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	146.452.305,00
43	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	64.179.060,00
44	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi / Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	117.320.500,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	berpotensi bencana provinsi				
45	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota / Penyusunan Rencana, Kebiiakan, Strategi dan Teknis SPAM	843.574.000,00
46	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional / Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	727.700.000,00
47	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi / Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	250.000.000,00
48	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur / Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	212.560.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
49	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	573.637.500,00
50	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	89.906.700,00
51	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	241.165.100,00
52	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu	66.000.000,00
53	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	53.109.000,00
54	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	236.319.399,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
55	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	50.000.000,00
56	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.000.000,00
57	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.850.000,00
58	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.740.000,00
59	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00
60	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti /	356.238.050,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	dalam panti			Pengasuhan	
61	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Makanan	1.627.554.000,00
62	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Sandang	294.973.700,00
63	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	403.788.850,00
64	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	53.037.103,00
65	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	400.203.829,00
66	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	180.565.220,00
67	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Akta	7.500.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
				Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	
68	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	613.851.800,00
69	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	53.932.800,00
70	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.160.142,00
71	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	975.602.000,00
72	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	65.612.279,00
73	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	149.999.700,00
74	Rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	PROGRAM	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut	14.250.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	dasar lanjut usia telantar di dalam panti		REHABILITASI SOSIAL	Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu	
75	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	35.153.700,00
76	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169.934.300,00
77	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	12.960.000,00
78	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.500.000,00
79	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.100.000,00
80	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan	22.084.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
				Penelusuran Keluarga	
81	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.084.000,00
82	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemulasaraan	20.452.000,00
83	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	273.750.000,00
84	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Sandang	19.302.500,00
85	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	120.022.900,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
86	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6.304.429,00
87	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	51.570.000,00
88	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	122.911.597,00
89	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	24.611.200,00
90	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di	2.000.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti			dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
91	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.225.000,00
92	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemulangan ke Daerah Asal	9.790.000,00
93	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	10.108.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
94	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Permakanan	180.316.320,00
95	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Sandang	19.012.000,00
96	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	230.000.000,00
97	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	266.200.000,00
98	Perlindungan dan jaminan sosial pada	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	251.977.357,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		BENCANA	/ Pelayanan Dukungan Psikososial	

6.5. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, terdapat 48 perangkat daerah yang melaksanakan 264 program yang terdiri dari 881 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2023 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2023.

Tabel VI-5
Program dan Kegiatan berdasarkan OPD Tahun 2023

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	23	1.753.809.691.046,00
2	Dinas Kesehatan	6	22	283.547.144.158,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	4	14	384.896.699.372,00
4	Rumah Sakit Jiwa	4	14	42.823.468.349,00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	4	14	559.051.710.000,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3	13	99.361.844.940,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16	31	88.761.614.500,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3	14	47.606.411.375,99
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	15	11.216.074.451,00
10	Dinas Sosial	8	22	39.407.835.753,00
11	Dinas Tenaga Kerja	7	23	31.990.707.909,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	27	16.492.310.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	12	24	18.788.387.800,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	20	9.200.124.163,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	8	17	17.547.951.396,00
16	Dinas Perhubungan	5	23	23.962.617.300,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6	16	39.487.101.907,48
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	19	19.003.984.200,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	17	19.046.198.524,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	18	56.986.583.920,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	19	16.213.700.347,10
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	7	27	46.599.380.884,00
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	6	20	20.970.168.033,00
24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	25	89.317.062.872,50
25	Dinas Perkebunan	7	18	30.381.348.343,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	26	34.245.177.200,00
27	Dinas Kehutanan	6	25	80.046.854.470,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6	26	21.317.028.400,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	24	28.822.748.600,00
30	Inspektorat	4	15	43.401.000.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	18	33.402.565.182,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4	18	1.479.317.029.403,70
33	Badan Pendapatan Daerah	3	10	118.044.000.000,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	3	15	21.800.758.096,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	30.049.405.992,00
36	Badan Penelitian dan	3	15	12.460.357.434,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
	Pengembangan Daerah			
37	Badan Penghubung	3	12	18.712.432.951,00
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	15	3.200.000.000,00
39	Biro Kesejahteraan Rakyat	3	15	62.084.157.980,00
40	Biro Hukum	3	14	3.350.000.000,00
41	Biro Perekonomian	3	15	3.000.000.000,00
42	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3	15	3.960.000.000,00
43	Biro Administrasi Pembangunan	3	14	3.200.000.000,00
44	Biro Organisasi	3	14	3.500.000.000,00
45	Biro Umum	2	13	151.771.883.388,00
46	Biro Administrasi Pimpinan	2	15	6.804.923.490,00
47	Sekretariat DPRD	3	23	320.276.703.600,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	16	18.142.953.826,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel VII-1 dan Indikator kinerja daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan pada tabel VII-2.

Tabel VII - 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	72,44	73,5	73,5
2	Indeks Demokrasi Indonesia (TPB)	Indeks	72,79	74	75
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,38	55,3	55,8
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (58,38)	B	B
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Indeks	72,44	70,95	71,50
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	72,79	12,67	12,68

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2021	2022	2023
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	55,38	8,2	8,3
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	CC (58,38)	4,3-4,4	4,0-4,3
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,07	69,57	71,37
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Persen	67,96	69,14	69,18
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	75,386	76	74,87
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	91,22	92,20	92,31
13	Rasio Elekrifikasi Rumah Tangga	Persen	99,94	97	98
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,79	3-4	3,5-4,5
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	101,23	102-103	104-105
16	Laju Inflasi	Persen	2,19	3±1	3±1
17	Angka Kemiskinan	Persen	11,67	12,4-11,9	11,9-11,4
18	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,56	68,66	69,09
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	6,74	6,915	7,066
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	145,42	141	139,1

Tabel VII - 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,69	70,0 – 70,3	70,3 - 70,6
2	Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi supervise, pembinaan dan	Persen	85	90	95

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	pengendalian bidang perekonomian				
3	PDRB per kapita ADHK	(Juta Rp)		27,00-28,00	28,00-29,00
4	Indeks Williamson	Indeks			0,2212
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	**Tenaga Kerja**				
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	95,31	96,34	96,43
1.2	Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan	Persen	80,97	84	86
2	**Pangan**				
2.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,25	78	79
2.2	Stabilitas harga pangan	Koefisien	1,27	Cv ≥ 5%	Cv ≥ 5%
2.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	2,63	1%	1%
2.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	85,3	87	88
2.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	100	99	99,5
3	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah**				
3.1	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Persen	2,28	3,29	4,47
3.2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	35,17	34,26	35,22
3.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	Indeks	-	B	B
4	**Penanaman Modal**				
4..1	Realisasi investasi	Rupiah	13,05	12 Trilyun	13,5 Trilyun
	Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata				
1.1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	8,9	33	37
1.2	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	9,7	12	14
1.3	Persentase peningkatan rata-rata pengeluran wisatawan	Persen	4,8	7	12

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
1.4	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung	Rupiah	2,16	3,5	3,75
2	**Pertanian (Tananam pangan, Perkebunan dan Peternakan)**				
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Ubi Kayu)	Persen	99,48	100	100
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultural (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis)	Persen	91,3	100	100
2.3	Jumlah Populasi Ternak - Sapi Potong - Ayam Pedaging - Ayam Petelur	Ekor	860.951 94.254.495 13.230.147	857.657 86.291.694 9.644.313	883.387 88.017.528 9.837.199
2.4	Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)	Ton	108.286	110.302	112.508
2.5	Jumlah Produksi Telur	Ton	195.204	172.863	176.32
3	**Perdagangan**				
3.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,57	5,8	6
3.2	Nilai Ekspor Non Migas	Milyar US $	4,83	3,48	3,65
3.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Nilai	1,1	≤1,5	≤1,5
4	**Perindustrian**				
4.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	8,26	6,3	6,8
5	**Keluatan dan Perikanan**				
5.1	Prosentase Produksi Perikanan	%	90	100	100
5.2	Prosentase Ekspor Perikanan	%	84,7	100	100
6	**Perkebunan**				
6.1	Jumlah produksi lada rakyat	Ton	15.412	15.464	15.695
6.2	Jumlah produksi kopi robusta rakyat	Ton	117.311	117.78	119.546
6.3	Jumlah produksi tebu rakyat	Ton	148.549	189.606	192.45
6.4	Jumlah produksi robusta rakyat	Ton	192.601	164.706	167.177
6.5	Jumlah produksi kakao rakyat	Ton	57.507	61.25	62.17
6.6	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat	Ton	197.639	199.959	202.958
6.7	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat	Ton	81.475	86.225	87.519
	Penunjang Urusan				

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
1	**Keuangan**				
1.1	Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	WTP	WTP	WTP
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14,86	2,00	3,17
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Persen	85,02	85	88,3
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	75	76,00	74,87%
2	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
2.1	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	Persen	100	86,00%	90,00%
2.2	Persentase penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	82,27	83,75%	85,47%
2.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman Terhadap Sanitasi Layak	Persen	77,49	79,97%	82,44%
2.4	Persentase jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	71,11	71,66%	72,74%
2.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	Persen	100	97,38%	97,92%
3	**PSDA**				
31	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan IP>2	Persen	40	45	50
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
4	**Lingkungan Hidup**				
4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,77	58,44	58,54
4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,46	83,34	84,44
4.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	79,56	73,32	73,94
4.4	Indeks Kualitas Tutupn Lahan (IKTL)	Indeks	33,54	40,85	43,03
4.5	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektir Limbah	Persen	15,23	8,07	8,42
4.6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin	Persen	94,32	89	91

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis lingkungan hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah				
5	**BPBD**				
5.1	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Nilai	4,8	5,83	6,21
6	**Perhubungan**				
6.1	Rasio konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Rasio	0,68	0,7	0,72
6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	72,62	84	85
6.3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persentase	29	35	40
7	**Komunikasi dan Informatika**				
7.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,76	3,0(Baik)	3,3(Baik)
7.2	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update	Persen		85	90
7.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	87,98	75 (cukup informatif)	80 (menuju informatif)
7.4	Kualifikasi Indeks Keterbukaan informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Informatif
7.5	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Skor / Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7.6	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat ekektronik dan terintegrasi dengan BSSN	Persen	4	6	8
	LAYANAN URUSAN PILIHAN				
1	**Kehutanan**				
1.1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam, Rehabilitas maupun Restorasi	Persen	2,63	1,275	1,275
2	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
2.1	Rasio Dusun Berlistrik	Persen	52,96	53	54

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	PENUNJANG URUSAN				
3	**Perencanaan Pembangunan**				
3.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	23,92	30	31
3.3	Persentase OPD yang indicator sasaran Renstranya selaras dengan indicator sasaran RPJMD	Persen	100	100	100
3.4	Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100	100	100
3.5	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	85	90	95
4	**Penelitian dan Pengembangan**				
4.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	80	82	85
4.2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	CC*	B	B
2	Nilai SAKIP (TPB)		B*	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/Nilai	82	84	86
4	Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai	3,1	3,2	3,3
5	Nilai SKM untuk Fasilitasi Pelayanan Penataan produk perundang -undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum	Nilai	3,1	3,2	3,3
6	Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan di Sekretariat Daerah	Nilai	3,1	3,2	3,3
7	Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan	Nilai	3,1	3,2	3,3

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
8	Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B	Skor/Nilai	68	70	75
9	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	75,11	97,5	98
10	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan	Persen	88,5	89	89,5
11	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	99,23	100%	100%
12	Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan	Persen	98,27	100%	100%
13	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	98,3	100%	100%
14	Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasiona	Skor	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Persentase Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	Persen	100	100	100
16	Pesentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Persen	97,75	100	100
17	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik	Persen	70	70	75
18	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	100	85	87,5
19	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Angka	74,09	72,50	72,75
20	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	Persen	102,2	92	93
21	Persentase pelayanan keprotokolan	Persen	91	92	93
22	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD	Persen	100	100	100

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
23	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung	Persen	78	80	85
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	**Pendidikan**				
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat	Persen	87,59	96,33	97,83
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat	Persen	63,55	67,24	68,24
2	**Kesehatan**				
2.1	Prevalensi stunting	Persen	18,5	18,4	16
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	187	150	130
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	489	570	550
2.4	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	Persen	94	90	90
2.5	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	667	806	886
2.6	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Paripurna
2.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	75	82	84
2.8	Akreditasi rumah sakit	Status	Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 90%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93%
2.9	Nilai SPM	Persen	83	85	88
2.10	Tingkat Layanan Sub Spesialis	Persen	70	77%	88
2.11	Survey Kepuasaan Pasien/Penerima Layanan	Mutu Pelayanan	82	85	87
3	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
3.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	Persen	65	70	75

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
3.2	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan	Persen	65	70	75
4	**Sosial**				
4.1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	1,7	1,72	1,74
4.2	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen	20	20	20
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persen	4,59	3,00	3,10
1.2	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	Persen	86,67	100	100
1.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	Persen	100	100	100
2	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
2.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	103,31	82	88
2.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	53	65	82
3	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
3.1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	Persen	16,58	12,76	31,89
3.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,33	23,44	23,44
4	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
4.1	Cakupan KB Aktif	Persen	74,52	67,29	67,71
5	**Kepemudaan dan Olahraga**				

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
5.1	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional	Persen	50	40,00%	45,00%
5.2	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	Persen	73,08	52,49%	53,82%
6	**Kebudayaan**				
6.1	Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional	Persen	67,5	72,5	76,25
7	**Perpustakaan**				
7.1	Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	Persen	14,2	38,5	48,2
8	**Kearsipan**				
8.1	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	Persen	50	30	35
	PENUNJANG URUSAN				
1	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				
1.1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi	Persen	64.56	70	75
1.2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	Persen	50	79	91
1.3	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Persen	25,34	32,39	38,30
1.4	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	Nilai	B	A	A
2	**Pengawasan**				
2.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level (Skor)	3	3 (3,03)	3 (3,05)
2.2	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	96	84%	86%
2.3	Persentase Peraturan daerah (Perda)yang ditetapkkan.	Persen	58,3	70	80
2.4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Persen	100	100	100
2.5	Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi	Persen	100	100	100
2.6	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	3	3	4
2.7	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata	Persen	100	85	90

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)				
	ASPEK DAYA SAING				
1	**Fokus Iklim Berinvestasi**				
1.1	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan	Angka	82,94	86	87

BAB VIII PENUTUP

Salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kinerja jajaran pemerintah, dukungan dan peran aktif masyarakat maupun swasta serta aparat Pemerintah Kabupaten/Kota,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023, adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RAKYAT
LAMPUNG
Berjaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,746,344,691,046**					**1,788,996,451,526**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**954,854,974,046**					**956,096,080,646**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**600,000,000**					**850,000,000**
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	6 Dokumen	100 %	300,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	450,000,000
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	5 Laporan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	400,000,000
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**942,979,025,846**					**942,979,025,846**
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	8273 orang		941,979,025,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	941,979,025,846
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Dokumen		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	1,000,000,000
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,017,544,400**					**1,058,651,000**
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	15 Dokumen		73,678,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	76,654,000
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		586,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	609,859,000
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara,	100 %	1 Laporan		357,688,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	372,138,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kupang Kota									
1 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**800,000,000**					**850,000,000**
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	3 Dokumen		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	850,000,000
1 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,772,064,000**					**1,912,064,000**
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	11 Paket		221,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	221,064,000
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	75,000,000
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	18,000,000
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	75,000,000
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			100 %	0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	10,000,000
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	103,000,000
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	550,000,000
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		760,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	860,000,000
1 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**996,943,800**					**1,561,943,800**
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara,	100 %	50 Unit		245,966,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	610,966,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kupang Kota									
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	5 Unit		750,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	950,977,000
1 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,594,396,000**					**5,664,396,000**
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		952,136,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	972,136,000
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		4,642,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	4,692,260,000
1 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,095,000,000**					**1,220,000,000**
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	7 Unit		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	185,000,000
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	313 Unit		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	185,000,000
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	8 Unit		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	850,000,000
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**779,687,817,000**					**819,193,350,880**
1 01 02 1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**377,261,972,000**					**397,819,400,880**
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	37 Ruang		25,852,238,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	25,852,238,000
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	14 Ruang		4,546,355,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	4,546,355,000
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	73 %	30 Ruang		8,692,493,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	8,692,493,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan					SMA				
1 01 02 1.01 09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	36 Ruang		15,051,503,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	15,051,503,000
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	5 Ruang		1,716,319,000			Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,716,319,000
1 01 02 1.01 11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4 Ruang		1,362,516,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,362,516,000
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	16 Unit		4,043,562,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	4,043,562,000
1 01 02 1.01 17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	11 Unit		5,312,867,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	5,312,867,000
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	18 Ruang		10,413,141,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	10,413,141,000
1 01 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	23 Ruang		3,716,608,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	3,716,608,000
1 01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	6 Ruang		694,731,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	694,731,000
1 01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua	73 %	2 Ruang		238,930,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	73 %	238,930,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		minimal B	Sedang/Berat		Kecamatan, Semua Kelurahan					Reguler-SMA		minimal B		
1 01 02 1.01 26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	16 Ruang		3,019,469,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	3,019,469,000
1 01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	1 Ruang		129,276,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	129,276,000
1 01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	9 Ruang		1,336,818,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,336,818,000
1 01 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	20 Unit		3,893,263,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	3,893,263,000
1 01 02 1.01 34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	2 Unit		487,485,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	487,485,000
1 01 02 1.01 41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	95 Paket		19,105,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	18,798,600,000
1 01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4000 Peserta didik		4,477,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	15,705,878,400
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	100 Peserta Didik		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,540,400,000
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan		Semua Kab/Kota, Semua	73 %	77 Satuan Pendidikan		13,886,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	73 %	18,479,968,480

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		minimal B	Kelembagaan dan Manajemen		Kecamatan, Semua Kelurahan							minimal B		
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	513 Satuan Pendidikan		247,786,980,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	247,786,980,000
1 01 02 1.01 57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	50 Orang		1,448,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	5,000,000,000
1 01 02 1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**383,539,154,000**					**398,033,054,000**
1 01 02 1.02 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	31 Ruang		14,645,367,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	14,645,367,000
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	42 Ruang		46,155,480,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	46,155,480,000
1 01 02 1.02 05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	17 Ruang		6,626,024,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	6,626,024,000
1 01 02 1.02 06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	7 Ruang		1,186,584,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,186,584,000
1 01 02 1.02 07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		1,340,217,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,340,217,000
1 01 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	15 Unit		1,000,320,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,000,320,000
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah		Semua Kab/Kota,	73 %	13 Ruang		1,431,012,000	DAK Fisik-Bidang		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan	73 %	1,431,012,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		SLB yang berakreditasi minimal B	Direhabilitasi		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Pendidikan-Penugasan-SMK		SLB yang berakreditasi minimal B		
1 01 02 1.02 17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	1 Ruang		317,250,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	317,250,000
1 01 02 1.02 33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	46 Paket		54,325,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	54,325,000,000
1 01 02 1.02 37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4037 Peserta didik		6,095,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	18,000,000,000
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	100 Peserta Didik		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,540,400,000
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	152 Satuan Pendidikan		3,900,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	5,000,000,000
1 01 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	487 Satuan Pendidikan		246,465,400,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	246,465,400,000
1 01 02 1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**18,886,691,000**					**23,340,896,000**
1 01 02 1.03 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	12 Ruang		2,231,818,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	2,231,818,000
1 01 02 1.03 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	1 Ruang		171,591,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	171,591,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 01 02 1.03 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4 Ruang		664,447,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	664,447,000
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	7 Unit		962,782,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	962,782,000
1 01 02 1.03 10	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Unit		748,640,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	748,640,000
1 01 02 1.03 13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	5 Ruang		738,353,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	738,353,000
1 01 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		200,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	200,000,000
1 01 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		200,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	200,000,000
1 01 02 1.03 21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		200,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	200,000,000
1 01 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	2 Unit		100,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	100,000,000
1 01 02 1.03 40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	45 Paket		540,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	540,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	2085 Peserta Didik		3,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	6,742,085,000
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	50 Peserta Didik		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	412,120,000
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	31 Satuan Pendidikan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	500,000,000
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	31 Satuan Pendidikan		8,929,060,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	8,929,060,000
1 01 04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**11,801,900,000**					**13,707,020,000**
1 01 04 1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**								**11,801,900,000**					**13,707,020,000**
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	64 %	1 Dokumen		6,591,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	64 %	6,591,900,000
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	64 %	1 Laporan		5,210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	64 %	7,115,120,000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**7,465,000,000**					**8,021,404,000**
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**2,300,000,000**					**2,311,404,000**
2 22 02 1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,300,000,000**					**2,311,404,000**
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	80 %	10 Objek		966,245,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	80 %	971,421,000
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan				80 %	200 Orang		1,179,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan	80 %	1,179,566,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		pengembangan kesenian budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa					DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya		pengembangan kesenian budaya		
2 22 02 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	80 %	10 Unit		154,189,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	80 %	160,417,000
2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**415,000,000**					**450,000,000**
2 22 03 1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**415,000,000**					**450,000,000**
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota		1000 Orang		415,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000
2 22 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**								**400,000,000**					**450,000,000**
2 22 04 1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**								**400,000,000**					**450,000,000**
2 22 04 1.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	76.25 %	100 Orang		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	76.25 %	450,000,000
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**350,000,000**					**510,000,000**
2 22 05 1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**								**350,000,000**					**510,000,000**
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yeng teregistrasi nasional	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	85.03 %	100 Orang		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Cagar Budaya yeng teregistrasi nasional	85.03 %	510,000,000
2 22 06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**								**4,000,000,000**					**4,300,000,000**
2 22 06 1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**								**4,000,000,000**					**4,300,000,000**
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan		Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng	57.32 %	500 Unit		1,067,671,500	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57.32 %	1,167,671,500
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng	57.32 %	6 Unit		2,439,873,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57.32 %	2,539,873,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng	57.32 %	10 Unit		492,454,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57.32 %	592,454,900
								TOTAL	**1,753,809,691,046**					**1,797,017,855,526**

DINAS KESEHATAN

2

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**283,547,144,158**					**359,660,790,893**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**71,616,265,260**					**75,808,274,512**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**250,000,000**					**350,000,000**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	3 Dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	40,000,000
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**48,991,288,520**					**43,855,000,000**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	430 Orang/ Bulan	100 %	46,341,288,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	41,590,000,000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	6 Dokumen	100 %	2,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	2,100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	30,000,000
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	35,000,000
1 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	40,000,000
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	30,000,000
1 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	0 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	30,000,000
1 02 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**
1 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
1 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
1 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**152,874,000**					**340,000,000**
1 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Unit	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	10 Orang	100 %	102,874,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
1 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	100 Orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,592,165,840**					**4,038,274,512**
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	412,106,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	642,106,840
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	175,000,000
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	575,000,000
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	275,000,000
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	405,000,000
1 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	330,000,000
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Laporan	100 %	1,015,059,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,486,167,672
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**695,000,000**					**880,000,000**
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	190,000,000
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	200,000,000
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	240,000,000
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**11,110,596,900**					**11,275,000,000**
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	12 Laporan	100 %	2,447,196,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,725,000,000
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	12 Laporan	100 %	8,663,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,550,000,000
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,493,400,000**					**4,050,000,000**
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	70 Unit	100 %	1,579,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,650,000,000
1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	200,000,000
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	748,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,100,000,000
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,100,000,000
1 02 01 1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**5,310,940,000**					**11,000,000,000**
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Unit Kerja	100 %	5,310,940,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	11,000,000,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**209,830,878,898**					**277,751,665,881**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**25,729,069,632**					**30,641,320,264**
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 %	1 Unit	75 %	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 % 100 %	4,200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			78 % 100 % 5.43 %				Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.01 04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1 Unit	75 %	3,719,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4,125,000,000
1 02 02 1.01 06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Layanan	75 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	325,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	100,000,000
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1 Unit	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	250,000,000
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	3 Unit	75 %	3,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	17,400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	5 Unit	75 %	87,143,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	500,000,000
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	5 Unit	75 %	65,457,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	5 Unit	75 %	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	100,000,000
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Paket	75 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Unit	75 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	65,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	160,000,000
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	87,126,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	575,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	85,000,000
1 02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	90,000,000
1 02 02 1.01 20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Unit	75 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	188,380,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	338,380,632
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1 Paket	75 %	15,016,371,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,192,939,632

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 23	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Didistribusikan ke Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	15 Paket	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	100,000,000
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**182,279,809,266**					**242,635,345,617**
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	278199 Orang	75 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2,583,343,000
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 %	86099 Orang	75 %	804,056,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC	75 % 78 % 75 %	3,609,935,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Insentif Daerah		Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	16 Dokumen	75 %	676,577,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4,976,577,000
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,966,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	120,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	110,000,000
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	17 Dokumen	75 %	9,160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	9,620,000,000
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	4 Dokumen	75 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	310,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,000,000,000
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	795,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	490,000,000
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	1,865,879,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,215,879,264
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	335,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	451 Orang	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	164,752,389,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	208,289,739,529
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	4 Dokumen	75 %	250,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	467,939,632

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	6 Dokumen	75 %	955,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2,150,000,000
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	15 Dokumen	75 %	684,941,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,211,931,392

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	290,000,000
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	50,000,000
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Dokumen	75 %	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	2,050,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	265,000,000
1 02 02 1.02 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Paket	75 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	120,000,000
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	210,000,000
1 02 02 1.02 27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	310,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1 Dokumen	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	550,000,000
1 02 02 1.02 30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2100000 Keluarga	75 %	200,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**462,000,000**					**965,000,000**
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	365,000,000
1 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	297,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	600,000,000
1 02 02 1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,360,000,000**					**3,510,000,000**
1 02 02 1.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah	FKTP Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus	Kota Bandar Lampung, Enggal,	75 % 78 %	9 Unit	75 %	150,000,000			FKTP Terakreditasi	75 % 78 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	(CDR) TBC (78%)	Pahoman	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	4 Unit	75 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	275,000,000
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	9 Unit	75 %	1,085,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	2,935,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,130,000,000**					**4,955,000,000**
1 02 03 1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**308,400,000**					**2,440,000,000**
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	46 %	16404 Orang	47 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	46 %	2,120,000,000
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	46 %	420 Orang	47 %	108,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	46 %	320,000,000
1 02 03 1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**821,600,000**					**2,515,000,000**
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	47 %	185 Orang	100 %	772,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	47 %	2,200,000,000
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	47 %	1 Dokumen	100 %	48,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	47 %	315,000,000
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**315,000,000**					**477,000,000**
1 02 04 1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**								**165,000,000**					**220,000,000**
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	50 Sarana	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	90,000,000
1 02 04 1.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	2 Dokumen	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	130,000,000
1 02 04 1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**								**150,000,000**					**257,000,000**
1 02 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	2 Sarana	96 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	137,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 04 1.02 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	2 Dokumen	96 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	120,000,000
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**655,000,000**					**668,850,500**
1 02 05 1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**								**130,000,000**					**140,000,000**
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	4 Dokumen	66 %	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	140,000,000
1 02 05 1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**								**450,000,000**					**388,850,500**
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	4 Dokumen	66 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	338,850,500
1 02 05 1.02 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	1 Dokumen	66 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	50,000,000
1 02 05 1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**								**75,000,000**					**140,000,000**
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	2 Dokumen	66 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	140,000,000
								TOTAL	**283,547,144,158**					**359,660,790,893**

RUMAH SAKIT UMUM dr. ABDUL MOELOEK

3

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**384,896,699,372**					**507,300,138,140**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**361,403,699,372**					**389,580,236,894**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**71,336,699,372**					**75,080,000,000**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan		15050 Orang/ Bulan	100 %	71,261,699,372	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah		75,000,000,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan		1 Dokumen	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah		80,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10,067,000,000**					**11,264,000,000**
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terbayarnya honorarium PTHL	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan		1 Laporan	100 %	10,067,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan penunjang urusan pemerintah daerah		11,264,000,000
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**280,000,000,000**					**303,236,236,894**
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan BLUD	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	280,000,000,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	303,236,236,894
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**23,000,000,000**					**117,019,901,246**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**21,200,000,000**					**114,619,901,246**
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase upaya kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan pelayanan	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan	100 %	1 Unit	100 %	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase upaya kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	100 %	64,619,901,246
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase upaya kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan pelayanan	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan	100 %	1 Unit	100 %	20,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Persentase upaya kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	100 %	50,000,000,000
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,800,000,000**					**2,400,000,000**
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase upaya kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase upaya kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	100 %	2,400,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**493,000,000**					**700,000,000**
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**493,000,000**					**700,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Terlaksananya pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan	100 %	12 Orang	100 %	493,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	100 %	700,000,000
								TOTAL	**384,896,699,372**					**507,300,138,140**

RUMAH SAKIT JIWA

4

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**42,823,468,349**					**45,124,488,449**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**42,042,220,284**					**43,844,026,949**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**396,235,800**					**438,903,000**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ		100 %	7 dokumen	100 %	36,915,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	41,269,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ		100 %	15 Dokumen	100 %	359,319,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	397,634,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**21,517,817,205**					**22,844,704,000**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan		100 %	14 Bulan	100 %	21,496,497,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	22,821,266,000
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan		100 %	10 Dokumen	100 %	21,320,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	23,438,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**340,745,858**					**371,267,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	12 bulan 0 Paket	100 %	84,432,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	92,876,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	0 Paket 40 unit	100 %	140,151,488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	124,586,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	40 jenis 0 Paket	100 %	27,539,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	30,533,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	0 Paket 4 kegiatan	100 %	88,622,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	123,272,000
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**271,062,000**					**298,169,000**
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase terpeliharannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	38,856,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	42,742,000
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase terpeliharannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	7 Unit 0 Unit	100 %	232,206,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	255,427,000
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,016,359,421**					**3,390,983,949**
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 bulan 0 Laporan	100 %	643,063,221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	803,483,949
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	13 bulan	100 %	2,373,296,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	2,587,500,000
1 02 01 1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**16,500,000,000**					**16,500,000,000**
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan dibayarkannya operasional layanan RSJ	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD		100 %	12 bulan	100 %	16,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	16,500,000,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**663,927,565**					**1,163,141,000**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**216,316,200**					**670,767,000**
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	5 Unit 0 Unit	100 %	134,166,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan Jumlah pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Paket 6 Paket	100 %	39,788,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	70,767,000
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan Jumlah pengadaan Barang Penunjang Operasional	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Unit 70 Unit	100 %	42,361,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100,000,000
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**447,611,365**					**492,374,000**
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah laporan kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 29 laporan	100 %	59,652,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	65,618,000
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah laporan terapi rehabilitasi mental atau terapi pasien ODMK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Dokumen 39 laporan	100 %	177,327,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	195,061,000
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan terapi rehabilitasi napza Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	7 Orang 0 Orang	100 %	146,452,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	161,098,000
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Dokumen 11 laporan	100 %	64,179,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	70,597,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**117,320,500**					**117,320,500**
1 02 03 1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**117,320,500**					**117,320,500**
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia	Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat		100 %	20 laporan 0 Orang	100 %	117,320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia	100 %	117,320,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi										
								TOTAL	**42,823,468,349**					**45,124,488,449**

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

5

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**559,051,710,000**					**995,411,803,301**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**57,491,745,460**					**67,965,970,350**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**830,463,000**					**871,986,150**
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	4 Dokumen	100 %	610,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	641,379,900
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	12 Dokumen	100 %	76,960,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	80,808,000
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	142,665,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	149,798,250
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**33,940,904,000**					**33,760,384,200**
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	310 Orang/ Bulan	100 %	33,712,586,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	33,499,384,200
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	38,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	60,000,000
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Laporan	100 %	20,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	26,000,000
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	140,302,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	145,000,000
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	18 Laporan	100 %	29,314,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**400,000,000**					**544,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	150,000,000
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	194,500,000
1 03 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,815,430,500**					**2,245,000,000**
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai		100 %	0 Paket	100 %	0			Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	350,000,000
1 03 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	191,981,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	80,000,000
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 248 Orang	100 %	800,263,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	950,000,000
1 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	280 Orang	100 %	823,185,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	865,000,000
1 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,967,427,200**					**2,081,100,000**
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	2 Paket	100 %	126,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	139,100,000
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Paket	100 %	8,027,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	9,000,000
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	60 Paket	100 %	588,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	619,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	25 Paket	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	62,000,000
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	27,000,000
1 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	125 Paket	100 %	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	227,000,000
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	100 Laporan	100 %	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	212,000,000
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	510,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	526,000,000
1 03 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	260,000,000
1 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,095,121,600**					**14,500,000,000**
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Unit	100 %	500,494,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,000,000,000
1 03 01 1.07 03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Unit	100 %	880,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000,000
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	300 Unit	100 %	1,314,627,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,000,000,000
1 03 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,500,000,000
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**11,570,342,400**					**9,609,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	13,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	14,000,000
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	631,142,400	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	651,000,000
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	10,925,700,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,944,000,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,872,056,760**					**4,354,000,000**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Unit	100 %	1,255,655,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,294,000,000
1 03 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	200,015,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	500,000,000
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 210 Unit	100 %	360,390,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	372,000,000
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	2,055,996,760	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,188,000,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**496,846,546,540**					**922,589,832,951**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**								**496,846,546,540**					**922,589,832,951**
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	60 Dokumen	4.725 %	12,431,382,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	13,053,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 10 1.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Pesawaran, Padang Cermin, Semua Kelurahan	77 %	1000 M^2	4.725 %	2,023,066,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	15,000,000,000
1 03 10 1.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	2 Dokumen	4.725 %	2,150,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	2,215,000,000
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8 Dokumen	4.725 %	3,200,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	3,296,000,000
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	4 KM	4.725 %	25,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	63,000,000,000
1 03 10 1.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	77 %	1 KM	4.725 %	6,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	56,000,000,000
1 03 10 1.01 07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Way Hui	77 %	1 KM	4.725 %	15,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	87,000,000,000
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	22 KM	4.725 %	178,384,250,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	292,500,000,000
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	43 KM	4.725 %	178,096,156,540	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	210,000,000,000
1 03 10 1.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Way Hui	77 %	2 KM	4.725 %	6,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	16,200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	320 KM	4.725 %	32,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	93,000,000,000
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	16 M	4.725 %	8,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	22,575,000,000
1 03 10 1.01 16	Penggantian Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8 M	4.725 %	4,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	4,120,000,000
1 03 10 1.01 17	Pelebaran Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8 M	4.725 %	4,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	5,500,000,000
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	50 M	4.725 %	3,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	3,080,000,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8580 M	4.725 %	3,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	3,217,500,000
1 03 10 1.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	360 M	4.725 %	1,994,700,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	2,035,000,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan		77 %	0 KM	4.725 %	0	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	5,000,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	2 Dokumen	4.725 %	1,066,992,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	1,100,000,000
1 03 10 1.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota,	77 %	55 Dokumen	4.725 %	11,500,000,000	Pendapatan Pajak		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	24,698,332,951

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Jalan/Jembatan		Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Daerah				
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**4,713,418,000**					**4,856,000,000**
1 03 11 1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**								**4,427,210,500**					**4,561,000,000**
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah SDM yang Mengikuti Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.32 %	420 Orang	420 Orang	3,872,599,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	79.32 %	3,989,000,000
1 03 11 1.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah SDM yang Mengikuti Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.32 %	0 Orang 285 Orang	420 Orang	554,611,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	79.32 %	572,000,000
1 03 11 1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**								**286,207,500**					**295,000,000**
1 03 11 1.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.32 %	1 Laporan	100 %	286,207,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	79.32 %	295,000,000
								TOTAL	**559,051,710,000**					**995,411,803,301**

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

6

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**99,361,844,940**					**210,760,624,859**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**55,344,427,167**					**66,704,006,648**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**506,649,934**
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	44,940,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	202,891,363
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	21,324,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	80,613,828
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,241,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	80,703,829
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	71,932,339
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	28,495,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	70,508,575
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**38,626,480,367**					**47,594,230,575**
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	38,587,780,367	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	47,532,219,937

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	15,650,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	31,005,319
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	23,050,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	31,005,319
1 03 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**147,310,000**					**322,700,875**
1 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Lokasi Yang Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	96,600,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	208,344,172
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun Tepat Waktu	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	26,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	14,356,703
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,710,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	100,000,000
1 03 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**54,000,000**					**597,410,478**
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pelayanan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	100 %	54,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	597,410,478
1 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,212,773,500**					**3,096,444,115**
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	252,945,500	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	830,178,566

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	34,823,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	62,010,637
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	105,005,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	225,780,730

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	92,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	31,005,319
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,728,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	1,947,468,863
1 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**33,440,000**					**124,418,142**
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Unit	33,440,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	124,418,142
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**13,156,182,000**					**13,050,477,855**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	942,642,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	621,016,142

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	12,213,540,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	12,429,461,713
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**964,241,300**					**1,411,674,674**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya	ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan,	100 %	52 Unit	100 %	446,200,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	489,554,137

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	38,140,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	50,817,756
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabillitasi	ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	479,901,300	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	871,302,781
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**44,017,417,773**					**144,056,618,211**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**15,378,669,700**					**62,396,094,301**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	10 Dokumen	80 %	1,484,666,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	2,300,666,446
1 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 Dokumen	80 %	517,400,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,072,081,318
1 03 02 1.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumalh Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	3 Dokumen	80 %	778,338,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	2,264,635,906
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 Dokumen	80 %	715,530,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,460,953,620
1 03 02 1.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	6 Unit	80 %	3,503,634,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	6,533,151,562
1 03 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Titik	80 %	1,722,400,300	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	2,595,986,400
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	0.288 KM	80 %	3,330,996,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	41,234,161,667
1 03 02 1.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan		100 -	0.16 KM	80 %	716,440,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam	100 -	794,872,810

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Kondisi Baik		Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kondisi Baik		
1 03 02 1.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	0.17 KM	80 %	781,006,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,992,961,727
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	3 Dokumen	80 %	219,749,400	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	277,007,717
1 03 02 1.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Kelembangaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Lembaga	80 %	234,080,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	237,271,921
1 03 02 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 Dokumen	80 %	527,780,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	752,561,092
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 Lembaga	80 %	101,650,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	197,665,107
1 03 02 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Sungai yang Dipelihara	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	0.4 KM	80 %	745,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	682,117,008
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**28,638,748,073**					**81,660,523,910**
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 -	9 Dokumen	100 %	2,005,074,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur	100 -	6,126,264,373

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Tersusun	Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kelurahan							Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik		
1 03 02 1.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Bendung Irigasi DIbangun	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Bendung	100 %	1,375,771,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,498,656,335
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan IRigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	6.8 KM	100 %	15,183,117,810	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	59,688,697,432
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	7.647 KM	100 %	6,767,195,263	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	9,630,390,601
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	10 Bendung	100 %	3,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	4,145,782,907
1 03 02 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukura	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	18 DI	100 %	307,590,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	570,732,262
								TOTAL	**99,361,844,940**					**210,760,624,859**

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

7

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**38,843,034,000**					**102,017,721,247**
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**843,574,000**					**843,574,000**
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**								**843,574,000**					**843,574,000**
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Persentase tersusunnya kajian SPAM		100 %	1 Dokumen	100 %	843,574,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	100 %	843,574,000
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan persampahan regional sesuai dengan aturan yang ada	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Tersedianya sistem peneglolaan Persampahan Regional	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	750,000,000	Pajak Daerah		Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan persampahan regional sesuai dengan aturan yang ada	100 %	750,000,000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**727,700,000**					**727,700,000**
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**								**727,700,000**					**727,700,000**
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Tersedianya Sistem pengelolaan air limbah domestik		100 %	1 Dokumen	100 %	727,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	100 %	727,700,000
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**4,101,760,000**					**26,080,354,772**
1	**03**	**07**	**1.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**								**4,101,760,000**					**26,080,354,772**
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman kawasan strategis provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Sistem Jaringan 14 Sistem Jaringan	100 %	3,801,760,000	Pajak Daerah		Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100 %	23,980,354,772
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman kawasan strategis provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Sistem Jaringan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100 %	1,200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 07 1.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman kawasan strategis provinsi		100 %	8 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100 %	900,000,000
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**25,779,598,950**					**63,145,458,475**
1 03 08 1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**								**25,779,598,950**					**63,145,458,475**
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Bangunan gedung yang layak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	12,333,661,350	Pajak Daerah		Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100 %	36,085,028,334
1 03 08 1.01 02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Tersedianya Bangunan gedung yang layak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	13,445,937,600	Pajak Daerah		Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100 %	27,060,430,141
1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**2,220,401,050**					**6,050,634,000**
1 03 09 1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**2,220,401,050**					**6,050,634,000**
1 03 09 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	255,413,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	100 %	240,676,000
1 03 09 1.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kawasan	100 %	263,677,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	100 %	309,958,000
1 03 09 1.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kawasan	100 %	1,701,310,200	Pajak Daerah		Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	100 %	5,500,000,000
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**4,420,000,000**					**4,420,000,000**
1 03 12 1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**								**1,700,000,000**					**1,700,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 12 1.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Persentase Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	1,700,000,000
1 03 12 1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**								**500,000,000**					**500,000,000**
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Tata Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	500,000,000
1 03 12 1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**								**500,000,000**					**500,000,000**
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	3 Dokumen	100 %	500,000,000	Pajak Daerah		0	0 0	500,000,000
1 03 12 1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**								**1,720,000,000**					**1,720,000,000**
1 03 12 1.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	1,720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	1,720,000,000
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**49,338,580,500**					**79,124,062,000**
1 04 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**15,761,614,500**					**20,502,015,600**
1 04 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**250,000,000**
1 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000
1 04 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,000,000
1 04 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,702,186,900**					**10,911,988,000**
1 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	62 Orang/ Bulan	100 %	8,620,388,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,812,190,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	45,360,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	63,360,000
1 04 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	36,438,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36,438,000
1 04 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,000,000**
1 04 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
1 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
1 04 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**178,074,000**					**158,074,000**
1 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 24 Orang	100 %	178,074,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	158,074,000
1 04 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,516,192,000**					**2,576,192,000**
1 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000
1 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	293,807,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	360,000,000
1 04 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	12 Paket	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan									
1 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80,000,000
1 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 bulan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,000,000
1 04 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	31,193,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,000,000
1 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,041,192,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,941,192,000
1 04 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**200,000,000**					**150,000,000**
1 04 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	200,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000
1 04 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,415,161,600**					**5,305,761,600**
1 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	250,000,000
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,315,161,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,055,761,600
1 04 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**550,000,000**					**1,100,000,000**
1 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	p	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	300,000,000	Pajak Daerah		p	100 %	400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 04 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	p	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		p	100 %	100,000,000
1 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	p	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	Pajak Daerah		p	100 %	420,000,000
1 04 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	p		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		p	100 %	180,000,000
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**500,000,000**					**700,000,000**
1 04 02 1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**								**500,000,000**					**700,000,000**
1 04 02 1.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase dokumen yang disusun untuk korban bencana atau relokasi program provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	350,000,000
1 04 02 1.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase dokumen yang disusun untuk korban bencana atau relokasi program provinsi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	350,000,000
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**19,500,000,000**					**21,300,000,000**
1 04 03 1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**								**5,500,000,000**					**7,800,000,000**
1 04 03 1.01 01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok	Persentase pembinaan masyarakat dikawasan	Semua Kab/Kota,	100 %	10 Laporan	100 %	3,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	6,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Permukiman Kumuh		Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	kumuh	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 04 03 1.01 08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Persentase pembinaan masyarakat dikawasan kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	500,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	500,000,000
1 04 03 1.01 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembinaan masyarakat dikawasan kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	2,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	800,000,000
1 04 03 1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**								**14,000,000,000**					**13,500,000,000**
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	605 Unit Rumah	100 %	14,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	13,500,000,000
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**13,576,966,000**					**36,622,046,400**
1 04 05 1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**								**13,576,966,000**					**36,622,046,400**
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase ketersediaan PSU pada Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	100 %	1,650,000,000	Pajak Daerah		Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	100 %	4,695,080,400
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase ketersediaan PSU pada Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	78 Lokasi	100 %	11,926,966,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	100 %	31,926,966,000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**580,000,000**					**1,300,000,000**
2 10 03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**								**0**					**400,000,000**
2 10 03 1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**								**0**					**400,000,000**
2 10 03 1.01 01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Jumlah kab/kota penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum				15 Kab/Kota		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
2 10 06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**								**300,000,000**					**300,000,000**
2 10 06 1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**300,000,000**					**300,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 10 06 1.01 02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	300,000,000	Pajak Daerah		persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100 %	150,000,000
2 10 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan		Persentase pelaksanaan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100 %	150,000,000
2 10 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**								**280,000,000**					**600,000,000**
2 10 10 1.01	**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**280,000,000**					**600,000,000**
2 10 10 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase perencanaan Penggunaan Tanah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	280,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100 %	300,000,000
2 10 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA		Persentase perencanaan Penggunaan Tanah yang terlaksana		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100 %	300,000,000
								TOTAL	**88,761,614,500**					**182,441,783,247**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

8

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**47,606,411,376**					**48,565,835,956**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**42,956,563,676**					**43,417,025,956**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**159,701,400**					**159,701,400**
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi PD Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 Dokumen	100 persen	47,550,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	47,550,200
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi PD Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	100 persen	37,383,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	37,383,200
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi PD Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	74,768,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	74,768,000
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**21,082,152,576**					**21,082,152,576**
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Laporan Keuangan Sesuai Peraturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14 Orang/ Bulan	100 Persen	21,082,152,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	21,082,152,576
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,000,000**
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelaporan Aset dan Barang	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Laporan	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	25,000,000
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelaporan Aset dan Barang	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	25,000,000
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**359,825,000**					**359,825,000**
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 Persen	146,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	146,040,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	7 Laporan	100 Persen	30,515,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	30,515,000
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	602 Orang	100 Persen	129,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	129,772,000
1 05 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Orang	100 Persen	53,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	53,498,000
1 05 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**993,172,200**					**993,172,200**
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	13,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	13,991,000
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	7 Paket	100 Persen	101,831,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	101,831,850
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	16,000,000
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	65,000,000
1 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	88,974,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	88,974,350
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan,	100 persen	15 Laporan	100 Persen	707,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	707,375,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan									
1 05 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,657,531,150**					**20,113,624,780**
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	113,624,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	113,624,780
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	19,543,906,370	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	20,000,000,000
1 05 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**654,181,350**					**658,550,000**
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Saspras Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Unit	100 Persen	495,631,350	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	500,000,000
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Saspras Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	100 Persen	38,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	38,600,000
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Saspras Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 Persen	119,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	119,950,000
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**4,649,847,700**					**5,148,810,000**
1 05 02 1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**4,001,037,700**					**4,500,000,000**
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Terciptanya Suasana Aman dan Tertib Di Masyarakat	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Kasus	100 Persen	3,512,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	100 Persen	4,000,000,000
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya Suasana Aman dan Tertib Di Masyarakat	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Kasus	100 Persen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	100 Persen	190,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			yang Dilakukan Penindakan											
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Suasana Aman dan Tertib Di Masyarakat	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	303,395,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	100 Persen	310,000,000
1 05 02 1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**								**523,810,000**					**523,810,000**
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penyuluhan dan Penegakan Perda	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	311,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	100 Persen	311,250,000
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Terlaksananya Penyuluhan dan Penegakan Perda	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	212,560,000	Pajak Daerah		Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	100 Persen	212,560,000
1 05 02 1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**								**125,000,000**					**125,000,000**
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Pembinaan PPNS Provinsi Lampung Yang terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Meningkatnya Kemampuan dan Karir PPNS	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan PPNS Provinsi Lampung Yang terlaksana	100 Persen	125,000,000
								TOTAL	**47,606,411,376**					**48,565,835,956**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

9

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**11,216,074,451**					**14,645,412,295**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9,017,683,751**					**9,285,901,223**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**149,066,000**					**149,066,000**
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	100 %	65,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65,500,000
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	39,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	39,200,000
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	44,366,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	44,366,000
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,725,384,451**					**5,305,025,723**
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang/ Bulan	100 %	5,650,384,451	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,230,025,723
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	32,438,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,438,400
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	42,561,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	42,561,600
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,000,000**
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
1 05 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,565,000**					**20,565,000**
1 05 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,565,000
1 05 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,262,757,800**					**2,843,774,000**
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8,435,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13,000,000
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	81,774,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	500,000,000
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	15,019,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,019,000
1 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	19,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19,070,000
1 05 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,200,000
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,128,259,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,286,485,000
1 05 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**541,995,500**					**394,395,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	113,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	113,160,000
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	428,835,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	281,235,500
1 05 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**267,915,000**					**523,075,000**
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	11 Unit	100 %	244,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	500,000,000
1 05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	20 Unit	100 %	23,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23,075,000
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**2,198,390,700**					**5,359,511,072**
1 05 03 1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**								**205,481,400**					**1,520,000,000**
1 05 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		100 %	1 Dokumen	100 %	70,184,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	1,250,000,000
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		100 %	30 Orang	100 %	135,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	270,000,000
1 05 03 1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**1,118,160,000**					**2,535,050,372**
1 05 03 1.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	178,834,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	250,000,000
1 05 03 1.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	270 Unit	100 %	162,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	300,000,000
1 05 03 1.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan		100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Prosentase upaya penanggulangan bencana	100 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						(PAD)		yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana		
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	4 Kawasan	100 %	328,551,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	839,050,372
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	95,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	200,000,000
1 05 03 1.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Laporan	100 %	203,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	446,000,000
1 05 03 1.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	300,000,000
1 05 03 1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**469,786,300**					**585,529,700**
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1 Laporan	100 %	164,859,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	242,736,000
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1 Laporan	100 %	20,066,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	31,521,600
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1500 Orang	100 %	259,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	211,272,100
1 05 03 1.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 03 1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**404,963,000**					**718,931,000**
1 05 03 1.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	66,481,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	98,931,000
1 05 03 1.04 03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	50,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	120,000,000
1 05 03 1.04 06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	70 Keluarga	100 %	89,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	200,000,000
1 05 03 1.04 07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	197,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	300,000,000
								TOTAL	**11,216,074,451**					**14,645,412,295**

DINAS SOSIAL

10

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**39,407,835,753**					**40,931,752,699**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**25,146,027,666**					**28,361,938,424**
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**127,445,250**					**180,387,324**
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	28,185,150			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	63,736,854
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	11 Laporan	100 Persen	48,095,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	56,521,362
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	7 Laporan	100 Persen	51,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	60,129,108
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**20,248,335,753**					**24,722,688,097**
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	14 Orang/ Bulan	100 Persen	19,927,335,753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	23,459,976,829
1	06	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,220,620,892
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	25,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12,025,822
1	06	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,012,911
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	18,038,732

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD											
1 06 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,012,911
1 06 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**103,842,171**
1 06 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	2,405,164
1 06 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	50,000,000
1 06 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	1 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	15,803,439
1 06 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	13,529,049
1 06 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	2,104,519
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	20,000,000
1 06 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**112,300,000**					**24,051,644**
1 06 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12,025,822

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Utara, Pengajaran									
1 06 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	30 Orang	100 Persen	84,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12,025,822
1 06 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,006,640,532**					**1,559,762,959**
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	36,077,465
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	374,618,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	253,744,836
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	363,558,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	14,430,986
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	41,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	48,103,286
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	91,025,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	54,116,197
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	231,437,486
1 06 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	48,103,286
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	956,238,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	873,749,417
1 06 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,793,204,631**					**1,554,741,441**
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	5,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,012,911

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Utara, Pengajaran									
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	440,192,731	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	446,802,497
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	45,577,864
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	1,302,899,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,056,348,169
1 06 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**808,101,500**					**216,464,788**
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	28 Unit	100 Persen	507,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	24,051,643
1 06 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	0 Unit 50 Unit	100 Persen	19,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	24,051,643
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	8 Unit	100 Persen	175,515,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30,064,554
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	5 Unit	100 Persen	105,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	138,296,948
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**526,682,950**					**696,223,999**
1 06 02 1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**81,864,000**					**96,206,573**
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Terlaksananya UGB dan PUB	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	0 Dokumen 8 Dokumen	100 Persen	81,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota	100 Persen	96,206,573

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Pengumpulan Uang atau Barang		Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 02 1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**								**444,818,950**					**600,017,426**
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Orang	100 Persen	71,391,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	105,395,985
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	229 Orang	100 Persen	70,639,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	105,912,613
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Keluarga 40 Keluarga	100 Persen	69,866,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	50,754,379

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi											
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Lembaga	100 Persen	232,922,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	337,954,449
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								**249,999,500**					**300,886,056**
1 06 03 1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**								**249,999,500**					**300,886,056**
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tndak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Warga Negara Migran Tindak Kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	100 Persen	249,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tndak Kekerasan	100 %	300,886,056
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**10,833,813,022**					**9,295,775,311**
1 06 04 1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**								**1,335,727,699**					**1,477,986,072**
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	573,637,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	674,140,741
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	89,906,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	105,659,855
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	0 Orang 40 Orang	40 Orang	241,165,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	56,587,624
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	66,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	83,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	53,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	62,414,014
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	236,319,399	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	324,722,894
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000
1 06 04 1.01 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	25 Orang	40 Orang	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	5,000,000
1 06 04 1.01 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	14,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000
1 06 04 1.01 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	40 Orang	4,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	16,460,944
1 06 04 1.01 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	40 Orang	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		sosialnya										sosialnya		
1 06 04 1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**								**4,003,805,494**					**4,378,637,102**
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	356,238,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	381,687,552
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	1,627,554,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	1,914,443,454
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua	100 %	165 Orang	165 Orang	294,973,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	328,632,633

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	403,788,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	147,357,202
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	53,037,103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	53,037,103
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran,	100 %	165 Orang	165 Orang	400,203,829	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	336,229,342

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 04 1.02 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	180,565,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	199,766,575
1 06 04 1.02 08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	165 Orang	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	20,000,000
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	613,851,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	909,072,142

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 04 1.02 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	53,932,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	83,411,099
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	12,160,142	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	5,000,000
1 06 04 1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**								**1,497,731,979**					**1,629,468,596**
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	975,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	1,104,202,521
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia	Kab. Lampung Selatan,	100 %	77 Orang	77 Orang	65,612,279			Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang	100 %	77,832,561

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	terlantar di dalam Panti	Natar, Natar					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya		
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	149,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	30,064,554
1 06 04 1.03 04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	14,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	16,866,215
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	35,153,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	58,039,501
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	169,934,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	207,493,526
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	12,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000
1 06 04 1.03 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	25 Orang	77 Orang	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	2,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 06 04 1.03 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	7,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	8,418,075
1 06 04 1.03 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	22,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	25,000,000
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	22,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	25,000,000
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	20,452,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	24,051,643
1 06 04 1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**								**647,595,626**					**694,367,475**
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	273,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	329,206,866
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	19,302,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	33,675,307
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	120,022,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya	100 %	12,564,217

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		kemampuan fungsi sosialnya										kemampuan fungsi sosialnya		
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	6,304,429	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	7,408,965
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	51,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	60,610,141
1 06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	122,911,597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	153,157,641
1 06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	24,611,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	41,658,648
1 06 04 1.04 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	5,000,000
1 06 04 1.04 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	7,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	6,133,169

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 06 04 1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	9,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	33,071,009
1 06 04 1.04 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	25 Orang	10,108,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	11,881,512
1 06 04 1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**								**3,348,952,224**					**1,115,316,066**
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	656,867,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	121,941,831
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	100,000,000
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	872,828,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	286,214,554
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	1,608,266,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	529,893,777
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	76,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya	100 %	77,265,904

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		kemampuan fungsi sosialnya										kemampuan fungsi sosialnya		
1 06 04 1.05 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	28,999,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	0
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**1,370,059,665**					**894,675,676**
1 06 05 1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**								**1,370,059,665**					**894,675,676**
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	700 Keluarga	100 Persen	283,026,665	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	126,331,256
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	700 Keluarga	100 Persen	103,153,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	468,344,420
1 06 05 1.02 03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanaan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 Persen	983,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	300,000,000
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**947,505,677**					**961,349,477**
1 06 06 1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**								**947,505,677**					**961,349,477**
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 Persen	180,316,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	16,114,601
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 Persen	19,012,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 06 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persen	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	216,464,789
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 Persen	266,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	300,000,000
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 Persen	251,977,357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	378,770,087
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**333,747,273**					**420,903,756**
1 06 07 1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**								**333,747,273**					**420,903,756**
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Lokasi	44,171,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100 %	141,904,695
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Makam	2 Lokasi	289,576,273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100 %	278,999,061
								TOTAL	**39,407,835,753**					**40,931,752,699**

DINAS TENAGA KERJA

11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**31,990,707,909**					**40,906,446,904**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**28,561,707,909**					**31,481,446,904**
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**325,000,000**
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Dokumen	96.43 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	125,000,000
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,003,093,708**					**26,891,000,000**
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	225 Orang/ Bulan	96.43 persen	25,953,093,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	26,701,000,000
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Dokumen	96.43 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	40,000,000
2	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	2 Dokumen	96.43 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**40,000,000**					**85,446,904**
2	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	1 Laporan	96.43 persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	35,446,904
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	1 Laporan	96.43 persen	20,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 07 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**47,268,201**					**180,000,000**
2 07 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 orang	12 Dokumen	96.43 persen	17,268,201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 orang	30,000,000
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 orang	30 Orang	96.43 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 orang	150,000,000
2 07 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**566,000,000**					**1,150,000,000**
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Paket	96.43 persen	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000
2 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Paket	96.43 persen	32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Paket	96.43 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 paket	96.43 persen	89,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	300,000,000
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	70 laporan	96.43 persen	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	96 laporan	96.43 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	550,000,000
2 07 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100,000,000**					**300,000,000**
2 07 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	35 unit	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	300,000,000
2 07 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,131,676,000**					**1,350,000,000**
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	700,000,000
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	631,676,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	650,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 07 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**523,670,000**					**1,200,000,000**
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Unit	96.43 persen	373,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	500,000,000
2 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	40 Unit	96.43 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	150,000,000
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	3 Unit	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	550,000,000
2 07 02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**142,000,000**					**300,000,000**
2 07 02 1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**142,000,000**					**300,000,000**
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	84 persen	1 dokumen	96.43 persen	92,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	84 persen	150,000,000
2 07 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan RTK Mikro	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	84 persen	50 orang	96.43 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	84 persen	150,000,000
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**1,550,000,000**					**5,250,000,000**
2 07 03 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**								**1,200,000,000**					**4,500,000,000**
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Utara, Abung Surakarta, Tatakarya Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Segalamider Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	100 persen	320 Orang	96.43 orang	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	4,500,000,000
2 07 03 1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**								**75,000,000**					**200,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 LPK	96.43 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	200,000,000
2 07 03 1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**								**175,000,000**					**400,000,000**
2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 Perusahaan	96.43 persen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	400,000,000
2 07 03 1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**								**100,000,000**					**150,000,000**
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	90 Dokumen	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	150,000,000
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**825,000,000**					**1,750,000,000**
2 07 04 1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**250,000,000**					**600,000,000**
2 07 04 1.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	90 Orang	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	250,000,000
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	90 Orang	96.43 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	350,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 07 04 1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**100,000,000**					**250,000,000**
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	300 Orang	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	250,000,000
2 07 04 1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**								**475,000,000**					**900,000,000**
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	90 Orang	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	200,000,000
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	100 Orang	96.43 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	500,000,000
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna yang Diberdayakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	60 Orang	96.43 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	200,000,000
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**422,000,000**					**925,000,000**
2 07 05 1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**								**107,000,000**					**250,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 07 05 1.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Laporan	86 persen	107,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	250,000,000
2 07 05 1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**								**215,000,000**					**425,000,000**
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Perkara	86 persen	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	250,000,000
2 07 05 1.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 Perusahaan	86 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	175,000,000
2 07 05 1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**								**100,000,000**					**250,000,000**
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Penetapan UMP	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Surat Keputusan	86 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	250,000,000
2 07 06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**								**490,000,000**					**1,200,000,000**
2 07 06 1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**								**490,000,000**					**1,200,000,000**
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Perusahaan	86 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100 Persen	350,000,000
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Kasus	86 persen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100 Persen	300,000,000
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Perusahaan	86 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100 Persen	550,000,000
								TOTAL	**31,990,707,909**					**40,906,446,904**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**16,071,455,000**					**17,542,287,227**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12,457,983,000**					**13,003,151,227**
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**310,000,000**
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	17 dokumen 17 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	150,000,000
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	50,000,000
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	4 Laporan	100 %	0			Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	110,000,000
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,907,610,000**					**9,264,871,227**
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan		100 %	66 Orang/ Bulan	100 %	8,782,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	8,839,871,227
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan		100 %	4 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	350,000,000
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan		100 %	4 Laporan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	75,000,000
2	**08**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,000,000**
2	08	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD		100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	50,000,000
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**125,000,000**					**75,000,000**
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD		100 %	4 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	50,000,000
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD		100 %	0 Orang 5 Orang	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											
2 08 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,825,556,000**					**1,613,280,000**
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	28,280,000			Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	28,280,000
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	69 Paket	100 %	75,800,000			Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	240,000,000
2 08 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	8,000,000
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	25,000,000
2 08 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	33,000,000
2 08 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	79,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	79,000,000
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	1,576,476,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	1,200,000,000
2 08 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**200,938,800**					**300,000,000**
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Unit	100 %	200,938,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	300,000,000
2 08 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**663,340,000**					**680,000,000**
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	148,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	220,000,000
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	515,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	460,000,000
2 08 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**535,538,200**					**710,000,000**
2 08 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	13 Unit	100 %	292,908,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Operasional atau Lapangan		dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemerintah Daerah										
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	113 Unit	100 %	58,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	70,000,000
2 08 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Unit	100 %	183,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	240,000,000
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**882,615,000**					**740,000,000**
2 08 02 1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**								**181,168,000**					**280,000,000**
2 08 02 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG		100 %	0 Perangkat Daerah 49 Perangkat Daerah	100 %	181,168,000			Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100 %	280,000,000
2 08 02 1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**								**519,420,000**					**300,000,000**
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pesentase Kabupaten peserta bimtek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga		100 %	1 Dokumen	100 %	519,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100 %	300,000,000
2 08 02 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**								**182,027,000**					**160,000,000**
2 08 02 1.03 03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Persentase Kab/Kota yang memperoleh KIE PPPA		100 %	1 Dokumen	100 %	182,027,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100 %	160,000,000
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**1,054,584,000**					**1,482,330,000**
2 08 03 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**601,118,000**					**720,000,000**
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		100 %	1 Dokumen	100 %	201,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	200,000,000
2 08 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			100 %	15 Perangkat Daerah	100 %	400,000,000			Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang	100 %	520,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Kewenangan Provinsi	mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan		
2 08 03 1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**262,044,000**					**379,564,000**
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan		100 %	0 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	50,000,000
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan		100 %	50 Layanan	100 %	262,044,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	329,564,000
2 08 03 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**								**191,422,000**					**382,766,000**
2 08 03 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan		100 %	1 Laporan	100 %	191,422,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	250,000,000
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan		100 %	0 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	79,366,000
2 08 03 1.03 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	53,400,000
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**585,780,000**					**620,000,000**
2 08 04 1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**								**585,780,000**					**620,000,000**
2 08 04 1.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mengikuti Pelatihan dan Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga		100 %	1 Laporan	100 %	585,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	620,000,000
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**191,243,000**					**470,000,000**
2 08 05 1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**								**191,243,000**					**470,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak		100 %	1 Dokumen	100 %	82,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	100 %	250,000,000
2 08 05 1.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak		100 %	1 Dokumen	100 %	109,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	100 %	220,000,000
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**637,012,000**					**900,000,000**
2 08 06 1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**								**637,012,000**					**900,000,000**
2 08 06 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	197,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	260,000,000
2 08 06 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	74,121,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	190,000,000
2 08 06 1.02 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	365,003,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	450,000,000
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**262,238,000**					**326,806,000**
2 08 07 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**185,432,000**					**200,000,000**
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota peserta Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	185,432,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	200,000,000
2 08 07 1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**								**0**					**50,000,000**
2 08 07 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				0 Layanan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 08 07 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**76,806,000**					**76,806,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan		100 %	1 Dokumen	100 %	76,806,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	76,806,000
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**420,855,000**					**790,000,000**
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**70,000,000**					**180,000,000**
2 14 02 1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**70,000,000**					**180,000,000**
2 14 02 1.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota		8 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	8 %	50,000,000
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota		8 %	1 Dokumen	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	8 %	130,000,000
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**84,967,000**					**190,000,000**
2 14 03 1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**84,967,000**					**190,000,000**
2 14 03 1.01 08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluaraga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja		100 %	1 Laporan	100 %	84,967,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluaraga Berencana	100 %	190,000,000
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**265,888,000**					**420,000,000**
2 14 04 1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**180,000,000**					**290,000,000**
2 14 04 1.01 05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	50,000,000
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB		100 %	1 Dokumen	100 %	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	240,000,000
2 14 04 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**85,888,000**					**130,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga		100 %	1 Dokumen	100 %	85,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	130,000,000
								TOTAL	**16,492,310,000**					**18,332,287,227**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

13

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**18,788,387,800**					**20,838,317,781**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**15,373,853,900**					**17,776,249,391**
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**115,000,000**					**126,500,000**
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen		85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				93,500,000
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,000,000
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,478,832,335**					**10,103,968,169**
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan		9,405,786,335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,023,968,169
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen		23,046,000	Pajak Daerah				25,000,000
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 dokumen 2 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**23,300,000**					**25,630,000**
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		23,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,630,000
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**24,000,000**					**26,400,000**
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang		24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,400,000
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**599,267,800**					**1,246,952,080**
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		122,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				134,568,500
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,800,000
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,500,000
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang				1 Paket		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				77,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Disediakan							(PAD)				
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		323,932,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				944,083,580
2 11 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**155,840,000**					**171,424,000**
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit		155,840,000					171,424,000
2 11 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**758,120,000**					**833,932,000**
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		315,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				346,632,000
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		443,000,000					487,300,000
2 11 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**219,493,765**					**241,443,142**
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit		101,785,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				111,964,342
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit		17,708,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,478,800
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
2 11 01 1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**4,000,000,000**					**5,000,000,000**
2 11 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja		4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000
2 11 02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**								**1,306,481,000**					**1,362,339,000**
2 11 02 1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**								**521,823,000**					**702,339,000**
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen		521,823,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				702,339,000
2 11 02 1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**								**784,658,000**					**660,000,000**
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				2 Dokumen		784,658,000	Pajak Daerah				660,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**303,848,000**					**181,406,500**
2 11 03 1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**								**178,498,000**					**119,586,500**
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen		117,837,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				76,741,500
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 dokumen 0 Dokumen		60,661,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,845,000
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 03 1.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**								**76,717,000**					**55,000,000**
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan		76,717,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
2 11 03 1.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**								**48,633,000**					**6,820,000**
2 11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen		48,633,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,820,000
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**50,000,000**					**55,000,000**
2 11 04 1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**								**50,000,000**					**55,000,000**
2 11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**96,136,900**					**8,832,890**
2 11 05 1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**96,136,900**					**8,832,890**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen		96,136,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,832,890
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**160,078,000**					**74,690,000**
2 11 06 1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**								**160,078,000**					**74,690,000**
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				0 Dokumen 1 dokumen		54,533,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,850,000
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 laporan 0 Laporan		44,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,000,000
2 11 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 dokumen		60,609,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,840,000
2 11 07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**								**36,191,000**					**17,600,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 07 1.01	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								**36,191,000**					**17,600,000**
2 11 07 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH				0 Dokumen 1 dokumen		36,191,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,600,000
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**50,000,000**					**55,000,000**
2 11 08 1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**								**50,000,000**					**55,000,000**
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen		50,000,000					55,000,000
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**81,219,000**					**42,900,000**
2 11 09 1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**								**81,219,000**					**42,900,000**
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				15 Entitas		81,219,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,900,000
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**53,569,000**					**2,200,000**
2 11 10 1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**								**53,569,000**					**2,200,000**
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani				0 Dokumen 1 dokumen		53,569,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,200,000
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**1,277,011,000**					**1,262,100,000**
2 11 11 1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**								**1,277,011,000**					**1,262,100,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen		506,436,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				471,600,000
2 11 11 1.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				65 Unit		770,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				790,500,000
								TOTAL	**18,788,387,800**					**20,838,317,781**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

14

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**9,200,124,163**					**10,241,068,358**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7,654,561,713**					**9,193,233,500**
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**110,799,800**					**171,034,000**
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	7 Dokumen	100 %	32,939,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	63,757,000
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	1 Dokumen	100 %	15,999,300	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2	12	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	1 Dokumen	100 %	16,217,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	3 Laporan	100 %	27,468,100	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	38,000,000
2	12	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	5 Laporan	100 %	18,175,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	19,277,000
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,167,593,720**					**5,551,147,700**
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	35 Orang/ Bulan	100 %	5,120,023,120	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	5,484,280,000
2	12	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	1 Laporan	100 %	8,930,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	24,122,000
2	12	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	4 Dokumen	100 %	17,304,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	16,192,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi										Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
2 12 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	3 Laporan	100 %	13,419,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	16,710,200
2 12 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	1 Dokumen	100 %	7,915,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	9,843,500
2 12 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**12,191,800**					**19,500,000**
2 12 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Administrasi Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		100 %	2 Laporan	100 %	12,191,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	19,500,000
2 12 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**439,494,200**					**920,234,000**
2 12 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	1 Dokumen	100 %	9,483,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2 12 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	45 Orang	100 %	51,087,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	98,084,000
2 12 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	0 Dokumen 420 Orang	100 %	282,161,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	502,543,100
2 12 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	110 Orang	100 %	96,762,300	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	294,606,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,092,737,193**					**1,596,764,300**
2 12 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	4 Paket	100 %	7,717,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	7,717,400
2 12 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	1 Paket	100 %	68,592,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	220,000,000
2 12 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	12 Paket	100 %	7,995,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	7,995,900
2 12 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	12 Paket	100 %	29,617,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	125,000,000
2 12 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	12 Paket	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2 12 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	14 Dokumen	100 %	4,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
2 12 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	0 Dokumen 3 Paket	100 %	92,768,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	159,170,000
2 12 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	0 Laporan 24 Laporan	100 %	32,240,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	87 Laporan	100 %	746,646,300	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	791,881,000
2 12 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	2 Dokumen	100 %	78,159,793	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	195,000,000
2 12 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50,025,000**					**45,000,000**
2 12 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 %	4 Unit	100 %	14,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2 12 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 %	1 Unit	100 %	36,025,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
2 12 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**249,754,000**					**264,553,500**
2 12 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemeritntah daerah yang tersedia		100 %	12 Laporan	100 %	127,120,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	141,920,000
2 12 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemeritntah daerah yang tersedia		100 %	12 Laporan	100 %	122,633,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	122,633,500
2 12 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**531,966,000**					**625,000,000**
2 12 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	6 Unit	100 %	198,610,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	225,000,000
2 12 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	50 Unit	100 %	15,152,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	57,152,000
2 12 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	110 Unit	100 %	119,678,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	112,848,000
2 12 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	1 Unit	100 %	198,526,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	230,000,000
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**86,300,000**					**263,535,000**
2 12 02 1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**								**32,400,000**					**163,535,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 02 1.01 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen pelaksanaan pelayanan pendaftaran kependudukan di Kabupaten/Kota yang tersedia		100 %	1 Dokumen	100 %	32,400,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	163,535,000
2 12 02 1.02	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**								**21,900,000**					**35,000,000**
2 12 02 1.02 02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparatur pendaftaran kependudukan yang tersedia		0 0	1 Laporan	100 %	21,900,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	0 0	35,000,000
2 12 02 1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**								**32,000,000**					**65,000,000**
2 12 02 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhaddap 15 kabupaten/kota yang tersedia		100 %	15 Laporan	100 %	32,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	65,000,000
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**1,210,879,450**					**305,391,000**
2 12 03 1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**1,110,879,450**					**205,391,000**
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di 15 Kabupaten/Kota yang tersedia		100 %	15 Laporan	100 %	1,110,879,450	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	205,391,000
2 12 03 1.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**								**35,000,000**					**35,000,000**
2 12 03 1.02 02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil		100 %	2 Laporan	100 %	35,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	35,000,000
2 12 03 1.03	**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**65,000,000**					**65,000,000**
2 12 03 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang tersedia		100 %	15 Laporan	100 %	65,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	65,000,000
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**159,261,000**					**253,651,000**
2 12 04 1.02	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**								**72,099,000**					**128,651,000**
2 12 04 1.02 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia		100 %	30 Dokumen	100 %	72,099,000	Pajak Daerah		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	128,651,000
2 12 04 1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**								**87,162,000**					**125,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang tersedia		100 %	1 Laporan	100 %	87,162,000	Pajak Daerah		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	125,000,000
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**89,122,000**					**225,257,858**
2 12 05 1.01	**Penyediaan Profil Kependudukan**								**89,122,000**					**225,257,858**
2 12 05 1.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen profil kependudukan yang tersedia		100 %	3 Dokumen	100 %	89,122,000	Pajak Daerah		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100 %	225,257,858
								TOTAL	**9,200,124,163**					**10,241,068,358**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

15

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**16,547,951,396**					**16,617,951,396**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**13,747,951,396**					**13,817,951,396**
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**150,000,000**
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100 %	1 Dokumen		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	45,000,000
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100 %	1 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	50,000,000
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	1 Laporan		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	55,000,000
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,292,741,116**					**10,292,741,116**
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	1022 Orang/ Bulan		9,017,741,116			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	9,017,741,116
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100 %	1 Dokumen		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	1,200,000,000
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100 %	1 Dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	25,000,000
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan			100 %	1 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Transmigrasi Prov.Lampung)	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Transmigrasi Prov.Lampung)		
2 13 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**70,000,000**
2 13 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		25,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,959,000
2 13 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		24,041,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,041,000
2 13 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**500,650,000**					**500,650,000**
2 13 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 %	10 Orang		100,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	100,650,000
2 13 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	50 Orang		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	400,000,000
2 13 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,923,827,880**					**1,948,827,880**
2 13 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 %	10 Paket		34,495,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	44,495,600
2 13 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	42 Paket		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	100,000,000
2 13 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100 %	10 Paket		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	30,000,000
2 13 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100 %	50 Paket		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)										Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)		
2 13 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			100 %	10 Paket		34,908,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	34,908,200
2 13 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 %	3 Laporan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	160,000,000
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	112 Laporan		1,436,959,782	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	1,436,959,782
2 13 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100 %	1 Dokumen		117,464,298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	117,464,298
2 13 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**536,056,400**					**536,056,400**
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								146,056,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				146,056,400
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan		390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				390,000,000
2 13 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**294,676,000**					**319,676,000**
2 13 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								170,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195,176,000
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								24,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,500,000
2 13 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**								**200,000,000**					**200,000,000**
2 13 03 1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
2 13 03 1.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**1,300,000,000**					**1,300,000,000**
2 13 04 1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**								**1,300,000,000**					**1,300,000,000**
2 13 04 1.01 05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			25 %	1 Dokumen		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	100,000,000
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			25 %	1 Dokumen		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	300,000,000
2 13 04 1.01 10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina			25 %	300 Orang		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	100,000,000
2 13 04 1.01 12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	200,000,000
2 13 04 1.01 15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	200,000,000
2 13 04 1.01 18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota			25 %	1 Dokumen		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	400,000,000
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**1,300,000,000**					**1,300,000,000**
2 13 05 1.01	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**1,300,000,000**					**1,300,000,000**
2 13 05 1.01 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000
2 13 05 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan			25 %	1 Lembaga		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			kapasitas Kelembagaannya											
2 13 05 1.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000
2 13 05 1.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			25 %	1 Laporan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	500,000,000
2 13 05 1.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			25 %	1 Laporan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			25 %	0 Laporan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**1,000,000,000**					**1,000,000,000**
3 32 02	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**								**650,000,000**					**650,000,000**
3 32 02 1.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**								**650,000,000**					**650,000,000**
3 32 02 1.01 02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi			100 %	1 Kawasan Transmigrasi		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100 %	650,000,000
3 32 03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**200,000,000**					**200,000,000**
3 32 03 1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100 %	1 Laporan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase calon transmigran yang di fasilitasi	100 %	200,000,000
3 32 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**150,000,000**					**150,000,000**
3 32 04 1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**								**150,000,000**					**150,000,000**
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase identifikasi sarana prasarana kawasan transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			100 %	1 Satuan Permukiman		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase identifikasi sarana prasarana kawasan transmigrasi	100 %	150,000,000
								TOTAL	**17,547,951,396**					**17,617,951,396**

DINAS PERHUBUNGAN

16

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**23,962,617,300**					**33,790,767,422**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**20,246,538,897**					**19,484,174,897**
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**215,000,000**					**1,065,000,000**
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100 %	9 Dokumen		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000,000
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKj, LKPJ, LPPD)			100 %	3 laporan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, Evaluasi Renstra, monitoring)			100 %	3 laporan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	35,000,000
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,359,686,897**					**12,945,474,897**
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 OB		13,274,686,897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,820,474,897
2	15	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				7 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,025,000,000**					**25,000,000**
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan		2,015,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**384,750,000**					**453,000,000**
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (PDL Pejabat Struktural dan fungsional)				1 Paket		37,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang		86,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				143,000,000
2 15 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi)				0 Orang 50 orang		260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,000,000
2 15 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**884,000,000**					**1,314,000,000**
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
2 15 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,000,000
2 15 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket		47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47,000,000
2 15 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rapat Dinas)				12 Dokumen		48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48,000,000
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117 laporan		732,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,152,000,000
2 15 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**260,000,000**					**1,130,000,000**
2 15 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2 15 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 6 unit		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Alat Timbang Kendaraan Portable Wireless 20T)											
2 15 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 0 Unit		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 15 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,398,200,000**					**2,001,700,000**
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Gaji PTHL, OB dll)				0 Laporan 12 laporan		2,086,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,689,700,000
2 15 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**719,902,000**					**550,000,000**
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 unit		73,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 unit		566,902,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				380,000,000
2 15 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**3,435,000,000**					**13,656,592,525**
2 15 02 1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**								**750,000,000**					**900,000,000**
2 15 02 1.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				3 Dokumen 0 Dokumen		700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
2 15 02 1.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen 0 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 15 02 1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**								**1,250,000,000**					**8,681,592,525**
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				0 Unit 300 unit		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,581,592,525
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				0 Unit 8 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 15 02 1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**								**260,000,000**					**650,000,000**
2 15 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				0 Unit 5 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2 15 02 1.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B				0 Orang 12 orang		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
2 15 02 1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**								**180,000,000**					**900,000,000**
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				0 Laporan 2 laporan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi											
2 15 02 1.05 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				0 Unit 40 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				550,000,000
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				0 Laporan 6 laporan		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2 15 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				2 laporan 0 Laporan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 15 02 1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**150,000,000**					**300,000,000**
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan 4 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				0 Laporan 4 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 15 02 1.07 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 15 02 1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**570,000,000**					**650,000,000**
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provins				0 Laporan 4 laporan		520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600,000,000
2 15 02 1.09	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**1,500,000,000**
2 15 02 1.09 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				0 Dokumen 2 dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000
2 15 02 1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**75,000,000**					**75,000,000**
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				400 unit		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**246,078,403**					**600,000,000**
2 15 03 1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**								**50,000,000**					**50,000,000**
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut				12 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas											
2 15 03 1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**								**161,078,403**					**500,000,000**
2 15 03 1.09 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				0 Unit 1 unit		161,078,403	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2 15 03 1.11	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**								**35,000,000**					**50,000,000**
2 15 03 1.11 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				0 Laporan 1 laporan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 15 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**								**35,000,000**					**50,000,000**
2 15 05 1.06	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**								**35,000,000**					**50,000,000**
2 15 05 1.06 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				0 Dokumen 2 dokumen		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
								TOTAL	**23,962,617,300**					**33,790,767,422**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

17

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**39,053,043,607**					**43,123,311,233**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16,918,389,707**					**19,913,276,987**
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**103,165,500**					**165,798,600**
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	40,110,000			Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100 Persen	60,132,000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		100 Persen	16 Laporan	100 Persen	27,110,000	Pajak Daerah		Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100 Persen	52,532,000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		100 Persen	23 Laporan	100 Persen	35,945,500	Pajak Daerah		Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100 Persen	53,134,600
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,773,389,807**					**16,263,877,107**
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	136 Orang/ Bulan	100 persen	11,694,031,907	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	13,768,647,627
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	5 Dokumen	100 persen	2,020,000,000	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2,424,000,000
2	16	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	5 Dokumen	100 persen	12,634,900	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	15,161,880
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	2 Laporan	100 persen	13,173,000	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	15,807,600
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	16 Laporan	100 persen	33,550,000	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	40,260,000
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**100,000,000**					**220,000,000**
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang		100,000,000	Pajak Daerah				220,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**921,896,000**					**1,206,275,200**
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		23,275,000	Pajak Daerah				27,930,000
2 16 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket		12,548,000	Pajak Daerah				15,057,600
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		45,000,000	Pajak Daerah				54,000,000
2 16 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket		60,000,000	Pajak Daerah				72,000,000
2 16 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan		63,741,000	Pajak Daerah				76,489,200
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51 Laporan		717,332,000	Pajak Daerah				960,798,400
2 16 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**118,226,000**					**141,871,200**
2 16 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit		118,226,000	Pajak Daerah				141,871,200
2 16 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,467,650,600**					**1,394,580,720**
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		7,120,000	Pajak Daerah				8,544,000
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		1,460,530,600	Pajak Daerah				1,386,036,720
2 16 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**434,061,800**					**520,874,160**
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit		377,811,800	Pajak Daerah				453,374,160
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit		56,250,000	Pajak Daerah				67,500,000
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**12,248,405,700**					**9,737,328,060**
2 16 02 1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**								**12,248,405,700**					**9,737,328,060**
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan				4 Dokumen		1,520,000,000	Pajak Daerah				1,216,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Aspirasi Publik											
2 16 02 1.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen		164,415,000	Pajak Daerah				131,532,000
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen		861,252,800	Pajak Daerah				689,002,240
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen		274,059,500	Pajak Daerah				219,247,600
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan		7,205,000,000	Pajak Daerah				5,764,000,000
2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				4 Dokumen		621,870,200					436,099,660
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang		37,726,000	Pajak Daerah				30,180,800
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				16 Dokumen		1,514,497,000	Pajak Daerah				1,211,597,600
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen		49,585,200	Pajak Daerah				39,668,160
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**9,886,248,200**					**13,472,706,186**
2 16 03 1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**9,886,248,200**					**13,472,706,186**
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				3 Dokumen		103,210,000	Pajak Daerah				139,333,500
2 16 03 1.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen		41,000,000	Pajak Daerah				55,350,000
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				2 Dokumen		8,800,000,000	Pajak Daerah				11,880,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 03 1.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2 Dokumen		165,977,000	Pajak Daerah				269,335,016
2 16 03 1.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				48 Perangkat Daerah		396,162,200	Pajak Daerah				634,818,970
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				11 Unit		134,500,000	Pajak Daerah				174,850,000
2 16 03 1.02 08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Layanan		36,000,000	Pajak Daerah				46,800,000
2 16 03 1.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen		40,000,000	Pajak Daerah				52,000,000
2 16 03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen		169,399,000	Pajak Daerah				220,218,700
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**186,497,000**					**335,694,600**
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**186,497,000**					**335,694,600**
2 20 02 1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**								**186,497,000**					**335,694,600**
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen		52,700,000	Pajak Daerah				94,860,000
2 20 02 1.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				3 Orang		33,797,000	Pajak Daerah				60,834,600
2 20 02 1.01 05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik				2 Unit		100,000,000	Pajak Daerah				180,000,000
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**247,561,300**					**625,000,000**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**247,561,300**					**625,000,000**
2 21 02 1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**								**220,180,800**					**556,548,750**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				3 Dokumen		68,993,000	Pajak Daerah				172,482,500
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan		33,300,000	Pajak Daerah				89,346,750
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan		88,548,800	Pajak Daerah				221,372,000
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				19 Perangkat Daerah		29,339,000	Pajak Daerah				73,347,500
2 21 02 1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**								**27,380,500**					**68,451,250**
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				48 Perangkat Daerah		27,380,500	Pajak Daerah				68,451,250
								TOTAL	**39,487,101,907**					**44,084,005,833**

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

18

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**19,003,984,200**					**19,359,581,169**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**13,253,984,200**					**13,309,581,169**
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**137,238,000**					**225,000,000**
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	10 dokumen	100 %	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100 persen	175,000,000
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	11 Laporan	100 %	52,238,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100 persen	50,000,000
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,966,552,108**					**10,804,581,169**
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	75 orang	100 %	10,926,552,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,724,581,169
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	36 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	15,000,000
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	15,000,000
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	17 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	50,000,000
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**
2	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	2 laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**50,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	2 Orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	50,000,000
2 17 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**472,262,000**					**450,000,000**
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 paket	100 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 paket	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	15,000,000
2 17 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 paket	100 %	107,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	75,000,000
2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 laporan	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	40,000,000
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 laporan	100 %	287,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	300,000,000
2 17 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**188,876,000**					**500,000,000**
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 %	21 unit	100 %	188,876,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	1 %	500,000,000
2 17 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**806,232,092**					**825,000,000**
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 laporan	100 %	331,347,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	370,000,000
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	474,885,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	455,000,000
2 17 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**642,824,000**					**435,000,000**
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 unit	100 %	41,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Jabatan													
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	9 unit	100 %	198,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	300,000,000
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	15 Unit	100 %	32,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	369,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	50,000,000
2 17 02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**								**400,000,000**					**800,000,000**
2 17 02 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**400,000,000**
2 17 02 1.01 01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam		44.33 %	13 unit usaha	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.33 %	400,000,000
2 17 02 1.02	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**400,000,000**
2 17 02 1.02 01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya		44.33 %	16 unit usaha	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.33 %	400,000,000
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**250,000,000**					**300,000,000**
2 17 03 1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**250,000,000**					**300,000,000**
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		42.45 %	1 dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	42.45 %	150,000,000
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel"	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		42.45 %	30 unit usaha	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	42.45 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
2 17 04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**150,000,000**					**200,000,000**
2 17 04 1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**150,000,000**					**200,000,000**
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya		71.42 %	30 unit usaha	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	71.42 %	200,000,000
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**2,550,000,000**					**2,750,000,000**
2 17 05 1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,550,000,000**					**2,750,000,000**
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya		26.55 %	980 orang	100 %	2,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.55 %	2,750,000,000
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**400,000,000**					**500,000,000**
2 17 06 1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**400,000,000**					**500,000,000**
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	"Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha"	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha		21.22 %	45 unit usaha	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.22 %	500,000,000
2 17 07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**1,400,000,000**					**1,000,000,000**
2 17 07 1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**								**1,400,000,000**					**1,000,000,000**
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan		0.5 Rasio	100 Unit Usaha	100 %	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5 Rasio	900,000,000
2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan		0.5 Rasio	30 orang 0 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5 Rasio	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**600,000,000**					**500,000,000**
2 17 08 1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**								**600,000,000**					**500,000,000**
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya		8.22 %	70 unit usaha	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	8.22 %	500,000,000
								TOTAL	**19,003,984,200**					**19,359,581,169**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

19

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**19,046,198,524**					**19,046,198,524**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16,952,172,524**					**16,952,172,524**
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**180,000,000**					**180,000,000**
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	15 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	3 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,386,706,674**					**13,386,706,674**
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	114 Orang/ Bulan	100 %	13,293,706,674	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13,293,706,674
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen bahan pelaksanaan verifikasi keuangan	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4 dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	35,000,000
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	6 Dokumen	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	45,000,000
2	18	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pengelolaan dan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4 Dokumen	100 %	13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13,000,000
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen rekon aset barang	Tersedianya jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada DPMPTSP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 18 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Tersedianya jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada DPMPTSP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
2 18 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**
2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian pada DPMPTSP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
2 18 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,897,465,850**					**1,897,465,850**
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan komponen listrik dan penerangan bnagunan kantor	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	25 buah	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan alat dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	25 buah	100 %	163,557,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	163,557,650
2 18 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	500 buah	100 %	207,908,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	207,908,200
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	500 buah	100 %	114,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	114,000,000
2 18 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah bahan material	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1000 buah	100 %	667,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	667,000,000
2 18 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tamu yang berkunjung	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	50 orang	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	70,000,000
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 kali	100 %	625,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	625,000,000
2 18 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100,000,000**					**100,000,000**
2 18 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah barang pada pengadaan	Kota Bandar Lampung,	100 %	10 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Prosentase Layanan Penunjang Urusan	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	atau Bangunan Lainnya	Pemerintah Daerah	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	barang milik daerah penunjang urusan PD	Telukbetung Selatan, Talang					(PAD)		Pemerintah Daerah		
2 18 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,024,330,000**					**1,024,330,000**
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	36 tagihan bulan	100 %	211,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	211,330,000
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah aparatur yang dibayarkan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	376 orang bulan	100 %	813,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	813,000,000
2 18 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**323,670,000**					**323,670,000**
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	7 unit	100 %	173,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	173,670,000
2 18 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	50 paket	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	200 unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**440,000,000**					**440,000,000**
2 18 02 1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laju pertumbuhan investasi	jumlah dokumen kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	Tersedianya jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	7 %	1 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laju pertumbuhan investasi	7 %	100,000,000
2 18 02 1.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laju pertumbuhan investasi	jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal	Tersedianya jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	7 %	1 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laju pertumbuhan investasi	7 %	100,000,000
2 18 02 1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**								**240,000,000**					**240,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Laju pertumbuhan investasi	jumlah peta potensi dan peluang usaha investasi	Tersedianya Jumlah dokumen RUPM, Peta potensi investasi dan kajian terkait potensi dan peluang investasi di Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	7 %	1 dokumen	100 %	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laju pertumbuhan investasi	7 %	240,000,000
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**200,000,000**					**200,000,000**
2 18 03 1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peringkat tujuan investasi nasional	Jumlah promosi penanaman modal	Tersedianya Jumlah promosi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung		7 Peringkat	5 kali	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peringkat tujuan investasi nasional	7 Peringkat	200,000,000
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**500,000,000**					**500,000,000**
2 18 04 1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**500,000,000**					**500,000,000**
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	14000 dokumen 0 Pelaku Usaha	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	100 %	300,000,000
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	50 layanan 0 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	100 %	100,000,000
2 18 04 1.02 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 kali	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	100 %	100,000,000
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**854,026,000**					**854,026,000**
2 18 05 1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**854,026,000**					**854,026,000**
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman			Tersedianya Jumlah pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	339 Pelaku Usaha	100 %	454,026,000				100 %	454,026,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Modal	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	modal di Provinsi Lampung	Kecamatan, Semua Kelurahan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional		
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersedianya Jumlah pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Lampung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Proyek	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100 %	400,000,000
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**100,000,000**					**100,000,000**
2 18 06 1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**								**100,000,000**					**100,000,000**
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Jumlah data/aplikasi penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 buah	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100 %	100,000,000
								TOTAL	**19,046,198,524**					**19,046,198,524**

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

20

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**56,986,583,920**					**82,191,583,920**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**19,396,244,920**					**44,601,244,920**
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi yang Tepat Waktu		100 %	9 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	100 %	150,000,000
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi yang Tepat Waktu		100 %	3 Dokumen 0 Laporan	100 %	100,000,000			Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	100 %	100,000,000
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,219,810,820**					**36,399,810,820**
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	12 Bulan 0 Orang/ Bulan	100 %	11,114,810,820			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	11,114,810,820
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	12 Bulan	100 %	25,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %		100 %	0			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,180,000,000
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	50,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	10 Dokumen 0 Dokumen	100 %	30,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**50,000,000**
2	19	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	15,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Barang Milik Daerah pada SKPD											
2 19 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	10,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
2 19 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik daerah Pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	0			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
2 19 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**150,000,000**
2 19 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	Persentase Aparatur yang Lulus Bimtek dan Sosialisasi		100 %	10 Orang	100 %	150,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150,000,000
2 19 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,522,926,100**					**1,522,926,100**
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Buah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	50 Buah	100 %	30,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	0 Paket 10 Unit	100 %	644,990,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	644,990,000
2 19 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Buah Peralatan Rumah Tangga	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	120 Buah	100 %	130,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	130,000,000
2 19 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Terpenuhi	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	20 Kali	100 %	30,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	1 Laporan 120 Orang	100 %	687,936,100			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	687,936,100
2 19 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**70,000,000**					**70,000,000**
2 19 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Buah Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100 %	6 Buah	100 %	70,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
2 19 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,121,530,000**					**5,121,530,000**
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Layanan Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	12 Bulan 1 Laporan	100 %	100,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daerah yang Terlaksana										
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	12 Bulan	100 %	700,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	700,000,000
2 19 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,000,000
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	13 Bulan 0 Laporan	100 %	4,301,530,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,301,530,000
2 19 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,036,978,000**					**1,036,978,000**
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara		100 %	8 Unit	100 %	214,978,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	214,978,000
2 19 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara		100 %	12 Dokumen	100 %	22,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22,000,000
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan yang Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara		100 %	4 Unit 4 Unit	100 %	800,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	800,000,000
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**4,107,042,000**					**4,107,042,000**
2 19 02 1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**								**2,888,222,000**					**2,888,222,000**
2 19 02 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	30 Orang 30 Orang	100 %	35,788,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	35,788,000
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	30 Orang	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 19 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemimpinan Pemuda	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	0 Orang 30 Orang	100 %	150,000,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	150,000,000
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	35 Orang 35 Orang	100 %	983,124,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	983,124,000
2 19 02 1.01 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	1 Unit 1 Unit	100 %	1,589,310,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	1,589,310,000
2 19 02 1.01 06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	6 Orang	100 %	30,000,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	30,000,000
2 19 02 1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,218,820,000**					**1,218,820,000**
2 19 02 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Kab/ Kota yang Organisasi Kepemudaannya Melaksanakan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang dikembangkan		89.41 %	15 Kab/Kota 1 unit	100 %	1,100,000,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	1,100,000,000
2 19 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Jumlah Pelajar/ Mahasiswa Anggota Organisasi Masyarakat/ Organisasi Kepemudaan Provinsi (OKP) yang Mengikuti Pembinaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang dikembangkan		89.41 %	0 Dokumen 164 Orang	100 %	118,820,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	118,820,000
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**32,424,912,000**					**32,424,912,000**
2 19 03 1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**13,765,000,000**					**13,765,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 19 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi yang Dibina Dalam Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Daerah Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Persentase Pembinaan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah		65 %	250 Orang 0 Unit	100 %	2,415,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	2,415,000,000
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Olahraga yang Ditingkatkan	Persentase Pembinaan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah		65 %	0 Unit 30 Unit	100 %	11,350,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	11,350,000,000
2 19 03 1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**								**17,749,912,000**					**17,749,912,000**
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik		65 %	5 Event	100 %	400,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	400,000,000
2 19 03 1.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi Jumlah Peserta Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Keikutsertaan Pada Pekan Paralimpik Nasional	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik		65 %	0 Dokumen 200 Orang	100 %	1,130,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	1,130,000,000
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang Mengikuti/ Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik		65 %	0 dokumen 160 Orang	100 %	16,219,912,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	16,219,912,000
2 19 03 1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**								**460,000,000**					**460,000,000**
2 19 03 1.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Atlet Daerah	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina		65 %	160 Orang	100 %	200,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	200,000,000
2 19 03 1.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina		65 %	0 Orang 500 Orang	100 %	150,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Klub Olahraga yang Dibina Untuk Kejuaraan											
2 19 03 1.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Atlet Berprestasi yang Mendapat Penghargaan Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina		65 %	50 Orang	100 %	110,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	110,000,000
2 19 03 1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**450,000,000**					**450,000,000**
2 19 03 1.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Klub Olahraga yang Dibina dan Berstandarisasi	Persentase Peningkatan Organisasi Olahraga yang Terbina		65 %	30 klub	100 %	450,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	450,000,000
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**1,058,385,000**					**1,058,385,000**
2 19 04 1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**1,058,385,000**					**1,058,385,000**
2 19 04 1.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	Jumlah Peserta Kepramukaan yang SDM-nya Dikembangkan Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Terbina		70 %	50 Orang 0 Unit	100 %	1,058,385,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	70 %	1,058,385,000
								TOTAL	**56,986,583,920**					**82,191,583,920**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

21

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**15,003,700,347**					**17,268,036,000**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**13,200,624,347**					**14,718,036,000**
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**120,000,000**					**200,000,000**
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	14 Dokumen	100 %	60,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	4 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	8 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,838,370,000**					**11,958,370,000**
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya keseuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	98 Orang/ Bulan	100 %	11,778,370,000			Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	11,778,370,000
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya keseuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	3 Laporan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	60,000,000
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya keseuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	3 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	120,000,000
2	**23**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**150,000,000**
2	23	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	75,000,000
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara,	100 %	12 Laporan	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pengajaran									
2 23 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**160,000,000**
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN yang didiklatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	10 Orang	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	160,000,000
2 23 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**461,355,347**					**1,135,566,000**
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	2 Paket	100 %	14,943,947	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40,000,000
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Paket	100 %	2,400,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,566,000
2 23 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Paket	100 %	42,950,200	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	3 Dokumen	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000
2 23 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	2 Paket	100 %	60,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	125,000,000
2 23 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	12 laporan	100 %	83,600,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150,000,000
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	15 Laporan	100 %	227,461,200	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	500,000,000
2 23 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0**					**0**
2 23 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						57 jenis		0					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
2 23 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**552,700,000**					**749,100,000**
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	12 Laporan	100 %	253,600,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	450,000,000
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	12 Laporan	100 %	299,100,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	299,100,000
2 23 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**198,199,000**					**365,000,000**
2 23 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	8 Unit	12 unit	190,199,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	350,000,000
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	0 Unit 8 Unit	12 unit	8,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**1,620,454,000**					**2,250,000,000**
2 23 02 1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,370,454,000**					**1,800,000,000**
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah layanan perpustakaan Elektronik (Elibrary), dan pemeliharaan bahan pustaka	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	425000 -	3 jenis	100 %	790,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	850,000,000
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425000 -	2 Perpustakaan	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	350,000,000
2 23 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi		425000 -	0 Perpustakaan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	0
2 23 02 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua	425000 -	50 Orang	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan	425000 -	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Daerah Provinsi	Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Kecamatan, Semua Kelurahan							Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite		
2 23 02 1.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425000 -	3 Layanan	100 %	120,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	150,000,000
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	425000 -	2600 Eksemplar	100 %	260,454,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	300,000,000
2 23 02 1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**								**250,000,000**					**450,000,000**
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	425000 -	15 Lokus	20 %	150,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	300,000,000
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425000 -	15 Perpustakaan	20 %	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaatn Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	150,000,000
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**								**182,622,000**					**300,000,000**
2 23 03 1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**								**104,261,000**					**200,000,000**
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	terkumpuln ya Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	40 -	57 Eksemplar	10 jenis	104,261,000	Pajak Daerah		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	40 -	200,000,000
2 23 03 1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**								**78,361,000**					**100,000,000**
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Jumlah dokumen KID dan Jurnal yang diterbitkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	40 -	100 entri	250 dokumen	78,361,000	Pajak Daerah		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	40 -	100,000,000
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah dokumen KID dan Jurnal yang diterbitkan		40 -	0 eksemplar	250 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	40 -	0
2 23 03 1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**								**0**					**0**
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan		Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan				0 Eksemplar		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Didayagunakan		Didayagunakan											
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**1,210,000,000**					**1,480,000,000**
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**1,210,000,000**					**1,480,000,000**
2 24 02 1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**								**245,000,000**					**280,000,000**
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Terdatanya dokumen arsip yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	200 Berkas	2000 arsip	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	200,000,000
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terdatanya dokumen arsip yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	200 Berkas	2000 arsip	145,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	80,000,000
2 24 02 1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**								**285,000,000**					**350,000,000**
2 24 02 1.02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Jumlah Arsip Statis yang terkelola	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	160 arsip 0 Arsip	160 arsip	80,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	100,000,000
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Jumlah Arsip Statis yang terkelola	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	160 Arsip	160 arsip	205,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	250,000,000
2 24 02 1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**								**680,000,000**					**850,000,000**
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	300 Pengguna	100 %	30,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	50,000,000
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	58 Laporan	100 %	650,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penigkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	800,000,000
								TOTAL	**16,213,700,347**					**18,748,036,000**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

22

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**46,599,380,884**					**37,279,332,684**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**21,237,594,684**					**21,189,332,684**
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**225,000,000**
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100 %	5 Dokumen	100 %	65,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100 %	75,000,000
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100 %	3 Dokumen	100 %	60,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100 %	75,000,000
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100 %	6 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100 %	75,000,000
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15,409,332,684**					**15,489,332,684**
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	122 Orang/ Bulan	100 %	15,364,332,684	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	15,364,332,684
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	17 Dokumen	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	75,000,000
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**40,000,000**
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	3 Laporan	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	3 Laporan	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**115,500,000**					**120,000,000**
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	6 Orang	100 %	45,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	60 Orang	100 %	30,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
3 25 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	50 Orang	100 %	40,500,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,296,859,000**					**2,290,000,000**
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	20 Paket	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	25,000,000
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	5 Paket	100 %	50,000,000			Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	20 Paket	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	20,000,000
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	1 Paket	100 %	176,399,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	5 Paket	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	20,000,000
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	5 Dokumen	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	25,000,000
3 25 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	10 Paket	100 %	80,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	80,000,000
3 25 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	12 Laporan	100 %	40,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	72 Laporan	100 %	870,460,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	2,000,000,000
3 25 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**226,007,000**					**300,000,000**
3 25 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercapainya umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	149,858,200	Pajak Daerah		umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	10 Unit	100 %	76,148,800	Pajak Daerah		umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Daerah	yang Disediakan	Pemerintah Daerah								Daerah		
3 25 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,134,374,000**					**2,075,000,000**
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	556,733,500	Pajak Daerah		Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	475,000,000
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	2,527,640,500	Pajak Daerah		Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,550,000,000
3 25 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**875,522,000**					**650,000,000**
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 Tahun 100 %	25 Unit	1 Tahun	426,967,000	Pajak Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Tahun 100 %	350,000,000
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 Tahun 100 %	2 Unit	1 Tahun	398,660,000	Pajak Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Tahun 100 %	200,000,000
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 Tahun 100 %	10 Unit	1 Tahun	49,895,000	Pajak Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Tahun 100 %	100,000,000
3 25 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**1,275,000,000**					**1,400,000,000**
3 25 02 1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**1,000,000,000**					**900,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	2 Dokumen	4 Kegiatan	200,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	300,000,000
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	270.693 Ha	4 Kegiatan	313,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	100,000,000
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	10 Ha	4 Kegiatan	272,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	300,000,000
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	30 Orang	4 Kegiatan	215,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	200,000,000
3 25 02 1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**75,000,000**					**100,000,000**
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)		15 Dokumen	10 Rekomendasi	15 Dokumen	75,000,000	Pajak Daerah		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	15 Dokumen	100,000,000
3 25 02 1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**								**200,000,000**					**400,000,000**
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 Kegiatan	30 Orang	2 Kegiatan	180,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Kegiatan	200,000,000
3 25 02 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 Kegiatan	3 Kelompok	2 Kegiatan	20,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Kegiatan	200,000,000
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**15,986,928,200**					**5,560,000,000**
3 25 03 1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**1,150,000,000**					**1,150,000,000**
3 25 03 1.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3 Kegiatan	100 Unit	3 Kegiatan	800,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	750,000,000
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3 Kegiatan	1200 Unit	3 Kegiatan	350,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 03 1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**850,000,000**					**800,000,000**
3 25 03 1.02 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		3 Kegiatan	1 Dokumen	3 Kegiatan	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3 Kegiatan	400,000,000
3 25 03 1.02 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		3 Kegiatan	100 Unit	3 Kegiatan	750,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3 Kegiatan	400,000,000
3 25 03 1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**115,948,200**					**30,000,000**
3 25 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan		200 Nelayan	300 Rekomendasi	200 Nelayan	115,948,200	Pajak Daerah		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan	200 Nelayan	30,000,000
3 25 03 1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**								**13,820,980,000**					**3,500,000,000**
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tercapainya Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	3 Pelabuhan Perikanan	4 Pelabuhan	180,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 Pelabuhan	100,000,000
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Tercapainya Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	8 Unit	4 Pelabuhan	12,062,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 Pelabuhan	1,000,000,000
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Tercapainya Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	4 Layanan	4 Pelabuhan	1,578,980,000	Pajak Daerah		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 Pelabuhan	2,400,000,000
3 25 03 1.09	**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**50,000,000**					**80,000,000**
3 25 03 1.09 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1 Kegiatan	100 Rekomendasi	1 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	1 Kegiatan	80,000,000
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**4,032,858,000**					**5,875,000,000**
3 25 04 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**150,000,000**					**75,000,000**
3 25 04 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)		10 Dokumen	5 Rekomendasi	10 Dokumen	150,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	10 Dokumen	75,000,000
3 25 04 1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**2,412,164,000**					**4,250,000,000**
3 25 04 1.05 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	1 Dokumen	7 Kegiatan	320,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	20 Unit	7 Kegiatan	120,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	750,000,000
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	30 paket	7 Kegiatan	842,164,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	2,000,000,000
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	1 paket 0 Unit	7 Kegiatan	0	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	200,000,000
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	0 2 unit	7 Kegiatan	850,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	1,000,000,000
3 25 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	15 Dokumen	7 Kegiatan	200,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	100,000,000
3 25 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	25 Orang	7 Kegiatan	80,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	100,000,000
3 25 04 1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**								**1,470,694,000**					**1,550,000,000**
3 25 04 1.06 01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		2 Kegiatan	1 unit	2 Kegiatan	700,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Kegiatan	800,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 04 1.06 02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		2 Kegiatan	4 unit	2 Kegiatan	770,694,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Kegiatan	750,000,000
3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**1,172,000,000**					**1,380,000,000**
3 25 05 1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**1,012,000,000**					**1,155,000,000**
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	20 Dokumen	4 Kegiatan	162,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	80,000,000
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	20 Dokumen	4 Kegiatan	600,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	800,000,000
3 25 05 1.01 03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	20 Dokumen	4 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	75,000,000
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	24 Kelompok	4 Kegiatan	200,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	200,000,000
3 25 05 1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**160,000,000**					**225,000,000**
3 25 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 Kegiatan	20 Dokumen	3 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	3 Kegiatan	75,000,000
3 25 05 1.02 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 Kegiatan	20 Dokumen	3 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	3 Kegiatan	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Kewenangannya											
3 25 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 Kegiatan	20 Dokumen	3 Kegiatan	60,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	3 Kegiatan	75,000,000
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**2,895,000,000**					**1,875,000,000**
3 25 06 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**275,000,000**
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25 Rekomendasi	5 Rekomendasi	25 Rekomendasi	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Rekomendasi	75,000,000
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Tercapainya Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25 Rekomendasi	1 Dokumen	25 Rekomendasi	150,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Rekomendasi	200,000,000
3 25 06 1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**1,200,000,000**					**600,000,000**
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2 Kegiatan	30 Unit Usaha	2 Kegiatan	250,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Kegiatan	150,000,000
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2 Kegiatan	15 Unit Usaha	2 Kegiatan	950,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Kegiatan	450,000,000
3 25 06 1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**1,495,000,000**					**1,000,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 06 1.03 01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		3 Kegiatan	1 Dokumen	3 Kegiatan	250,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	250,000,000
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		3 Kegiatan	10 Unit Usaha	3 Kegiatan	1,245,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	750,000,000
								TOTAL	**46,599,380,884**					**37,279,332,684**

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

23

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**20,970,168,033**					**22,117,453,633**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**13,170,168,033**					**13,412,453,633**
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**225,000,000**					**230,000,000**
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		90 %	8 Dokumen	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	150,000,000
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		90 %	3 Laporan	1 tahun	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	80,000,000
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,860,946,633**					**8,860,946,633**
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	72 Orang/ Bulan	12 bulan	8,785,946,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8,785,946,633
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	1 Laporan	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	4 Dokumen	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	4 Laporan	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15,000,000**					**15,000,000**
3	26	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi barang milik daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7,500,000
3	26	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi barang milik daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7,500,000
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**65,000,000**					**80,000,000**
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	1 Dokumen	1 tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat		100 %	1 Dokumen	1 tahun	10,000,000				100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	daerah						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
3 26 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	5 Orang	1 tahun	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
3 26 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,619,905,400**					**1,842,191,000**
3 26 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	218,191,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	218,191,000
3 26 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	35,000,000
3 26 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47,000,000
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Laporan	1 daerah	117,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	117,000,000
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Laporan	1 daerah	1,177,714,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,400,000,000
3 26 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,065,316,000**					**2,065,316,000**
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	392,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	392,226,000
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	1,673,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,673,090,000
3 26 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**319,000,000**					**319,000,000**
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	4 Unit	1 tahun	147,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	147,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	0 Unit 20 Unit	1 tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,000,000
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Unit	1 tahun	152,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,000,000
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**3,200,000,000**					**3,475,000,000**
3 26 02 1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**								**850,000,000**					**900,000,000**
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata provinsi		90 %	5 Lokasi	1 tahun	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	900,000,000
3 26 02 1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**								**2,150,000,000**					**2,275,000,000**
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata provinsi		90 %	5 Lokasi	1 tahun	1,250,000,000			Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	1,300,000,000
3 26 02 1.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata provinsi		90 %	1 Laporan	1 tahun	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	800,000,000
3 26 02 1.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata provinsi		90 %	3 Lokasi	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	175,000,000
3 26 02 1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**300,000,000**
3 26 02 1.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		90 %	1 Dokumen	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	150,000,000
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		90 %	1 Laporan	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	150,000,000
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**2,075,000,000**					**2,375,000,000**
3 26 03 1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**								**2,075,000,000**					**2,375,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	10 Dokumen	1 tahun	1,120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	1,300,000,000
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	4 Laporan	1 tahun	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	500,000,000
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	1 Dokumen	1 tahun	355,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	375,000,000
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	1 Dokumen	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	200,000,000
3 26 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**								**1,475,000,000**					**1,605,000,000**
3 26 04 1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**								**1,300,000,000**					**1,400,000,000**
3 26 04 1.01 01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota kreatif		90 %	74 Unit	1 tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	300,000,000
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota kreatif		90 %	1 Laporan	1 tahun	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	1,100,000,000
3 26 04 1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**								**175,000,000**					**205,000,000**
3 26 04 1.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		90 %	1 Dokumen	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	125,000,000
3 26 04 1.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		90 %	1 Dokumen	1 tahun	75,000,000			Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	80,000,000
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**1,050,000,000**					**1,250,000,000**
3 26 05 1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**								**850,000,000**					**1,025,000,000**
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		90 %	100 Orang	1 tahun	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	675,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		90 %	50 Orang	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	175,000,000
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		90 %	50 Orang	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	175,000,000
3 26 05 1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**								**200,000,000**					**225,000,000**
3 26 05 1.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		90 %	100 Orang	1 tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	225,000,000
								TOTAL	**20,970,168,033**					**22,117,453,633**

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

24

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**4,348,837,500**					**4,911,000,000**
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**								**227,687,500**					**441,000,000**
2	**09**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**								**227,687,500**					**441,000,000**
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan bagi petani di Provinsi Lampung.		cv ≤ 10% koefisien	0 Unit	15 Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	cv ≤ 10% koefisien	130,000,000
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan bagi petani di Provinsi Lampung.		cv ≤ 10% koefisien	1 laporan	15 Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	cv ≤ 10% koefisien	91,000,000
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan bagi petani di Provinsi Lampung.		cv ≤ 10% koefisien	1 Laporan	15 Kabupaten/Kota	227,687,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	cv ≤ 10% koefisien	220,000,000
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**2,598,710,000**					**2,415,000,000**
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**310,000,000**					**395,000,000**
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan		Meningkatnya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan.		86,5 -		15 Kabupaten/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	195,000,000
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Meningkatnya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan.		86,5 -	1 Laporan	15 Kabupaten/Kota	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	100,000,000
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan.		86,5 -	1 laporan	15 Kabupaten/Kota	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 09 03 1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**								**410,000,000**					**270,000,000**
2 09 03 1.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi.		86,5 -	19 Ton	25 ton	410,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	270,000,000
2 09 03 1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**								**1,878,710,000**					**1,750,000,000**
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan koordinasi/sinkronisasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).		86,5 -	1 Dokumen	50 KWT	1,601,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	1,350,000,000
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Pelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan koordinasi/sinkronisasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).		86,5 -	1 Laporan	50 KWT	277,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	400,000,000
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**300,000,000**					**300,000,000**
2 09 04 1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**								**300,000,000**					**300,000,000**
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase Penuruanan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.		1 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penuruanan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	300,000,000
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**1,222,440,000**					**1,755,000,000**
2 09 05 1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**1,222,440,000**					**1,755,000,000**
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	520,000,000
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	10 Sertifikat	15 Kabupaten/Kota	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	195,000,000
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	325,000,000
2 09 05 1.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.				98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	195,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.										
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	67,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	520,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**84,968,225,373**					**92,306,712,066**
3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**51,071,288,734**					**52,672,137,251**
3 27 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,497,000**					**481,000,000**
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	4 Dokumen	16 Dokumen	67,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	78,000,000
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	4 Kali	16 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	195,000,000
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	7 Dokumen	16 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	104,000,000
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	12 Laporan	16 Dokumen	83,109,000			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	104,000,000
3 27 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,913,889,340**					**42,293,316,740**
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	348 Orang/ Bulan	8 Dokumen	42,772,723,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	41,332,300,940
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 laporan	8 Dokumen	21,166,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	642,515,800
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	0 Dokumen	8 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	0 Laporan	8 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	32,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 laporan	8 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	78,000,000
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 Laporan	8 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	78,000,000
3 27 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 Laporan	8 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**145,000,000**					**260,000,000**
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	1 Dokumen	5 Dokumen	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	1 Laporan	5 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	1 Laporan	5 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	0 Laporan	5 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**136,812,000**
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah.		100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	136,812,000
3 27 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**125,000,000**					**278,140,000**
3 27 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.		100 Persen	1 Unit	15 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	153,140,000
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.		100 Persen	15 Orang	15 orang	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	125,000,000
3 27 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,541,542,394**					**2,942,966,511**
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen		1 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	52,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Bangunan Kantor													
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	0 Paket	1 Dokumen	922,357,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	589,726,800
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	1 Paket	1 Dokumen	52,137,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	67,779,391
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	0 Paket	1 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	182,000,000
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen		1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	32,500,000
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	12 Paket	1 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	233,998,700
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen		1 Dokumen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	156,000,000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	12 Laporan	1 Dokumen	1,227,047,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,576,961,620
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	52,000,000
3 27 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**472,230,000**					**472,230,000**
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan.		100 Persen	1 Unit	1 unit	472,230,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	472,230,000
3 27 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,743,630,000**					**3,269,552,000**
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		100 Persen	1 Laporan	3 Laporan	609,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	962,000,000
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		100 Persen	0 Laporan	3 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		100 Persen	1 Laporan	3 Laporan	2,134,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2,242,552,000
3 27 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,949,500,000**					**2,538,120,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		100 Persen	88 Unit	88 unit	1,005,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,306,500,000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		100 Persen	0 Unit 4 Unit	88 unit	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	130,000,000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		100 Persen	0 Unit	88 unit	879,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,101,620,000
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**8,635,167,700**					**11,101,668,500**
3 27 02 1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**								**7,138,855,700**					**8,995,668,500**
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian di Kabupaten/Kota.		100 Persen	4 Laporan	15 Kabupaten/Kota	474,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	4,007,146,000
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian di Kabupaten/Kota.		100 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	6,664,080,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	4,988,522,500
3 27 02 1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**1,246,312,000**					**1,911,000,000**
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman di Prov. Lampung		100 Persen	15 Sertifikat	3 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	455,000,000
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman di Prov. Lampung		100 Persen	11 Laporan	3 Dokumen	370,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	611,000,000
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman di Prov. Lampung		100 Persen	0 Dokumen	3 Dokumen	626,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	845,000,000
3 27 02 1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**								**250,000,000**					**195,000,000**
3 27 02 1.03 02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.		100 Persen		1 Laporan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	195,000,000
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**19,628,212,639**					**22,662,760,715**
3 27 03 1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**								**19,628,212,639**					**22,662,760,715**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	15 Dokumen	1 Dokumen	13,834,737,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	10,491,000,955
3 27 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	15 Dokumen	1 Dokumen	4,036,153,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	4,868,747,300
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	780,000,000
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	650,000,000
3 27 03 1.01 07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	4 Unit	1 Dokumen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	117,000,000
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1,582,322,139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	956,012,460
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	0 Unit	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	4,800,000,000
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**838,556,300**					**875,145,600**
3 27 05 1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**838,556,300**					**875,145,600**
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan.		100 Persen	100 Ha	100 Hektare	838,556,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.	100 Persen	875,145,600
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**4,795,000,000**					**4,995,000,000**
3 27 07 1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**								**150,000,000**					**250,000,000**
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan.		15.000 Kelompok Tani	641 Orang	641 orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	250,000,000
3 27 07 1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**								**4,395,000,000**					**4,445,000,000**
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.		15.000 Kelompok Tani	2 Dokumen	2 Dokumen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	325,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.		15.000 Kelompok Tani	15 Kelompok	2 Dokumen	3,945,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	4,120,000,000
3 27 07 1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**								**250,000,000**					**300,000,000**
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.		15.000 Kelompok Tani		1 Laporan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksananaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	300,000,000
								TOTAL	**89,317,062,873**					**97,217,712,066**

DINAS PERKEBUNAN

25

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**30,381,348,343**					**29,840,966,743**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**19,209,560,793**					**18,669,179,193**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**380,000,000**					**380,000,000**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	8 Dokumen	14 Dokumen	300,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	300,000,000
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	6 Laporan	14 Dokumen	80,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80,000,000
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15,622,695,793**					**15,082,314,193**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Dokumen Laporan Keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	113 Orang/ Bulan	12 Dokumen	15,578,607,388	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	15,038,225,788
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Gaji dan Dokumen Laporan Keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Dokumen	44,088,405	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44,088,405
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**72,917,000**					**72,917,000**
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	113 Orang	5 Dokumen	72,917,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	72,917,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,047,400,000**					**1,047,400,000**
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	62,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	62,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	75,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	24,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	24,000,000
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Paket	12 Bulan	210,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	210,000,000
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50,000,000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	626,400,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	626,400,000
3 27 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,130,046,000**					**1,130,046,000**
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	293,700,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	293,700,000
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	133,416,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	133,416,000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	702,930,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	702,930,000
3 27 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**956,502,000**					**956,502,000**
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	27 Unit	12 Bulan	521,502,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	521,502,000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	68 Unit	12 Bulan	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50,000,000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	2 Unit	12 Bulan	325,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	325,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pesawaran, Tegineneng, Semua Kelurahan									
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	14 Unit	12 Bulan	60,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	60,000,000
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**900,000,000**					**900,000,000**
3 27 02 1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**								**75,000,000**					**75,000,000**
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Lokasi Pengawasan Sarana pertanian	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	1 Laporan	15 Kab/Kota	75,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	5 Persen	75,000,000
3 27 02 1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**825,000,000**					**825,000,000**
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	Jumlah Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua	5 Persen	30 Sertifikat	30 Sertifikat	225,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	5 Persen	225,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Sertifikasi Benih	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	5 Persen	4 Laporan	30 Sertifikat	600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	5 Persen	600,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**4,917,960,000**					**4,917,960,000**
3 27 03 1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**								**4,917,960,000**					**4,917,960,000**
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua	3 Persen	16 Dokumen	3 Kegiatan	4,317,960,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	3 Persen	4,317,960,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03 1.01 07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Pesawaran, Tegineneng, Semua Kelurahan	3 Persen	3 Unit	3 Kegiatan	300,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	3 Persen	300,000,000
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Pesawaran, Tegineneng, Semua Kelurahan	3 Persen	1 Unit	3 Kegiatan	300,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	3 Persen	300,000,000
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**375,000,000**					**375,000,000**
3 27 05 1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**375,000,000**					**375,000,000**
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Areal yang dapat dikendalikan dan Jumlah Kasus Gangguan Usaha yang dapat dikendalikan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	150 Ha	150 Ha	275,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	25 Persen	275,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 05 1.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Areal yang dapat dikendalikan dan Jumlah Kasus Gangguan Usaha yang dapat dikendalikan	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	0 Ha	150 Ha	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	25 Persen	100,000,000
3 27 06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**350,000,000**					**350,000,000**
3 27 06 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**350,000,000**					**350,000,000**
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua	30 Persen	2 Laporan	2 Kegiatan	350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penilaian Usaha Perkebunan	30 Persen	350,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**4,628,827,550**					**4,628,827,550**
3 27 07 1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**								**4,178,827,550**					**4,178,827,550**
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani yang terdata untuk KPB, Penerapan Pembudidayaan sesuai GAP Tembakau, Pembinaan, Pengawalan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan, Pengolahan Pasca Panen Perkebunan, Sekolah Lapang, Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perkebunan, Festival	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	20 Persen	9 Dokumen	9 Dokumen	4,178,827,550	Pajak Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	20 Persen	4,178,827,550

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Komoditi Perkebunan seta Penas KTNA	Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**								**450,000,000**					**450,000,000**
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis Kawasan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	2 Unit	2 Kegiatan	450,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	20 Persen	450,000,000
								TOTAL	**30,381,348,343**					**29,840,966,743**

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**34,245,177,200**					**44,634,783,207**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**20,296,336,458**					**20,396,076,868**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**228,943,500**					**550,000,000**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	6 Dokumen	100 %	138,943,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	300,000,000
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	250,000,000
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,738,986,858**					**16,594,000,000**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	160 Orang/Bulan	100 %	16,738,986,858	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	16,500,000,000
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	0
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	14,000,000
3 27 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**63,183,000**					**105,000,000**
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	0
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3 27 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	38,183,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**55,000,000**
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	150 Orang	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	0 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3 27 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,597,530,000**					**1,552,274,768**
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	336,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	190,000,000
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Utara, Gulak Galik									
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	24,000,000
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan 0 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,152,012,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,253,274,768

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,047,089,400**					**1,036,629,400**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	300,000,000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	747,089,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	736,629,400
3 27 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**590,603,700**					**503,172,700**
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	36 Unit	100 %	310,603,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	273,043,700
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	31 Unit	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	160,129,000
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	63 Unit	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	40,000,000
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**10,438,198,500**					**12,688,706,339**
3 27 02 1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**2,420,027,500**					**4,220,706,339**
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kelahiran Ternak di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	20 %	455,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	600,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan,									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kelahiran Ternak di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Campang Tiga Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Negeri Sakti	100 %	1 Laporan	20 %	1,964,427,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	3,480,706,339
3 27 02 1.04 03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Meningkatnya Kelahiran Ternak di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung		100 %	0 Orang	20 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	140,000,000
3 27 02 1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**7,973,615,000**					**8,373,000,000**
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Meningkatnya Produksi Semen Beku	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Terbanggi	100 %	2 Laporan	20 %	7,938,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	8,273,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Besar, Poncowati Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 02 1.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah pengawasan peredaran Benih/Bibit Ternak yang beredar dan bersertifikat Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Meningkatnya Produksi Semen Beku	Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 0 Laporan	20 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	100,000,000
3 27 02 1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**								**44,556,000**					**95,000,000**
3 27 02 1.06 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Obat Hewan yang Memenuhi Syarat Di Tingkat Distributor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung	100 %	1 Laporan	90 %	44,556,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	95,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**1,643,900,000**					**7,750,000,000**
3 27 03 1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**								**1,643,900,000**					**7,750,000,000**
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Penataan Pembangunan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	93,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	750,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03 1.01 05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Penataan Pembangunan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar		100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	2,000,000,000
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Penataan Pembangunan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Campang Tiga Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Poncowati Kota Bandar Lampung, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Negeri Sakti	100 %	4 Unit	100 %	1,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	5,000,000,000
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**1,151,046,242**					**2,025,000,000**
3 27 04 1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**259,828,000**					**300,000,000**
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan,	80 %	1 Laporan	80 %	259,828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 04 1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**								**50,700,000**					**140,000,000**
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		80 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	50,000,000
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan atau Produk Hewan	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	80 %	1 Laporan	100 %	50,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan									
3 27 04 1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**								**782,260,242**					**1,085,000,000**
3 27 04 1.03 01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah/Zona Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	10 Unit	100 %	187,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	370,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 04 1.03 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veterin	Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	188,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	515,000,000
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit	Kota Bandar Lampung, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu	80 %	1 Dokumen	100 %	405,995,242	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	200,000,000
3 27 04 1.04	**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**32,800,000**					**250,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 04 1.04 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Meningkatnya unit usaha yang disertifikasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Sertifikat	90 %	32,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	250,000,000
3 27 04 1.05	**Kesejahteraan Hewan**								**25,458,000**					**250,000,000**
3 27 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Meningkatnya unit usaha berNKV	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 Sertifikat	90 %	25,458,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**0**					**200,000,000**
3 27 05 1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**0**					**200,000,000**
3 27 05 1.01 04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				0 Laporan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 27 06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**149,328,000**					**300,000,000**
3 27 06 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**149,328,000**					**300,000,000**
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Meningkatnya UMKM Subsektor Peternakan yang Memiliki Izin Usaha	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	90 %	149,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	90 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**566,368,000**					**1,275,000,000**
3 27 07 1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**								**448,688,000**					**750,000,000**
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pengendalian Harga Komoditas Peternakan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	100 %	291,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	90 %	450,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan	Pengendalian Harga Komoditas Peternakan	Kab. Lampung Barat, Semua	90 %	50 Kelompok	100 %	157,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan	90 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Peternakan	Pemberdayaan		Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua							Peternakan		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**								**117,680,000**					**525,000,000**
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Meningkatnya Kelompok Ternak Berbadan Hukum	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit 2 Unit	90 %	90,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	90 %	275,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Meningkatnya Kelompok Ternak Berbadan Hukum	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	90 %	27,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	90 %	250,000,000
								TOTAL	**34,245,177,200**					**44,634,783,207**

DINAS KEHUTANAN

27

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**80,046,854,470**					**84,123,514,894**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**65,951,612,470**					**69,336,010,794**
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**127,547,000**					**130,742,050**
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	63,901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	67,096,050
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	63,646,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	63,646,000
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**60,679,554,270**					**63,803,531,984**
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	513 Orang/ Bulan	1 dokumen	60,644,554,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	63,766,781,984
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 dokumen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	36,750,000
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**31,500,000**
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,500,000
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**120,000,000**					**126,000,000**
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	35 orang	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	126,000,000
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,252,118,400**					**1,314,724,320**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	12 bulan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	47,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	12 bulan	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,800,000
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	58,842,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	61,784,730
3 28 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	12 bulan	90,645,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	95,177,670
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	282,156,000			Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	296,263,800
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	709,474,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	744,948,120
3 28 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	52,500,000
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**209,612,994**					**220,093,644**
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	29,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,206,000
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	8,754,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	9,191,700
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan,	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	105,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan									
3 28 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	71,138,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	74,695,944
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,562,601,806**					**1,640,731,896**
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	10,860,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,403,003
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	425,089,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	446,344,290
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	1,126,652,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,182,984,603
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,970,178,000**					**2,068,686,900**
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	222 Unit	12 bulan	1,658,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,741,761,000
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	175 Unit	12 bulan	113,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	119,175,000
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 12 Unit	12 bulan	140,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	147,554,400
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 bulan	57,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	60,196,500
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**8,955,275,000**					**9,390,538,750**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**460,418,000**					**483,438,900**
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	1 Dokumen	1 dokumen	460,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	483,438,900
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**339,485,000**					**343,959,250**
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan KPH yang tersusun	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran,	962.77 hektar	9 Dokumen	9 dok	339,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	343,959,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**547,026,300**					**574,377,615**
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan hutan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	5 Dokumen	14 dok	489,613,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	514,094,175
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan hutan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	9 Dokumen	14 dok	57,412,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	60,283,440
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**6,896,276,000**					**7,241,089,800**
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	5 Dokumen	962.77 hektar	62,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	65,625,000
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Tutupan Lahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Ha 400 Ha	962.77 hektar	4,351,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	4,569,231,450
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Tutupan Lahan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	362.77 Ha	962.77 hektar	1,499,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	1,574,979,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	5 Laporan	962.77 hektar	24,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	26,010,600
3 28 03 1.04 09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Tutupan Lahan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	962.77 hektar	200 Ha	962.77 hektar	957,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	1,005,243,750
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**562,352,700**					**590,470,335**
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Ha 15 Ha	374965 hektar	47,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	50,237,250
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Ha 564954 Ha	374965 hektar	437,819,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	459,710,685
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	7 Operasi	374965 hektar	16,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	17,069,850

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	17 Dokumen	374965 hektar	46,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	49,306,950
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	2 Laporan	374965 hektar	13,472,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	14,145,600
3 28 03 1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**51,419,000**					**53,989,950**
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Persentase kenaikan produksi HHBK	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Unit Managemen 2 Unit Managemen	1.2 %	28,558,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	29,985,900
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Persentase kenaikan produksi HHBK	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	11 Unit Managemen	1.2 %	22,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	24,004,050
3 28 03 1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**71,308,000**					**74,873,400**
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi hasil hutan kayu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	2 Dokumen	770.8 m3	67,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	70,484,400
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Jumlah produksi hasil hutan kayu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	4 Unit Managemen	770.8 m3	4,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	4,389,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	secara Elektronik													
3 28 03 1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**								**26,990,000**					**28,339,500**
3 28 03 1.09 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	12 Unit Usaha	100 %	26,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	28,339,500
3 28 04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**487,122,000**					**511,478,100**
3 28 04 1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**								**435,482,000**					**457,256,100**
3 28 04 1.01 01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah dokumen pengamanan kawasan TAHURA	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	0 6 laporan	40 hektar	8,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	8,744,400
3 28 04 1.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	20 Operasi	40 hektar	9,533,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	10,009,650
3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	5 Ha	40 hektar	349,292,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	366,756,600
3 28 04 1.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan	Luas areal yang telah dipulihkan	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan	Kota Bandar Lampung,	40 hektar	2 Ha	40 hektar	50,563,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	53,091,150

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		Ekosistem	mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)				
3 28 04 1.01 06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	1 Permohonan	40 hektar	4,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	5,131,350
3 28 04 1.01 07	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	5 Dokumen	40 hektar	3,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	4,197,900
3 28 04 1.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	10 Desa	40 hektar	5,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	6,284,250
3 28 04 1.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan,	40 hektar	2 Dokumen	40 hektar	2,896,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	3,040,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan									
3 28 04 1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**								**45,789,000**					**48,078,450**
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Persentase perlindungan terhadap TSL	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	1 Laporan	90 %	45,789,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	48,078,450
3 28 04 1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**								**5,851,000**					**6,143,550**
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Jumlah kelompok/masyarakat yang diberdayakan	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	50 Orang	2 lokasi	5,851,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	6,143,550
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**3,310,777,000**					**3,476,315,850**
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**3,310,777,000**					**3,476,315,850**
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Persentase peningkatan KTH yang diberdayakan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	200 Orang	5 %	680,726,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5 %	714,762,300
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Persentase peningkatan KTH yang diberdayakan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	11 Kelompok	5 %	2,175,086,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5 %	2,283,840,300
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Persentase peningkatan KTH yang diberdayakan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	63197 Ha	5 %	454,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5 %	477,713,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 28 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**								**1,342,068,000**					**1,409,171,400**
3 28 06 1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**1,342,068,000**					**1,409,171,400**
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	3 Dokumen	25 %	203,957,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	214,154,850
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kelurahan	25 %	0 140 unit	25 %	1,126,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	1,182,384,000
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	20 Orang	25 %	6,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	6,725,250
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 3 Dokumen	25 %	5,626,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	5,907,300
								TOTAL	**80,046,854,470**					**84,123,514,894**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

28

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								**21,317,028,400**					**24,614,710,150**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**17,363,918,400**					**17,555,000,150**
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**167,356,000**					**275,000,000**
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	16,126,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	125,000,000
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	116,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	100,000,000
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	3 Laporan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	50,000,000
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**14,101,488,585**					**13,582,117,685**
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1582 Orang/ Bulan	100 %	14,091,368,585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	13,547,117,685
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	6 Laporan	100 %	10,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	35,000,000
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**78,369,550**
3	29	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	25,000,000
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	7 Laporan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	53,369,550
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**100,000,000**					**150,000,000**
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	20 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	150,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,274,251,900**					**1,302,052,915**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	19 Paket	100 %	15,884,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	40,884,000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	460 Paket	100 %	46,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	97,500,000
3 29 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	25 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	25,000,000
3 29 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	2347 Paket	100 %	168,432,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	202,500,000
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	415 Laporan	100 %	25,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	35,000,000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	128 Laporan	100 %	1,018,160,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	901,168,915
3 29 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**384,483,000**					**150,000,000**
3 29 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah laporan hasil pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	7 Paket	100 %	114,214,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	50,000,000
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan hasil pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	7 Unit	100 %	270,269,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	100,000,000
3 29 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**724,833,915**					**733,060,000**
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	197,558,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	250,800,000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	36 Laporan	100 %	527,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	482,260,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 29 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**561,505,000**					**1,284,400,000**
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	218,080,000			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	859,400,000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	0 Unit 43 Unit	100 %	28,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	75,000,000
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	8 Unit	100 %	315,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	350,000,000
3 29 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**600,000,000**					**1,070,000,000**
3 29 02 1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**480,000,000**					**820,000,000**
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peningkatan persentase perusahaan pemanfaat dan pengambil air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah		61 %	1 Dokumen	32.5 %	261,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	61 %	220,000,000
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Peningkatan persentase perusahaan pemanfaat dan pengambil air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah		61 %	4 Dokumen	32.5 %	218,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	61 %	600,000,000
3 29 02 1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**120,000,000**					**250,000,000**
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peningkatan progress penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah		61 %	4 Laporan	22 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	61 %	250,000,000
3 29 03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**519,110,000**					**750,000,000**
3 29 03 1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**								**140,000,000**					**315,000,000**
3 29 03 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Jumlah Dokumen teknis sub urusan mineral dan batubara		50 %	7 Dokumen	7 Dokumen	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	50 %	315,000,000
3 29 03 1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**								**379,110,000**					**435,000,000**
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan	Peningkatan progress penyusunan Peraturan		50 %	11 Laporan	22 laporan	189,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	50 %	225,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah						(PAD)				
3 29 03 1.03 05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Peningkatan progress penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah		50 %	11 Laporan	22 laporan	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	50 %	210,000,000
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**1,659,790,000**					**3,025,000,000**
3 29 05 1.03	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**								**309,000,000**					**400,000,000**
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Terpenuhinya target pendapatan daerah		33,5 %	18 Laporan	12 Laporan	309,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	400,000,000
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**1,350,790,000**					**2,625,000,000**
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi Daerah	Dokumen Neraca Energi Daerah, rapergub roadmap pengelolaan energi Provinsi Lampung		33,5 %	0 2 Dokumen	2 Dokumen	405,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	650,000,000
3 29 05 1.04 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Manfaat dan Teknologi Konservasi Energi	Dokumen Neraca Energi Daerah, rapergub roadmap pengelolaan energi Provinsi Lampung		33,5 %	0 200 Orang	2 Dokumen	795,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	1,325,000,000
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas /Gedung milik	Dokumen Neraca Energi Daerah, rapergub roadmap pengelolaan		33,5 %	0 2 Unit	2 Dokumen	150,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	650,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Pemerintah yang dilakukan efisiensi Energi Listrik	energi Provinsi Lampung										
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**1,174,210,000**					**2,214,710,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**								**250,000,000**					**350,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung		80 %	6 Laporan	25 Kali	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	80 %	350,000,000
3 29 06 1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**								**100,000,000**					**150,000,000**
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi/Usaha ketenagalistrikan di Provinsi Lampung		80 %	12 Laporan	6 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	80 %	150,000,000
3 29 06 1.05	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**								**474,210,000**					**210,000,000**
3 29 06 1.05 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		80 %	7 Laporan	7 Laporan	474,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	80 %	210,000,000
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**350,000,000**					**1,504,710,000**
3 29 06 1.06 04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung yang Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT		80 %	13 Dokumen	6 kab/kota	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	80 %	250,000,000
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung yang Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT		80 %	3 Unit	6 kab/kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	80 %	1,004,710,000
3 29 06 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	Data Jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung yang		80 %	13 Laporan	6 kab/kota	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang	80 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	terealisasi	Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT						(PAD)		terealisasi		
								TOTAL	**21,317,028,400**					**24,614,710,150**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**25,017,682,690**					**23,588,682,539**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**21,479,682,690**					**20,028,682,539**
3	**30**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**175,089,000**					**280,000,000**
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen		98,237,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan		76,852,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	130,000,000
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,703,422,690**					**15,686,429,539**
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	112 Orang/ Bulan		15,604,422,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,521,429,539
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen		2,029,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan		40,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45,000,000
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan		30,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
3	**30**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,000,000**
3	30	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya BMD perangkat daerah		100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya BMD perangkat daerah		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 30 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**100,000,000**					**75,000,000**
3 30 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Layanan administrasi kepegawaian		100 %	18 Orang	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	75,000,000
3 30 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,149,040,825**					**1,642,253,000**
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	35,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45,000,000
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	412,179,825	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	325,000,000
3 30 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47,253,000
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	35,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
3 30 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	281,950,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150,000,000
3 30 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Laporan	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40,000,000
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Layanan administrasi umum		100 %	70 Laporan	100 %	324,911,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	975,000,000
3 30 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,594,710,175**					**1,575,000,000**
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	355,550,175	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	475,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,239,160,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,100,000,000
3 30 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**707,420,000**					**720,000,000**
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	15 %	317,420,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	425,000,000
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Dinas		100 %	1 Unit	15 %	350,000,000			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	225,000,000
3 30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	15 %	40,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**70,000,000**					**100,000,000**
3 30 03 1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**								**70,000,000**					**100,000,000**
3 30 03 1.01 03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	-	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Terlaksananya pasar lelang komoditas		0 0	50 Orang	3 Kali	70,000,000	Pajak Daerah		-	0 0	100,000,000
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**								**380,000,000**					**490,000,000**
3 30 04 1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**								**325,000,000**					**390,000,000**
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5- 6 %	1 Laporan		75,000,000	Pajak Daerah		koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	5- 6 %	90,000,000
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			5- 6 %	3 Laporan		250,000,000	Pajak Daerah		koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	5- 6 %	300,000,000
3 30 04 1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**								**55,000,000**					**100,000,000**
3 30 04 1.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu		Meningkatnya kinerja realisasi pupuk		5- 6 %	1 Laporan	85 %	30,000,000	Pajak Daerah		Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5- 6 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%											
3 30 04 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Meningkatnya kinerja realisasi pupuk		5- 6 %	1 Laporan	85 %	25,000,000	Pajak Daerah		Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5- 6 %	50,000,000
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**750,000,000**					**625,000,000**
3 30 05 1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**								**750,000,000**					**625,000,000**
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Meningkatnya pasar pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dagang		50 %	4 Pelaku Usaha	20 produk	350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	50 %	350,000,000
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Meningkatnya pasar pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dagang		50 %	175 Pelaku Usaha	20 produk	400,000,000			Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	50 %	275,000,000
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**1,538,000,000**					**1,095,000,000**
3 30 06 1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**300,000,000**					**125,000,000**
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota		17,5 %	1 BPSK	25 Laporan	250,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	75,000,000
3 30 06 1.01 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	1 LPKSM	25 Laporan	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	25,000,000
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	5 Pengaduan	25 Laporan	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	25,000,000
3 30 06 1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**1,068,000,000**					**670,000,000**
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Meningkatnya pengujian mutu		17,5 %	6 Komoditi	1 %	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	70,000,000
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Meningkatnya pengujian mutu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	12 Dokumen	1 %	750,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	250,000,000
3 30 06 1.02 03	Pengembangan Layanan Sertifikasi		Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Meningkatnya pengujian mutu	Kota Bandar Lampung, Semua	17,5 %	1955 Sertifikat	1 %	238,000,000	Pajak Daerah			17,5 %	275,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi			Kecamatan, Semua Kelurahan							Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi		
3 30 06 1.02 04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Meningkatnya pengujian mutu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	45 Sertifikat	1 %	30,000,000			Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	75,000,000
3 30 06 1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**170,000,000**					**300,000,000**
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			17,5 %	25 Laporan		150,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	225,000,000
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Kasus yang Ditangani		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	1 Kasus		20,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	75,000,000
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**800,000,000**					**1,250,000,000**
3 30 07 1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**								**500,000,000**					**1,000,000,000**
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya promosi produk UKM/PKM binaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	30 UMKM	20 %	500,000,000	Pajak Daerah		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	1,000,000,000
3 30 07 1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**300,000,000**					**250,000,000**
3 30 07 1.03 01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Meningkatnya kualitas usaha maupun produk PKM/UKM	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Laporan	20 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	150,000,000
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya kualitas usaha maupun produk PKM/UKM		10 %	1 Dokumen	20 %	200,000,000	Pajak Daerah		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	100,000,000
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**3,805,065,910**					**7,085,000,000**
3 31 02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**3,550,065,910**					**6,660,000,000**
3 31 02 1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**								**3,550,065,910**					**6,660,000,000**
3 31 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,			0,5 %	2 Dokumen		450,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	4,000,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Perwilayahan Industri		Penyebaran dan Perwilayahan Industri											
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0,5 %	2 Dokumen		450,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	875,000,000
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	2 Dokumen		350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	225,000,000
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			0,5 %	3 Dokumen		2,250,065,910	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	1,475,000,000
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	1 Dokumen		50,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	85,000,000
3 31 03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**								**175,000,000**					**260,000,000**
3 31 03 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**								**175,000,000**					**260,000,000**
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Meningkatnya verifikasi teknis pemenuhan perolehan perizinan berusaha		10 %		100 %	75,000,000	Pajak Daerah		Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10 %	135,000,000
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Meningkatnya verifikasi teknis pemenuhan perolehan perizinan berusaha		10 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10 %	125,000,000
3 31 04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**80,000,000**					**165,000,000**
3 31 04 1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**								**80,000,000**					**165,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 31 04 1.01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri		40 %	1 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	40 %	125,000,000
3 31 04 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri		40 %	1 Dokumen	12 Bulan	30,000,000	Pajak Daerah		Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	40 %	40,000,000
								TOTAL	**28,822,748,600**					**30,673,682,539**

INSPEKTORAT

30

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**43,401,000,000**					**44,470,590,574**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**35,606,363,000**					**34,629,518,574**
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**40,000,000**
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku		100 %	6 Dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**32,108,300,000**					**30,041,775,574**
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	162 Orang/ Bulan	100 %	32,088,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,021,775,574
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,000,000
6	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**75,000,000**
6	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	1 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	35,000,000
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	1 Laporan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	40,000,000
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**753,239,000**					**1,020,145,000**
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai		100 % 100 persen	76 Orang	100 %	753,239,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	1,020,145,000
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,468,005,000**					**1,888,779,000**
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	39,208,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	59,208,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	1 Paket	100 %	474,562,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	650,336,800
6	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	14,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	14,310,000
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	65,000,000
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	61,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	81,000,000
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Laporan	100 %	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	285,000,000
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Laporan	100 %	613,924,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	733,924,000
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**708,439,000**					**865,439,000**
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	378,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	448,120,000
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	330,319,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	417,319,000
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**518,380,000**					**698,380,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	14 Unit	100 %	277,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	297,600,000
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	82 Unit	100 %	96,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	166,100,000
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	4 Unit	100 %	144,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	234,680,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**6,727,475,000**					**8,550,565,000**
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**6,183,715,000**					**7,669,305,000**
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	5 Laporan	100 %	1,806,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	2,006,109,000
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	6 Laporan	100 %	576,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	812,560,000
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	3 Laporan	100 %	39,956,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	64,276,000
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	3 Laporan	100 %	29,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	4,970,000
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	45 Laporan	100 %	2,055,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	2,155,750,000
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	1 Kesepakatan	100 %	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	1,800,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	2 Dokumen	100 %	575,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	825,640,000
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**543,760,000**					**881,260,000**
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Meningkatnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		86 %	3 Laporan	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	160,000,000
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		86 %	16 Laporan	100 %	498,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	721,260,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1,067,162,000**					**1,290,507,000**
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**162,000,000**					**187,845,000**
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan		100 %	1 Rekomendasi	100 %	87,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	102,845,000
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan		100 %	1 Rekomendasi	100 %	74,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	85,000,000
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**905,162,000**					**1,102,662,000**
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi oleh Inspektorat Provinsi Lampung		100 %	48 Perangkat Daerah	100 %	300,022,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	360,022,000
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi oleh Inspektorat Provinsi Lampung		100 %	15 Perangkat Daerah	100 %	188,697,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	268,697,000
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi oleh Inspektorat Provinsi Lampung		100 %	4 Kegiatan	100 %	172,929,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	200,429,000
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi oleh Inspektorat Provinsi Lampung		100 %	48 Perangkat Daerah	100 %	243,514,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	273,514,000
												TOTAL	**43,401,000,000**					**44,470,590,574**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

31

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**33,402,565,182**					**39,177,468,458**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**25,918,576,582**					**23,394,530,811**
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**350,252,000**					**711,450,960**
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		100 %	13 Dokumen	0 0	221,293,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	427,358,690
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		100 %	7 Laporan	0 0	128,959,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	284,092,270
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15,571,227,092**					**18,369,393,661**
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0		100 %	115 Orang	0 0	15,494,945,400	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	18,245,460,621
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0		100 %	2 Laporan	0 0	76,281,692	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	123,933,040
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**41,080,000**					**66,550,000**
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0		100 %	3 Laporan	0 0	41,080,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	66,550,000
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**267,996,000**					**266,200,000**
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0		100 %	314 Paket	0 0	165,850,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	145,200,000
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0		100 %	90 Orang	0 0	102,146,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**6,587,937,490**					**1,020,556,191**
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		100 %	12 Paket	0 0	115,328,140	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	450,000,000
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0		100 %	12 Paket	0 0	25,579,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	12,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0		100 %	12 Paket	0 0	25,486,600	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	24,200,000
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0		100 %	12 Paket	0 0	30,815,750	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	36,343,984
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0		100 %	1 Laporan	0 0	184,800,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	72,600,000
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		100 %	1 Laporan	0 0	6,205,928,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	425,312,207
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**133,214,600**					**156,090,000**
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor		100 %	149 Unit	100 %	133,214,600	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	156,090,000
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,269,846,000**					**1,529,513,800**
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran		100 %	1 Laporan	100 %	424,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	513,040,000
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran		100 %	1 Laporan	100 %	66,675,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,500,000
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran		100 %	1 Laporan	100 %	1,779,171,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	955,973,800
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**697,023,400**					**1,274,776,199**
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0		100 %	14 Unit	0 0	337,434,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	289,190,000
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		100 %	325 Unit	0 0	26,400,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	48,400,000
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		100 %	2 Unit	0 0	333,189,400	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	937,186,199
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**3,346,616,000**					**7,489,938,141**
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1,300,606,600**					**3,360,200,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0		100 %	1 Berita Acara	0 0	121,842,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	242,000,000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	0		100 %	1 Berita Acara	0 0	257,595,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	568,700,000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	0		100 %	4 Dokumen	0 0	921,169,600	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	2,549,500,000
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**1,021,073,000**					**1,979,451,240**
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	0		100 %	3 Masukan	0 0	118,138,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	244,231,240
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0		100 %	75 Orang	0 0	314,298,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	665,500,000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	0		100 %	60 Orang	0 0	122,830,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	262,570,000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0		100 %	2 Buku	0 0	465,807,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	807,150,000
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**810,861,400**					**1,750,286,901**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	0		100 %	2 Laporan	0 0	49,232,200	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	358,826,589
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0		100 %	3 Laporan	0 0	532,990,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	778,937,500
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	0		100 %	3 Dokumen	0 0	228,639,200	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	612,522,812
5	**01**	**02**	**1.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**								**214,075,000**					**400,000,000**
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0		100 %	1 Dokumen	0 0	127,560,000	Pajak Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	150,000,000
5	01	02	1.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0		100 %	1 Dokumen	0 0	43,432,000	Pajak Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000
5	01	02	1.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0		100 %	1 Dokumen	0 0	43,083,000	Pajak Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	150,000,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**4,137,372,600**					**8,292,999,506**
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**1,769,216,000**					**2,381,576,000**
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	37,770,200	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	391,435,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	0		100 %	10 Perangkat Daerah	0 0	205,472,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	0		100 %	10 Perangkat Daerah	0 0	471,453,800	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0		100 %	1 Laporan	0 0	154,000,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	340,435,000
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	340,180,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	445,401,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	0		100 %	6 Perangkat Daerah	0 0	200,000,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	0		100 %	6 Perangkat Daerah	0 0	154,688,200	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	275,025,000
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0		100 %	2 Laporan	0 0	205,651,800	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**918,822,600**					**2,559,112,006**
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	2 Dokumen	0 0	223,294,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	445,364,821

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	50,350,400	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	373,015,654
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	70,089,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	361,851,468
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0		100 %	1 Laporan	0 0	197,184,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	170,139,794
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	4 Dokumen	0 0	103,714,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	216,535,550

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	141,424,200	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	206,184,000
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	85,200,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	434,855,850
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0		100 %	1 Laporan	0 0	47,567,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	351,164,869
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**1,449,334,000**					**3,352,311,500**
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	283,076,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	693,205,460

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	231,044,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	181,500,000
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	25,508,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0		100 %	1 Laporan	0 0	32,324,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	425,228,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	758,315,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	108,802,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	35,428,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0		100 %	2 Laporan	0 0	307,924,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	790,011,040
												TOTAL	**33,402,565,182**					**39,177,468,458**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

32

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**1,479,317,029,404**					**1,793,299,476,681**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**102,114,165,436**					**121,825,202,861**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**392,988,000**					**493,006,998**
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	5 Dokumen	100 %	138,523,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	167,613,798
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	48 Dokumen	100 %	28,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	48,400,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	48 Dokumen	100 %	28,631,400			Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	48,400,000
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	48 Dokumen	100 %	23,751,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	29,596,600
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	48 Dokumen	100 %	23,751,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	29,596,600
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	8 Laporan	100 %	149,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	169,400,000
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**94,883,703,236**					**113,618,116,622**
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD		100 %	14 Orang/ Bulan	100 %	81,551,494,736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	96,885,077,442
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD		100 %	12 Dokumen	100 %	13,057,208,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16,400,289,180
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD		100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,250,000
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD		100 %	3 Dokumen	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	242,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD		100 %	16 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,500,000
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**60,500,000**
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,250,000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,250,000
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**720,814,000**					**545,989,268**
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian PD		100 %	0 Orang 20 Orang	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian PD		100 %	500 Orang	100 %	520,814,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	424,989,268
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,894,624,800**					**4,491,060,321**
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	3 Paket	100 %	803,152,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	781,395,615
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	3 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	263,517,672
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	2 Paket	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	168,869,052
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	2 Dokumen	100 %	88,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	106,939,800
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	3 Paket	100 %	112,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	244,548,018

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	486,209,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	959,882,594
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	2,359,904,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,965,907,570
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**523,660,600**					**300,767,764**
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	8 Unit	100 %	245,952,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	57,112,000
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	20 Unit	100 %	277,708,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	243,655,764
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**973,078,400**					**1,409,139,743**
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	54,597,983
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	12 Laporan	100 %	973,078,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,354,541,760
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**675,296,400**					**906,622,145**
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	18 Unit	100 %	352,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	384,801,780
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	55 Unit	100 %	322,456,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	521,820,365
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**1,370,289,321,768**					**1,663,087,833,758**
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**3,287,258,300**					**3,987,020,543**
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	2 Dokumen	100 %	191,725,500			Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	231,987,855
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	2 Dokumen	100 %	196,299,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	237,522,274

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	0 Dokumen	100 %	224,013,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	271,056,698
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	0 Dokumen	100 %	223,078,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	269,925,348
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	0 Dokumen	100 %	62,209,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	75,273,495
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	0 Dokumen	100 %	62,209,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	75,273,495
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	1,018,351,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	1,241,643,678
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	1 Dokumen	100 %	1,026,151,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	1,241,643,678
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	2 Dokumen	100 %	182,218,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	220,484,022
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	1 Dokumen	100 %	101,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	122,210,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**								**1,328,155,200**					**1,607,067,792**
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	380,873,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	460,856,572
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	373,884,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	452,399,882
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	254,741,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	308,237,699
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	15 Dokumen	100 %	182,102,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	220,344,025
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	136,553,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	165,229,614
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**1,138,873,000**					**1,299,204,830**
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	12000 Dokumen	98 %	425,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	435,600,000
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	1 Laporan	98 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	60,500,000
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	48 Dokumen	98 %	134,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	162,993,050

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	2 Dokumen	98 %	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	229,900,000
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	1 Dokumen	98 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	1 Laporan	98 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	145,200,000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	7 Dokumen	98 %	119,018,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	144,011,780
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**1,917,528,200**					**2,182,269,122**
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	14 Laporan	100 %	119,187,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	307,017,656
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	12 Laporan	100 %	413,733,600			Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	144,216,875

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	3 Dokumen	100 %	873,358,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	935,763,180
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	4 Dokumen	100 %	162,553,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	179,749,251
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	193,600,000
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	36 Orang	100 %	67,046,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	81,125,660
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	4 Lembaga	100 %	281,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	340,796,500
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**1,360,259,040,268**					**1,651,158,526,643**
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	13 Laporan	100 %	252,410,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	305,416,826
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	3,547,643,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	30,842,900,000
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Meningkatnya Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	31,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	38,115,000,000
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Meningkatnya Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	1,324,958,986,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	1,581,895,209,817
5	**02**	**02**	**1.06**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**								**2,358,466,800**					**2,853,744,828**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	144,671,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	298,389,872
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	1,538,194,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	1,739,105,533
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %	222 Orang	100 %	675,600,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	816,249,423
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**6,913,542,200**					**8,386,440,062**
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**6,913,542,200**					**8,386,440,062**
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah standar harga yang disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	366,540,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	318,158,247
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	230,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	181,016,000
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	231,862,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	280,553,504
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	215,453,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	581,349,098
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	167,168,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	626,039,480
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	2 Laporan	100 %	343,228,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	187,217,734
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	2,559,635,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,313,293,995

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	0 Laporan 1 Laporan	100 %	365,662,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	840,624,147
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	476,921,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	148,623,211
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksanaanya Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindah tanganan,Pemusnahaan dan Penghapusan BMD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	665,733,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	619,681,898
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	2 Laporan	100 %	785,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	920,982,546
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	342,697,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	247,900,202
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	50 Orang	100 %	163,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
												TOTAL	**1,479,317,029,404**					**1,793,299,476,681**

BADAN PENDAPATAN DAERAH

33

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**118,044,000,000**					**133,204,265,339**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**98,753,662,500**					**112,032,554,339**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**144,000,000**					**155,000,000**
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 persen	8 Dokumen	100 Persen	33,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100 persen	35,000,000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 persen	6 Laporan	100 Persen	111,000,000	Pajak Daerah		Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100 persen	120,000,000
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**78,962,179,577**					**91,936,454,339**
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Layanan Administrasi Keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 persen	417 Orang/bulan	100 Persen	78,916,179,577	Pendapatan Pajak Daerah		Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100 persen	91,885,854,339
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Layanan Administrasi Keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 persen	12 Laporan	100 Persen	46,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100 persen	50,600,000
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**56,100,000**					**71,800,000**
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	43,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	43,000,000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	13,100,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	28,800,000
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**414,000,000**					**420,000,000**
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Layanan Administrasi terkait Perencanaan, Pelaksanaan serta Pembukuan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	414,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	420,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**108,000,000**					**115,000,000**
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Orang	100 Persen	108,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	115,000,000
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**7,388,160,700**					**8,640,300,000**
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Paket	100 Persen	85,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	95,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	38 Paket	100 Persen	4,491,286,270	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	5,000,000,000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	4 Paket	100 Persen	1,530,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	1,650,000,000
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	2 Paket	100 Persen	134,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	147,400,000
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	147,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	161,700,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	100 Laporan	100 Persen	1,000,874,430	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	1,586,200,000
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,567,049,223**					**7,389,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	2,165,525,223	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	2,384,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	581,400,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	689,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan 0 Laporan	100 Persen	4,820,124,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	4,316,400,000
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,114,173,000**					**3,304,600,000**
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	22 Unit	100 Persen	778,173,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	850,300,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	11 Unit	100 Persen	2,923,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	2,000,000,000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	260 Unit	100 Persen	413,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	454,300,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**19,290,337,500**					**21,171,711,000**
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**19,290,337,500**					**21,171,711,000**
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	12 Laporan	100 Persen	2,156,587,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	1,144,100,000
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	12 Laporan	100 Persen	1,434,740,200	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	513,700,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	2 Sarana dan Prasarana	100 Persen	3,104,075,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	1,000,000,000
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	1 Laporan	100 Persen	100,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100,000,000
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelapran Basis Data Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	12 Laporan	100 Persen	6,423,619,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	12,052,600,000
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	15 Dokumen SSPD	100 Persen	5,268,315,800	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	5,478,011,000
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	12 Laporan	100 Persen	803,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	883,300,000
												TOTAL	**118,044,000,000**					**133,204,265,339**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

34

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**21,800,758,096**					**26,794,477,265**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**14,111,089,211**					**16,167,965,338**
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**130,000,000**					**173,750,000**
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gedong Pakuon	100 %	13 dokumen	100 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	95,000,000
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	9 laporan	100 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	78,750,000
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,826,759,447**					**12,953,073,713**
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	14 orang/bulan	100 %	11,796,759,447	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	12,920,261,213
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset perangkat daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	0
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / smesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / smeteran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	24 laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	32,812,500
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**863,697,309**					**1,787,181,167**
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket komponen peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket	100 %	5,169,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	8,400,000
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket	100 %	270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	858,899,267
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket 0 Paket	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	8,820,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket	100 %	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	22,050,000
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang undangan yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan		100 %	15 dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	0
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	21,000,000
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	30 Laporan	100 %	29,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	30,450,000
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	61 laporan	100 %	510,527,409	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	837,561,900
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**965,848,055**					**912,710,458**
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Persentase pelayanan jasa kantor yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Laporan	100 %	267,248,055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	280,610,458
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase pelayanan jasa kantor yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 laporan	100 %	698,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	632,100,000
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**324,784,400**					**341,250,000**
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	21 Unit	100 %	269,874,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	283,500,000
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	46 Unit	100 %	30,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	32,550,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 Unit	100 %	23,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	25,200,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**7,689,668,885**					**10,626,511,927**
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**6,028,268,885**					**7,534,106,393**
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	9 dokumen	80 %	5,467,847,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	6,413,606,392
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	615 dokumen	80 %	44,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	133,500,001
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	1 lembaga	80 %	315,821,845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	672,000,000
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	185 dokumen	80 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	165,000,000
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	15000 Dokumen	80 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	150,000,000
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**931,000,000**					**1,625,157,599**
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan admnistrasi, jabatan pelaksana, dan mutasi ASN antar daerah	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	850 dokumen	75 %	51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	65,000,000
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	14 Laporan	75 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	130,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan profesi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	10 dokumen 0 Dokumen	75 %	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	1,430,157,599
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**580,000,000**					**1,126,000,000**
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi , ujian dinas, UPKP dan penataan dan pembinaan jabatan fungsional	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	595 orang	80 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	670,000,000
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi , ujian dinas, UPKP dan penataan dan pembinaan jabatan fungsional	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	350 orang	80 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	351,000,000
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi , ujian dinas, UPKP dan penataan dan pembinaan jabatan fungsional	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	200 orang	80 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	105,000,000
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**150,400,000**					**341,247,935**
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	12 dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	285,247,935
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	15 Orang	75 %	50,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	56,000,000
												TOTAL	**21,800,758,096**					**26,794,477,265**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

35

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**30,049,405,992**					**37,641,275,540**
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**19,056,427,392**					**22,146,915,540**
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**155,780,000**					**162,011,200**
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen		100,000,000					104,000,000
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan		33,280,000					34,611,200
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan		22,500,000					23,400,000
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,163,750,292**					**13,660,373,683**
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan		13,088,750,292					13,606,293,683
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		47,952,000					32,448,000
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan		27,048,000					21,632,000
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**28,990,500**					**33,320,000**
5	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan		15,670,500					20,000,000
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		13,320,000					13,320,000
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**280,085,400**					**317,500,000**
5	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen		52,878,500					37,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				105 Orang		227,206,900					280,000,000
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,316,611,600**					**3,365,490,017**
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		36,484,200					65,000,000
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket		55,175,000					71,400,000
5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket		10,367,600					37,500,000
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		35,354,000					55,000,000
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen		20,000,000					25,000,000
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket		109,775,600					130,000,000
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan		60,000,000					70,000,000
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157 Laporan		1,976,457,600					2,893,590,017
5	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen		12,997,600					18,000,000
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,246,324,500**					**2,426,811,240**
5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket		74,000,000					390,000,000
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit		1,070,246,500					1,111,811,240
5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		102,078,000					925,000,000
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,324,216,100**					**1,291,600,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		642,940,000					700,000,000
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		681,276,100					591,600,000
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**540,669,000**					**889,809,400**
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit		173,484,000					150,309,400
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				550 Unit		151,170,000					210,000,000
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit		216,015,000					529,500,000
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**10,992,978,600**					**15,494,360,000**
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**								**2,501,171,500**					**3,171,000,000**
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				940 Orang		2,501,171,500					3,171,000,000
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**8,491,807,100**					**12,323,360,000**
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen		43,747,900					50,000,000
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				100 Orang		184,690,100					815,000,000
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				4 Laporan		194,813,600					200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen		35,300,000					25,000,000
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				938 Orang		7,915,575,500					11,117,840,000
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Dokumen		117,680,000					115,520,000
												TOTAL	**30,049,405,992**					**37,641,275,540**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**12,460,357,434**					**16,012,190,273**
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**10,438,488,534**					**10,665,853,646**
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**234,033,984**					**435,000,000**
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	11 Dokumen	100 %	163,191,984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	350,000,000
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	18 Laporan	100 %	51,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55,000,000
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	7 Laporan	100 %	19,042,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
5	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,910,447,000**					**7,834,749,346**
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	76 Orang/ Bulan	100 %	7,910,447,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7,834,749,346
5	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15,000,000**					**25,000,000**
5	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	2 Laporan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25,000,000
5	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**18,000,000**					**18,000,000**
5	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	2 Orang	100 %	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	18,000,000
5	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,482,841,750**					**1,593,584,300**
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	3,624,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,624,300

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	149,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
5	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	6,312,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25,000,000
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	15,493,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,206,400
5	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	25,906,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	34,753,600
5	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	40,000,000
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Laporan	100 %	1,257,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,310,000,000
5	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**596,638,600**					**564,520,000**
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	93,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	130,000,000
5	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	38,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	45,000,000
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	464,658,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	389,520,000
5	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**181,527,200**					**195,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	6 Unit	100 %	160,027,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	165,000,000
5	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	1 Unit	100 %	21,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**2,021,868,900**					**5,346,336,627**
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**292,534,000**					**1,150,000,000**
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	45,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	88,624,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	57,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	101,004,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	200,000,000
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**343,775,000**					**700,000,000**
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Sosial Dan Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	99,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Sosial Dan Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	244,028,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**873,270,900**					**1,996,336,627**
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Sinar Banten Kab. Way Kanan, Banjit, Dono Mulyo	100 %	1 Dokumen	100 %	118,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	402,429,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	696,336,627
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	160,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	72,239,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	119,257,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**512,289,000**					**1,500,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	133,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hanura Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	102,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	400,000,000
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Sri Basuki	100 %	1 Laporan	100 %	134,982,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	141,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	400,000,000
												TOTAL	**12,460,357,434**					**16,012,190,273**

BADAN PENGHUBUNG

37

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**								**18,712,432,951**					**20,304,158,002**
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16,878,418,551**					**18,214,129,412**
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**40,751,500**					**121,077,963**
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen 0 Dokumen		8,377,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,961,888
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen 0 Laporan		32,374,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				116,116,075
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,913,254,651**					**7,448,122,790**
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 0 Orang/ Bulan		6,875,845,951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,429,252,785
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Laporan		37,408,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,870,005
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**33,300,000**					**38,295,000**
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,750,000
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								8,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,545,000
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**65,000,000**					**75,000,000**
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,667,978,300**					**3,686,645,924**
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan		188,069,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				319,382,997
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 jenis		1,221,539,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				479,848,759

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 jenis		44,929,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,931,938
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				22 jenis		33,000,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51,083,865
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan		303,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				787,004,365
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan		1,846,346,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,851,394,000
5	07	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen		30,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				153,000,000
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,229,427,900**					**3,473,964,000**
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan		724,603,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				969,140,000
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan		2,504,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,504,824,000
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,928,706,200**					**3,371,023,735**
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit		1,481,984,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,395,363,800
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 jenis		237,951,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				466,888,435
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 lokasi		1,208,771,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,508,771,500
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**								**1,834,014,400**					**2,090,028,590**
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**								**1,834,014,400**					**2,090,028,590**
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 bulan		901,708,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				823,159,999

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 bulan		167,656,500					240,720,000
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				6 paket		279,865,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				279,865,466
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				4 kali		294,190,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				326,400,000
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				220 kali		190,593,500					419,883,125
												TOTAL	**18,712,432,951**					**20,304,158,002**

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,200,000,000**					**3,831,907,253**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,800,536,000**					**1,984,402,650**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**83,181,800**					**112,341,430**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	5 Dokumen	100 persen	61,339,800	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen	76,873,130
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	5 dokumen	100 persen	21,842,000	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen	35,468,300
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,580,955,400**					**1,715,202,600**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 Persen	15 kali	100 persen	176,952,000	Pajak Daerah		Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	100 Persen	311,199,200
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 Persen	15 kali	100 persen	1,404,003,400	Pajak Daerah		Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	100 Persen	1,404,003,400
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**136,398,800**					**156,858,620**
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro Yang Disusun	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	12 Kali	100 persen	136,398,800	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro yang disusun	100 persen	156,858,620
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**								**1,399,464,000**					**1,847,504,603**
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**								**365,893,000**					**572,154,453**
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase LAporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	4 Dokumen	100 persen	20,810,000	Pajak Daerah		Persentase LAporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100 persen	28,750,000
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase LAporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	12 kali	100 persen	235,761,000	Pajak Daerah		Persentase LAporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100 persen	334,103,750
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase LAporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	3 Dokumen	100 persen	109,322,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase LAporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100 persen	209,300,703
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**								**753,201,000**					**876,854,450**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	12 kali	100 persen	322,277,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	100 persen	394,102,700
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	3 Dokumen	100 persen	141,815,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	100 persen	193,642,750
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	3 Dokumen	100 persen	289,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	100 persen	289,109,000
4 01 03 1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**280,370,000**					**398,495,700**
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah Yang Terlegitimasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	5 Dokumen	100 persen	142,859,700	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100 persen	194,644,400
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah Yang Terlegitimasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	7 Dokumen	100 persen	14,936,000	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100 persen	31,809,000
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah Yang Terlegitimasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	6 Dokumen	100 persen	122,574,300	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100 persen	172,042,300
								TOTAL	**3,200,000,000**					**3,831,907,253**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**62,084,157,980**					**51,522,564,328**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**823,609,000**					**800,000,000**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**69,620,400**					**89,063,108**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	5 dokumen	95 %	26,405,900	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	35,765,713
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	1 dokumen	95 %	18,698,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	20,007,395
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	8 dokumen	95 %	8,152,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	12,031,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	2 laporan	95 %	16,364,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	21,259,000
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**57,108,100**					**94,425,307**
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	1 laporan	100 %	16,948,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	21,598,000
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	4 dokumen	100 %	13,280,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	41,840,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	12 laporan	100 %	26,880,100	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	30,987,307
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30,500,000**					**25,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase administrasi kepegawaian biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	6 Orang	100 %	30,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	25,000,000
4 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**362,420,500**					**380,911,585**
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	6 Paket	95 %	129,630,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	45,561,991
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	17 Laporan	95 %	232,790,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	335,349,594
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**303,960,000**					**210,600,000**
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan umum biro yang disusun	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	12 laporan	100 %	303,960,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	210,600,000
4 01 04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**61,260,548,980**					**50,722,564,328**
4 01 04 1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**								**57,559,158,180**					**48,322,564,328**
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Jumlah sarana prasarana rumah ibadah yang diberikan bantuan	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	0 Unit 693 Unit	95 %	13,895,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	14,177,418,887
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	4 Lembaga	95 %	43,664,158,180	Pendapatan Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	34,145,145,441
4 01 04 1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**								**2,751,390,800**					**1,650,000,000**
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	95 %	100,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	150,000,000
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	Semua Kab/Kota, Semua	98 %	1 Dokumen	95 %	751,390,800	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang	98 %	750,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Bidang Kesehatan	tersalurkan	Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	pelayanan dasar yang disalurkan	Kecamatan, Semua Kelurahan							tersalurkan		
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	5 Dokumen	95 %	1,900,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	750,000,000
4 01 04 1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**								**950,000,000**					**750,000,000**
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	3 Dokumen	95 %	765,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	550,000,000
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	95 %	185,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	200,000,000
								TOTAL	**62,084,157,980**					**51,522,564,328**

BIRO HUKUM

40

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0003 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,350,000,000**					**3,350,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,623,164,000**					**1,623,164,000**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**124,768,400**					**124,768,400**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	124,768,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	124,768,400
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,370,715,600**					**1,370,715,600**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		100 %	12 Paket	200 Laporan	161,675,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	161,675,600
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		100 %	220 Laporan	200 Laporan	1,209,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	1,209,040,000
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**127,680,000**					**127,680,000**
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang / Jasa		100 %	12 Laporan	9 Laporan	127,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	127,680,000
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**								**1,726,836,000**					**1,726,836,000**
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**								**778,186,900**					**778,186,900**
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	548 Dokumen	548 Dokumen	318,242,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	318,242,400
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	550 Dokumen	548 Dokumen	50,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	50,894,000
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	548 Dokumen	548 Dokumen	151,343,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	151,343,500
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	548 Dokumen	548 Dokumen	257,707,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	257,707,000
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**								**948,649,100**					**948,649,100**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0003 Biro Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Jumlah Penanganan Perkara, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pelaporan Aksi HAM		100 %	0 Kasus 12 Kasus	23 Laporan	476,172,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	476,172,500
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Jumlah Penanganan Perkara, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pelaporan Aksi HAM		100 %	15 Kabupaten/Kota	23 Laporan	472,476,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	472,476,600
								TOTAL	**3,350,000,000**					**3,350,000,000**

BIRO PEREKONOMIAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0004 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,000,000,000**					**3,839,953,615**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,178,285,500**					**1,764,174,849**
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**34,935,500**					**50,000,000**
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			100 %	2 Laporan		20,935,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	100 %	30,000,000
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100 %	1 Laporan		14,000,000	Pajak Daerah		Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	100 %	20,000,000
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**27,000,000**					**85,932,900**
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 %	9 Orang		27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	85,932,900
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**952,760,300**					**1,454,530,183**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	1 Paket		34,123,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	220,597,923
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100 %	12 Paket		14,945,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	15,913,500
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	12 Laporan		903,691,000			Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	1,218,018,760
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**163,589,700**					**173,711,766**
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	12 Laporan		25,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	20,825,467
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100 %	12 Laporan		137,969,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	152,886,299
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**1,821,714,500**					**2,075,778,766**
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**								**215,950,500**					**201,982,630**
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			100 %	4 Dokumen		95,950,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	95,347,327
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			100 %	3 Dokumen		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	106,635,303

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0004 Biro Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 06 1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**								**957,229,900**					**981,687,058**
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			100 %	14 Dokumen		459,575,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	794,577,186
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			100 %	6 Dokumen		290,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	76,172,620
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			100 %	6 Dokumen		207,419,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	110,937,252
4 01 06 1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**								**648,534,100**					**892,109,078**
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			100 %	4 Dokumen		311,442,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	613,677,440
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			100 %	1 Dokumen		123,791,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	100,000,000
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			100 %	4 Dokumen		213,300,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	178,431,638
								TOTAL	**3,000,000,000**					**3,839,953,615**

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0005 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,960,000,000**					**4,367,359,940**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,702,253,300**					**1,916,748,570**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**71,717,300**					**78,889,030**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	40 Dokumen	100 %	46,440,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	51,084,110
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	25,277,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	27,804,920
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**240,784,000**					**264,862,400**
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah		100 %	12 Dokumen	10 %	240,784,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	264,862,400
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,245,400**					**11,269,940**
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	10,245,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,269,940
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**90,000,000**					**143,000,000**
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 %	10 orang	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	143,000,000
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,017,912,000**					**1,119,703,200**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jumlah Peket dan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	206,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	227,400,800
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Peket dan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	811,184,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	892,302,400
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**271,594,600**					**299,024,000**
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah DokumeJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		100 %	1 Unit	100 %	271,594,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	299,024,000
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**								**2,257,746,700**					**2,450,611,370**
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**888,410,000**					**977,251,000**
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa		93 %	2 Laporan	100 %	107,974,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	93 %	118,771,400
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan		93 %	1 Laporan	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai	93 %	660,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0005 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		ditenderkan	Barang dan Jasa	Barang dan Jasa						(PAD)		ditenderkan		
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa		93 %	12 Laporan	100 %	180,436,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	93 %	198,479,600
4 01 07 1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**								**623,336,700**					**685,670,370**
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 %	12 Laporan	100 %	330,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	363,713,900
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 %	1 Laporan	100 %	156,293,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	171,922,300
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 %	1 Laporan	100 %	136,394,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	150,034,170
4 01 07 1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**								**746,000,000**					**787,690,000**
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang Yang Mengkuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	0 Orang 100 orang	100 %	365,641,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	369,295,100
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	1 Dokumen	100 %	159,759,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	175,734,900
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	1 Dokumen	100 %	220,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	242,660,000
								TOTAL	**3,960,000,000**					**4,367,359,940**

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0006 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,200,000,000**					**4,039,834,103**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**919,500,000**					**1,209,834,103**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**100,000,000**					**116,000,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan yang sesuai aturan		100 %	17 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	116,000,000
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**225,000,000**					**250,000,000**
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen administrasi keuangan daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen administrasi keuangan daerah	100 %	250,000,000
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**24,000,000**					**30,000,000**
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD		100 %	1 Laporan	100 %	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 %	30,000,000
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**140,500,000**					**185,000,000**
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tingkat layanan administrasi kepegawaian perangkat daeah		100 %	11 orang	100 %	140,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	185,000,000
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**430,000,000**					**628,834,103**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Layanan administrsai umum yang sesuai aturan dan tepat waktu		100 %	1 paket	100 %	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	378,834,103
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Layanan administrsai umum yang sesuai aturan dan tepat waktu		100 %	1 laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	250,000,000
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**								**2,280,500,000**					**2,830,000,000**
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								**880,500,000**					**1,442,000,000**
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Perangkat daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya		100 %	3 laporan	85 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	374,000,000
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pengebdalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Perangkat daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya		100 %	3 laporan	85 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	318,000,000
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Perangkat daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya		100 %	85 laporan	85 %	480,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	750,000,000
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								**1,400,000,000**					**1,388,000,000**
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang	Jumlah dokumen hasil analisa capaian kinerja	Perangkat daerah yang laporan kinerjanya baik		100 %	1 dokumen	85 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Presentase perangkat daerah yang	100 %	284,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0006 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	pembangunan daerah yang disediakan	dan tepat waktu						(PAD)		menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi		
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah yang laporan kinerjanya baik dan tepat waktu		100 %	5 laporan	85 %	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	844,000,000
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Perangkat daerah yang laporan kinerjanya baik dan tepat waktu		100 %	1 Dokumen	85 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	260,000,000
								TOTAL	**3,200,000,000**					**4,039,834,103**

BIRO ORGANISASI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0007 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,500,000,000**					**3,850,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,726,758,600**					**1,850,000,000**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**267,488,000**					**325,000,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI YANG TEPAT WAKTU dan PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SETDA PROVINSI LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU		0 0 100 %	15 Dokumen	100 %	139,791,500	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 0 100 %	175,000,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI YANG TEPAT WAKTU dan PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SETDA PROVINSI LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU		0 0 100 %	11 Dokumen	100 %	127,696,500	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 0 100 %	150,000,000
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,019,169,000**					**1,040,000,000**
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI UMUM BIRO ORGANISASI YANG SESUAI ATURAN		100 %	10 Kegiatan	100 %	1,019,169,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,040,000,000
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**440,101,600**					**485,000,000**
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PERSENTASE PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI ATURAN		100 %	12 Unit	100 %	299,221,600	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	315,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PERSENTASE PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI ATURAN		100 %	12 Bulan	100 %	140,880,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	170,000,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**								**1,773,241,400**					**2,000,000,000**
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**								**616,363,500**					**720,000,000**
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PRESENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN		100 %	3 Dokumen	100 %	178,353,700	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai	100 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0007 Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Dengan Peraturan										Dengan Peraturan		
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PRESENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN		100 %	15 Dokumen	100 %	115,331,300	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	100 %	170,000,000
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	PRESENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN		100 %	20 Dokumen	100 %	322,678,500	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	100 %	350,000,000
4 01 02 1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**								**1,156,877,900**					**1,280,000,000**
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	2 Dokumen	100 %	214,324,000	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	240,000,000
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	6 Dokumen	100 %	351,944,000	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	380,000,000
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	2 Laporan	100 %	97,933,500	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	125,000,000
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	2 Dokumen	100 %	151,769,100	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	175,000,000
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA		100 %	2 Dokumen	100 %	340,907,300	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi,	100 %	360,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0007 Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku		YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU								Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku		
								TOTAL	**3,500,000,000**					**3,850,000,000**

BIRO UMUM

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**151,771,883,388**					**159,947,563,836**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**151,771,883,388**					**159,947,563,836**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,172,000,000**					**1,265,645,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	5 Dokumen	100 %	663,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	715,975,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	509,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	549,670,000
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**76,323,959,104**					**82,298,764,336**
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	467 Orang/ Bulan	100 %	75,072,378,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	81,070,789,336
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	663,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	715,975,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	18 Laporan	100 %	588,581,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	512,000,000
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,714,000,000**					**2,460,007,500**
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Dokumen	100 %	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	458,957,500
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan,	100 %	152 Laporan	100 %	597,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan	100 %	539,950,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	SKPD		Talang							dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	32 Laporan	100 %	593,199,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	640,600,000
4 01 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	46 Dokumen	100 %	1,098,300,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	820,500,000
4 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,840,691,250**					**1,641,750,000**
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	0 Paket 79 Paket	100 %	405,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	437,500,000
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	364,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	394,000,000
4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	425,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	459,250,000
4 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	70 Orang	100 %	645,941,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	351,000,000
4 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**8,632,807,750**					**8,104,410,000**
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Paket	100 %	384,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	415,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Paket	100 %	190,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	205,300,000
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	202,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	218,680,000
4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Paket	100 %	193,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	209,400,000
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Laporan	100 %	7,661,558,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	7,055,530,000
4 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**6,925,000,000**					**7,478,607,500**
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	22 Unit	100 %	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,240,000,000
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4222 Unit	100 %	2,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	2,969,725,000
4 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	3034 Unit	100 %	1,175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	1,268,882,500
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,798,185,000**					**17,423,850,000**
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 %	12 Laporan	100 %	162,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan,	100 %	175,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu		Tepat Waktu	Selatan, Talang							administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu		
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	36 Laporan	100 %	5,896,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	6,368,000,000
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Laporan	100 %	11,739,785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	10,880,850,000
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**16,019,400,000**					**17,299,479,500**
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	32 Unit	100 %	3,361,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,630,400,000
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	138 Unit	100 %	3,478,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,756,160,000
4 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	0 Unit 16 Unit	100 %	1,395,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	1,506,460,500
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	72 Unit	100 %	4,410,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	4,762,359,000
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	44 Unit	100 %	3,374,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,644,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 01 1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**7,335,840,285**					**7,924,000,000**
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH Dan WKDH Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Orang/Bulan	100 %	7,235,840,285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	7,814,000,000
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH Dan WKDH Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	110,000,000
4 01 01 1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**13,010,000,000**					**14,051,050,000**
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	60 Paket	100 %	2,120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	2,290,000,000
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	60 Paket	100 %	1,390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	1,502,000,000
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	200 Paket	100 %	9,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	10,259,050,000
								TOTAL	**151,771,883,388**					**159,947,563,836**

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0009 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**6,804,923,490**					**7,485,415,839**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6,804,923,490**					**7,485,415,839**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**116,687,890**					**128,356,679**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan yang berlaku		100 %	12 Dokumen	100 %	116,687,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	128,356,679
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**67,685,600**					**74,454,160**
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian		100 %	5 Dokumen	100 %	67,685,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	74,454,160
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,769,062,200**					**4,145,968,420**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	11 Paket	100 %	345,711,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	380,282,430
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1800 Laporan	100 %	3,423,350,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	3,765,685,990
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,236,553,000**					**1,360,208,300**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	9000 Laporan	100 %	112,604,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	123,864,400
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	5 Laporan	100 %	1,123,949,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	1,236,343,900
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**180,499,700**					**198,549,670**
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi komunikasi pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan setda		100 %	12 Paket	100 %	180,499,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi komunikasi pimpinan	100 %	198,549,670
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**								**737,447,400**					**811,192,140**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0009 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan		100 %	1350 Dokumen	93 %	289,617,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	318,578,810
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan		100 %	36 Laporan	93 %	124,299,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	136,729,670
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan		100 %	751 Laporan	93 %	323,530,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	355,883,660
4 01 01 1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**								**696,987,700**					**766,686,470**
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase fasilitasi keprotokolan		100 %	492 Laporan	93 %	320,790,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	352,869,660
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi keprotokolan		100 %	132 Laporan	93 %	324,976,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	357,473,600
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase fasilitasi keprotokolan		100 %	36 Laporan	93 %	51,221,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	56,343,210
								TOTAL	**6,804,923,490**					**7,485,415,839**

SEKRETARIAT DPRD

47

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**320,276,703,600**					**340,276,703,600**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**152,313,379,312**					**162,620,129,712**
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,415,165,500**					**3,415,165,500**
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Renstra,Renja, dan evaluasi Renja Murni dan Perubahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	29 Dokumen	858,250,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	858,250,000
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen RKA, DPA Murni dan Perubahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	29 Dokumen	657,455,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	657,455,500
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	29 Dokumen	1,057,900,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,057,900,000
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja LPPD, E-Sakip, Evaluasi Rencana Aksi, RKT, PK, Laporan Penyusunan IKK, IKU	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	29 Dokumen	841,560,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	841,560,000
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**18,497,509,993**					**18,354,260,393**
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	15,764,588,700	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	15,621,339,100
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Nomenklatur Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan, dan Standar Operasional	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	430,539,920	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	430,539,920
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Bahan-bahan pelaksanaan verifikasi	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	443,256,600	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	443,256,600
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	0 Dokumen 12 Bulan	12 Bulan	588,461,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	100 %	588,461,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		DPRD Provinsi	SKPD Layanan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		Kecamatan, Semua Kelurahan							DPRD Provinsi		
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Dokumen	12 Bulan	510,359,200	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	510,359,200
4 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen LHP	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 3 Dokumen	12 Bulan	270,540,773	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	270,540,773
4 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen 0 Laporan	12 Bulan	489,763,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	489,763,800
4 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,321,519,400**					**4,321,519,400**
4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Kali 0 Orang	12 Bulan	4,321,519,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	4,321,519,400
4 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**12,408,133,704**					**15,408,133,704**
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Dinas Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	625,283,600	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	625,283,600
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor serta Jumlah Dokumen data pengelolaan BMD/Aset pada Sekretariat	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	725390 Unit	12 Bulan	2,091,137,775	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	4,791,137,775
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	350,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan									
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Bahan Makanan dan Minuman DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,826,886,849	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,826,886,849
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	181928 Unit	12 Bulan	1,497,354,600	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,497,354,600
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	704,307,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	704,307,400
4 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	979,306,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	979,306,500
4 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya layanan bahan makanan dan minuman DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	841,240,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	841,240,000
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terfasilitasinya Layanan Rapat-rapat DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	2,900,000,000
4 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Penataan Arsip Dinamis 15 Sub Bagian	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	84,122,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	84,122,000
4 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Dokumentasi Perundang-undangan secara elektronik	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	808,494,980	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	808,494,980
4 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,494,241,015**					**3,994,241,015**
4 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	2 Unit	12 Bulan	0			Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		DPRD Provinsi		Pemerintah Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan							DPRD Provinsi		
4 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	12 Bulan	0	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	0
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	448290 Unit	12 Bulan	1,494,241,015	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	3,994,241,015
4 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,073,055,800**					**6,073,055,800**
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	289,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	289,000,000
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Listrik, Air, Tlp, dan Indihome kantor dan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,227,216,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,227,216,000
4 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	600,000,000
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	3,956,839,800	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	3,956,839,800
4 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,450,597,900**					**7,650,597,900**
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terawatnya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	12 Bulan	1,292,620,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,292,620,800
4 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya mebel kantor	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan									
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya peralatan dan mesin kantor	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,580,831,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	2,180,831,000
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor dan rumah jabatan dinas Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,077,146,100	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	3,677,146,100
4 02 01 1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**69,597,806,500**					**69,597,806,500**
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Gaji dan Tunjangan DPRD	Tersedianya Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	67,118,256,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	67,118,256,500
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD Prov Lampung	Tersedianya Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	510 Stel	12 Bulan	1,952,750,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,952,750,000
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah layanan Medical Check Up Anggota DPRD	Tersedianya Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 Anggota DPRD	12 Bulan	526,800,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	526,800,000
4 02 01 1.16	**Layanan Administrasi DPRD**								**31,055,349,500**					**33,805,349,500**
4 02 01 1.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 dokumen	100 %	255,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	255,000,000
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	400,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	400,000,000
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	29,250,349,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	32,000,349,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pada rumah dinas jabatan Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	1,150,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,150,000,000
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**167,963,324,288**					**177,656,573,888**
4 02 02 1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**								**11,321,197,800**					**11,321,197,800**
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Peraturan	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 naskah	6 Rapenda	1,033,230,400	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,033,230,400
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Peraturan Daerah	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Rapenda	6 Rapenda	6,958,286,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	6,958,286,800
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Kajian dan Uji Publik Raperda/Produk Hukum serta Bantuan Hukum DPRD dan Legal Opinion	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 10 Naskah	6 Rapenda	1,432,271,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,432,271,000
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Naskah Akademik	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 Naskah	6 Rapenda	1,500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,500,000,000
4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Buku Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1700 Buku 0 Dokumen	6 Rapenda	397,409,600	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	397,409,600
4 02 02 1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**3,220,525,800**					**3,920,525,800**
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Tersedianya Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen	1,200,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,200,000,000
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen APBD Murni dan Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Tersedianya Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen	4 Dokumen	2,020,525,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2,720,525,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 02 02 1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**6,081,767,600**					**6,081,767,600**
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Rekomendasi DPRD terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	30 Kali	1,305,349,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,305,349,800
4 02 02 1.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pengawasan Penggunaan Anggaran oleh DPRD	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	30 Kali	1,305,349,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,305,349,800
4 02 02 1.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Terlaksananya Hasil Pembahasan DPRD	Tersedianya Jumlah Pengawasan	Semua Kab/Kota,	100 %	12 bulan	30 Kali	971,068,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	100 %	971,068,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Fungsi DPRD	terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur	Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Fungsi DPRD		
4 02 02 1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**111,815,271,288**					**120,808,520,888**
4 02 02 1.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	184 Orang	6,941,297,200	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	6,941,297,200
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Sosper dalam rangka penyebarluasan produk hukum daerah dan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan serta rakor koordinasi serta rakor koordinasi	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 kegiatan	184 Orang	85,031,469,860	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	91,024,719,460
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	91 Orang	184 Orang	7,566,716,400	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	7,566,716,400
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Orang	184 Orang	1,032,997,200	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,032,997,200
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Peliputan Media Online dan Cetak kegiatan Pimpinan dan Anggota, Publikasi Media Luar Ruang Hasil Kegiatan Pimpinan dan Anggota	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kegiatan	184 Orang	8,984,590,628	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	11,984,590,628
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan laporan Kerja DPRD	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	184 Orang	2,258,200,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2,258,200,000
4 02 02 1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**33,142,814,800**					**33,142,814,800**
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersedianya Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Dokumen	2,520,152,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2,520,152,000
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersedianya Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1,178,081,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,178,081,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kecamatan, Semua Kelurahan									
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumah Kegiatan Reses	Tersedianya Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kali	1 Dokumen	29,444,581,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	29,444,581,800
4 02 02 1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**575,751,000**					**575,751,000**
4 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	575,751,000	Pajak Daerah		Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	575,751,000
4 02 02 1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**								**1,805,996,000**					**1,805,996,000**
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Layanan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 Anggota DPRD	85 Anggota DPRD	1,355,996,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,355,996,000
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Kerja ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	Tersedianya Layanan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	85 Anggota DPRD	450,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	450,000,000
								TOTAL	**320,276,703,600**					**340,276,703,600**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**18,142,953,826**					**22,659,904,132**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**14,663,366,226**					**18,803,701,232**
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**102,275,200**					**311,123,800**
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	57 dok/lap	15,194,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	145,704,000
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	57 dok/lap	15,376,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,941,600
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen	57 dok/lap	15,407,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	57 dok/lap	14,290,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,941,600
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	57 dok/lap	13,962,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	57 dok/lap	14,994,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,941,600
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	57 dok/lap	13,048,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	29,595,000
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,062,684,886**					**16,014,132,532**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	51 Orang/ Bulan	120 dok	6,618,094,886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,029,256,532
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39 Dokumen	120 dok	5,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	8,920,800,000
8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	120 dok	22,414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	32,276,000
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	120 dok	22,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,800,000
8	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**35,962,000**					**33,600,000**
8	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pengelola aset	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 lap.	24,278,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,800,000
8	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pengelola aset	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	12 lap.	11,684,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,800,000
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**54,400,000**					**80,400,000**
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 5 Orang	279 orang	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	54,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	154 Orang	279 orang	15,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,200,000
8	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Orang	279 orang	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,200,000
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,481,862,140**					**1,463,919,200**
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	11,243,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,980,000
8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Paket	180 paket	350,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	497,527,000
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,520,000
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	20,176,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	108,356,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	145,123,200
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	180 paket	32,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Laporan	180 paket	951,634,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	723,769,000
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**525,952,000**					**546,470,000**
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah laporan layanan penyediaan jasa kantor	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 lap.	282,452,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	259,910,000
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah laporan layanan penyediaan jasa kantor	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 lap.	243,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	286,560,000
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**400,230,000**					**354,055,700**
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	65 %	197,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	224,055,700
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 8 Unit	65 %	181,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	80,000,000
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Unit	65 %	20,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**957,226,600**					**1,225,082,000**
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**957,226,600**					**1,225,082,000**
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Dokumen	1845 orang	30,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	53,650,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1425 Orang	1845 orang	437,043,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	1,049,272,000
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	420 Orang	1845 orang	268,893,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	116,160,000
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	1845 orang	221,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	6,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**1,092,819,000**					**601,352,900**
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**1,092,819,000**					**601,352,900**
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Dokumen	4330 orang	12,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	11,280,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Dokumen	4330 orang	10,575,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	16,000,000
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua	30 %	3830 Orang	4330 orang	702,930,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	221,160,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	500 Orang	4330 orang	93,935,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	342,912,900
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua	30 %	15 Laporan	4330 orang	272,907,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							**258,433,000**					**258,433,000**
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**							**258,433,000**					**258,433,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	525 Orang	525 orang	220,433,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30 %	220,433,000
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	2 Laporan	525 orang	38,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30 %	38,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**346,600,000**					**346,600,000**
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**346,600,000**					**346,600,000**
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1365 Orang	1365 orang	307,447,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30 %	307,447,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	1365 orang	39,153,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30 %	39,153,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**824,509,000**					**1,424,735,000**
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**824,509,000**					**1,424,735,000**
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	1230 orang	108,304,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	120,000,000
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	880 Orang	1230 orang	365,605,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	474,512,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	350 Orang	1230 orang	80,944,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	430,348,000
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	1230 orang	32,116,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	8,500,000
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	2 Dokumen	1230 orang	237,538,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	391,375,000
												TOTAL	**18,142,953,826**					**22,659,904,132**